Volume 13 No. 1, Juni 2023

ISSN: 2089-6980

JURNAL
KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI
KELAUTAN DAN PERIKANAN

J. Kebijakan Sosial Ekonomi KP	Vol. 13	No. 1	Hal. 1 - 87	Jakarta Juni 2023	ISSN 2089-6980

Terakreditasi RISTEKDIKTI : **200/M/KPT/2020**

Diterbitkan bersama :

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Jaringan Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat RahmatNya telah diselesaikan Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Volume 13 Nomor 1 Tahun 2023. Jurnal ini telah terakreditasi berdasarkan Keputusan Kepala LIPI Nomor 1221/E/2016 tanggal 22 September 2016 dengan Sertifikat Akreditasi No. 758/Akred/P2MI-LIPI/08/2016. Jurnal ini merupakan pengembangan dari Jurnal Kebijakan dan Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan yg diterbitkan oleh Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, maka sejak tanggal 30 Maret 2017 terjadi perubahan nama nomenklatur organisasi dari Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan menjadi Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan.

Penerbitan jurnal ini didanai oleh Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Informasi yang ditampilkan meliputi: (i) Penyelesaian Konflik Nelayan Melalui Pembangunan Permukiman Bersama (Studi Kasus di Kota Cilacap); (ii) Persepsi Masyarakat Untuk Pengembangan Wisata Berkelanjutan di Pesisir Madura; (iii) Strategi Pemenuhan Kebutuhan Keluarga Nelayan Banjang (Kasus KUB Mina Sero Laut, Desa Wringinputih, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi); (iv) Strategi Pemasaran Dalam Masa Pandemi: Pelajaran dari Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar) Hasil Perikanan di Kabupaten Banyumas; (V) Penguatan Kelembagaan Korporasi Pembudidaya Tambak Udang dan Ikan di Kawasan Pertambakan di Indonesia; (vi) Persepsi Masyarakat Mengenai Dampak Pengembangan Pariwisata Pantai Ammani Terhadap Tingkat Kesejahteraan, dan; (vii) *Silvofishery Ecopreneurship* - Strategi Untuk Pengembangan Ekosistem Mangrove Sebagai Kawasan Budi Daya Berkelanjutan.

Dengan diterbitkannya jurnal ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang ada kepada masyarakat dan menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perikanan dan kelautan. Saran dan masukan dari pembaca sangat diharapkan guna kesempurnaan penerbitan jurnal ini dimasa mendatang.

Redaksi

UCAPAN TERIMA KASIH

Dewan Redaksi Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (JKSEKP) menyampaikan penghargaan dan terima kasih sebesar - besarnya kepada para Mitra Bestari yang telah berpartisipasi dalam menelaah naskah yang diterbitkan di jurnal ilmiah ini, sehingga jurnal ini dapat terbit tepat pada waktunya. Mitra Beestari yang berpartisipasi dalam terbitan Volume 13 Nomor 1, Juni 2023 adalah:

1. Prof. Dr. Rilus A Kinseng *(Sosiologi Pedesaan Kebijakan - IPB University)*
2. Prof. Dra. Indah Susilowati, M.Sc. Ph.D *(Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan - Universitas Diponegoro*
3. Achmad Zamroni, Ph.D *(Pengelolaan Wilayah Pesisir - Badan Riset Inovasi Nasional)*
4. Dr. Pujo Semedi Hargo Yuwono, M.A. *(Antropologi - Universitas Gadjah Mada)*
5. Dr. Ir. Edi Susilo, MS *(Sosiologi Perikanan - Universitas Brawijaya)*
6. Maulana Firdaus, Ph.D *(Sistem Usaha Perikanan - Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan)*
7. Abdul Malik, S.T., M.Si., Ph.D. *(Lingkungan Perairan dan Sumberdaya Perikanan - Universitas Negeri Makassar)*
8. Dr. Suhana *(Ekonomi Sumber Daya Kelautan - Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim)*
9. Tenny Apriliani, M. Si *(Sistem Usaha Perikanan - Badan Riset Inovasi Nasional)*
10. Dr. Najamuddin, ST, M.Si *(Ilmu Kelautan dan Lingkungan - Universitas Khairun)*
11. Hakim Miftakhul Huda, M. Si *(Sistem Usaha Perikanan - Badan Riset dan Inovasi Nasional)*
12. Estu Sri Luhue, M. Si *(Ekonomi Perikanan - Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan)*
13. Permana Ari Soejarwo, M.T *(Dinamika Sumber Daya Kelautan dan Perikanan - Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan)*
14. Christina Yuliati, M. Si *(Sosial Budaya - Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan)*

ISSN 2089-6980

JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Volume 13 Nomor 1, Juni 2023

Penanggung Jawab :
Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Dewan Redaksi :

Ketua:
Prof. Dr. Agus Heri Purnomo (*Ekonomi Sumber Daya*)

Anggota:
Prof. Dr. Harsuko Riniwati (*Sosial Ekonomi Perikanan*)
Prof. Dr. Ir. Ketut Sukiyono., DipAgEc. MEc, *(Ekonomi Pertanian)*
Dr. Armen Zulham *(Sistem Usaha Perikanan)*
Dr. Yonvitner, S.Pi, M.Si. (*Dinamika Populasi & Lingkungan Perairan dan Sumberdaya Perikanan*)
Dr. Rani Hafsaridewi, S.K.M., M.Si. *(Sistem Usaha Perikanan)*
Dr. Achmad Rizal *(Sosial Ekonomi Perikanan)*
Drs. Masyhuri Imron, MA (*Sosiologi*)

Redaksi Pelaksana :
Nila Mustika Wati, S.S.
Sinta Nurwijayanti, M.A.
Nendah Kurniasari, M.Si.
Rizki Aprilian Wijaya, M.T.
Freshty Yulia Arthatiani, M.Si
Heny Lestari, S.E.
Siti Nurhayati, S.Sos.
Rahadi Susetyo Frendly Muhammad, S.I.Kom.

Desain dan Tata Letak :
Ilham Ferbiansyah, S. Kom.

Alamat Redaksi :
Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Gedung BRSDM KP Lt. 3
Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara
Telp. (021) 6471 1583, Faks.(021) 64700924
Email: kebijakan.sosek@gmail.com
Jurnal Online: *http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkse*

Jurnal ini merupakan perubahan dari Jurnal Kebijakan dan Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan dengan mengalami perubahan cover dan judul

ISSN 2089-6980

JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Volume 13 Nomor 1, Tahun 2022

DAFTAR ISI **Halaman**

KATA PENGANTAR i

UCAPAN TERIMA KASIH ii

DAFTAR ISI iii

Penyelesaian Konflik Nelayan Melalui Pembangunan Permukiman Bersama (Studi Kasus di Kota Cilacap)
Oleh : Agus Darwanto, Lili Pujiastuti dan Silvi Fatika Wulandari ..... 1 - 12

Persepsi Masyarakat Untuk Pengembangan Wisata Berkelanjutan di Pesisir Madura
Oleh : Ris Yuwono Yudo Nugroho dan Mochammad Reza Adiyanto ..... 13 - 23

Strategi Pemenuhan Kebutuhan Keluarga Nelayan Banjang (Kasus KUB Mina Sero Laut, Desa Wringinputih, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi)
Oleh : Melisa Priskila Patrescia dan Rokhani ..... 25 - 39

Strategi Pemasaran Dalam Masa Pandemi: Pelajaran dari Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar) Hasil Perikanan di Kabupaten Banyumas
Oleh : Annisa Wening Maharani Putri, Muhammad Hanief Ihsanuddin, Kusdiarti, Lies Emmawati dan Endhay Kusnendar Muljana Kontara ..... 41 - 53

Penguatan Kelembagaan Korporasi Pembudidaya Tambak Udang dan Ikan di Kawasan Pertambakan di Indonesia
Oleh : Nensyana Shafitri, Radityo Pramoda, Sumaryanto, Saptana, Budi Wardono, Mochammad Fahlevi, Dadan Permana dan Armen Zulham, Adhita Sri Prabakusuma dan Dongqi Shi ..... 55 - 65

Persepsi Masyarakat Mengenai Dampak Pengembangan Pariwisata Pantai Ammani Terhadap Tingkat Kesejahteraan
Oleh : Sri Wahyuni, Subari Yanto dan Andi Alamsyah Rivai ..... 67 - 78

Silvofishery Ecopreneurship - Strategi Untuk Pengembangan Ekosistem Mangrove Sebagai Kawasan Budi Daya Berkelanjutan
Oleh : Amal Arfan, Muhammad Azrul Muin, Hasriyanti, Muhammad Yusuf dan Irwansyah Sukri ..... 79 - 87

INDEKS ABSTRAK JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
(Abstract Index of Journal Policy Socio-Economics Marine and Fisheries)

Vol. 13 No. 1, Juni 2023

Penyelesaian Konflik Nelayan Melalui Pembangunan Permukiman Bersama (Studi Kasus di Kota Cilacap)

Resolving Fishermen Conflict through the Development of Co-settlement (Case Study in Cilacap City)

Agus Darwanto, Lili Pujiastuti dan Silvi Fatika Wulandari

ABSTRAK

Penerapan larangan penangkapan ikan dengan menggunakan pukat harimau (*trawl*) melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 39 Tahun 1980 telah menimbulkan konflik antara nelayan trawl dan nelayan lainnya. Hal itu terjadi juga di Cilacap, yang melibatkan nelayan Bonbaru versus nelayan Sidakaya Bakung yang terjadi pada tahun 1985, yang disebut perang perahu. Konflik yang diikuti tawuran antarpemuda dari kedua kampung itu menciptakan nuansa permusuhan hingga bertahun-tahun, dan baru benar-benar terhenti ketika pemerintah membuka kawasan perumahan nelayan dan pembagian kaveling di wilayah Pelabuhan Perikanan Nusantara Cilacap (PPNC), penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konflik yang terjadi antara dua komunitas nelayan tersebut, dan mengukur tingkat efektivitas pembauran warga dari kedua daerah di Perumahan PPNC untuk melerai dampak konflik perang perahu. Metode penelitian yang digunakan adalah *mix method* dengan memadukan metode kualitatif dan metode kuantitatif. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan menyajikan data dalam bentuk numerik dan grafik. Hasil survei menunjukkan bahwa penyebab kerukunan warga dalam pembauran di Perumahan PPNC adalah kebutuhan untuk bersosialisasi. Selain itu, hasil survei menunjukkan bahwa 80% responden menyatakan bahwa pembauran di Perumahan PPNC efektif merukunkan para nelayan dari kedua daerah yang berkonflik, bahkan 13,3% menyatakan sangat efektif. Survei juga menunjukan bahwa 60% responden menyatakan bahwa pembauran di Perumahan PPNC efektif merukunkan remaja dari kedua daerah tersebut, bahkan 23,3% menyatakan sangat efektif. Dengan demikian, pembangunan perumahan PPNC terbukti efektif melerai permusuhan bertahun-tahun sebagai dampak dari perang perahu.

Kata Kunci: Bonbaru; kawasan perumahan; perang perahu; PPNC; Sidakaya; tawuran

ABSTRACT

The implementation of the ban on fishing using trawlers through Presidential Decree (Keppres) Number 39 of 1980 has created conflict between trawl fishermen and other fishermen. The conflict also happened in Cilacap, which involved a boat war involving Bonbaru fishermen versus Sidakaya Bakung fishermen that occurred in 1985, which was called a boat war. Then, the conflict was followed by brawls between youths from the two villages, creating an atmosphere of hostility that lasted for years. Was only recently that the dispute really stopped when the government opened a residential area for fishermen and distribution of plots in the Cilacap Archipelago Fishing Port (PPNC) area. The purpose of this study aims to describe the conflict that occurred between the two fishing communities, and this is to measure the level of effectiveness of assimilation of residents from the two areas in PPNC housing to break up the impact of boat war conflicts. The research method used is the mixed method by combining qualitative methods and quantitative methods. Data analysis used is descriptive analysis by presenting data in numerical and graphical forms. The results of a survey involving 30 respondents from PPNC Housing residents produced data, namely 70% of respondents considered that the cause of the harmony of residents in assimilation in PPNC Housing was the need to socialize. In addition, the survey results show 80% of respondents stated that assimilation in PPNC Housing was effective in reconciling fishermen from the two conflicting areas, even 13.3% said it was very effective. The survey also showed that 60% of respondents stated that assimilation in PPNC housing effective in reconciling youth from the two areas, even 23.3% said it was very effective. Thus, the construction of the PPNC Housing proved effective in dissolving the years of hostility as a result of the boat war.

Keywords: Bonbaru; residential area; boat war; PPNC; Sidakaya; braw

INDEKS ABSTRAK JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
(Abstract Index of Journal Policy Socio-Economics Marine and Fisheries)
Vol. 13 No. 1, Juni 2023

Persepsi Masyarakat Untuk Pengembangan Wisata Berkelanjutan di Pesisir Madura

Community Perception for the Development of Sustainable Tourism on Coastal Madura

Ris Yuwono Yudo Nugroho dan Mochammad Reza Adiyanto

ABSTRAK

Pemerintah Kabupaten Bangkalan menyusun rencana untuk mengoptimalkan potensi wilayah pesisir melalui pembangunan wisata berkelanjutan di Desa Tajungan. Dalam hal ini, pelibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan terkait merupakan hal yang sangat relevan. Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi persepsi masyarakat, terutama mengenai dampak terkait, yang harus diprioritaskan penanganannya oleh pengambil kebijakan. Terdapat tiga kriteria dampak pengembangan pariwisata berkelanjutan, baik positif maupun negatif, yang dijadikan fokus perhatian dalam penelitian ini, yaitu dampak ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Pendekatan penelitian bersifat kuantitatif, dengan pemilihan responden secara *purposive*. Jumlah responden sebanyak 25 orang dari 8 kategori. Model yang diacu dalam penelitian ini adalah *Analytic Hierarchy Process*. Hasil menunjukkan bahwa dampak positif yang menjadi harapan masyarakat dan harus menjadi prioritas perhatian adalah dampak ekonomi berupa dorongan untuk perkembangan kewirausahaan, dampak sosial budaya terkait penambahan infrastruktur baru, dan dampak lingkungan peningkatan kesadaran lingkungan. Sementara itu, dampak negatif yang menjadi kekhawatiran utama masyarakat dan perlu menjadi fokus perhatian pengambil kebijakan adalah dampak ekonomi terkait ketergantungan terhadap pencaharian berbasis pariwisata, dampak sosial berupa tekanan infrastruktur dan kemacetan. Implikasi kebijakan dari hasil-hasil tersebut adalah: perlunya program-program untuk mendorong kewirausahaan, misalnya melalui penyelenggaraan pelatihan dan pembimbingan usaha, dan penguatan modal usaha. Sisi infrastruktur perlu didukung dengan alokasi anggaran khusus yang diarahkan pada perbaikan jalan dan infrastruktur desa. Untuk aspek lingkungan, hasil penelitian mengarah pada implikasi tentang perlunya upaya masif untuk peningkatan kesadaran masyarakat tentang berbagai aspek lingkungan.

Kata Kunci: persepsi; wisata berkelanjutan; pesisir; Bangkalan; Madura

ABSTRACT

The government of Bangkalan Regency has developed a plan to optimize the potential of the coastal area of Tajungan Village for sustainable tourism development. In this case, it is relevant to involve community in formulating related policies. The research aims to identify public perceptions, especially regarding the related impacts, that must be put in priority for by policymakers. There are three criteria of the impact of sustainable tourism development, both positive and negative, which are the focus in this study, namely economic, sociocultural, and environmental impacts. The research approach is quantitative, with a purposive selection of respondents. The number of respondents was 25 people from 8 categories. The study refer to the model of Analytic Hierarchy Process. The results of the study showed that the positive impacts, which are expected by the community and must be put in priority, are economic impacts in the form of encouragement for entrepreneurial development, sociocultural impacts related to the addition of new infrastructure and environmental impacts of increasing environmental awareness. The negative impacts, which become the community's main concern and need to be the focus of policymakers, are economic impacts related to dependence on tourism-based livelihoods and social impacts in the form of pressure on infrastructure and congestion. Policy implications of those results are the need for entrepreneurship programs include business training and mentoring, and capital reinforcement. The infrastructure must be encourage with financial support to improve roads and village infrastructure. For environmental aspects, implications regarding the need for massive efforts to increase public awareness of various environmental aspects.

Keywords: perception; sustainable tourism; coastal; Bangkalan; Madura

INDEKS ABSTRAK JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
(Abstract Index of Journal Policy Socio-Economics Marine and Fisheries)

Vol. 13 No. 1, Juni 2023

Strategi Pemenuhan Kebutuhan Keluarga Nelayan Banjang (Kasus KUB Mina Sero Laut, Desa Wringinputih, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi)

Strategy for Fulfilling the Needs of Banjang Fishermen's Families (KUB Mina Sero Laut Case, Wringinputih Village, Muncar District, Banyuwangi Regency)

Melisa Priskila Patrescia dan Rokhani

ABSTRAK

Pendapatan nelayan tergantung pada jumlah tangkapan, yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti peredaran bulan, siklus musim, dan jenis alat tangkap. Nelayan Desa Wringinputih, Banyuwangi merupakan salah satu contohnya. Kondisi ini mendorong adanya upaya untuk mendapatkan pemasukan tambahan melalui optimalisasi keberadaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Mina Sero Laut. Keanggotaan KUB dibagi ke dalam dua golongan: (i) keluarga nelayan banjang penuh, (ii) keluarga nelayan banjang sambilan utama. Penelitian ini bertujuan melakukan analisis pada penggolongan tersebut terutama sehubungan dengan perbedaan pengelolaan aset dan strategi nafkah. Penelitian dilaksanakan menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, *in-depth interview*, dan dokumentasi, dengan informan yang dipilih secara *purposive sampling*. Hasil penelitian adalah sebagai berikut. Pertama, aset atau modal nelayan banjang sambilan utama termanfaatkan secara lebih optimal; ini terjadi karena mereka juga memanfaatkan keberadaan modal alam, sosial, ekonomi, fisik, dan manusia secara efektif. Disisi lain, nelayan banjang penuh hanya memanfaatkan dua modal saja, modal sosial dan fisik. Kedua, perbedaan pola pemanfaatan aset tersebut berimbas pada strategi nafkah yang diterapkan oleh nelayan. Nelayan banjang sambilan utama menerapkan tiga strategi nafkah: (i) intensifikasi, (ii) diversifikasi, dan (iii) migrasi. Sebaliknya, nelayan banjang penuh hanya menerapkan dua strategi: (i) intensifikasi dan (ii) migrasi. Ketiga pemenuhan kebutuhan keluarga, khususnya pada keluarga nelayan banjang penuh, masih dapat ditingkatkan. Implikasi utama dari hasil ini adalah perlunya kebijakan komplemen yang diarahkan pada dukungan terhadap upaya optimalisasi modal manusia khususnya keterampilan nelayan. Hal ini dapat dilakukan misalnya melalui pemberian fasilitas permodalan dan peningkatan keterampilan nelayan.

Kata Kunci: kebutuhan; modal; nelayan banjang penuh; nelayan banjang sambilan utama; optimalisasi; pendapatan

ABSTRACT

The lives of fishermen in general are highly influenced by the dynamic resources of the sea, with income uncertain depending on the amount of fish they catch. The amount of catch is determined by a number of factors, including the circulation of the moon, seasonal cycles, and traditional fishing gear. The fishermen of Wringinputih Village, Banyuwangi are a case in point; their fisheries do not provide a steady income. This uncertainty has prompted them to make efforts to obtain additional income by optimizing the existence of the Mina Sero Laut Joint Business Group (KUB). In this regard, the KUB membership is divided into two groups, namely: (i) members from full-time banjang fisher families and (ii) members from part-time banjang fisher families. This study aimed to analyze these categories, especially in relation to differences in asset management and livelihood strategies. This research was conducted using a qualitative descriptive analysis approach. Data were collected through observation techniques, in-depth interviews, and documentation; meanwhile. The determination of informants for interviews was done using a purposive sampling method. The research results show the following. First, the assets or capital of the main part-time banjang fisher families are utilized more optimally; this is because this group also uses the existence of natural, social, economic, physical, and human capital effectively. On the other hand, the full banjang fishing families only utilize two capitals, namely social and physical capital. Second, the difference in asset utilization patterns has an impact on the livelihood strategies applied by the fishermen. Part-time banjang fishermen primarily apply the livelihood strategies of intensification, (ii) diversification, and (iii) migration. Meanwhile, full-time banjang fishers only implement two strategies, namely: (i) intensification and (ii) migration. Third, the fulfilment of fisher families' needs, especially in full banjang fisher families, can still be improved. This can be done through the optimization of human capital, and fishermen's skills, directed at the ability to increase income. Policy implications are needed to optimize human and economic capital by providing capital facilities and fishermen skills.

Keywords: need; capital; full banjang fishermen; main sideline fishermen; optimization; income

INDEKS ABSTRAK JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
(Abstract Index of Journal Policy Socio-Economics Marine and Fisheries)

Vol. 13 No. 1, Juni 2023

Strategi Pemasaran Dalam Masa Pandemi: Pelajaran dari Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar) Hasil Perikanan di Kabupaten Banyumas

Marketing Strategy During a Pandemic: Lessons from Fishery Product Processors and Marketers Group (Poklahsar) in Banyumas Regency

Annisa Wening Maharani Putri, Muhammad Hanief Ihsanuddin, Kusdiarti, Lies Emmawati dan Endhay Kusnendar Muljana Kontara

ABSTRAK

Pandemi COVID-19, yang berdampak pada penurunan aktivitas sampai dengan kegagalan bisnis, memberi pelajaran berharga bagi keberhasilan pengembangan usaha Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar). Hasil Perikanan di Kabupaten Banyumas melalui penerapan strategi SO (*Strenght-Opportunities*). Penelitian ini merupakan studi kasus yang dilaksanakan di Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Kembaran, dan Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas pada bulan April sampai dengan Mei 2021. Tujuan penelitian untuk mengkonfirmasi validitas strategi keberhasilan poklahsar Banyumas dalam mengatasi dampak pandemi. Data utama diperoleh melalui konsultasi dengan pejabat Dinas Pertanian dan Perikanan (DPP) Kabupaten Banyumas, dan wawancara dengan anggota poklahsar melalui teknik *purposive sampling*. Poklahsar diwakili oleh pengurus dan/atau anggota aktif yang pada umumnya adalah perempuan berusia usia 20–60 tahun, yang melakukan usaha pengolahan nila, lele, gurami, tuna, dan salmon. Dilakukan pengambilan sampel sebanyak 10 responden dari total 37 anggota dari lima poklahsar aktif sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Pokok analisis pertama adalah rekonstruksi strategi yang diterapkan oleh masyarakat pada masa pandemi Covid-19, melalui analisis SWOT. Analisis SWOT didasarkan pada hasil identifikasi aspek-aspek kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang relevan dengan situasi. Analisis kedua adalah pengukuran kinerja dari strategi tersebut, melalui analisis usaha poklahsar terkait. Hasil menunjukkan bahwa: (i) strategi *Strenght-Opportunities* terbukti valid dan sesuai dengan analisis SWOT yang didasarkan pada pada aspek-aspek internal dan eksternal terkait, (ii) analisis usaha menunjukkan kinerja finansial positif, yang mengindikasikan berjalannya strategi yang diterapkan. Implikasi kebijakan dari kesimpulan ini adalah bahwa strategi tepat yang menyertakan pertimbangan segenap aspek relevan sangat penting untuk menunjang keberhasilan pelaku usaha untuk menghadapi situasi sulit seperti pandemi.

Kata Kunci: panalisis kelayakan usaha; BEP; NPV; B/C ratio; poklahsar; SWOT

ABSTRACT

The impact of the COVID-19 pandemic on reducing activity to the point of business failure provided valuable lessons for the successful development of the Fishery Product Processing and Marketing Group (Poklahsar) business in Banyumas Regency through the implementation of the Strenght-Opportunities strategy. This research is a case study conducted in Kedungbanteng, Kembaran, and Sokaraja Districts, Banyumas Regency from April to May 2021. The aim is to confirm Poklahsars' successful strategy to overcome the pandemic impact. The primary data was obtained through consultation with the Agriculture and Fisheries Agency (DPP) officials of Banyumas Regency, and interviews with Poklahsars' members using a purposive sampling technique. Poklahsars were represented by the active members who are generally women aged 20–60 years, operating processing businesses of tilapia, catfish, gourami, tuna, and salmon. Sampling was conducted from 10 respondents from 37 members from five active Poklahsars according to predetermined criteria. The strategy-implemented reconstruction of the community during the pandemic through a SWOT analysis. SWOT analysis is based on the identification of strengths, weaknesses, opportunities, and threats to the situation. The strategy performance was measured through Poklahsars' business analysis. The results show that: (i) the Strength-Opportunities strategy is proven to be valid by the SWOT analysis based on internal and external aspects, (ii) the business analysis shows positive financial performance, which indicates the strategy accomplishment. The policy-implication conclusion is that an appropriate strategy that includes all relevant aspects of consideration is essential to support the businesses actor's success in dealing with the pandemic.

Keywords: business feasibility analysis; BEP; NPV; B/C ratio; poklahsar; SWOT

INDEKS ABSTRAK JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
(Abstract Index of Journal Policy Socio-Economics Marine and Fisheries)
Vol. 13 No. 1, Juni 2023

Penguatan Kelembagaan Korporasi Pembudidaya Tambak Udang dan Ikan di Kawasan Pertambakan di Indonesia

Strengthtening Institution of Shrimp and Fish Farmer Corporates in the Brackish Water Area in Indonesia

Nensyana Shafitri, Radityo Pramoda, Sumaryanto, Saptana, Budi Wardono, Mochammad Fahlevi, Dadan Permana dan Armen Zulham, Adhita Sri Prabakusuma dan Dongqi Shi

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lambatnya pembentukan korporasi pada kawasan pertambakan di Indonesia. Tujuan penelitian adalah: (i) melakukan pemetaan keragaman penguasaan luasan tambak di berbagai pulau dan provinsi dalam kaitannya dengan pengembangan korporasi; (ii) mengidentifikasi peran komponen kelembagaan korporasi pertambakan; (iii) menyusun strategi pengembangan kelembagaan korporasi tambak di Indonesia, yang dituangkan pada model generic korporasi petambak untuk kawasan tambak dengan luas minimal 100 hektar. Pendekatan metodologis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan analisis statistik deskriptif. Data Sensus Pertanian 2013 (jumlah sampel 138.865 responden) dan data hasil survey tahun 2023 di Kabupaten Brebes dan Kabupaten Indramayu (100 responden) digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan korporasi pembudidaya tambak dapat dibentukpada beberapa lokasi di provinsi tertentu, dengan lima komponen korporasi walaupun belum berperan. Model generik korporasi pembudidaya tambak tersebut, menjadi basis untuk membangun bisnis *on farm–off farm* korporasi dengan memfungsikan lima komponen korporasi pembudidaya tambak melalui prinsip konsolidasi, kolaborasi dan integrasi. Implikasi kebijakan dari hasil penelitian ini adalah relevansi pemahaman bahwa: (i) identifikasi dan pemetaan sebaran petambak dan luas kawasan pertambakan harus ditempatkan sebagai langkah paling awal dalam pengembangan korporasi pada sektor kelautan dan perikanan, (ii) petambak mutlak harus diorganisasikan dalam Gapokkan sehingga dapat mengatasi masalah produksi dan pasar, dan (iii) komponen-komponen korporasi dari model generik merupakan hal yang vital di dalam upaya membangun korporasi pada satu kawasan pertambakan.

Kata Kunci: model korporasi; kawasan pertambakan; komponen korporasi; bisnis

ABSTRACT

This research is motivated by the slow formation of corporations in brackish water areas in Indonesia. The aims of the study were: (i) Mapping the diversity of pond control over various islands and provinces about corporate development; (ii) identifying the role of the institutional components of the aquaculture corporation; (iii) developing a strategy for developing pond corporation institutions in Indonesia, on the generic model of corporation farmers for pond areas with a minimum area of 100 hectares. The methodology of the study is a quantitative approach using descriptive statistical analysis. The answer research hypothesis used Agricultural Census data for 2013 (sample of 138,865 respondents) and survey data for 2023 in Brebes and Indramayu Regencies (100 respondents). The study highlights that pond cultivator corporations can be formed in several locations in certain provinces, with five corporate components, even though they have not played a role yet. The generic model of the pond cultivator corporation is the basis for building a corporate on farm – off farm business by functioning the five components of the pond cultivator corporation through the principles of consolidation, collaboration and integration. The policy implications of the results of this study are the relevance of the understanding that: (i) identification and mapping of the distribution of farmers and the area of brackish water must be placed as the earliest step in corporate development in the Maritime and Fisheries Sector, (ii) absolute farmers must be organized into Gapokkan so that they can overcome production and market issues, and (iii) the corporate components of the generic model are vital in the effort to build a corporation in a brackish water area.

Keywords: corporate model; brackishwater area; corporate component; business

INDEKS ABSTRAK JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
(Abstract Index of Journal Policy Socio-Economics Marine and Fisheries)

Vol. 13 No. 1, Juni 2023

Persepsi Masyarakat Tentang Dampak Pengembangan Pariwisata Pada Kesejahteraan Masyarakat: Kasus Pantai Ammani, Pinrang

Public Perceptions of The Impact of Tourism Development on Community Wellbeing: Lessond from the Case of Pinrang's Ammani Beach

Sri Wahyuni, Subari Yanto dan Andi Alamsyah Rivai

ABSTRAK

Salah satu pemangku kepentingan yang paling berpotensi terdampak program pembangunan, termasuk program pengembangan pariwisata, adalah masyarakat sekitar. Karenanya, informasi mengenai dampak positif maupun negatif yang terjadi pada masyarakat, dan persepsi mereka tentang hal tersebut sangat krusial dalam pengembangan kebijakan terkait. Penelitian ini dilakukan pada kasus Pantai Ammani, Kabupaten Pinrang, dengan tujuan untuk: (i) mengukur tingkat kesejahteraan, yang didasarkan pada indikator Badan Pusat Statistik (BPS, dan (ii) menganalisis persepsi masyarakat terkait kesejahteraan dihubungkan dengan pengembangan wisata di wilayah mereka. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, dokumentasi, dan wawancara menggunakan kuesioner. Penentuan responden dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Uji Kruskal-wallis H digunakan untuk menganalisis perbedaan persepsi masyarakat mengenai tingkat kesejahteraan berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan hal-hal sebagai berikut: (i) Persepsi masyarakat terhadap pengembangan pariwisata Pantai Ammani adalah positif atau berdampak baik terhadap aspek kesejahteraan masyarakat, (ii) Tidak terdapat perbedaan signifikan dari persepsi masyarakat berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan (p>0,05), (iii) Berdasarkan indikator menurut BPS, tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar (Desa Mattiro Tasi), termasuk ke dalam kategori sejahtera dengan pendapatan rata-rata penduduk di atas Rp 3.000.000/bulan, tingkat pendidikan hingga jenjang SMA / sederajat, dan fasilitas tempat tinggal yang lengkap, (iv) Terdapat perbedaan signifikan untuk indikator pendapatan dan pengeluaran berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan (p < 0,05). Implikasi kebijakan penelitian ini adalah pentingnya penekanan aspek dampak kesejahteraan, baik yang terbaca melalui pengukuran objektif maupun terefleksikan dari persepsi masyarakat dalam pengembangan program pembangunan, termasuk pengembangan pariwisata. Untuk itu, kebijakan komplemen yang mengakomodasikan aspek ini merupakan hal yang sangat relevan.

Kata Kunci: persepsi; pariwisata; Pantai Ammani; kesejahteraan

ABSTRACT

One of the stakeholders that most potentially affected by development programs, including tourism development programs, is the community. Therefore, information about the positive and negative impacts that have occurred on the community, and their perceptions of this issue is crucial in the development of related policies. This research was conducted on the Ammani Beach, Pinrang Regency, with the aim of: (i) measuring the level of welfare, which is based on the indicators of the Central Statistics Agency (BPS), and (ii) analyzing people's perceptions regarding welfare related to tourism development in their area. The data was collected using observation, documentation and interview techniques using questionnaires. The respondents were determined using a purposive sampling technique. The Kruskal-Wallis H test was used to analyze differences in people's perceptions regarding the level of welfare based on gender and education level. The results showed the following : (i) The community's perception of Ammani Beach tourism development is positive or has a good impact on aspects of community welfare, (ii) There is no significant difference from the public's perception based on gender and level of education (p> 0.05), (iii) Based on indicators according to BPS, the level of welfare of the surrounding community (Desa Mattiro Tasi), is included in the prosperous category with an average income of over Rp. 3,000,000/month, education level up to high school level/equivalent, and complete housing facilities, (iv) There are significant differences for income and expenditure indicators based on gender and level of education (p <0.05). The policy implication of this research is the importance of emphasizing aspects of welfare impacts, both readable through objective measurements and reflected from public perceptions in the development of development programs, including tourism development. For this reason, complementary policies that accommodate this aspect are very relevant.

Keywords: perception; tourist; Ammani Beach; well-being

INDEKS ABSTRAK JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
(Abstract Index of Journal Policy Socio-Economics Marine and Fisheries)
Vol. 13 No. 1, Juni 2023

Silvofishery Ecopreneurship - Strategi Untuk Pengembangan Ekosistem Mangrove Sebagai Kawasan Budi Daya Berkelanjutan

Silvofishery Ecopreneurship – A Strategy for Developing Mangrove Ecosystem as a Sustainable Aquaculture Area

Amal Arfan, Muhammad Azrul Muin, Hasriyanti, Muhammad Yusuf dan Irwansyah Sukri

ABSTRAK

Areal hutan mangrove berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di wilayah pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengembangan kawasan budidaya pada ekosistem mangrove tanpa merusak fungsi ekologisnya. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan metodologis deksriptif kualitatif, dengan data-data primer yang diperoleh dari wawancara mendalam dengan responden yang dipilih dengan teknik *purposive sampling* berdasarkan profesi responden. Data-data dari responden tersebut diverifikasi dengan observasi dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan teknik SWOT *(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)*. Lokasi penelitian adalah ekosistem hutan mangrove di Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar, di mana masyarakat melakukan kegiatan penangkapan dan budi daya ikan di kawasan sekitarnya. Hasil SWOT menunjukkan bahwa lokus strategi terbaik berada pada kuadran I (0,55; 0,68) (strategi agresif), yaitu memaksimalkan kekuatan serta peluang untuk meraih keuntungan berkelanjutan. Strategi tersebut mencakup tiga poin utama: (1) penerapan konsep *silvofishery-ecopreneurship,* yang memadukan budidaya dengan pelestarian ekosistem mangrove, dan (2) peningkatan peran lembaga masyarakat dalam pengelolaan kawasan mangrove. (3) pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan kemandirian dengan inovasi yang berbasis kegiatan budidaya berkelanjutan. Implikasi dari hasil ini adalah bahwa pendekatan *ecofishery-ecopreneurship* perlu dipertimbangkan dalam pengembangan kebijakan pengelolaan hutan mangrove di berbagai lokasi.

Kata Kunci: strategi agresif; pengembangan; pengelolaan; mangrove; budi daya berkelanjutan

ABSTRACT

Mangrove forests are potential to be developed as sustainable cultivation areas to increase the income of coastal communities. This study aims to analyze the strategy for developing cultivation areas in mangrove ecosystems without destroying their ecological functions. A qualitative descriptive method was conducted in this study based on primary data obtained from in-depth interviews. Sampling using the purposive sampling technique based on the profession of the respondent. The data of respondents are verified by observation and documentation. The data were analyzed using SWOT analysis (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). The research location is a mangrove forest ecosystem in Sanrobone District, Takalar Regency, where the community carries out fishing and fish farming activities in the surrounding area. The SWOT analysis results show that the best strategic locus is in quadrant I (0.55; 0.68) (aggressive strategy), namely maximizing strengths and opportunities to gain sustainable profits. The strategy includes three main points: (1) application of the silvofishery-ecopreneurship concept, which combines cultivation with the preservation of mangrove ecosystems, and (2) increasing the role of community institutions in managing mangrove areas. (3) community empowerment to create independence with innovation based on sustainable cultivation activities. The implication of these results is that the ecofishery-ecopreneurship approach needs to be considered in the development of mangrove forest management policies in various locations.

Keywords: ***aggressive strategy; development; management; mangrove; sustainable cultivation***

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

Penyelesaian Konflik Nelayan Melalui Pembangunan Permukiman Bersama (Studi Kasus di Kota Cilacap)

Resolving Fishermen Conflict through the Development of Co-settlement (Case Study in Cilacap City)

***Agus Darwanto[1], Lili Pujiastuti[2] dan Silvi Fatika Wulandari[3]**

[1]International Open University
21 Kanifing Mosque Road, PO Box 2340, Kanifing South, KMC, Gambia

[2]SMA Sri Mukti Cilacap
Jl. Bawean No.293, Klempang, Gunungsimping, Kec. Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53224, Indonesia

[3]Universitas Tidar
Jl. Kapten Suparman No.39, Potrobangsan, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah 56116, Indonesia

ARTICLE INFO

Diterima tanggal : 8 Mei 2022
Perbaikan naskah: 27 Januari 2023
Disetujui terbit : 26 Mei 2023

*Korespodensi penulis:
Email: adarwanto@gmail.com

DOI: http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v13i1.11093

ABSTRAK

Penerapan larangan penangkapan ikan dengan menggunakan pukat harimau (*trawl*) melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 39 Tahun 1980 telah menimbulkan konflik antara nelayan trawl dan nelayan lainnya. Hal itu terjadi juga di Cilacap, yang melibatkan nelayan Bonbaru versus nelayan Sidakaya Bakung yang terjadi pada tahun 1985, yang disebut perang perahu. Konflik yang diikuti tawuran antarpemuda dari kedua kampung itu menciptakan nuansa permusuhan hingga bertahun-tahun, dan baru benar-benar terhenti ketika pemerintah membuka kawasan perumahan nelayan dan pembagian kaveling di wilayah Pelabuhan Perikanan Nusantara Cilacap (PPNC), penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konflik yang terjadi antara dua komunitas nelayan tersebut, dan mengukur tingkat efektivitas pembauran warga dari kedua daerah di Perumahan PPNC untuk melerai dampak konflik perang perahu. Metode penelitian yang digunakan adalah *mix method* dengan memadukan metode kualitatif dan metode kuantitatif. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan menyajikan data dalam bentuk numerik dan grafik. Hasil survei menunjukkan bahwa penyebab kerukunan warga dalam pembauran di Perumahan PPNC adalah kebutuhan untuk bersosialisasi. Selain itu, hasil survei menunjukkan bahwa 80% responden menyatakan bahwa pembauran di Perumahan PPNC efektif merukunkan para nelayan dari kedua daerah yang berkonflik, bahkan 13,3% menyatakan sangat efektif. Survei juga menunjukan bahwa 60% responden menyatakan bahwa pembauran di Perumahan PPNC efektif merukunkan remaja dari kedua daerah tersebut, bahkan 23,3% menyatakan sangat efektif. Dengan demikian, pembangunan perumahan PPNC terbukti efektif melerai permusuhan bertahun-tahun sebagai dampak dari perang perahu.

Kata Kunci: Bonbaru; kawasan perumahan; perang perahu; PPNC; Sidakaya; tawuran

ABSTRACT

The implementation of the ban on fishing using trawlers through Presidential Decree (Keppres) Number 39 of 1980 has created conflict between trawl fishermen and other fishermen. The conflict also happened in Cilacap, which involved a boat war involving Bonbaru fishermen versus Sidakaya Bakung fishermen that occurred in 1985, which was called a boat war. Then, the conflict was followed by brawls between youths from the two villages, creating an atmosphere of hostility that lasted for years. Was only recently that the dispute really stopped when the government opened a residential area for fishermen and distribution of plots in the Cilacap Archipelago Fishing Port (PPNC) area. The purpose of this study aims to describe the conflict that occurred between the two fishing communities, and this is to measure the level of effectiveness of assimilation of residents from the two areas in PPNC housing to break up the impact of boat war conflicts. The research method used is the mixed method by combining qualitative methods and quantitative methods. Data analysis used is descriptive analysis by presenting data in numerical and graphical forms. The results of a survey involving 30 respondents from PPNC Housing residents produced data, namely 70% of respondents considered that the cause of the harmony of residents in assimilation in PPNC Housing was the need to socialize. In addition, the survey results show 80% of respondents stated that assimilation in PPNC Housing was effective in reconciling fishermen from the two conflicting areas, even 13.3% said it was very effective. The survey also showed that 60% of respondents stated that assimilation in PPNC housing effective in reconciling youth from the two areas, even 23.3% said it was very effective. Thus, the construction of the PPNC Housing proved effective in dissolving the years of hostility as a result of the boat war.

Keywords: *Bonbaru; residential area; boat war; PPNC; Sidakaya; braw*

PENDAHULUAN

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 39 Tahun 1980 dengan tegas melarang segala kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan pukat harimau (*trawl*). Terbitnya Keppres tersebut bertujuan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam perikanan, mendorong peningkatan produksi perikanan tangkap, dan menghindarkan terjadinya ketegangan-ketegangan sosial. Penggunaan pukat harimau dengan cara mengeruk dasar perairan menyebabkan rusaknya habitat dan terkurasnya berbagai jenis biota laut yang bukan termasuk hasil tangkapan utama. Pukat harimau pada umumnya digunakan untuk menangkap udang. Namun, alat tersebut adalah alat tangkap yang paling tidak selektif karena berbagai spesies yang merupakan hasil tangkapan sampingan (HTS) lebih banyak yang terjaring dengan perbandingan 20:1 daripada hasil tangkapan udang, bahkan bisa lebih (Eayrs, 2005). Nelayan kecil sangat dirugikan oleh tindakan kapal-kapal yang menggunakan pukat harimau. Penggunaan pukat harimau sendiri tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap penghasilan yang diterima anak buah kapal (ABK) atau buruh nelayan (Widodo *et al*., 1997).

Kemunculan teknologi baru menimbulkan perbedaan hasil produksi penangkapan, sebagaimana perbedaan jumlah produksi ikan yang dihasilkan oleh nelayan *trawl* dan nelayan tradisional per trip dan per musimnya. Produksi ikan nelayan *trawl* rata-rata tiga hingga tujuh kali lipat dari hasil yang diperoleh nelayan-nelayan tradisional. Banyaknya jumlah kapal *trawl* yang beroperasi di perairan Cilacap membuat petugas Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) mengalami kesulitan dalam pengawasan dan penertiban operasinya. Rendahnya intensitas pengawasan mendorong banyak nelayan *trawl* yang melanggar jalur penangkapan nelayan tradisional. Faktor penyebabnya memang cukup beragam, seperti faktor ekonomi, hukum, hingga ilmu pengetahuan. Pelanggaran tersebut menyulut konflik antara nelayan tradisional dan nelayan *trawl*. Seperti kejadian di Madura, sebagaimana dijelaskan oleh Subianto (2014) bahwa selama tahun 1999 – 2004 terjadi sebanyak 12 (dua belas) kali konflik nelayan di daerah Pasuruan yang disebabkan penggunaan jaring *trawl* yang mengakibatkan 6 unit perahu dan mesin dibakar, 4 unit perahu milik nelayan Pasuruan disandera oleh nelayan Bangkalan, 5 unit perahu milik nelayan Bangkalan disandera oleh nelayan Pasuruan, dan 3 unit perahu milik nelayan Sampang disandera oleh nelayan Bangkalan. Ada pun korban jiwa terdiri dari 8 (delapan) orang tewas yaitu 5 orang berasal dari Bangkalan dan 3 orang berasal dari Pasuruan, sementara 9 orang dari Pasuruan luka-luka akibat dianiaya. Di Bengkulu Utara, Warta (2019) memberitakan terjadinya konflik antara nelayan tradisional dengan nelayan *trawl*. Setidaknya ada 4 orang nelayan tradisional yang terluka oleh senapan angin milik nelayan *trawl* dan 21 orang lainnya diamankan oleh polisi untuk mencegah konflik yang lebih besar. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah (2022) juga mengungkapkan terjadinya konflik di daerahnya terkait dengan pengoperasian *trawl* mini.

Demikian pula peristiwa di Kabupaten Cilacap, penggunaan pukat harimau oleh beberapa nelayan Bonbaru membuat marah nelayan Sidakaya. Kemudian, mereka melakukan operasi tangkap tangan terhadap para nelayan Bonbaru yang terbukti menggunakan pukat harimau. Hal itu memicu dendam dari para nelayan Bonbaru. Sebagai wujud kemarahannya, menurut Sukirno yang dikuatkan oleh keterangan dari Maniso, Ketua KUD Minosaroyo, para nelayan Bonbaru melempari kapal-kapal nelayan Sidakaya yang melintasi Jembatan Kaliyasa dengan batu-batu berukuran besar. Beberapa saksi sejarah menuturkan bahwa konflik perang perahu itu terjadi pada tahun 1985. Konflik antara nelayan Bonbaru dan nelayan Sidakaya berlangsung sekitar 2 minggu hingga didamaikan oleh Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Cilacap dan KUD Mino Saroyo Cilacap melalui pertemuan para kelompok nelayan. Hasilnya disepakati bahwa pukat harimau tidak lagi digunakan. Akhirnya, nelayan Bonbaru yang memiliki pukat harimau menjualnya kepada para nelayan Prenca.

Namun, selang beberapa bulan kemudian terjadi konflik antarpemuda dari Bonbaru dan Sidakaya tersebut. Padahal, kedua kampung hanya dibatasi oleh Sungai Kaliyasa. Tawuran dan perang antarkampung menyebabkan lumpuhnya kegiatan penangkapan ikan nelayan Sidakaya hingga 2 bulan. Meski kontak fisik akhirnya terhenti dengan sendirinya, permusuhan antarpemuda di kedua kampung tersebut terus berlanjut hingga bertahun-tahun. Beberapa remaja Sidakaya bahkan sempat dikejar pemuda Bonbaru ketika melintasi jalan raya di dekat Kampung Bonbaru, demikian pula sebaliknya.

Pada umumnya konflik sosial yang terjadi selama bertahun-tahun tidak dapat diselesaikan dengan mudah, bahkan berpotensi menyematkan dendam. Hal itu berbeda dengan konflik yang terjadi antara nelayan Bonbaru dan Sidakaya Bakung. Keajaiban terjadi pada saat pemerintah membangun kawasan perumahan nelayan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Cilacap (PPNC). Semua nelayan dari Sidakaya dan

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

Bonbaru dapat mengambil perumahan tersebut dengan biaya yang sangat murah. Selain itu, pemerintah menyediakan tanah kaveling secara cuma-cuma untuk para nelayan Sidakaya dan Bonbaru yang menjadi anggota HNSI. Saksi peristiwa menuturkan bahwa berbaurnya anggota keluarga nelayan Bonbaru dengan anggota keluarga nelayan Sidakaya di perumahan nelayan PPNC serta di daerah kaveling ampuh melerai pertikaian antardua kampung yang telah berlangsung bertahun-tahun. Hal yang menarik sebagai bahan kajian adalah bagaimana efektivitas pembauran warga dalam perumahan nelayan untuk melerai pertikaian antarkedua kampung?

Penelitian dilakukan pada bulan Juli-September 2021. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan *mix method* yang memadukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan survei menggunakan angket. Wawancara dilakukan dengan pengurus KUD Mino Saroyo, pengurus HNSI Cabang Cilacap, dan para tokoh masyarakat yang mengalami dan menyaksikan pertikaian perang perahu hingga pembangunan Perumahan Nelayan PPNC. Kegiatan survei menggunakan metode *purposive sampling* dilakukan dengan memilih secara acak warga perumahan nelayan dan kaveling PPNC yang berasal dari Sikadaya Bakung dan Bonbaru yang berusia di atas 35 tahun dengan alasan bahwa usia di bawah 35 tahun tidak mengetahui kisah perang perahu dan tidak mengalami dampak sosial-ekonomi pascaperang perahu. Hal itu terjadi karena perumahan nelayan dan kaveling PPNC benar-benar menjadi tempat yang representatif bagi pembauran masyarakat nelayan yang pernah bertikai sehingga tidak mewariskan cerita konflik masa lalu kepada generasi berikutnya. Oleh karena itu, tidak semua warga perumahan dan kaveling PPNC mengetahui konflik dan dampak dari peristiwa perang perahu.

Penentuan jumlah sampel merujuk pada metode Roscoe (1975) yang menyatakan bahwa jumlah sampel 30—500 cocok untuk hampir semua jenis penelitian, serta teori Gay dan Diehl (1996) yang menyebutkan jumlah sampel penelitian deskriptif dengan menggunakan perbandingan minimal 15 sampel dari setiap kelompok. Data kualitatif diolah dengan analisis deskriptif dan dengan reduksi terhadap data yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, lalu dilanjutkan dengan interpretasi menggunakan teori-teori dan data penelitian sebelumnya. Sementara itu, analisis data kuantitatif yang digunakan adalah analisis statistik dengan menyajikan data dalam bentuk numerik dan grafik untuk mengetahui besaran persentase pengaruh pembangunan perumahan terhadap keberhasilan upaya melerai konflik nelayan.

KONFLIK NELAYAN SIDAKAYA BAKUNG DAN BONBARU

Beberapa konflik nelayan terjadi di Kabupaten Cilacap antara tahun 1977-1979. Nelayan-nelayan tradisional berkali-kali melakukan penyerangan terhadap nelayan-nelayan *trawl*. Mereka menganiaya orang-orang yang bekerja di atas kapal *trawl*, mengambil alih kemudi, dan menabrakkan kapalnya ke Pantai Teluk Penyu hingga tenggelam (Gani & Widodo, 2021).

Terbitnya Keppres nomor 39 Tahun 1980 memang memicu tindakan nelayan-nelayan tradisional di Kota Cilacap melakukan penghakiman massa terhadap kapal-kapal *trawl* yang tetap nekat beroperasi menggunakan pukat harimau. Berdasar keterangan narasumber, semua kapal pengguna jaring *trawl* semuanya milik WNI keturunan namun dioperasikan oleh WNI pribumi. Menurut keterangan Sukirno salah satu nelayan Sidakaya, ketakutan para pengusaha keturunan mendorong mereka menjual pukat harimau miliknya. Jaring-jaring tersebut dibeli oleh beberapa nelayan Bonbaru dari kawasan Sentolo Kawat. Kemudian, mereka menggunakan pukat harimau tersebut untuk operasi penangkapan ikan dengan kapal-kapal yang kemudian dikenal dengan sebutan *mini trawl*. Faktor utama, menurut Adhitama (2017), yang membuat sebagian oknum nelayan nekat menggunakan pukat harimau adalah keinginan memperoleh tangkapan ikan dalam jumlah yang lebih banyak, tetapi dengan cara yang mudah walaupun dengan merusak ekosistem bawah laut. Inilah yang menyulut terjadinya perang perahu.

Perang perahu sebenarnya bukan peristiwa peperangan yang menggunakan perahu, tetapi konflik antarnelayan terkait dengan kegiatan melaut dengan menggunakan perahu. Konflik itu sebenarnya lebih tepat disebut sebagai "perang alat tangkap" atau *gear war*, tetapi para nelayan Cilacap lebih mudah menyebutnya dengan tragedi "perang perahu" karena yang menjadi sasaran adalah perahu-perahu nelayan yang berkonflik. Menurut para pelaku peristiwa konflik, perang perahu berawal dari kejadian pada tahun 1977 yang dipicu oleh pemakaian pukat harimau oleh kapal-kapal *trammelnet* dan *gillnet* milik nelayan WNI keturunan. Kesenjangan penghasilan antara nelayan pribumi dan nelayan WNI keturunan yang menggunakan pukat harimau memicu kecemburuan sosial yang makin lama makin memanas. Tidak hanya di Cilacap, menurut Kusnadi (2002), pengoperasian pukat harimau di berbagai daerah memang menyulut konflik fisik di tengah laut. Amuk masa kerap terjadi karena penegakan hukum terhadap nelayan-nelayan yang tetap membandel menggunakan pukat harimau tidak segera dilakukan.

Penggunaan pukat harimau memang sangat merusak ekosistem dasar laut dan menimbulkan kecemburuan sosial para nelayan pribumi, apalagi setelah terbitnya Keppres Nomor 39 Tahun 1980 yang melarang kegiatan penangkapan ikan menggunakan pukat harimau. Pada tahun 1985 para nelayan pribumi berdemontrasi menuntut agar Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap menghentikan penggunaan pukat harimau. Nelayan-nelayan tradisional pun melakukan *sweeping* terhadap kapal-kapal milik nelayan WNI keturunan yang kedapatan beroperasi menggunakan pukat harimau. Peristiwa-peristiwa semacam itu memang rawan memicu tindakan yang menggunakan pola-pola responsif (memberikan respon dengan cepat), reaksi inkonvensional, dan menyimpang dari pola-pola umum (Sukardi, 2016). Oleh karena itu, konflik semacam itu dapat dipahami sebagai suatu akibat dari pertentangan yang terjadi antara apa yang diharapkan oleh seseorang atau sekelompok orang dan kenyataan yang terjadi (Muspawi, 2014). Penghakiman massa pun terjadi di tengah laut terhadap kapal-kapal *trawl*. Situasi demikian sejalan dengan penjelasan Rillus (2007) bahwa tingkat kebrutalan konflik dipengaruhi oleh isu konflik yang diangkat dan lambatnya proses penyelesaian. Jika isu konflik menyangkut sumber penghidupan dan proses penyelesaiannya berlarut-larut, konflik akan cenderung menjadi brutal. Hal itu menurut Subianto (2014) merupakan upaya perebutan sumber daya perikanan laut yang menyebabkan nelayan tradisional merasa sumber nafkahnya terancam karena tindakan pihak nelayan yang menggunakan pukat harimau sehingga konflik cenderung berlangsung makin keras, bahkan menjadi terbuka dan anarkistis. Tragedi tersebut memaksa Pemerintah Kabupaten Cilacap mempertemukan para nelayan di Kota Cilacap guna menyepakati penghentian pemakaian pukat harimau.

Kesepakatan penghentian pemakaian pukat harimau membuat para juragan kapal milik WNI keturunan yang biasa dipanggil *tauke* menjual pukat harimau miliknya kepada beberapa juragan kapal asal Bonbaru. Karena merasa sebagai bagian dari nelayan pribumi, beberapa juragan kapal Bonbaru memberanikan diri mengoperasikan pukat harimau. Salah satu alasan mereka adalah *fishing ground* dalam operasi pukat harimau di perairan dangkal tidak mengganggu operasi penangkapan ikan para nelayan lainnya di lautan yang lebih dalam. Kapal-kapal yang digunakan sebagian nelayan Bonbaru untuk mengoperasikan pukat harimau ukurannya lebih kecil daripada kapal-kapal milik para *tauke* WNI keturunan sehingga disebut dengan istilah mini *trawl*.

Perbuatan beberapa oknum nelayan Bonbaru memicu konflik baru karena di antara penyebab timbulnya konflik menurut Sulaiman (2013) adalah adanya perbedaan kelas antara nelayan yang menggunakan peralatan sederhana dan nelayan yang menggunakan peralatan modern sehingga mampu menguras sumber daya perikanan tanpa memperhitungkan kelestarian benih ikan. Implikasinya adalah terjadi kesenjangan pendapatan yang luar biasa. Karena merasa dikhianati oleh beberapa oknum nelayan dari Bonbaru yang tidak hanya membeli pukat harimau, bahkan mengoperasikannya meskipun di perairan dangkal, para nelayan Sidakaya marah. Secara serempak para nelayan Sidakaya melakukan tangkap tangan kapal-kapal mini *trawl* yang tengah beroperasi menggunakan pukat harimau. Langkah demikian sebenarnya kurang tepat, sebagaimana penjelasan Sembiring (2011) bahwa penyelesaian masalah dengan cara main hakim sendiri tidak akan menyudahi persengketaan, malah akan menyulut pertikaian yang lebih besar karena tiap-tiap pihak akan berusaha membalasnya.

Gambar 1. Jembatan Tempat Terjadinya Aksi Pelemparan Batu Tahun 1985.

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

Tindakan nelayan-nelayan Sidakaya tersebut menyulut kemarahan para nelayan Bonbaru. Memang konflik semacam itu akan terus memanas apabila muncul sikap berseberangan di antara kedua belah pihak sehingga tiap pihak memandang satu sama lainnya sebagai musuh (Wahyudi, 2015). Sebagai aksi balas dendam, para nelayan Bonbaru melakukan aksi pelemparan batu terhadap kapal-kapal nelayan Sidakaya yang berangkat atau pulang melaut dari atas jembatan yang berada di Muara Sungai Kaliyasa. Aksi pelemparan batu itu tentu melumpuhkan aktivitas melaut para nelayan Sidakaya. Kejadian itu menyulut konflik nelayan menjadi makin memanas.

Menurut Maniso, Ketua KUD Mino Saroyo Cilacap, konflik nelayan sebenarnya sudah dapat diselesaikan melalui rapat bersama yang diselenggarakan sekitar 2 bulan sejak awal meletusnya konflik. Musyawarah itu digelar di Kantor KUD Mino Saroyo yang melibatkan seluruh kelompok nelayan yang berada di Kota Cilacap, HNSI DPC Cilacap, dan aparat keamanan yang terkait. Penyelesaian konflik dengan musyawarah antarnelayan menurut Widiarto (2013) memiliki kelebihan, yaitu efektif karena dapat melancarkan komunikasi antarnelayan yang bertikai, biaya relatif murah, dan nelayan bisa diajak bersikap dewasa dalam menghadapi konflik. Namun, kelemahannya adalah apabila terjadi kebuntuan dalam penyelesaian masalah, hal itu cenderung memicu suasana yang tidak terkendali sehingga mengarah pada perbuatan destruktif.

Dalam rapat tersebut berhasil disepakati penghentian penggunaan pukat harimau. Kesepakatan tersebut sebenarnya sudah mengakhiri konflik nelayan yang berjalan sekitar 2 bulan. Penerapan pendekatan keadilan restoratif sebagai resolusi konflik memang lebih efektif apabila dilakukan dengan menggunakan pola-pola tradisional yang sejalan dengan kearifan lokal budaya. Namun, hal itu tetap berfokus pada pemenuhan keadilan melalui konsep kesetaraan, kemitraan, rekonsiliasi, dan partisipasi (Sukardi, 2016). Langkah-langkah yang ditempuh HNSI DPC Cilacap dan KUD Mino Saroyo sebenarnya sudah tepat karena konsep yang efektif dalam mengatasi konflik adalah dengan mengenal kesenjangan yang terjadi, mendiagnosis masalah yang memicu konflik, menyepakati suatu solusi dengan melibatkan semua pihak, melaksanakan kesepakatan, dan melakukan evaluasi langkah penyelesaian yang sudah dilaksanakan agar tidak melahirkan serangkaian masalah baru (Muspawi, 2014). Semua langkah dalam penyelesaian konflik sudah dilaksanakan sehingga potensi terulangnya kembali kasus serupa pada masa yang akan datang sangat kecil.

Jenis konflik antara warga nelayan Sidakaya Bakung dan warga nelayan Bonbaru dapat dikategorikan sebagai konflik eksternal (*external conflict*) yang menurut Coser *dalam* Zuldin, 2019 akan menciptakan berbagai batasan di antara kedua kelompok yang bertikai dalam sistem sosial dengan cara memperkuat bilah keterpisahan sehingga tercipta kesadaran identitas tiap-tiap kelompok. Isu utama konflik nelayan menurut Kinseng (2015) berkisar pada masalah *dominasi*, bukan *eksploitasi* karena esensi konflik yang terjadi pada masyarakat nelayan umumnya menyangkut *sumber penghidupan* atau masalah *hidup dan mati* sehingga arah konfliknya cenderung bernuansa konflik kekerasan dan destruktif. Perebutan sumber daya perikanan memunculkan kecemburuan sosial terhadap penggunaan pukat harimau karena terdapat kecenderungan bahwa pengoperasian alat tangkap tersebut memicu keserakahan segelintir nelayan dalam mengeksploitasi sumber daya perikanan (Mursyidah, 2018).

Gambar 2. Kaliyasa Batas Alam antara Bonbaru dan Sidakaya Bakung.

Sidakaya Bakung dan Bonbaru merupakan dua kawasan *basecamp* preman pada sekitar tahun 1980-an hingga 1990-an. Meskipun demikian, kedua kawasan tersebut tidak pernah terlibat konflik sebelum meletusnya perang perahu tahun 1985. Proses terbentuknya kelompok preman menurut Irmayani (2018) memiliki riwayat yang berbeda-beda sesuai dengan karakter, kepribadian, dan perasaan pada diri setiap individu yang secara kolektif berupaya untuk mencari kebahagiaan dan mempererat pertemanan, persatuan, dan pertahanan di dalam kelompoknya. Menurut Jamaludin (2017), para remaja tertarik untuk bergabung dengan suatu kelompok preman karena ingin mendapatkan pengakuan dari teman-teman sebayanya, menjadi jagoan yang diakui oleh kelompok yang lainnya, memiliki sarana menyalurkan ekspresi dan menampilkan eksistensi diri, serta merasa aman dan nyaman dalam bergaul.

Perang perahu memang sudah usai, tetapi kondisi masyarakat nelayan, baik di kawasan Sidakaya Bakung maupun kawasan Bonbaru pada saat itu masih jauh dari pengamalan ajaran agama. Kemudahan mencari uang dengan menjadi nelayan membuat masyarakat dari kedua kawasan tersebut lebih suka melaut daripada bersekolah. Setiap mendapatkan hasil yang berlimpah, mereka lebih sering menggunakannya untuk berfoya-foya dan mabuk-mabukan. Sekitar sebulan setelah konflik nelayan berhasil diselesaikan, terjadi senggolan antarkelompok pemuda dari kedua kawasan pada saat digelar pertunjukan dangdut di sekitar Alun-Alun Kota Cilacap yang berbuntut meletusnya tawuran antarremaja. Seakan-akan tawuran itu adalah episode lanjutan dari perang perahu. Meskipun demikian, menurut Sukirno, tidak ada hubungan sama sekali antara tawuran dan perang perahu. Tawuran tersebut berlangsung selama 2 bulan yang dampaknya menyulut dendam antarkelompok remaja dari kedua kawasan selama bertahun-tahun. Bentuk konflik sosial tersebut menurut Widyawati (2015) adalah konsumsi miras yang memicu kerusuhan antarwarga pada saat diadakan hiburan musik dangdut yang berujung pada perkelahian antar kelompok preman. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya konflik sosial tersebut, di antaranya, adalah perkembangan psikologi remaja dan perbedaan kepentingan antarkelompok.

Konflik tawuran antara remaja Bonbaru dan Sidakaya Bakung memang tidak terimbas langsung oleh konflik perang perahu. Namun, jeda waktu antara perang perahu dan tawuran antarremaja kedua kawasan tersebut hanya berselang beberapa bulan. Sisa-sisa trauma pada konflik perang perahu membuat warga nelayan Sidakaya Bakung tidak berani melaut sekitar 2 bulan.

Berdasarkan Gambar 3 diketahui bahwa komposisi usia responden, yakni 45—55 tahun adalah komposisi yang paling sering terlibat konflik di kedua daerah tersebut karena warga dengan komposisi usia demikian merupakan pelaku peristiwa perang perahu serta tawuran remaja pascaperang perahu.

Untuk mengatasi hal itu, diperlukan manajemen konflik yang berorientasi pada proses untuk mengarahkan terciptanya komunikasi antarpihak yang berkonflik sehingga mereka bisa saling memengaruhi dalam hal kepentingan (*interests*) dan interpretasi (Tualeka, 2017). Memang diakui bahwa proses interaksi sosial yang asosiatif setelah terjadinya konflik sangat sulit dibentuk. Salah satu faktor penyebabnya adalah masih adanya kekhawatiran warga untuk melakukan interaksi dengan warga lain yang pernah berkonflik (Susilo, 2021). Adanya perumahan yang dihuni oleh dua kelompok masyarakat yang berkonflik, mendorong terjalinnya komunikasi yang intens di antara mereka. Oleh karena itu, komunikasi

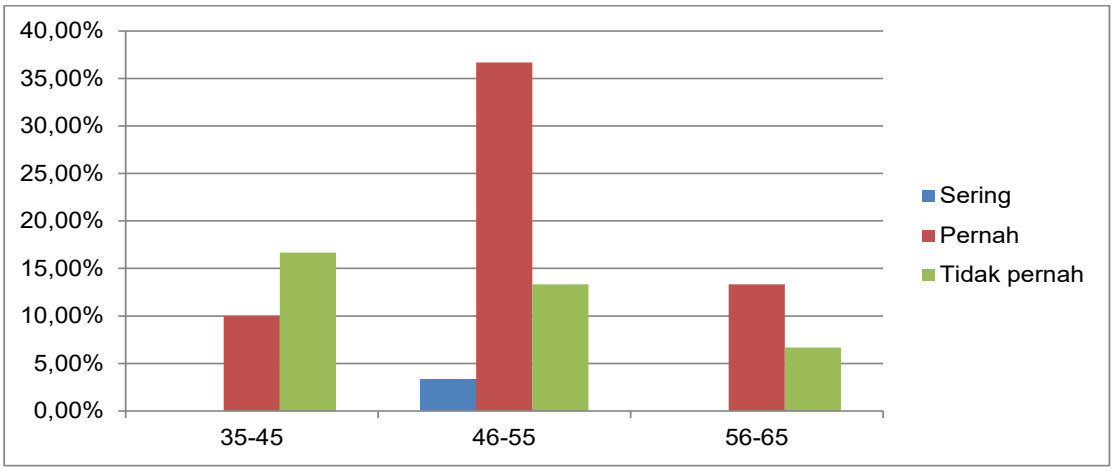

Gambar 3. Hubungan Usia Responden dengan Pengalaman Diintimidasi.

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

dan interaksi sebagai kebutuhan dasar manusia yang dilakukan antarwarga perumahan nelayan dan kaveling PPNC menjadi solusi terciptanya kerukunan antar warga. Frekuensi konflik antara warga nelayan Sidakaya Bakung dan Bonbaru terus menurun sejak dibangunnya PPNC sebagaimana hasil survei yang tersaji dalam Gambar 4.

Berdasarkan Gambar 4 diketahui bahwa frekuensi konflik antara warga Bonbaru dan warga Sidakaya Bakung setelah pembangunan PPNC cenderung menurun secara signifikan. Selain berbaur di kawasan pelabuhan, mereka juga berbaur di perumahan nelayan dan lahan kaveling PPNC yang diperuntukkan khusus bagi nelayan Bonbaru dan nelayan Sidakaya Bakung.

PENGARUH PEMBANGUNAN PERUMAHAN NELAYAN

Pelabuhan Perikanan Nusantara Cilacap (PPNC) yang sekarang sudah berkembang menjadi Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (PPSC) dibangun pada tahun 1991—1994. Pembangunan PPNC digagas oleh Direktorat Jenderal Perikanan untuk mengembangkan TPI Sentolokawat yang terhambat karena lokasinya berdekatan dengan dermaga dan lalu lintas kapal tanker Pertamina. Pembangunan PPNC dimulai pada tahun 1991/1992 dan selesai pada tahun 1994. Pada awalnya status PPNC ditetapkan sebagai pelabuhan perikanan tipe B (Nusantara) sesuai dengan persetujuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 86/M/PAN/4/2001 pada tanggal 4 April 2001. Dalam perkembangan selanjutnya statusnya meningkat menjadi PPSC sesuai dengan persetujuan (Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan, 2013). Seiring dengan pembangunan PPNC, Soewardi selaku Gubernur Jawa Tengah pada saat itu menginstruksikan pembangunan Perumahan Nelayan PPNC sebagai kompensasi pembatalan pengembangan TPI Sentolokawat (Bonbaru). Aset tanah di area perumahan PPNC adalah seluas 32.947 m^2 dengan lahan yang dibangun perumahan seluas 21.080 m^2 serta bangunan sebanyak 350 unit. Sementara itu, lahan seluas 11.867 m^2 digunakan untuk fasilitas umum, seperti jalan, saluran air, MCK, sekolah, masjid, dan ruang terbuka (Bintoro, 2019).

Menurut Parjo, Wakil Ketua HNSI Cilacap, pembangunan perumahan nelayan PPNC diperuntukkan bagi para nelayan Bonbaru yang lahannya digunakan oleh Pertamina. Sementara itu, narasumber lainnya menuturkan bahwa latar belakang pembangunan Perumahan PPNC adalah janji Gubernur Jawa Tengah yang akan membuka lahan perumahan bagi para nelayan Sidakaya Bakung karena padatnya penduduk di daerah Sidakaya Bakung. Pembangunan perumahan nelayan dimulai pada bulan Februari tahun 1992 dengan maksud agar bisa beriringan dengan rampungnya pembangunan PPNC. Type rumah yang disediakan adalah tipe 36. Tidak ada blok-blok khusus sehingga warga bisa lebih cepat berbaur. Pembangunan PPNC sebenarnya dimaksudkan untuk mengamankan jalur masuk kapal-kapal minyak dan kargo yang hendak berlabuh di Pelabuhan Tanjung Intan, Cilacap. Sebelum adanya PPNC, rata-rata nelayan Bonbaru melabuhkan kapal dan perahunya di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Sentolo Kawat yang terletak di persimpangan perairan Kalidonan dengan Muara Sungai Kaliyasa. Makin banyaknya jumlah kapal dan perahu nelayan yang bersandar di TPI Sentolo Kawat menyebabkan kapal-kapal tanker dan kargo kesulitan memasuki Pelabuhan Tanjung Intan.

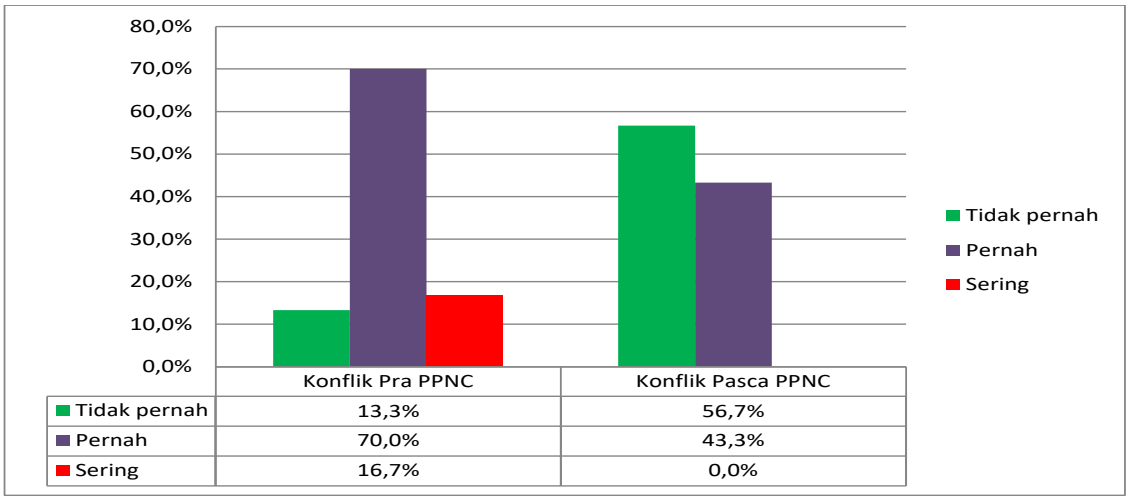

	Konflik Pra PPNC	Konflik Pasca PPNC
Tidak pernah	13,3%	56,7%
Pernah	70,0%	43,3%
Sering	16,7%	0,0%

Gambar 4. Frekuensi Konflik Sebelum dan Sesudah Pembangunan PPNC.

Gambar 5. Perumahan Nelayan PPNC.

Pembangunan PPNC pada tahun 1991—1994 yang kemudian dikembangkan menjadi Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (PPSC) pada tahun 2001 menyebabkan pendangkalan kawasan Muara Sungai Kaliyasa. Dampaknya banyak kapal nelayan yang tidak bisa lagi berlabuh di sepanjang Sungai Kaliyasa. Seandainya kapal- kapal mereka berlabuh di PPNC, tempat tinggalnya jauh dari PPNC. Hal ini menyulitkan mobilitas mereka ketika berangkat dan pulang melaut dengan membawa berbagai peralatan dan perbekalan. Oleh karena itu, pembangunan PPNC ini diikuti dengan pembangunan perumahan nelayan pada tahun 1992 yang diperuntukkan bagi warga nelayan Bonbaru dan warga nelayan Sidakaya Bakung yang membutuhkan rumah. Selain itu, pemerintah membagi-bagikan tanah kaveling secara cuma-cuma kepada warga nelayan Sidakaya Bakung dan warga nelayan Bonbaru yang masih ikut orang tua agar kelak pada saat mandiri sudah memiliki lahan untuk membangun rumah sendiri. Pembauran antara warga nelayan dari dua kawasan yang rawan berkonflik menurunkan ketegangan di antara warga nelayan dari kedua kawasan tersebut.

Mayoritas responden menyebutkan bahwa kebutuhan bersosialisasi dengan cara berbaur dan berinteraksi saling membutuhkan tanpa ada rasa curiga dan tanpa menyimpan dendam sebagai faktor utama yang mampu menciptakan kerukunan. Hal itu karena berbaurnya mereka telah membentuk komunitas yang baru, yang sejalan dengan pengertian masyarakat menurut Jamaludin (2017), yaitu kumpulan individu yang saling berinteraksi, saling membutuhkan, dan hidup dalam suatu daerah dalam kurun waktu yang lama. Dengan demikian, manusia harus menyatu dengan manusia lainnya untuk memudahkan mereka menjalani kehidupannya dengan cara membangun interaksi sosial (Darwis, 2022).

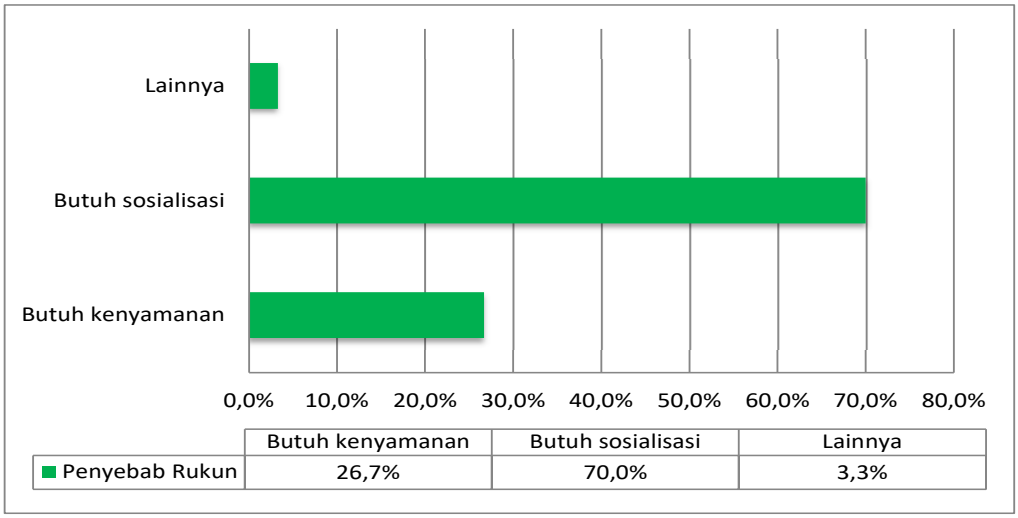

Gambar 6. Faktor-Faktor yang Menciptakan Kerukunan.

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

Dalam kehidupan sosial di tengah masyarakat, menurut Sari (2013), terkadang seseorang masih diliputi rasa curiga dan tidak percaya diri yang membuatnya tidak berani menyampaikan berbagai gejolak, potensi, kemampuan, atau emosinya kepada orang lain. Kebutuhan berbaur dan berinteraksi tanpa ada rasa curiga merupakan faktor paling dominan yang membuat warga nelayan dari dua kawasan yang bermusuhan bisa rukun. Meskipun demikian, responden dengan penghasilan di atas upah minimum kabupaten (UMK) cenderung menggunakan kebutuhan atas rasa aman dan nyaman sebagai alasan terciptanya kerukunan. Rata-rata responden yang memiliki penghasilan di atas UMK adalah juragan atau pemilik kapal, sehingga mereka membutuhkan rasa aman dan nyaman agar usahanya bisa berjalan dengan lancar. Hal itu berbeda dengan responden yang penghasilannya di bawah UMK. Mereka cenderung menggunakan alasan kebutuhan untuk bersosialisasi dan berinteraksi antarwarga perumahan PPNC sebagai alasan kerukunan. Hal itu terjadi karena interaksi sosial merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia hanya bisa bertahan hidup dengan melakukan interaksi sosial (Xiao, 2018). Oleh karena itu, warga perumahan nelayan dan kaveling dapat berbaur dan menyatu karena saling membutuhkan untuk berinteraksi sosial tanpa ada rasa curiga dan tanpa menyimpan dendam sehingga bisa hidup nyaman dan tidak perlu takut diserang atau diintimidasi.

Pendirian perumahan nelayan PPNC dan pembagian tanah kaveling di kawasan PPNC memang tidak terkait dengan upaya merukunkan warga kedua daerah yang rawan berkonflik. Namun, dampaknya sangat terasa dengan terciptanya kerukunan antarpenghuni perumahan nelayan dan tanah kaveling yang berasal dari kedua kawasan tersebut. Proses interaksi antarwarga menciptakan *mindfulness* yang menjadi pondasi terciptanya toleransi hubungan bertetangga yang erat, saling memotivasi, dan saling membantu yang membuat mereka merasa tenang dalam hidup sehingga dapat melakukan aktivitas rutin dengan normal (Prathama, 2017).

Berdasarkan Gambar 7 diketahui bahwa 80% responden menyatakan bahwa pembangunan perumahan PPNC efektif merukunkan nelayan yang berasal dari kedua kawasan yang rawan berkonflik. Bahkan, 13,3% di antaranya menyatakan bahwa itu sangat efektif. Namun ada 6,7% responden yang menyatakan tidak efektif karena mereka tidak terlibat dalam konflik, bahkan tidak mengalami peristiwa perang perahu maupun tawuran antar kampung.

Pertemuan warga Bonbaru dan warga Sidakaya Bakung di Perumahan PPNC membuat mereka merasa perlu untuk bersosialisasi, berinteraksi, dan hidup rukun. Interaksi sosial yang positif memang berpotensi menciptakan suatu kerja sama (*cooperation*) yang dapat mempermudah terjadinya asimilasi (Pratiwi, 2016). Komunikasi yang baik dapat menjadi media yang efektif dalam penyelesaian konflik (Lompoliu, 2015). Berdasarkan hasil survei, diperoleh data bahwa kerukunan warga Bonbaru dengan Sidakaya Bakung di Perumahan PPNC disebabkan oleh kebutuhan bersosialisasi antarwarga. Dengan demikian, secara tidak langsung pembangunan Perumahan PPNC terbukti efektif melerai konflik bertahun-tahun antara warga Bonbaru dan Sidakaya Bakung.

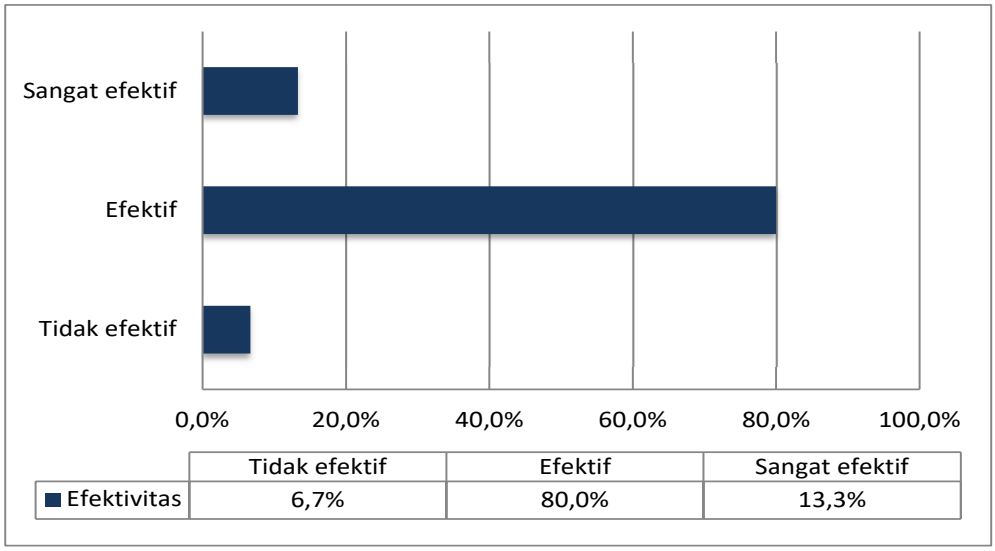

Gambar 7. Tingkat Efektivitas Perumahan PPNC dalam Merukunkan Warga Nelayan.

Pada Gambar 8 menunjukkan bahwa peran perumahan PPNC dalam merukunkan para remaja dari kedua daerah tersebut dinilai efektif oleh 60% responden, bahkan 23,3% menyatakan sangat efektif. Meskipun demikian ada 16,7% responden yang menyatakan tidak efektif karena memandang kerukunan antar nelayan bukan disebabkan adanya perumahan nelayan namun lebih kepada kebutuhan berinteraksi sosial antar warga dua kampung yang bertikai. Hasil survei tersebut sejalan dengan teori penyelesaian konflik dengan menggunakan metode pengurangan konflik. Menurut Wahyudi (2015), metode pengurangan konflik merupakan upaya mengurangi tingkat permusuhan, yaitu dengan cara mengelola konflik melalui pendinginan suasana dengan menggunakan sesuatu yang tidak berhubungan sama sekali dengan permasalahan awal yang memicu terjadinya konflik.

HUBUNGAN TAWURAN REMAJA DENGAN PERISTIWA PERANG PERAHU

Tawuran antarkelompok remaja Sidakaya Bakung dengan Bonbaru tidak terkait dengan peristiwa perang perahu. Namun, waktu kejadiannya yang berurutan menciptakan kesan bahwa terdapat kesinambungan antara kedua konflik tersebut. Hal itu didukung oleh rata-rata remaja yang berkonflik berprofesi sebagai nelayan. Hal itu juga didukung dengan hasil survei yang menyatakan bahwa komposisi usia responden 45—55 tahun paling sering terlibat konflik tawuran antarkedua daerah. Mereka adalah pelaku sejarah yang mengalami langsung peristiwa perang perahu dan tawuran remaja setelah perang perahu. Seiring berjalannya usia dan terjadinya pembauran di perumahan nelayan serta tanah kaveling, tingkat permusuhan mereka makin berkurang, bahkan menurun secara drastis hingga berubah menjadi interaksi saling membutuhkan tanpa melibatkan rasa curiga dan tanpa mengungkit dendam masa lalu.

Pembangunan perumahan nelayan menjadi solusi untuk merukunkan kedua kelompok yang bertikai. Perumahan dan tanah kaveling di PPNC memang diperuntukkan bagi keluarga nelayan Bonbaru yang lahannya akan digunakan oleh Pertamina dan nelayan Sidakaya yang penduduknya sudah sangat padat. Pertemuan warga dari kedua daerah yang bertikai menciptakan interaksi positif yang mampu mendinginkan tingkat permusuhan di antara mereka. Proses integrasi antar warga dari dua kampung di Perumahan PPNC dimulai dengan posisi rumah mereka yang bersebelahan sehingga mengharuskan mereka berinteraksi baik secara individual maupun dalam pertemuan pertemuan RT, Karangtaruna dan arisan Dasawisma. Kebutuhan bersosialisasi serta saling membantu tanpa rasa curiga dan tanpa menyimpan dendam menciptakan kerukunan di antara warga kedua daerah tersebut. Hal itu didukung oleh hasil survei yang menyebutkan bahwa 70% responden mengatakan bahwa kebutuhan bersosialisasi di lingkungan perumahan merupakan faktor dominan yang mendorong terciptanya kerukunan. Berdasarkan pernyataan tersebut, sebanyak 80% responden menilai bahwa pembangunan Perumahan PPNC efektif merukunkan para nelayan dari kedua daerah, bahkan 13,3% menyatakan sangat efektif. Hasil survei juga menyebutkan bahwa sebanyak 60% responden menilai bahwa pembangunan perumahan tersebut efektif merukunkan para remaja yang bertikai, bahkan 23,3% menyatakan sangat efektif.

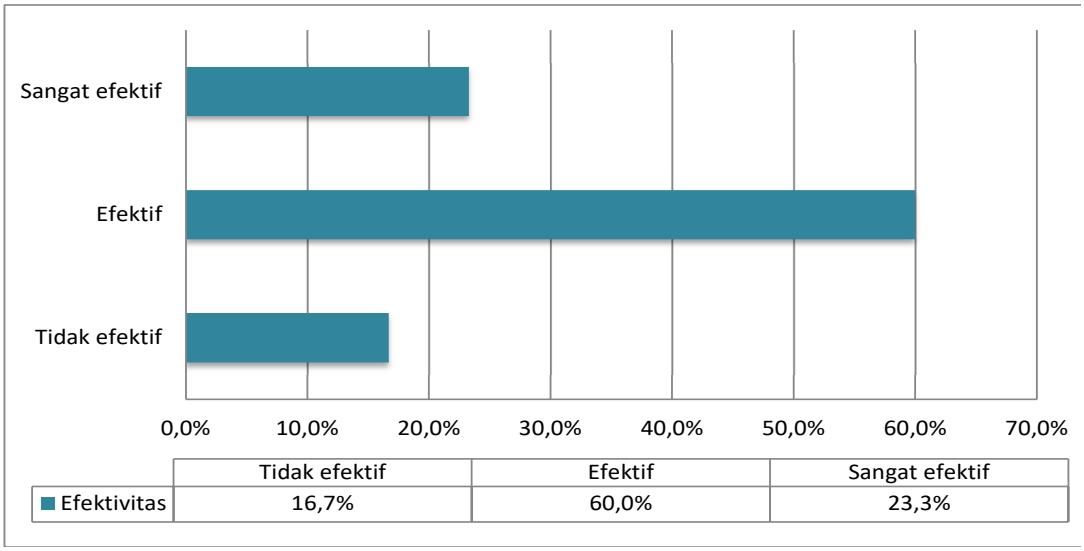

Gambar 8. Tingkat Efektivitas Perumahan dalam Merukunkan Remaja.

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

Meskipun demikian, menurut Arief (2022), konflik di tengah masyarakat memang akan terus berpotensi muncul kembali selama masih ada perbedaan kepentingan, latar belakang ekonomi, dan kondisi sosial budaya. Namun, konflik tidak harus dimaknai sebagai pertikaian atau permusuhan, tetapi bermakna kompetisi, ketegangan, atau ketidaksepahaman. Dengan demikian, langkah-langkah konsiliasi untuk menghilangkan dendam dan memupus sikap saling curiga perlu diupayakan.

IMPLIKASI KEBIJAKAN

Perang perahu yang melibatkan nelayan Bonbaru dan nelayan Sidakaya Bakung yang terjadi pada tahun 1985 dan kemudian diikuti tawuran antarpemuda dari kedua kampung telah menciptakan nuansa permusuhan hingga bertahun-tahun. Pertikaian tersebut benar-benar terhenti ketika pemerintah membuka kawasan perumahan nelayan dan pembagian kaveling di wilayah PPNC. Tingkat efektivitas pembangunan perumahan yang cukup signifikan dalam menciptakan kerukunan lebih banyak disebabkan oleh pembauran mereka di lingkungan perumahan. Dengan demikian, pembangunan perumahan nelayan mampu menjadi media untuk mengurangi potensi konflik, yaitu melalui pendinginan suasana dan pemenuhan kebutuhan untuk bersosialisasi dengan aman dan nyaman tanpa rasa curiga dan tanpa menyimpan dendam.

Langkah-langkah inovatif dalam penyelesaian konflik semestinya menjadi sebuah terobosan baru di bidang sosial karena terbukti efektif melerai berbagai pertikaian yang terjadi. Penyelesaian konflik dengan cara yang bijaksana seperti dalam konsep pembauran di Perumahan PPNC membuat semua pihak sadar tentang kebutuhan tiap-tiap individu dan kelompok untuk bersosialisasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih penulis ucapkan kepada HNSI DPC Kabupaten Cilacap; KUD Minosaroyo, Kabupaten Cilacap; warga Sidakaya Bakung; dan warga Bonbaru yang senantiasa menjaga kerukunan dengan tidak mewariskan konflik kepada generasi selanjutnya. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada tim editor dan mitra bestari (reviewer) atas saran dan masukan untuk perbaikan makalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

Adhitama, I. (2017). Implementasi kebijakan pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan puket hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) di wilayah pengelolaan perikanan Negara Rebuplik Indonesia. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, *8*(2), 7—18.

Arief, A.A. (2022). Monograf pola rekonsiliasi konflik nelayan (sebuah fakta pertikaian di laut), (cetakan pertama). Deepublish. ISSN 978-623-02-4383-7.

Bintoro, D.R. (2019, 25 Januari). Bupati serahkan sertifikat tanah untuk warga perumahan PPC. Diakses dari https://kominfo.cilacapkab.go.id/bupati-serahkan-sertifikat-tanah-untuk-warga-perumahan-ppc/.

Darwis, A. (2022). *Sistem sosial masyarakat kota.* doi: *10.31219/osf.io/jsn8a.*

Disliutkan Kalteng. (2022). Konflik nelayan pengguna jaring lempira dasar (trawl mini), di wilayah perairan Kalimantan Tengah. https://dislutkan.kalteng.go.id/berita-detail/konflik-nelayan-pengguna-jaring-lempara-dasar-trawl-mini-diwilayah-perairan-kalimnatan-tengah (diakses 17 November 2022).

Eayrs, S. (2005). Pedoman untuk mengurangi hasil tangkap sampingan (HTS) pada perikanan pukat-hela (trawl) udang perairan tropis. (Cetakan Pertama). Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Gani, R.A., & Widodo, S.K. (2021). Perubahan penggunaan alat tangkap nelayan dan pengaruhnya terhadap aktivitas kenelayanan di Kabupaten Cilacap, 1970-1985. *Historiografi*, *2*(1), 50-56. E-ISSN: 2774-3128

Irmayani, N.R. (2018). Fenomena kriminalitas remaja pada aktivitas geng motor. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial, 4(2).* https://doi.org/10.33007/inf.v4i2.1220

Jamaludin, A.N. (2015). Sosiologi perkotaan: Memahami masyarakat kota dan problematikanya. (Edisi Kedua). CV Pustaka Setia. ISBN: 978–979–076–518–4.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring *Trawl*.

Kinseng, R.A. (2014). Konflik nelayan. (Cetakan Pertama). Yayasan Pustaka Obor Indonesia. ISBN: 978-979-461-909-4.

Warta. (2019). Konflik Nelayan Trawl VS Nelayan Tradisional Bengkulu. https://www.klikwarta.com/konflik-nelayan-trawl-vs-nelayan-tradisional-bengkulu (diakses 17 November 2022).

Kusnadi, M. A. (2002). Konflik sosial nelayan, kemiskinan dan perebutan sumber daya perikanan. (Cetakan Pertama). LKIS Pelangi Aksara. ISBN: 979-9492-68-8.

Lompoliu, R.A., & Pasoreh, Y. (2015). Peran komunikasi dalam menyelesaikan konflik diantara remaja di Desa Sendangan, Kecamatan Kakas. *Acta Diurna Komunikasi*, *4*(3). https://ejournal.

unsrat.ac.id/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/7714/7279.

Mursyidah, I. (2018). Konflik penggunaan cantrang masyarakat nelayan di Kabupaten Rembang tahun 1996-2015 (Disertasi). Universitas Diponegoro. https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/4122.

Muspawi, M. (2014). Manajemen konflik (upaya penyelesaian konflik dalam organisasi), *16*. Jambi University. ISSN:0852-8349.

Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan. (2013). Sejarah pelabuhan perikanan Cilacap. https://pipp.djpt.kkp.go.id/profil_pelabuhan/1293/informasi .

Prathama, N.A. (2017). Negosiasi identitas dalam rekonsiliasi konflik antaretnis (Kasus: Relasi etnis madura dengan Etnis Dayak). *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, *6*(1), 110—119. https://doi.org/10.14710/interaksi.6.1.110-119.

Pratiwi, P.H. (2009). *Asimilasi dan akulturasi: Sebuah tinjauan konsep*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. http://staffnew.uny.ac.id/upload/132326892/pengabdian/asimilasi-akulturasi.pdf

Sukardi. (2016). Penanganan konflik sosial dengan pendekatan keadilan restoratif. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *46(1)*, 70—89. http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol46.no1.49.

Kinseng, R.A. (2007). Konflik-konflik sumberdaya alam di kalangan nelayan di Indonesia. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, *1*(1). https://doi.org/10.22500/sodality.v1i1.5936.

Sari, V.K. (2013). Pengaruh penyesuaian diri terhadap aktualisasi diri remaja di lembaga permasyarakatan anak Blitar. *PSIKOVIDYA*, *17*(1). http://psikovidya.wisnuwardhana.ac.id/index.php/psikovidya/article/view/37.

Sembiring, J. J. (2011). Cara menyelesaikan sengketa di luar pengadilan: negosiasi, mediasi, konsiliasi, & arbitrase, (Cetakan Pertama). Penerbit Visimedia. ISBN 9789790650909.

Subianto, A. (2014). Konflik nelayan dalam tiga rezim. Penerbit Brilliant. http://dspace.hangtuah.ac.id/xmlui/handle/dx/577.

Sulaiman. (2013). Model penyelesaian konflik alat tangkap perikanan di Aceh Barat. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 99—113. ISSN: 0854-5499.

Susilo, S., Nugraheni, I. L., Mentari, A., & Nurhayati, N. (2021). Analisis Interaksi Sosial Terhadap Perilaku Masyarakat Pasca Konflik Antar Etnik Di Kabupaten Lampung Selatan. Jurnal Civic Hukum, 6(1). https://doi.org/10.22219/jch.v6i1.13907.

Widodo, S.K., Wahyudi, S.S., Sugiyarto., & Sundari, W. (1997). Identifikasi terhadap konflik terbuka pada masyarakat nelayan di Kabupaten Rembang: Kasus di Desa Pasarbanggi. *Laporan Penelitian*. http://eprints.undip.ac.id/21644/2/542-ki-fs-98-a.pdf.

Tualeka, M.W.N. (2017). Teori konflik sosiologi klasik dan modern. *Al-Hikmah*, *3*(1), 32—48. http://dx.doi.org/10.30651/ah.v3i1.409.

Wahyudi, A. (2015). Konflik, konsep teori dan permasalahan. *Publiciana*, *8*(1), 38—52. https://journal.unita.ac.id/index.php/publiciana/article/view/45.

Widiarto, A.E., Nurdayasakti, S., & Sulistio, F. (2013). Mekanisme penyelesaian konflik nelayan (studi di Pantai Puger, Kabupaten Jember). *Jurnal Hukum PRIORIS*, *3*(2), 60—69. https://doi.org/10.25105/prio.v3i2.363.

Widyawati, A. (2015). Akar konflik dalam masyarakat multikultural di Karimun Jawa. *Yustisia Jurnal Hukum*, *4*(3), 602—616. https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i3.8692.

Xiao, A. (2018). Konsep interaksi sosial dalam komunikasi, teknologi, masyarakat. *Jurnal Komunika: Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika*, *7*(2), 94—99. http://dx.doi.org/10.31504/komunika.v7i2.1486.

Zuldin, M. (2019). Ketimpangan sebagai penyebab konflik: Kajian atas teori sosial kontemporer. *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial*, *2* (1), 157—183. https://doi.org/10.15575/jt.v2i1.4050.

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

Persepsi Masyarakat Untuk Pengembangan Wisata Berkelanjutan di Pesisir Madura

Community Perception for the Development of Sustainable Tourism on Coastal Madura

***Ris Yuwono Yudo Nugroho dan Mochammad Reza Adiyanto**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura
Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69162, Indonesia

ARTICLE INFO

Diterima tanggal : 2 Februari 2023
Perbaikan naskah: 27 April 2023
Disetujui terbit : 26 Mei 2023

*Korespodensi penulis:
Email: ris.nugroho@trunojoyo.ac.id

DOI: http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v13i1.12285

ABSTRAK

Pemerintah Kabupaten Bangkalan menyusun rencana untuk mengoptimalkan potensi wilayah pesisir melalui pembangunan wisata berkelanjutan di Desa Tajungan. Dalam hal ini, pelibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan terkait merupakan hal yang sangat relevan. Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi persepsi masyarakat, terutama mengenai dampak terkait, yang harus diprioritaskan penanganannya oleh pengambil kebijakan. Terdapat tiga kriteria dampak pengembangan pariwisata berkelanjutan, baik positif maupun negatif, yang dijadikan fokus perhatian dalam penelitian ini, yaitu dampak ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Pendekatan penelitian bersifat kuantitatif, dengan pemilihan responden secara *purposive*. Jumlah responden sebanyak 25 orang dari 8 kategori. Model yang diacu dalam penelitian ini adalah *Analytic Hierarchy Process*. Hasil menunjukkan bahwa dampak positif yang menjadi harapan masyarakat dan harus menjadi prioritas perhatian adalah dampak ekonomi berupa dorongan untuk perkembangan kewirausahaan, dampak sosial budaya terkait penambahan infrastruktur baru, dan dampak lingkungan peningkatan kesadaran lingkungan. Sementara itu, dampak negatif yang menjadi kekhawatiran utama masyarakat dan perlu menjadi fokus perhatian pengambil kebijakan adalah dampak ekonomi terkait ketergantungan terhadap pencaharian berbasis pariwisata, dampak sosial berupa tekanan infrastruktur dan kemacetan. Implikasi kebijakan dari hasil-hasil tersebut adalah: perlunya program-program untuk mendorong kewirausahaan, misalnya melalui penyelenggaraan pelatihan dan pembimbingan usaha, dan penguatan modal usaha. Sisi infrastruktur perlu didukung dengan alokasi anggaran khusus yang diarahkan pada perbaikan jalan dan infrastruktur desa. Untuk aspek lingkungan, hasil penelitian mengarah pada implikasi tentang perlunya upaya masif untuk peningkatan kesadaran masyarakat tentang berbagai aspek lingkungan.

Kata Kunci: persepsi; wisata berkelanjutan; pesisir; Bangkalan; Madura

ABSTRACT

The government of Bangkalan Regency has developed a plan to optimize the potential of the coastal area of Tajungan Village for sustainable tourism development. In this case, it is relevant to involve community in formulating related policies. The research aims to identify public perceptions, especially regarding the related impacts, that must be put in priority for by policymakers. There are three criteria of the impact of sustainable tourism development, both positive and negative, which are the focus in this study, namely economic, sociocultural, and environmental impacts. The research approach is quantitative, with a purposive selection of respondents. The number of respondents was 25 people from 8 categories. The study refer to the model of Analytic Hierarchy Process. The results of the study showed that the positive impacts, which are expected by the community and must be put in priority, are economic impacts in the form of encouragement for entrepreneurial development, sociocultural impacts related to the addition of new infrastructure and environmental impacts of increasing environmental awareness. The negative impacts, which become the community's main concern and need to be the focus of policymakers, are economic impacts related to dependence on tourism-based livelihoods and social impacts in the form of pressure on infrastructure and congestion. Policy implications of those results are the need for entrepreneurship programs include business training and mentoring, and capital reinforcement. The infrastructure must be encourage with financial support to improve roads and village infrastructure. For environmental aspects, implications regarding the need for massive efforts to increase public awareness of various environmental aspects.

Keywords: *perception; sustainable tourism; coastal; Bangkalan; Madura*

PENDAHULUAN

Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu tujuan wisata di Jawa Timur yang diminati oleh wisatawan. Paling tidak terdapat 20 objek wisata yang berada Kabupaten tersebut. Di antara jenis wisata yang ada di Bangkalan, wisata religi yang paling banyak menarik wisatawan. Jenis wisata tersebut ditunjang dengan keberadaan makam ulama terkenal seperti Pasarean Syaichona Cholil dan Pasarean Aer Mata Ebhu. Selain wisata religi, terdapat pula wisata sejarah seperti museum, mercusuar, dan situs benteng kolonial. Terdapat pula sentra industri batik tulis yaitu di Kecamatan Tanjung Bumi, yang

tidak kalah menarik minat wisatawan baik domestik maupun mancanegara (BPS, 2021).

Pada tahun 2020, jumlah wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Bangkalan adalah 961 ribu orang wisatawan domestik dan 39 orang wisatawan mancanegara. Jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2018, jumlah wisatawan domestik mencapai 2,4 juta dan wisatawan mancanegara sebanyak 165 orang (BPS,2019). Oleh karena itu terjadi penurunan yang cukup berarti. Penurunan tersebut terjadi karena adanya Pandemi Covid-19. Kondisi penurunan tersebut menimbulkan kesadaran *stakeholder* di Kabupaten Bangkalan untuk memanfaatkan seluruh modal dasar pembangunan yang dimiliki, sebagai sumber kekuatan perekonomian agar dapat didayagunakan dalam pembangunan.

Salah satu modal dasar yang dimiliki Kabupaten Bangkalan adalah potensi panjang pantai sepanjang 125 km (Bappeda, 2019), yang dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata berkualitas. Adanya objek-objek wisata tersebut, berpotensi untuk dikelola dan menjadi daya tarik wisatawan, baik nusantara maupun mancanegara. Untuk lebih mengoptimalkan pengembangan objek wisata tersebut, perlu ditambah fasilitas infrastruktur yang saat ini hanya berjumlah 5 hotel hotel dan losmen, termasuk melakukan revitalisasi objek-objek wisata yang sudah berkembang, baik wisata alam maupun buatan.

Salah satu wilayah kecamatan di Bangkalan yang berpotensi untuk dikembangkan sektor pariwisatanya adalah Kecamatan Kamal. Meski memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai dibandingkan dengan kecamatan lainnya, di dalam catatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun 2020, Kecamatan Kamal belum memiliki objek wisata unggulan. Melalui pengembangan badan usaha milik desa (bumdes) dan kelompok sadar wisata (pokdarwis), beberapa desa di Kecamatan Kamal mulai menggerakkan sektor pariwisata. Salah satu desa yang bergerak dan memperlihatkan hasil adalah Desa Tajungan.

Desa Tajungan memiliki luas wilayah 0,08 km persegi, dan merupakan desa dengan luas wilayah terkecil di Kecamatan Kamal. Jarak Desa Tajungan ke ibukota kecamatan dapat ditempuh sejauh 2 km (BPS, 2022), dengan waktu tempuh sekitar 15 menit menggunakan kendaraan bermotor, yang pada saat penelitian dilakukan, jalan tersebut dalam kondisi kurang baik. Berdasarkan monografi Desa Tajungan tahun 2014 (Hayati, 2015), pekerjaan utama penduduk desa adalah ibu rumah tangga sebesar 33%, nelayan sebesar 16%, swasta sebesar 7%, pedagang 3%, wiraswasta sebesar 1%, tukang bangunan 1%, dan PNS yang jumlahnya tidak signifikan. Dalam monografi tersebut, tercatat jumlah pelajar dan mahasiswa sebesar 21%, dan 18% pengangguran, yaitu orang yang belum memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Nelayan Tajungan dapat dibedakan menjadi nelayan pencari ikan saja, dan nelayan yang merangkap sebagai penyeberang penumpang.

Wisata mangrove yang ada sekarang di Desa Tajungan, direncanakan akan dipadukan dengan wisata kuliner dan pusat olahraga. Area tersebut diharapkan menjadi menjadi area terlengkap yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bangkalan dengan alokasi anggaran dari dana desa, yaitu melalui Bumdes dan Pokdarwis. Selain wisata mangrove, Desa Tajungan terkenal dengan tradisi perahu hias, yang dilaksanakan pada setiap hari raya ketupat, dan juga terdapat lomba balap perahu yang disponsori oleh pihak swasta. Potensi lain yang dapat dikembangkan adalah adanya ojek perahu menuju ke pelabuhan di Gresik, baik menuju ke dermaga Gresik, maupun ke pelabuhan rakyat lumpur Gresik.

Dalam mengembangkan wisata, perlu diperhatikan dampak pariwisata terhadap masyarakat lokal dan lingkungan. Pembangunan pariwisata yang tidak berkelanjutan dapat menimbulkan dampak negatif seperti kerusakan lingkungan, ketimpangan ekonomi, dan hilangnya identitas budaya lokal. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dengan memperhatikan kriteria yang mengacu pada aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya, serta keseimbangan di antara ketiganya untuk menjamin keberlanjutannya dalam jangka panjang. Perlu dilakukan upaya untuk melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan budaya setempat secara berkelanjutan (UNWTO, 2023).

Penelitian Choi dan Sirakaya (2005), tentang sikap penduduk terhadap pembangunan pariwisata, memberikan kesimpulan tentang adanya pergeseran paradigma dari pariwisata konvensional ke pariwisata berkelanjutan. Riset lain tentang pembangunan pariwisata dengan memperhatikan aspek berkelanjutan dilakukan antara lain oleh Weaver dan Lawton (2007), Tsundoda dan Mendlinger (2009), Aref *et al*. (2009), Musinguzi (2012) dan Wasudawan *et al*. (2021). Beberapa riset tentang pembangunan potensi wisata di Bangkalan seperti dilakukan oleh Maulana dan Hasyim (2019), Apridia dan Dahruji (2022), Wulandari

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

(2020) dan Atika *et al*. (2022), memberikan gambaran tentang potensi pengembangan wisata di Kabupaten Bangkalan, tetapi belum mengarah pada pembangunan pariwisata berkelanjutan. Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi persepsi masyakarat, terutama mengenai dampak terkait, yang harus diprioritaskan penanganannya oleh pengambil kebijakan dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Desa Tajungan.

Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan prosedur pemilihan responden secara *purposive*. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan wawancara terstruktur. Terdapat 8 (delapan) kategori terkait dengan dampak pengembangan wisata desa, yaitu responden dari dinas pariwisata, pengelola wisata di tempat lain sebagai *benchmark*, pengelola wisata, perangkat desa, karang taruna, pemilik perahu transportasi, serta dari kategori masyarakat lainnya. Apabila dikelompokkan berdasarkan asal responden, maka responden dibagi menjadi 2 (dua), yaitu responden yang berasal dari luar desa, dan responden yang berasal dari dalam Desa Tajungan. Responden dari luar desa merupakan ekspert atau ahli, karena berhubungan langsung dengan kebijakan pengembangan pariwisata, berjumlah 4 responden. Responden yang berasal dari dalam, merupakan masyarakat yang sehari-hari terdampak langsung dari pengembangan wisata Desa Tajungan. Pemilihan jumlah 21 responden dari dalam, sejalan dengan penelitian Nyumba *et al*. (2018) tentang jumlah anggota FGD (*Focus Group Discussion*) dalam satu kelompok, yang memperbolehkan antara 8 sampai dengan 21 orang. Tabel 1 mendeskripsikan kategori responden, jumlah responden, serta asal responden, dari dalam atau dari luar desa.

Tabel 1. Sebaran Responden Dampak Wisata.

No	Kategori	Jumlah Responden	Asal
1	Dinas Pariwisata Kabupaten	1	Luar
2	Pengelola Mangrove Benchmark	1	Luar
3	Pengelola Paket Wisata	2	Luar
4	Pengelola Mangrove Tajungan	3	Dalam
5	Perangkat Desa Tajungan	4	Dalam
6	Karang Taruna	4	Dalam
7	Nelayan Pemilik Perahu	3	Dalam
8	Masyarakat lainnya	7	Dalam
Total		**25**	

Sumber: Data olahan tim peneliti

Analisis dilakukan menggunakan model *Analytic Hierarchy Process* (AHP). Model ini digunakan untuk mengetahui keputusan yang akan diambil dengan memilih yang terbaik dari alternatif yang dievaluasi, berkaitan dengan sejumlah kriteria (Saaty & Vargas, 2012). Skala pengukuran yang digunakan menggunakan skala Satty's. Skala ini bertujuan mengidentifikasi alternatif yang paling signifikan dalam pengambilan keputusan. Garcia-Melon *et al.* (2012), menggunakannya untuk menentukan pilihan tiga strategi pariwisata berkelanjutan. Penelitian oleh Falcone (2019) menggunakan AHP untuk menghasilkan informasi pendorong potensial dan penghambat industri pariwisata. Lee *et al.* (2021) menggunakannya untuk mengembangkan indikator penilaian pariwisata berkelanjutan di Taiwan. Yang (2022) menggunakan AHP untuk mengevaluasi kinerja pelayanan wisata perdesaan di China. Noosut *et al.* (2023) menggunakan untuk menentukan urutan prioritas dari indikator wisata berbasis masyarakat di Thailand.

Prinsip dasar *Analytic Hierarchy Process* (AHP) adalah (1) Dekomposisi, yaitu menstrukturkan masalah yang kompleks menjadi kerangka hirarki atau jaringan kluster, sub-kluster, sub-sub kluster, dan seterusnya (Gambar 1); (2) penilaian komparasi, yaitu membangun pembandingan pasangan (*pairwise comparison*) dari semua kombinasi elemen-elemen dalam kluster dilihat dari cluster induknya untuk mendapatkan prioritas lokal, dan (3) Komposisi atau Sintesis, yaitu mengalihkan prioritas lokal dari elemen-elemen dalam kluster dengan prioritas dari elemen induk, yang akan menghasilkan prioritas global seluruh hirarki.

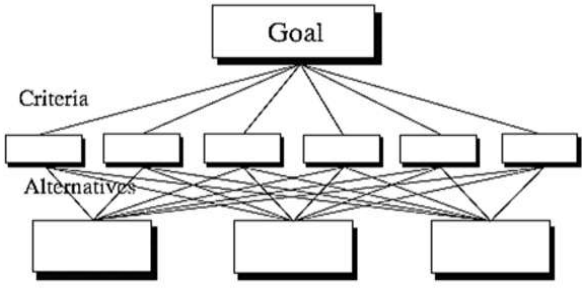

Gambar 1. Gambaran Umum Model AHP.
Sumber: Saaty dan Vargas (2013)

Dalam model AHP terdapat prinsip konsistensi, yaitu: (1) Kemungkinan terjadi inkonsistensi dalam mengukur preferensi komparasi pasangan, (2) Adanya transitivitas, yaitu jika a1 > a2 dan a2 > a3, maka a1 > a3 (> = lebih disukai). (3) Karena untuk mencapai konsistensi cukup sulit, maka diperkenalkan konsep deviasi dari konsistensi

dalam AHP, yaitu disarankan tingkat inkonsistensi preferensi atau pengaruh pembandingan pasangan (*pairwise comparison*) tidak lebih dari 10% (Rusydiana & Devi, 2013).

Tabel 2. menunjukkan skala perbandingan antarelemen dalam proses pengambilan keputusan. Skala tersebut mewakili intensitas penilaian yang ditunjukkan dengan 9 skala. Skala diturunkan melalui teori respons stimulus dan divalidasi untuk keefektifannya, tidak hanya dalam banyak aplikasi oleh sejumlah orang, tetapi juga melalui pembenaran teoretis tentang skala yang harus digunakan seseorang dalam perbandingan unsur-unsur homogen. Skala pengukuran berbentuk nilai numerik yang digunakan untuk perbandingan diperoleh dari skala perbandingan (Saaty & Vargas, 2013).

PENGEMBANGAN PARIWISATA BERKELANJUTAN

Secara tradisional, pendekatan perencanaan pariwisata berfokus pada dimensi ekonomi dengan keputusan tentang investasi, kebijakan, dan tempat pariwisata yang didorong oleh pertimbangan ekonomi. Perkembangan terbaru, perbincangan bergeser dengan memasukkan aspek-aspek lain, seperti sosial dan lingkungan, sebagai cerminan dari konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan. Keterlibatan warga, penduduk, atau pemangku kepentingan, menjadi unsur penting dalam pengembangan masyarakat dengan pendekatan partisipatif yang inklusif (Phillips & Robert, 2013).

Pengembangan masyarakat berbasis pariwisata terjadi apabila terdapat perbaikan berkelanjutan dalam kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan masyarakat lokal terlibat aktif dalam desain, implementasi, pengelolaan, serta peninjauan (Fleischer & Felsenstein, 2000). Menurut Theodori (2005), pengembangan masyarakat ditetapkan sebagai cara meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan kualitas lingkungan hidup penduduk suatu komunitas. Simpson dan Bretherton (2013) merinci dampak ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan dalam 2 aspek, yaitu positif dan negatif, sebagai berikut:

- Ditinjau dari sisi ekonomi, secara positif dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat lokal, menciptakan lapangan kerja baru, memperbaiki keseimbangan perekonomian lokal, serta mendorong timbulnya aktivitas kewirausahaan. Dampak negatif yang ditimbulkan, adalah adanya potensi ketergantungan perekonomian yang berlebihan, tekanan inflasi, ketergantungan terhadap sumberdaya dari luar daerah, tingginya ketergantungan barang dari luar daerah, permintaan harga dan pendapatan bersifat elastis.
- Ditinjau dari sisi sosial budaya, secara positif adalah peningkatan level kemajuan budaya lokal, terciptanya infrastruktur baru dan dengan adanya infrastruktur baru diikuti dengan perubahan sosial, berkembangnya fasilitas rekreasi. Dampak negatif yang ditimbulkan adalah terjadi perubahan atau pergeseran budaya, migrasi ke dalam memberi tekanan pada infrastruktur. Perubahan dalam struktur pekerjaan menuju keterampilan rendah, didominasi perempuan, terjadinya pekerjaan musiman. Tingkat pergantian komunitas yang lebih tinggi, serta meningkatnya kejahatan dan perilaku anti-sosial.
- Ditinjau dari sisi lingkungan, secara positif adalah kontrol yang lebih baik terhadap konservasi lingkungan, lebih banyak anggaran

Tabel 2. Skala Preferensi.

Intensitas Kepentingan	Definisi	Penjelasan
1	Sama pentingnya	Dua kegiatan berkontribusi sama untuk tujuan
2	Lemah	
3	Kepentingan sedang	Pengalaman dan penilaian sedikit mendukung satu aktivitas di atas yang lain
4	Lebih dari sedang	
5	Sangat penting	Pengalaman dan penilaian sangat mendukung satu aktivitas di atas yang lain
6	Kuat	
7	Sangat kuat atau menunjukkan pentingnya	Suatu aktivitas lebih disukai daripada yang lain; dominasinya ditunjukkan dalam praktek
8	Sangat, sangat kuat.	
9	Sangat penting sekali	Bukti yang mendukung satu aktivitas di atas yang lain merupakan urutan penegasan yang paling tinggi

Sumber: Saaty & Vargas (2013).

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

untuk pengelolaan lingkungan, meningkatkan kepedulian terhadap pentingnya lingkungan. Dampak negatif yaitu memburuknya kualitas lingkungan seperti polusi udara, kebisingan, maupun pemandangan yang kurang bagus, terjadi *ribbon development* yang tidak direncanakan, erosi tanah dan hilangnya habitat fauna, serta pemisahan (segregasi) wisatawan di zona pengunjung.

Beberapa penelitian dengan menggunakan metode yang berbeda, menjelaskan aspek pembangunan pariwisata berkelanjutan. Penelitian Fleischer dan Felsenstein (2000) menunjukkan bahwa promosi pariwisata skala kecil secara intuitif dianggap sebagai bentuk pembangunan ekonomi yang cocok untuk daerah pedesaan. Fakta yang sering diabaikan dalam perdebatan tentang pembangunan ekonomi melalui pariwisata, bahwa banyak daerah pedesaan, promosinya identik dengan promosi usaha kecil, dan dicirikan oleh usaha kecil yang berpusat pada keluarga, atau berbasis keluarga.

Penelitian Mohammadi *et al.* (2010) mengkaji persepsi masyarakat setempat tentang dampak sosial, ekonomi dan lingkungan dari pariwisata di destinasi warisan budaya Kermanshah di Iran. Studi difokuskan pada penduduk di sekitar objek wisata warisan populer di wilayah tersebut. Hasilnya, sebagian besar responden mengakui dan mengapresiasi dampak positif pariwisata terhadap masyarakat setempat. Di antara dampak tersebut, dampak sosial positif pariwisata yang paling dirasakan oleh masyarakat setempat, yaitu adanya peningkatan fasilitas rekreasi, dan bertemu dengan turis menjadi pengalaman berharga bagi masyarakat setempat.

Kastenholz *et al.* (2012) menyimpulkan bahwa pengalaman berwisata menjadi faktor kunci pengembangan destinasi yang kompetitif dan berkelanjutan. Hal tersebut sebagai hasil dari keseluruhan yang kompleks, dibuat bersama dan dibagikan oleh wisatawan, penyedia layanan, dan masyarakat setempat, dan dibentuk oleh sumber daya yang menyediakan bahan penting pengalaman tersebut. Riset yang dilakukan oleh Sanchez *et al.* (2019) membangun model berkelanjutan, mempertimbangkan lingkungan, sosial, dan penggerak ekonomi lokal. Penelitian ingin mengetahui persepsi penduduk tentang dampak pariwisata di kota Seville Spanyol Selatan, berdasarkan indikator ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hasilnya menunjukkan bahwa warga menghargai tiga jenis dampak, dengan dampak sosial datang setelah dampak ekonomi, sebagai pengaruh dari kepuasan mereka terhadap kondisi administrasi kota tersebut.

Baker dan Unni (2021) mengkaji perbedaan dampak ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan yang dirasakan dari sektor pariwisata, antara penduduk dua wilayah, yaitu Saint Kitts dan Nevis, serta sikap mansyarakatnya terhadap kecepatan dan arah pengembangan pariwisata. Hasilnya, penduduk kedua pulau memiliki persepsi yang sama tentang kecepatan dan arah pengembangan pariwisata di pulau mereka. Namun, ada perbedaan yang signifikan dalam persepsi mereka tentang dampak pariwisata. Jumlah penduduk Nevis, yang lebih banyak dari penduduk Saint Kitts, memiliki persepsi yang lebih baik tentang manfaat ekonomi dari pariwisata. Sedangkan dampak negatif terhadap lingkungan tidak menonjol, dan penduduk memiliki persepsi positif tentang dampak sosial budaya. Hasil lainnya yaitu pentingnya pemahaman dan pandangan anggota masyarakat lokal bagi pengembangan pariwisata berkelanjutan. Dukungan masyarakat lokal untuk pariwisata sangat penting untuk perencanaan dan pengelolaan pariwisata yang efektif.

Penelitian dari Acha-anyi dan Ndolose (2022) bertujuan untuk mengeksplorasi peluang pariwisata dalam pengembangan ekonomi lokal. Responden setuju bahwa pengembangan pariwisata akan meningkatkan infrastruktur masyarakat secara keseluruhan dan menghilangkan hambatan tertentu bagi usaha kecil baru. Manfaat potensial adalah penciptaan lapangan kerja. Respon anggota masyarakat terhadap manfaat ekonomi positif dari pariwisata sangat baik, tetapi dampak sosial dari pariwisata tidak menunjukkan dukungan positif yang sama. Masyarakat lokal kurang antusias terhadap dampak sosial dibandingkan keuntungan ekonomi dari pariwisata.

Di tingkat lokal dan regional, Maulana dan Hasyim (2019) meneliti respon masyarakat terhadap rencana pengembangan wisata halal di Desa Kamal, Kabupaten Bangkalan. diperoleh fakta bahwa masyarakat desa Kamal sangat antusias terhadap rencana pengembangan wisata halal tersebut. Hal itu sejalan dengan Apridia & Dahruji (2022) yang menganalisis potensi destinasi wisata halal di daerah pesisir selatan Kabupaten Bangkalan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa wilayah pesisir Bangkalan berpotensi menerapkan konsep pariwisata halal, tetapi terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi yaitu sarana dan prasarana serta regulasi pariwisata halal. Penelitian Wulandari (2020) yang meneliti potensi Kabupaten Bangkalan sebagai pusat pariwisata Pulau Madura, memberikan saran agar pemerintah Bangkalan dapat menggali potensi (sumber daya) yang belum terjamah dan masih baru pada wilayah sekitarnya agar dapat meningkatkan

perekonomian pada wilayah-wilayah Kabupaten Bangkalan. Penelitian tentang pengembangan kawasan wisata mangrove di Bangkalan dilakukan oleh Atika *et al.* (2022) di Kecamatan Sepulu, yang memberikan rekomendasi bahwa strategi untuk mengembangkan ekowisata mangrove pasca pandemi covid-19 antara lain melalui penambahan serta pembenahan fasilitas yang ada, keterlibatan masyarakat yang ada, serta promosi melalui media sosial. Belajar dari pengembangan pariwisata daerah lain, Sahnan *et al.* (2020) memberikan kesimpulan pada pengembangan Kawasan Wisata Mangrove Tamo, Kabupaten Majene, bahwa keberhasilan pengembangan harus didukung adanya sarana prasarana penunjang pariwisata, partisipasi masyarakat, serta penanganan sampah.

DAMPAK PENGEMBANGAN WISATA

Masing-masing dampak tersebut ditinjau dari 2 (dua) sisi, yaitu dampak positif dan negatif, sehingga secara terperinci menjadi 6 bagian. Dari tiap-tiap bagian tersebut, terdapat 3 (tiga) sub-kriteria yang menjadi butir pernyataan yang harus dipilih sesuai dengan pendapat atau preferensi dari masing-masing responden. Secara lebih terinci dapat dilihat pada Gambar 2.

Tahap berikutnya adalah kuantifikasi model dengan menggunakan pertanyaan dalam kuesioner. Kuesioner AHP tersebut berupa *pairwise comparison* (pembandingan pasangan) antar elemen (ekonomi, sosial budaya, lingkungan) dalam cluster (dampak) untuk mengetahui mana diantaranya yang lebih besar pengaruhnya atau lebih dominan. Skala menggunakan angka 1 sampai dengan 9. Hasil penilaian dikumpulkan dan diinput melalui software *super decision*, kemudian diproses sehingga menghasilkan output berbentuk prioritas.

Selanjutnya agar mengetahui penilaian individu dari responden yaitu dari luar, dalam, maupun gabungan dari kategori responden, dilakukan penilaian dengan menghitung *geometric mean*. Jawaban dari pertanyaan berupa perbandingan (*Pairwise comparison*) dari para responden akan dikombinasikan sehingga membentuk suatu konsensus. Tabel 3 menunjukkan hasil perbandingan *pairwise comparison*, dari 3 (tiga) aspek dampak pengembangan wisata di Desa Tajungan.

Tabel 3. Hasil *Pairwise Comparison* Berdasarkan Kategori Responden.

Dampak	Luar	Dalam	Gabungan
Dampak Ekonomi	0.5396	0.4126	0.4126
Dampak Sosial Budaya	0.1634	0.2599	0.2599
Dampak Lingkungan	0.2970	0.3275	0.3275

Berdasarkan hasil perhitungan, maka diketahui bahwa pihak dari luar dan dari dalam, masing-masing sama memprioritaskan dampak ekonomi sebagai aspek yang paling utama, kemudian dampak lingkungan, dan berikutnya adalah dampak

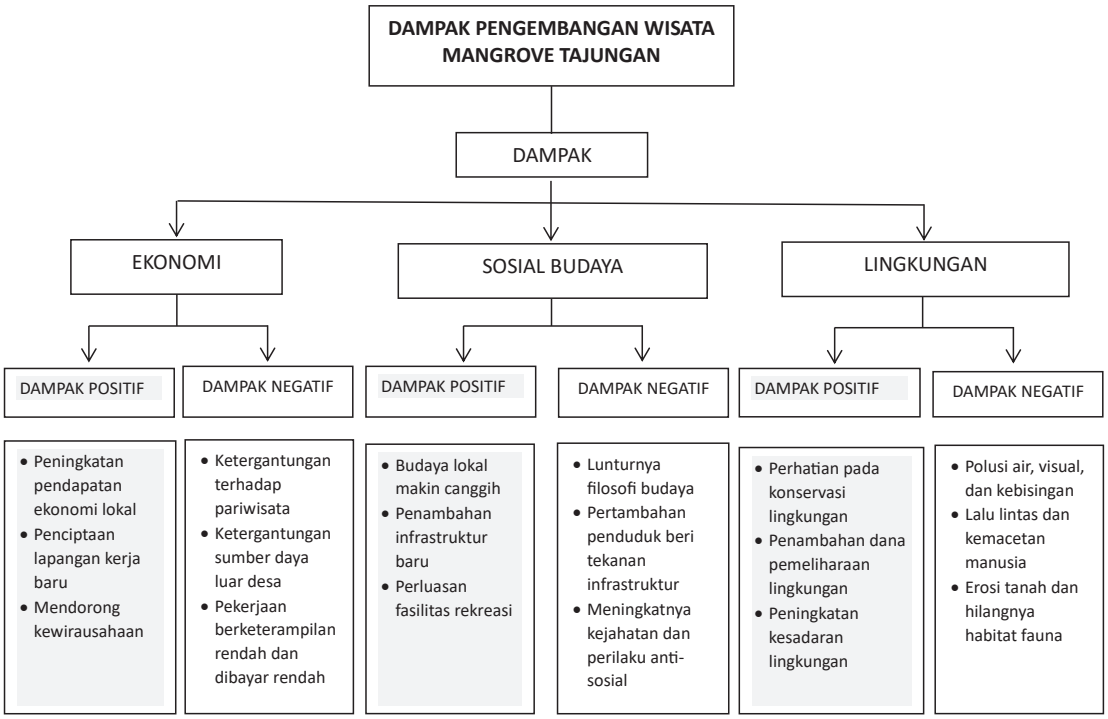

Gambar 2. Model Hirarki Dampak Pengembangan Wisata.

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

sosial budaya. Apabila ditinjau dari gabungan responden, atau seluruh responden baik dari luar maupun dalam, maka dampak ekonomi memiliki prioritas terbesar yaitu 41,26%, disusul dampak lingkungan sebesar 32,75%, dan terakhir dampak sosial budaya sebesar 25,99%.

Agar diketahui apakah para responden mencapai tingkat persetujuan atau kesepakatan terhadap satu masalah, dalam hal ini dampak adanya pengembangan wisata, maka diperlukan perhitungan *rater of agreement (w)*. Alat yang digunakan untuk mengukur *rater agreement* adalah *Kendall's Coefficient of Concordance*. Tabel 4 menunjukkan tingkat kesepakatan terhadap prioritas masing-masing aspek. Hasilnya, responden memiliki kesepakatan atau persetujuan jawaban, ketika menggunakan kategori gabungan responden.

Menurut kategori responden dari luar, prioritas masing-masing aspek tersebut memiliki *rater agreement* sebesar 0,3800 (tidak signifikan berdasarkan *p-value* 0,2187), demikian pula responden dari dalam, memiliki *rater agreement* sebesar 0,0829 (tidak signifikan berdasarkan *p-value* 0,1753), sedangkan gabungan responden, memiliki *rater agreement* sebesar 0,1086 (signifikan berdasarkan *p-value* 0,0664). Hasil *pairwise comparison* memberikan hasil bahwa dampak ekonomi sebagai yang terbesar, dengan nilai *inconsistency* dibawah 10%, artinya hasilnya konsisten pada tiap-tiap kategori responden, dan hasil *rater agreement* menunjukkan kesepakatan jawaban pada gabungan responden.

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Sanchez *et al.* (2019), Baker dan Unni (2021), serta Acha-anyi & Ndolose (2022), yang memprioritaskan manfaat ekonomi dalam pengembangan wisata setempat. Jika dikaitkan dengan kondisi masyarakat Desa Tajungan yang memiliki pekerjaan utama mayoritas ibu rumah tangga sebesar 33%, kemudian nelayan sebesar 16%, bahkan 18% sebagai penganggur, maka hasil penelitian tersebut tentu sejalan dengan realitas masyarakat sehari-hari.

Perbandingan pasangan (*pairwise comparison*), dilakukan untuk melihat lebih detail sub-kriteria dari masing masing dampak, sehingga diketahui mana diantaranya yang lebih besar pengaruhnya (lebih dominan). Hasil perhitungan prioritas responden pada Tabel 5, menunjukkan bahwa hampir seluruh kriteria dalam setiap dampak, memiliki prioritas yang sama yaitu 33,33%, kecuali pada dampak positif lingkungan, sehingga penulis mencoba untuk melakukan analisis pada nilai *geometric mean*. Nilai *geometric mean* merupakan jenis penghitungan rata-rata yang menunjukan tendensi atau nilai tertentu, sehingga penulis menggunakan informasi tersebut untuk analisis lanjutan.

Dengan menggunakan nilai *geometric mean* pada Tabel 5, prioritas terbesar pada dampak positif ekonomi adalah pada kemampuan pengembangan wisata untuk mendorong kewirausahaan. Hal tersebut sejalan dengan kondisi mata pencaharian Desa Tajungan yang disebutkan sebelumnya bahwa mayoritas ibu rumah tangga sebesar 33%, tentu dengan harapan bahwa adanya pengembangan pariwisata dapat mendorong kewirausahaan. Adanya penambahan wirausahawan lebih realistis terjadi dibandingkan dengan adanya lapangan usaha baru, karena sifat kewirausahaan yang lebih fleksibel dan membutuhkan usaha yang relatif lebih mudah, dibandingkan dengan menciptakan lapangan usaha baru, yang relatif membutuhkan usaha dan persyaratan yang lebih berat.

Dampak positif sosial budaya yang terbesar adalah penambahan infrastruktur baru. Penambahan infrastruktur baru akan memudahkan hubungan antarmasyarakat. Hal tersebut terkait dengan letak Desa Tajungan yang berada di ujung Kecamatan Kamal, meskipun tidak terlalu jauh, hanya sekitar 3 km perjalanan, tetapi kondisi jalan saat ini menuju ke Wisata Desa Tajungan kurang bagus, dan melewati beberapa desa lain sebelum ke Desa Tajungan.

Tabel 4. *Rater Agreement* Berdasarkan Kategori Responden.

Dampak	Kategori Responden		
	Luar	Dalam	Gabungan
Dampak Ekonomi	0.5396	0.4126	0.4126
Dampak Sosial Budaya	0.1634	0.2599	0.2599
Dampak Lingkungan	0.2970	0.3275	0.3275
Inconsintency	0.0089*	0.0516*	0.0516*
Kendall's W	0.3800	0.0829	0.1086*
x2	3.0400	3.4822	5.4252
P-Value	0.2187	0.1753	0.0664
Jumlah responden	4	21	25

Tabel 5. *Geometric Mean* Masing-Masing Aspek.

No	Dampak Positif	*Geometric Mean*	Prioritas Responden	*Inconsintency*
1	Peningkatan pendapatan ekonomi lokal	0.9440	33.33%	
2	Penciptaan lapangan kerja baru	1.1596	33.33%	0.0000*
3	Mendorong kewirausahaan	1.2079	33.33%	
4	Budaya lokal makin canggih	0.9265	33.33%	
5	Penambahan infrastruktur baru	1.3474	33.33%	0.0000*
6	Perluasan fasilitas rekreasi	1.2687	33.33%	
7	Perhatian lebih besar pada konservasi lingkungan	1.1226	32.75%	
8	Penambahan dana pemeliharaan lingkungan	1.3538	25.99%	0.0516*
9	Peningkatan kesadaran pentingnya lingkungan	1.5690	41.26%	
No	**Dampak Negatif**	***Geometric Mean***	**Prioritas Responden**	***Inconsintency***
1	Ketergantungan terhadap pariwisata	1.3474	33.33%	
2	Ketergantungan sumber daya luar desa	0.9421	33.33%	0.0000*
3	Pekerjaan berketerampilan rendah dan dibayar rendah	1.2393	33.33%	
4	Lunturnya filosofi budaya	0.9953	33.33%	
5	Tekanan infrastruktur karena pertambahan penduduk	1.1694	33.33%	0.0000*
6	Meningkatnya kejahatan dan perilaku anti-sosial	1.1302	33.33%	
7	Polusi air, visual, dan kebisingan.	1.3977	33.33%	
8	Lalu lintas dan kemacetan manusia	1.4091	33.33%	0.0000*
9	Erosi tanah dan hilangnya habitat fauna	0.9932	33.33%	

Adanya pengembangan wisata di Desa Tajungan dapat membawa harapan adanya perbaikan infrastruktur desa. Dampak positif lingkungan yang terbesar adalah peningkatan kesadaran lingkungan. Selain berada di tepi pantai Desa Tanjungan juga pernah menjadi tempat pembuangan sampah TPS yang berada tepat sebelum pintu masuk Desa Tajungan, dan letaknya tidak jauh dari lokasi wisata tersebut. Diharapkan dengan adanya pengembangan wisata tersebut kesadaran pentingnya lingkungan dapat tumbuh dengan baik.

Dampak negatif atau yang menjadi kekhawatiran warga dengan adanya pengembangan wisata adalah adanya ketergantungan terhadap pariwisata, tekanan infrastruktur, dan timbulnya kemacetan di Desa Tajungan. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, hal tersebut terkait satu dengan yang lain, yaitu kondisi geografis dan luas Desa Tajungan yang tidak luas, bahkan terkecil di Desa Kamal, sehingga kepadatan penduduk juga sudah mulai dirasakan oleh masyarakat sekitar. Apabila pengembangan wisata berhasil jumlah pengunjung akan meningkat dan penduduk desa lain akan tertarik untuk menuju atau berpindah ke Desa Tajungan, sehingga akan membawa tekanan pada infrastruktur dan menimbulkan kemacetan di Desa Tajungan.

Dampak pengembangan wisata Desa Tajungan menunjukkan bahwa seluruh kategori responden menjawab dampak ekonomi sebagai dampak yang terbesar. Hasil ini konsisten pada tiap-tiap kategori responden, dan menunjukkan hasil kesepakatan jawaban pada gabungan responden. Prioritas dampak positif ekonomi adalah pada kemampuan pengembangan wisata untuk mendorong kewirausahaan. Hal tersebut sejalan dengan kondisi Desa Tajungan, karena sifat kewirausahaan yang lebih fleksibel.

IMPLIKASI KEBIJAKAN

Dikaitkan dengan temuan prioritas dari sisi ekonomi, yaitu 'untuk mendorong kewirausahaan', harus diingat adanya fakta bahwa pekerjaan utama terbesar Desa Tajungan saat ini adalah ibu rumah tangga. Oleh karena itu, kebijakan yang dapat diberikan antara lain pemberian pelatihan khusus bagi ibu rumah tangga untuk mempelajari keterampilan dan pengetahuan dasar yang dibutuhkan dalam memulai dan mengelola usaha. Pemerintah dan organisasi masyarakat setempat dapat memberikan modal usaha yang khusus ditujukan untuk ibu rumah tangga yang ingin memulai usaha, yang dapat diberikan dalam bentuk bantuan atau pinjaman dengan bunga rendah. Pemerintah juga perlu memberikan pendampingan berupa bimbingan dan

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

konsultasi tentang perencanaan bisnis, pengelolaan keuangan, dan sebagainya, serta membantu dalam memasarkan produk-produk tersebut ke pasar lokal maupun nasional.

Dikaitkan dengan temuan prioritas dari sosial budaya berupa 'penambahan infrastruktur baru yang akan memudahkan hubungan antar masyarakat', maka implikasi kebijakan yang relevan antara lain perlunya pemerintah daerah mengalokasikan anggaran khusus untuk perbaikan jalan dan infrastruktur di desa tersebut sehingga jalan menjadi lebih baik dan aman untuk dilalui oleh wisatawan. Kerja sama antara desa-desa yang dilalui, bekerja sama dengan membentuk kelompok-kelompok masyarakat yang terorganisir untuk merawat jalan dan infrastruktur. Pemerintah dan masyarakat desa dapat meningkatkan promosi pariwisata melalui berbagai media seperti media sosial, brosur, dan lain sebagainya. Hal ini dapat membantu meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke desa tersebut, sehingga perbaikan infrastruktur menjadi prioritas utama.

Dikaitkan dengan temuan prioritas dari sisi lingkungan, yaitu berupa 'peningkatan kesadaran lingkungan' kondisi yang relevan adalah posisi Desa Tajungan yang berada di tepi pantai, dan dan merupakan bekas area pembuangan sampah. Dengan demikian, implikasi kebijakan yang dapat dilakukan antara lain perlunya pemerintah daerah mengembangkan program pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan di Desa Tajungan, meliputi program pembuangan sampah yang teratur, pengumpulan sampah, pemilahan sampah organik dan non-organik, dan program daur ulang untuk mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke lingkungan. Program pengelolaan sampah ini dapat membantu mencegah pencemaran lingkungan dan menjaga keindahan wisata mangrove dan pantai. Pemerintah dan masyarakat dapat menyelenggarakan program pendidikan lingkungan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat setempat. Masyarakat setempat harus lebih aktif terlibat dalam pengelolaan sampah dan menjaga kebersihan pantai, melalui pembentukan kelompok-kelompok lingkungan untuk kampanye kebersihan dan kegiatan pengelolaan sampah. Peningkatan jumlah dan kualitas tempat pembuangan sampah, pembangunan toilet umum, dan pembangunan sarana pembersihan pantai.

Berkaitan dengan dampak negatif atau yang menjadi 'kekhawatiran warga dengan adanya pengembangan wisata', beberapa implikasi kebijakan relevan adalah perlunya pemerintah untuk memperhatikan infrastruktur yang dibutuhkan seperti jalan raya, transportasi umum, fasilitas kesehatan, dan fasilitas pendidikan. Pembangunan infrastruktur yang memadai tersebut dapat mengurangi kemacetan dan meningkatkan kualitas hidup penduduk desa. Pemerintah juga perlu membuat regulasi yang mengatur perpindahan penduduk sehingga tidak terjadi penumpukan penduduk yang tidak terkendali, misalnya dengan mengatur batas jumlah penduduk yang boleh tinggal di desa wisata atau pindah ke desa. Pemerintah perlu melakukan kampanye dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga infrastruktur dan lingkungan. Peningkatan kesadaran masyarakat dapat mendorong masyarakat untuk tidak merusak infrastruktur dan lingkungan serta memperhatikan penggunaan infrastruktur secara bijaksana dan efisien.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada beberapa pihak, pertama LPPM Universitas Trunojoyo Madura, sebagai sponsor utama penelitian. Kedua, Kepala Desa Tajungan, Kamal, beserta seluruh pengelola wisata mangrove Segoro Ayu Tajungan. Ketiga, semua pihak yang telah bersedia menjadi responden, termasuk para mahasiswa yang membantu pelaksanaan penelitian.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Tim peneliti terdiri atas Ris Yuwono Yudo Nugroho, sebagai penulis utama sekaligus korespondensi (*corresponding author*) yang bertanggung jawab menyusun naskah sehingga memenuhi persyaratan publikasi, dan Mochammad Reza Adiyanto, sebagai anggota penelitian yang membantu dalam setiap proses pembuatan artikel ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

Acha-anyi, P. N., & Ndolose, L. (2022). Community perceptions of local economic development through tourism in port St Johns-South Africa. *Geo Journal of Tourism and Geosites, 40*(1), 283-291. https://doi.org/10.30892/gtg.40134-830.

Apridia, m., & Dahruji, D. (2022). Analisis potensi destinasi wisata halal di daerah pesisir selatan Kabupaten Bangkalan (Kecamatan Kamal, Labang dan Kwanyar). *Proceeding UM Surabaya*, *1*(1), 87-100.

Aref, F., Redzuan, M., & Gill, S. S. (2009). Community perceptions toward economic and environmental impacts of tourism on local communities. *Asian Social Science, 5*(7), 130-137. https://doi.org/10.5539/ass.v5n7p130.

Atika, M., Ariyani, Y., & Putri, A. R. (2022). Strategi pemulihan ekowisata mangrove desa labuhan, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan pasca pandemi covid-19. *Semesta,2*(1), 1-5.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). (2019). *RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023*. Bangkalan: Bappeda.

Badan Pusat Statistik. (2021). *Statistik daerah kabupaten Bangkalan 2021*. Bangkalan: BPS Kabupaten Bangkalan.

Badan Pusat Statistik. (2019). *Kabupaten Bangkalan dalam angka 2019*. Bangkalan: BPS Kabupaten Bangkalan.

Badan Pusat Statistik. (2022). *Kabupaten Bangkalan dalam angka 2022*. Bangkalan: BPS Kabupaten Bangkalan.

Baker, D. M. A., & Unni, R. (2021). Understanding Residents' Opinions and Support Toward Sustainable Tourism Development in the Caribbean: The Case of Saint Kitts and Nevis. *The Coastal Business Journal, 18*(1), 1-29. https://digitalcommons.coastal.edu/cbj/vol18/iss1/1.

Choi, H. S. C., & Sirakaya, E. (2005). Measuring residents' attitude toward sustainable tourism: Development of sustainable tourism attitude scale. *Journal of travel research, 43*(4), 380-394. https://doi.org/10.1177/0047287505274651.

Falcone, P. M. (2019). Tourism-based circular economy in Salento (South Italy): A SWOT-ANP analysis. *Social Sciences, 8*(7), 216. https://doi.org/10.3390/socsci8070216.

Fleischer, A., & Felsenstein, D. (2000). Support for rural tourism: Does it make a difference? *Annals of tourism research, 27*(4), 1007-1024. https://doi.org/10.1016/S0160-7383(99)00126-7.

Garcia-Melon, M., Gómez-Navarro, T., & Acuña-Dutra, S. (2012). A combined ANP-delphi approach to evaluate sustainable tourism. *Environmental Impact Assessment Review, 34*(April), 41-50. http://dx.doi.org/10.1016/j.eiar.2011.12.001.

Hayati, N. (2015). Membangun desa bersih dan sejahtera (Pendampingan masyarakat) dalam pengelolaan sampah berbasis riset aksi partisipatoris di Desa Tajungan Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan [*Undergraduate thesis]*. Surabaya: UIN Sunan Ampel.

Kastenholz, E., Carneiro, M. J., Marques, C. P., & Lima, J. (2012). Understanding and managing the rural tourism experience—The case of a historical village in Portugal. *Tourism Management Perspectives, 4*(October), 207-214. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2012.08.009.

Lee, T. H., Jan, F. H., & Liu, J. T. (2021). Developing an indicator framework for assessing sustainable tourism: Evidence from a Taiwan ecological resort. *Ecological indicators, 125*, 107596. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2021.107596.

Maulana, A. K., & Hasyim, L. Q. (2019). Respon masyarakat terhadap rencana pengembangan wisata halal di Desa Kamal Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Kamal Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan). *Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 6*(2), 96-109. https://doi.org/10.21107/dinar.v6i2.6117.

Mohammadi, M., Khalifah, Z., & Hosseini, H. (2010). Local people perceptions toward social, economic and environmental impacts of tourism in Kermanshah (Iran). *Asian Social Science, 6*(11), 220-225. http://dx.doi.org/10.5539/ass.v6n11p220.

Musinguzi, D. (2012). *The impacts of tourism on local communities: developing and operationalising a comprehensive monitoring framework* (Doctoral dissertation). Hongkong: polytechnic university school of hotel and tourism management. http://hdl.handle.net/10397/85809.

Noosut, K., Attawongchayakorn, K., Panyadee, C., & Trakarnsiriwanich, K. (2023). Developing of components and indicators of appropriate carrying capacity of community-based tourism attractions in upper north Thailand. *Kasetsart Journal of Social Sciences, 44*(1), 95-104.

Nyumba, T., Wilson, K., Derrick, C. J., & Mukherjee, N. (2018). The use of focus group discussion methodology: Insights from two decades of application in conservation. *Methods in Ecology and evolution, 9*(1), 20-32. http://dx.doi.org/10.1111/2041-210X.12860.

Phillips, R., & Robert, S. (2013). *Tourism, Planning, and Community Development*. New York: Routledge. http://dx.doi.org/10.4324/9780203720295-1.

Rusydiana, A. S., & Devi, A. (2013). *Analytic network process: Pengantar teori dan aplikasi*. Bogor: Smart Publishing.

Saaty, T. L., & Vargas, L. G. (2013). *Decision making with the analytic network process*. Second Edition. New York: Springer. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-7279-7.

Saaty, T. L., & Vargas, L. G. (2012). *Model, methods, concepts & applications of the AHP*. Second Edition. International Series in Operations Research & Management Science. New York: Springer. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-3597-6.

Sahnan, F., Salim, A., & Jufriadi, J. (2020). Pengembangan kawasan wisata mangrove Tamo Kelurahan Baurung Kabupaten Majene. *Journal of Urban Planning Studies, 1*(1), 21-29.

Sanchez del Rio-Vazquez, M. E., Rodríguez-Rad, C. J., & Revilla-Camacho, M. Á. (2019). Relevance of social, economic, and environmental impacts on residents' satisfaction with the public administration of tourism. *Sustainability, 11*(22), 1-15. https://doi.org/10.3390/su11226380.

Simpson, K., & Bretherton, P. (2013). Community understanding of the impact of temporary

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

visitors on incidental destinations. In *Tourism, Planning, and Community Development*. New York: Routledge. https://doi.org/10.1080/15575330903444077.

Theodori, G. L. (2005). Community and community development in resource-based areas: Operational definitions rooted in an interactional perspective. *Society and Natural Resources, 18*(7), 661-669. https://doi.org/10.1080/08941920590959640.

Tsundoda, T., & Mendlinger, S. (2009). Economic and social impact of tourism on a small town: Peterborough New Hampshire. *Journal of Service Science and Management, 2*(2), 61-70. https://doi.org/10.4236/jssm.2009.22009.

United Nations World Tourism Organization (UNWTO). (2023, April 15). *Sustainable tourism development*. https://www.unwto.org/sustainable-development.

Wasudawan, K., Shakur, M. M. A., & Ab-Rahim, R. (2021). The impact of the rural culture and cultural attractions on poverty alleviation: The moderating effect of tourism resources. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 11*(1), 595-610. : http://dx.doi.org/10.6007/IJARBSS/v11-i1/8546.

Weaver, D. B., & Lawton, L. J. (2007). Twenty years on: The state of contemporary ecotourism research. *Tourism management, 28*(5), 1168-1179. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2007.03.004.

Wulandari, L. S. W. (2020). *Potensi Kabupaten Bangkalan sebagai pusat pariwisata Pulau Madura yang memiliki posisi strategis dan bentang alam yang karls yang indah*. https://www.researchgate.net/publication/345771678.

Yang, S. (2022). Analytic hierarchy process and its application in rural tourism service performance evaluation. *Discrete Dynamics in Nature and Society, 2022*, 1-10. https://doi.org/10.1155/2022/5302588.

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

Strategi Pemenuhan Kebutuhan Keluarga Nelayan Banjang (Kasus KUB Mina Sero Laut, Desa Wringinputih, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi)

Strategy for Fulfilling the Needs of Banjang Fishermen's Families (Case Study of KUB Mina Sero Laut, Wringinputih Village, Muncar District, Banyuwangi Regency)

***Melisa Priskila Patrescia dan Rokhani**

[1]Penyuluhan Pertanian Fakultas Pertanian, Universitas Jember
Jl. Kalimantan 37- Kampus Bumi Tegal Boto Jember. Kode Pos 68121, Indonesia

ARTICLE INFO

Diterima tanggal : 28 Agustus 2022
Perbaikan naskah: 20 Februari 2023
Disetujui terbit : 29 Mei 2023

*Korespodensi penulis:
Email: melisapriskilapatresia@gmail.com

DOI: http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v13i1.11552

ABSTRAK

Pendapatan nelayan tergantung pada jumlah tangkapan, yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti peredaran bulan, siklus musim, dan jenis alat tangkap. Nelayan Desa Wringinputih, Banyuwangi merupakan salah satu contohnya. Kondisi ini mendorong adanya upaya untuk mendapatkan pemasukan tambahan melalui optimalisasi keberadaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Mina Sero Laut. Keanggotaan KUB dibagi ke dalam dua golongan: (i) keluarga nelayan banjang penuh, (ii) keluarga nelayan banjang sambilan utama. Penelitian ini bertujuan melakukan analisis pada penggolongan tersebut terutama sehubungan dengan perbedaan pengelolaan aset dan strategi nafkah. Penelitian dilaksanakan menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, *in-depth interview*, dan dokumentasi, dengan informan yang dipilih secara *purposive sampling*. Hasil penelitian adalah sebagai berikut. Pertama, aset atau modal nelayan banjang sambilan utama termanfaatkan secara lebih optimal; ini terjadi karena mereka juga memanfaatkan keberadaan modal alam, sosial, ekonomi, fisik, dan manusia secara efektif. Disisi lain, nelayan banjang penuh hanya memanfaatkan dua modal saja, modal sosial dan fisik. Kedua, perbedaan pola pemanfaatan aset tersebut berimbas pada strategi nafkah yang diterapkan oleh nelayan. Nelayan banjang sambilan utama menerapkan tiga strategi nafkah: (i) intensifikasi, (ii) diversifikasi, dan (iii) migrasi. Sebaliknya, nelayan banjang penuh hanya menerapkan dua strategi: (i) intensifikasi dan (ii) migrasi. Ketiga pemenuhan kebutuhan keluarga, khususnya pada keluarga nelayan banjang penuh, masih dapat ditingkatkan. Implikasi utama dari hasil ini adalah perlunya kebijakan komplemen yang diarahkan pada dukungan terhadap upaya optimalisasi modal manusia khususnya keterampilan nelayan. Hal ini dapat dilakukan misalnya melalui pemberian fasilitas permodalan dan peningkatan keterampilan nelayan.

Kata Kunci: kebutuhan; modal; nelayan banjang penuh; nelayan banjang sambilan utama; optimalisasi; pendapatan

ABSTRACT

The lives of fishermen in general are highly influenced by the dynamic resources of the sea, with income uncertain depending on the amount of fish they catch. The amount of catch is determined by a number of factors, including the circulation of the moon, seasonal cycles, and traditional fishing gear. The fishermen of Wringinputih Village, Banyuwangi are a case in point; their fisheries do not provide a steady income. This uncertainty has prompted them to make efforts to obtain additional income by optimizing the existence of the Mina Sero Laut Joint Business Group (KUB). In this regard, the KUB membership is divided into two groups, namely: (i) members from full-time banjang fisher families and (ii) members from part-time banjang fisher families. This study aimed to analyze these categories, especially in relation to differences in asset management and livelihood strategies. This research was conducted using a qualitative descriptive analysis approach. Data were collected through observation techniques, in-depth interviews, and documentation; meanwhile. The determination of informants for interviews was done using a purposive sampling method. The research results show the following. First, the assets or capital of the main part-time banjang fisher families are utilized more optimally; this is because this group also uses the existence of natural, social, economic, physical, and human capital effectively. On the other hand, the full banjang fishing families only utilize two capitals, namely social and physical capital. Second, the difference in asset utilization patterns has an impact on the livelihood strategies applied by the fishermen. Part-time banjang fishermen primarily apply the livelihood strategies of intensification, (ii) diversification, and (iii) migration. Meanwhile, full-time banjang fishers only implement two strategies, namely: (i) intensification and (ii) migration. Third, the fulfilment of fisher families' needs, especially in full banjang fisher families, can still be improved. This can be done through the optimization of human capital, and fishermen's skills, directed at the ability to increase income. Policy implications are needed to optimize human and economic capital by providing capital facilities and fishermen skills.

Keywords: *need; capital; full banjang fishermen; main sideline fishermen; optimization; income*

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki potensi perikanan yang tinggi, yang dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber penghidupan. Potensi perikanan yang tinggi tercatat pada data Badan Pusat Statistik (2019) yang menyebutkan bahwa perikanan sejauh ini telah mampu menyediakan lapangan kerja tidak kurang dari 965.756 nelayan. Statistik ini terelaborasi dalam berbagai publikasi, yang mengkonfirmasi besarnya peran sektor perikanan dan kelautan dalam kehidupan masyarakat Indonesia (Sulistiyanti & Wahyudi, 2018). Dilaporkan bahwa masyarakat tersebut, khususnya nelayan, menggantungkan penghidupan keluarganya secara langsung pada perolehan hasil laut, baik melalui penangkapan ataupun budi daya (Imran, 2018).

Di antara sentra-sentra perikanan penting di Indonesia adalah Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, yang sumber daya perikanannya dieksploitasi dengan pelibatan anggota masyarakat dalam jumlah yang besar. Sentra ini merupakan salah satu sentra terproduktif, dan pada periode tahun 2015-2019 tercatat hasil perikanan sebesar 1.670.233 ton, yang ditopang oleh aktivitas 4.086 penduduk bermata pencaharian sebagai nelayan. Di kecamatan tersebut, kegiatan kenelayanan terkonsentrasi di Desa Wringin putih Nelayan Wringinputih memproduksi ikan tangkapan rata-rata 1.000 kg/bulan, dengan jenis dominan berupa tongkol, tenggiri, cumi, dan gurita. Potensi perikanan yang tinggi ini pada musim tertentu tidak sepenuhnya dapat tereksploitasi dan menyebabkan penurunan pendapatan nelayan. Nelayan di Desa Wringinputih pada umumnya mengoperasikan alat tangkap *banjang*, yang jenis tangkapannya beragam dan jumlah tangkapannya berfluktuasi sehingga pendapatan nelayan menjadi tidak pasti. Ketergantungan tinggi membuat ketidakpastian tersebut semakin terasa bagi nelayan, terutama pada aspek pemenuhan kebutuhan keluarga. Fluktuasi produksi tangkapan ikan nelayan terjadi karena sejumlah faktor misalnya siklus musim melaut, fase bulan, dan peralatan tangkap. Menurut Widiasyih (2019), fase bulan (periode siklus bulan) merupakan faktor yang pengaruhnya paling signifikan pada pendapatan nelayan. Mengikuti periode siklus, secara periodik terjadi air pasang yang sangat tinggi dan air surut yang rendah. Pada saat itu, gravitasi bulan menarik air lebih kuat daripada bumi sehingga air laut mengembung dan penangkapan ikan menjaga kurang efektif (Lumban-Gaol *et al.,* 2019). Hal sebaliknya terjadi pada periode bulan baru (fase bulan pertama). Pada periode ini penangkapan terjadi lebih efektif, produksi lebih tinggi dan pendapatan nelayan meningkat.

Penangkapan ikan nelayan *banjang* ini juga sangat tergantung pada siklus tahunan (siklus musim melaut). Siklus musim dinamika alam tahunan, termasuk perubahan arah angin, peredaran bulan, gelombang laut, ombak, arus dan migrasi ikan. Terkait ini, nelayan *banjang* melewati tiga fase musim setiap tahunnya, yakni musim puncak (Mei-September), paceklik (Desember - Februari), dan musim transisi (Maret-April). Paceklik ikan terjadi pada musim angin barat, yang ditandai dengan kenaikan frekuensi angin kencang, badai dan gelombang besar, serta cuaca ekstrem, yang dengan keterbatasan alat *banjang* membuat nelayan tidak dapat melaut. Kondisi sebaliknya terjadi pada saat musim angin timur saat laut dalam kondisi tenang sehingga memungkinkan nelayan untuk melakukan aktivitas penangkapan secara maksimal (Maulana, *et al.,* 2021). Di antara kedua musim tersebut terdapat musim transisi dengan jumlah tangkapan dan pendapatan nelayan berada pada kisaran angka tangkapan dan pendapatan musim puncak dan paceklik.

Alat banjang yang dioperasikan nelayan Desa Wringinputih tidak dapat mengatasi faktor-faktor alam sebagaimana tersebut di atas dan merupakan hasil pengembangan nelayan Wringinputih yang sebelumnya menggunakan jaring. Alat tangkap yang diperkenalkan oleh komunitas keturunan Bugis ini terbuat dari belahan bambu-bambu kecil yang diikat satu dengan lainnya. Mewarisi karakteristik teknik menyerok yang dipengaruhi oleh budaya suku Bugis, banjang merupakan alat tangkap yang bersifat relatif pasif. Karakteristik pasif inilah yang menyebabkan alat banjang sangat terkendala oleh dinamika alam, termasuk musim, angin dan gelombang. Kendala-kendala yang berujung pada ketidakpastian penghasilan tersebut mendorong nelayan mencari pemasukan tambahan melalui berbagai pilihan alternatif pekerjaan yang tersedia. Dalam hal ini, peluang untuk mengadopsi sebuah pilihan disesuaikan dengan keberadaan aset atau modal keluarga dan dilaksanakan melalui strategi nafkah berupa pola nafkah ganda. Mengacu pada Ellis (2000), modal dimaksud terkait dengan modal sosial, modal manusia, modal fisik, modal alam, dan modal ekonomi. Pengelolaan modal tersebut dapat diarahkan untuk pemanfaatan melalui intensifikasi, diversifikasi, dan migrasi dalam pemenuhan kebutuhan (Scoones, 1998). Bagi nelayan banjang di Wringinputih, implementasi dari pemanfaatan modal dapat

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

dilakukan melalui berbagai alternatif pekerjaan yang ada yaitu bidang-bidang perdagangan, peternakan, jasa buruh pabrik, pengolahan ikan, pertanian, dan jasa wisata. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pengelolaan aset dan strategi nafkah pembentukan KUB Mina Sero Laut yang menciptakan golongan nelayan banjang penuh dan golongan nelayan banjang sambilan utama di Desa Wringinputih. Sebagai catatan, penggolongan nelayan ini mengacu pada Monintja dan Yusfiandayani (2001), yang membagi kelompok nelayan ke dalam 3 (tiga) tipe: nelayan penuh, nelayan sambilan utama, dan nelayan sambilan tambahan. Penelitian dilakukan pada bulan Februari -April 2022 di Desa Wringinputih, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi dengan penekanan pada kasus KUB Mina Sero Laut. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan berikut: (1) Kecamatan Muncar menjadi kecamatan penyumbang perikanan tangkap tertinggi di Banyuwangi (25.120 ton/tahun), (2) Desa Wringinputih merupakan sentra nelayan banjang, dan (3) KUB Mina Sero merupakan pengelola utama nelayan banjang aktif dengan yang menyumbang hampir 50 % produksi ikan di Muncar.

Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif (Kuntjojo, 2009). Pendekatan ini diadopsi untuk merekonstruksi gambaran pengelolaan aset atau modal keluarga dan strategi nafkah keluarga yang diterapkan oleh nelayan banjang penuh dan keluarga nelayan banjang sambilan utama dalam kasus KUB Mina Sero Laut dalam upaya memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dua tipe informan dipilih dari kelompok nelayan banjang penuh dan nelayan banjang sambilan utama yang tergabung dalam KUB Mina Sero Laut Informan ini merupakan pengurus inti yang terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Pengurus inti nelayan banjang penuh, nelayan banjang sambilan utama, dan anggota nelayan KUB lain.

Pengumpulan data penelitian dilakukan dalam berbagai latar (*setting*) latar alamiah *(natural setting),* di rumah responden, saat diskusi, dan di jalan. Berdasarkan sumbernya, data dikelompokkan ke dalam dua jenis, yakni data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan observasi (pengamatan), *interview* (wawancara), dan dokumentasi. Penelitian kualitatif ini menggunakan analisis dengan model interaktif (Miles & Huberman, 1984). Analisis interaktif merupakan proses analisis data secara bersamaan dengan menggunakan tahapan yang terdiri atas pengumpulan data, reduksi data, penyajian *(display)* data, dan kesimpulan *(*verifikasi*)* data.

Gambaran Umum Nelayan Banjang

Nelayan Desa Wringinputih, khususnya KUB Mina Sero Laut, melakukan aktivitas melaut dengan banjang atau melaut tanpa menggunakan kapal atau perahu. Nelayan mengambil tangkapan banjang dengan berjalan kaki. Aktivitas melaut ini disebut juga dengan menyerok ikan. Banjang merupakan rekayasa teknologi alat tangkap ikan yang didasari kondisi geografis wilayah perairan Desa Wringinputih yang berbentuk teluk. Perairan Desa Wringinputih dikenal juga sebagai Teluk Pangpang yang memiliki topografi teluk dalam atau tertutup yang memiliki semenanjung. Struktur pembentuk semenanjung yang berupa batuan *karst* menjadikan tipe tanah pada daerah ini bercampur lumpur dan membuat perairan ini dangkal sehingga tidak memungkinkan bagi nelayan untuk melakukan aktivitas melaut dengan menggunakan kapal. Kondisi teluk yang dangkal ini pada akhirnya mendorong adanya rekayasa teknologi penangkapan ikan berupa banjang yang merupakan tradisi suku Bugis. Banjang ini menjadi identitas nelayan di Desa Wringinputih.

Gambar 1. Alat Banjang.

Mayoritas warga desa bermata pencaharian sebagai nelayan yang dikenal dengan sebutan nelayan banjang. Alat teknologi banjang ini awalnya dibawa oleh suku Bugis yang menetap di Kecamatan Muncar. Aktivitas melaut menggunakan banjang yang dilakukan nelayan Desa Wringinputih dipengaruhi oleh faktor pasang surut. Pada saat kondisi laut surut, air laut susut kurang lebih 1 (satu) km hingga membentuk hamparan daratan. Sebelum ada rekayasa teknologi banjang, nelayan melaut dengan memakai jaring. Nelayan menggunakan alat tangkap ikan dengan belahan bambu yang diikat dengan bambu lainnya. Banjang terbuat dari bambu sebagai tiang dan jaring sebagai pembatas yang menggiring ikan masuk ke alat tangkap. Banjang terdiri atas (1) kantongan, (2) kamar I, (3) kamar II,

(4) *pani*, dan (5) *penaju*. Kantongan, kamar I, dan kamar II adalah tempat nelayan banjang menyerok tangkapannya. Beberapa nelayan banjang memiliki pekerjaan sampingan. Nelayan pergi mengambil hasil ikan di banjang dengan durasi maksimal 2-3 jam sehingga seorang nelayan banjang akan memiliki waktu luang yang banyak. Untuk melaut, nelayan membutuhkan maksimal 3 jam dalam sehari sehingga sangat memungkinkan bagi nelayan untuk memiliki pekerjaan sampingan guna meningkatkan pendapatan mereka.

Aset atau Modal Keluarga Nelayan Banjang

Sumber nafkah terdiri atas beberapa aset atau modal keluarga. Aset dapat diartikan sebagai kumpulan modal yang dikombinasikan untuk menjalankan strategi nafkah. Modal yang tersedia digunakan untuk menghasilkan sejumlah strategi penghidupan (*livelihood strategies*). Konsep pengelolaan aset sumber nafkah dalam penelitian ini mengacu pada konsep sumber nafkah menurut Ellis (2000) yang membagi sumber nafkah menjadi lima modal yang dimiliki oleh setiap keluarga nelayan banjang KUB Mina Sero Laut. Lima modal tersebut adalah alam, ekonomi, manusia, sosial, dan fisik. Sumber nafkah nelayan banjang ini akan menggambarkan kondisi kelima aset atau modal yang dimiliki nelayan KUB Mina Sero Laut yang dimanfaatkan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Penelitian ini akan menganalisis aset nelayan banjang penuh dan nelayan banjang sambilan utama.

Modal Alam Keluarga Nelayan Banjang Penuh

Menurut Ellis (2000), modal alam terdiri atas tanah, air, udara, plasma nutfah, dan segala sesuatu yang berasal dari sumber daya alam yang digunakan manusia untuk mempertahankan hidup keluarganya. Modal alam dibagi menjadi tiga aspek, yakni kepemilikan lahan, pemanfaatan jasa lingkungan pesisir pantai, dan ketersediaan air.

Gambar 1 menjelaskan bahwa modal alam yang dimiliki oleh nelayan banjang penuh tidak dimaksimalkan, seperti kepemilikan lahan dan jasa lingkungan yang menjadikan modal alam lemah. Nelayan banjang penuh tidak memiliki kemampuan untuk mengelola lahan dan jasa lingkungan sebagai pemasukan tambahan. Kehidupan nelayan banjang penuh bergantung sepenuhnya pada hasil banjang karena tidak ada sumber pendapatan lain. Modal alam berupa jasa lingkungan dimanfaatkan untuk melakukan aktivitas pariwisata yang dikembangkan dan dikelola oleh KUB Mina Sero Laut, yakni objek wisata Pantai Cemara Kawang yang juga sebagai konservasi mangrove. Nelayan banjang penuh kurang berusaha untuk memanfaatkan modal alam secara optimal untuk memenuhi kebutuhannya. Nelayan banjang penuh mengandalkan pendapatannya dari hasil melaut untuk akses kontrol terhadap wilayah penangkapan (*fishing ground*). Hal tersebut dapat dikatakan sudah baik, tetapi memang produksi hasil ikan sangat dipengaruhi oleh musim melaut, baik fase bulan maupun tahunan.

Modal Ekonomi Keluarga Nelayan Banjang Penuh

Penelitian ini membagi modal ekonomi menjadi empat aspek, yakni ketersediaan finansial, aset ekonomi, sarana produksi, dan bantuan pemerintah. Pemilikan aset ekonomi merupakan modal untuk mengembangkan kapasitas nelayan dalam melakukan kegiatan ekonomi (Mujaddis & Nugroho, 2021). Keluarga nelayan banjang penuh memiliki modal ekonomi yang lemah yang ditandai dengan kepemilikan aset ekonomi yang tidak beragam. Nelayan banjang penuh tidak memiliki aset ekonomi berupa emas, tabungan, dan ternak. Hal ini sejalan dengan penelitian Nurhayani & Hodijah (2019) bahwa kepemilikan tabungan merupakan salah satu kunci bagi nelayan dalam kepemilikan modal ekonomi. Rendahnya tabungan berimplikasi pada rendahnya investasi dan terjadinya kekurangan

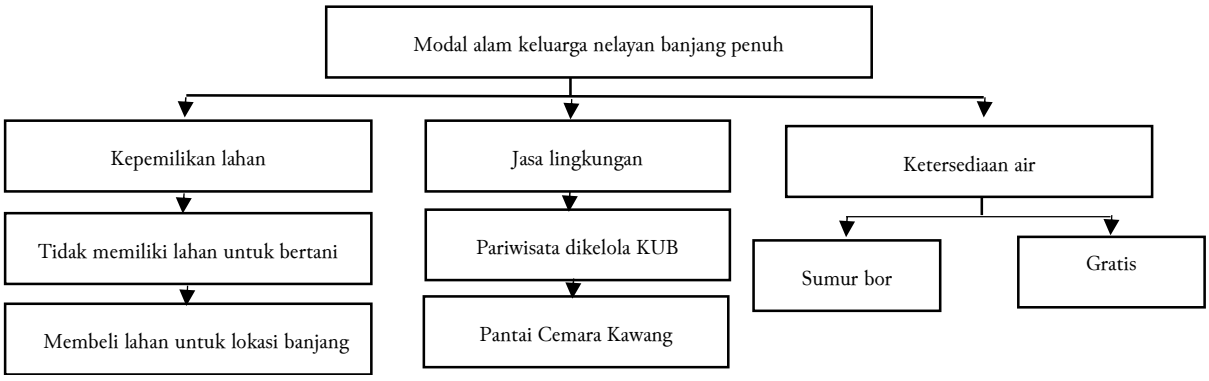

Gambar 2. Modal Alam Keluarga Nelayan Banjang Penuh.

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

modal ekonomi. Nelayan banjang penuh tidak memiliki modal untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan input produksi. Apabila produksi rendah, pendapatan yang diterima nelayan juga rendah. Bantuan ekonomi berupa sembako, uang tunai, dan KIP dari pemerintah desa dan pemerintah pusat diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga nelayan banjang.

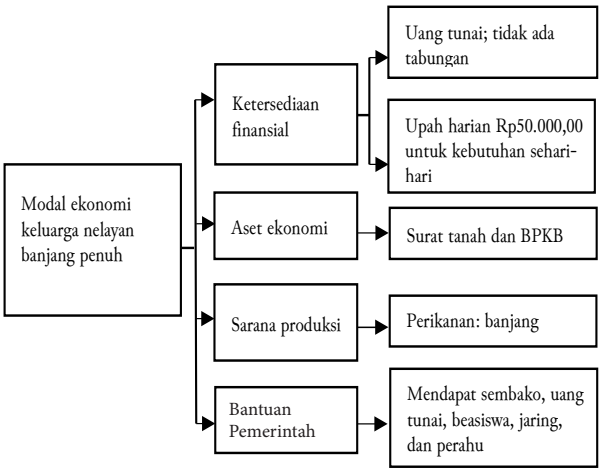

Gambar 3. Bagan Modal Ekonomi Keluarga Nelayan Banjang Penuh.

Keluarga nelayan banjang penuh memiliki modal ekonomi yang lemah yang ditandai dengan kepemilikan aset ekonomi yang tidak beragam. Nelayan banjang penuh tidak memiliki aset ekonomi berupa emas, tabungan, dan ternak. Hal ini sejalan dengan penelitian Nurhayani & Hodijah (2019) bahwa kepemilikan tabungan merupakan salah satu kunci bagi nelayan dalam kepemilikan modal ekonomi. Rendahnya tabungan berimplikasi pada rendahnya investasi dan terjadinya kekurangan modal ekonomi. Nelayan banjang penuh tidak memiliki modal untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan input produksi. Apabila produksi rendah, pendapatan yang diterima nelayan juga rendah. Bantuan ekonomi berupa sembako, uang tunai, dan KIP dari pemerintah desa dan pemerintah pusat diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga nelayan banjang.

Modal Manusia Keluarga Nelayan Banjang Penuh

Modal manusia mengarah pada tingkat kemampuan, pengetahuan, kesehatan, dan kepemilikan tenaga kerja guna menunjang strategi penghidupan yang dilaksanakan keluarga nelayan. Modal manusia ini digunakan sebagai modal dalam suatu organisasi yang dalam hal ini adalah keluarga yang digunakan untuk menjalankan sumber daya lainnya.

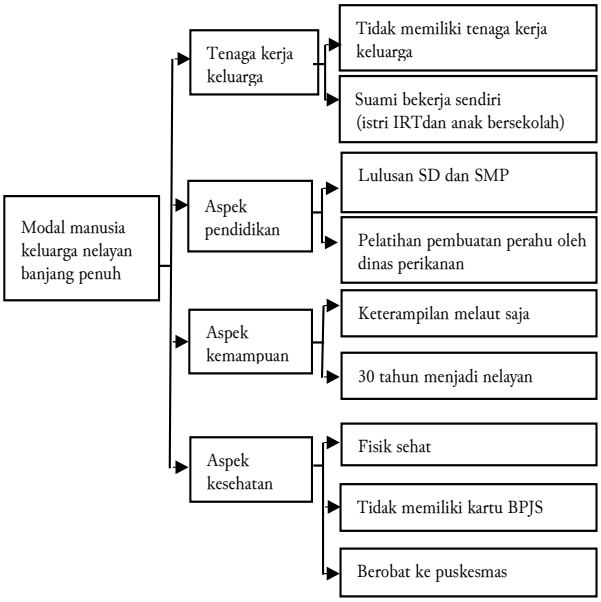

Gambar 4. Bagan Modal Manusia Keluarga Nelayan Banjang Penuh.

Modal sumber daya manusia yang dimiliki tidak memadai dan tidak dalam usia produktif. Usia tidak produktif adalah 15 tahun ke bawah dan 60 tahun ke atas, sedangkan usia produktif adalah antara 15 tahun sampai dengan 59 tahun (Ukkas, 2017). Makin kecil modal sumber daya manusia yang dimiliki maka makin sulit terjadi akumulasi pendapatan yang diperoleh untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari keluarga. Modal manusia dalam aspek kepemilikan tenaga kerja pun lemah dalam menunjang strategi penghidupan. Sehubungan dengan penelitian Gani dan Dharmawan (2021), nelayan banjang penuh memiliki pemanfaatan modal manusia yang rendah. Kondisi ini ditandai dengan pendidikan formal yang dimiliki rendah dan keterampilan yang dimiliki oleh nelayan merupakan keterampilan yang diperoleh dari pendidikan nonformal. Tingkat keberagaman keterampilan nelayan banjang penuh dapat dikatakan rendah. Nelayan banjang penuh memiliki tingkat keterampilan melaut yang tinggi dilihat dari pengalaman melaut yang mencapai 30 tahun. Nelayan banjang penuh tidak memiliki keterampilan lain di luar kemampuan melaut. Hal ini membuat nelayan banjang penuh tidak dapat melakukan pekerjaan sampingan. Tingkat kesehatan keluarga nelayan penuh dalam kondisi yang baik. Hal ini dapat dilihat dari kondisi fisik yang dimiliki nelayan. Kegiatan melaut mengharuskan nelayan memiliki kondisi fisik yang sehat. Kondisi fisik yang sehat akan berpengaruh pada peningkatan produktivitas nelayan.

Modal Sosial Keluarga Nelayan Banjang Penuh

Modal sosial dalam penelitian ini terdiri atas beberapa aspek, yakni jaringan kerja, hubungan sosial,

kelompok sosial, dan kepercayaan tradisi sebagai media orang untuk bergabung dan mendapatkan dukungan untuk menjalankan nafkahnya (Ellis, 2000). Potensi ini difokuskan pada jaringan sosial, norma, nilai, dan kepercayaan di antara sesama yang lahir dari anggota kelompok dan menjadi norma kelompok yang dipakai dalam kehidupan sehari hari. Modal sosial ini juga menekankan potensi suatu kelompok masyarakat. Pada penelitian ini kelompok yang dimaksud adalah kelompok nelayan banjang.

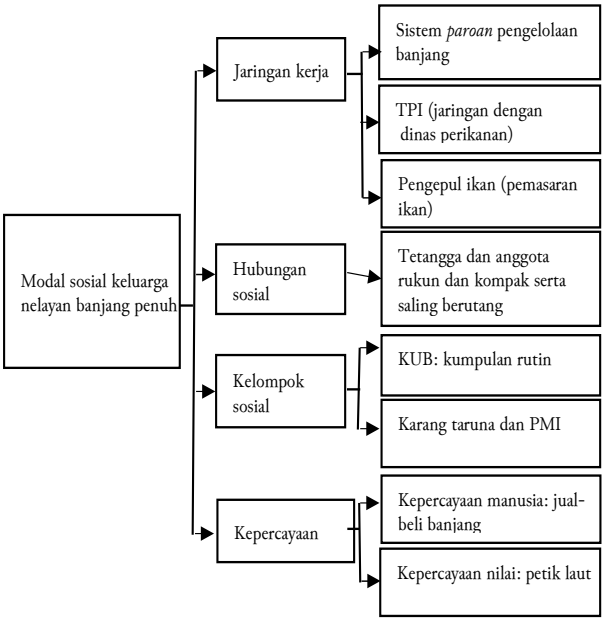

Gambar 5. Bagan Modal Sosial Keluarga Nelayan Banjang Penuh

Keluarga nelayan banjang penuh memiliki modal sosial yang kuat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Aspek pertama adalah jaringan sosial. Nelayan banjang penuh memiliki jaringan sosial yang beragam, yakni jaringan pengepul ikan, jaringan dengan dinas perikanan dalam bentuk tempat pelelangan ikan, dan jaringan dengan nelayan banjang dalam hal bagi hasil. Aspek kedua adalah kelompok sosial. Selaras dengan penelitian Magfiroh dan Sofia (2020), keluarga nelayan memanfaatkan modal sosial dengan bergabung dalam keanggotaan kelompok, dalam hal ini KUB Mina Sero Laut. Salah satu strategi nelayan dalam pemenuhan kebutuhannya adalah dengan cara berutang kepada tetangga. Hubungan sosial semacam ini terjalin timbal balik. Jika ada orang yang meminjam uang dia juga akan memberikan pinjaman kepada orang lain dengan menggunakan asas ketetanggaan. Hubungan sosial menjadi kekuatan modal sosial dalam keluarga. Aspek selanjutnya adalah kepercayaan tradisi. Nelayan banjang penuh setiap tahunnya melakukan tradisi petik laut sebagai ungkapan rasa syukur akan hasil yang melimpah. Tradisi yang dilakukan setiap tanggal 1 Sura ini masih dijaga dan dilestarikan.

Modal Fisik Keluarga Nelayan Banjang Penuh

Modal fisik terdiri atas infrastruktur dasar dan kepemilikan peralatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa sehingga mendorong tumbuhnya penghidupan. Infrastruktur yang dimaksud meliputi transportasi, bangunan, ketersediaan air bersih dan sanitasi, energi, dan akses komunikasi (Mujaddid, 2021). Rendahnya akses individu terhadap infrastruktur dasar menyebabkan individu atau kelompok akan makin dekat dengan kemiskinan. Modal fisik dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga aspek, yakni akses jalan, kepemilikan hunian, dan kepemilikan kendaraan (Chamro & Widjayanthi, 2020).

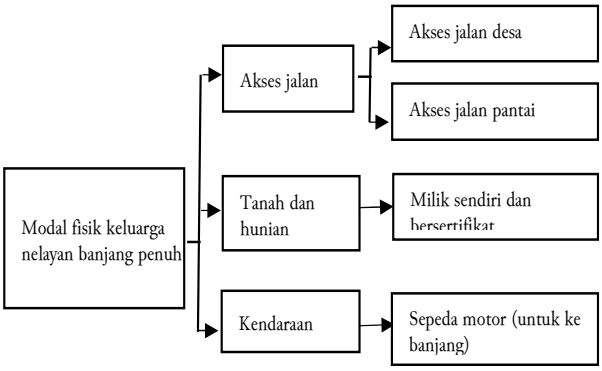

Gambar 6. Bagan Modal Fisik Keluarga Nelayan Banjang Penuh.

Modal fisik yang dimiliki keluarga nelayan banjang penuh dapat dikatakan kuat. Modal fisik digunakan sebagai penunjang kegiatan mata pencaharian. Modal fisik nelayan penuh dalam penelitian berbentuk infrastruktur jalan desa yang sudah sangat baik. Infrastruktur jalan desa yang baik membantu nelayan dalam mobilitas keluar-masuk desa. Jalan desa sudah ter-*paving* dengan baik. Hal sebaliknya terjadi pada jalan menuju pantai. Jalan pantai rusak dan belum diaspal sehingga perlu dilakukan perbaikan. Jalan yang rusak itu merupakan akses utama nelayan. Jalan yang rusak tersebut menghambat nelayan dalam melakukan aktivitas melaut. Aspek lain yang mendukung nelayan banjang penuh dalam melakukan aktivitas melaut adalah sarana produksi yang baik yang terdiri atas jaring dan bambu dalam bentuk banjang. Banjang yang terdiri atas bagian jaring dan bambu juga dirawat dalam upaya meningkatkan hasil produksi.

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

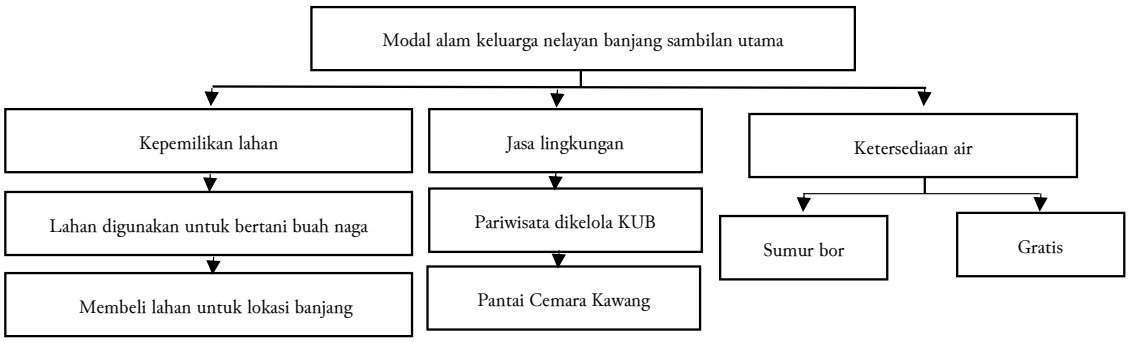

Gambar 7. Bagan Modal Alam Keluarga Nelayan Banjang Sambilan Utama.

Modal Alam Keluarga Nelayan Banjang Sambilan Utama

Gambar 7 menjelaskan bahwa nelayan banjang sambilan utama memiliki modal alam yang kuat yang dimanfaatkan dengan optimal sesuai dengan penelitian Sihombing, Kusai, dan Warningsih, (2021). Aset sumber daya alam memiliki fungsi yang sangat penting sebagai sumber kehidupan nelayan, misalnya jumlah sumber daya hewan laut bergantung pada sumber daya alam dan akan berpengaruh pada tingkat kehidupan. Kepemilikan lahan juga dimanfaatkan oleh nelayan banjang sambilan utama sebagai pekerjaan sampingan, yakni bertani buah naga. Lahan yang digunakan sebagai usaha tani menjadi pemasukan tambahan bagi keluarga nelayan banjang sambilan utama. Pemanfaatan pantai juga digunakan sebagai pemasukan tambahan. Istri nelayan ikut bekerja dengan membuka warung di area Pantai Cemara Kawang.

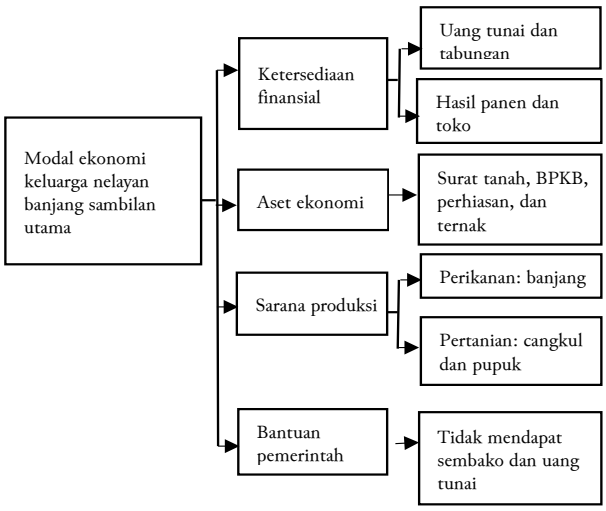

Gambar 8. Bagan Modal Ekonomi Keluarga Nelayan Banjang Sambilan Utama.

Modal Ekonomi Nelayan Banjang Sambilan Utama

Modal ekonomi atau finansial ini berfungsi untuk menunjang strategi mata pencaharian (Magfiroh & Sofia, 2020). Modal ekonomi atau finansial nelayan KUB Mina Sero Laut di Desa Wringinputih berupa uang, tabungan, sertifikat, kendaraan, emas, dan ternak yang juga sebagai tabungan jangka panjang keluarga nelayan.

Keluarga nelayan banjang sambilan utama memiliki modal ekonomi yang kuat dan jauh lebih beragam daripada keluarga nelayan banjang penuh. Modal ekonomi dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan penelitian Gai dan Dharmawan (2021), yakni modal ekonomi yang kuat dimanfaatkan untuk melakukan diversifikasi nafkah guna menambah penghasilan. Kepemilikan tabungan juga memperkuat perekonomian keluarga nelayan sambilan utama. Hal itu sejalan dengan penelitian Nurhayani dan Hodijah (2019) yang menyatakan bahwa kepemilikan tabungan merupakan salah satu kunci bagi nelayan dalam kepemilikan modal ekonomi. Rendahnya tabungan berimplikasi pada rendahnya investasi dan kurangnya modal ekonomi. Modal ekonomi yang kuat dimanfaatkan untuk diversifikasi nafkah dengan pembuatan toko sembako yang dapat menambah penghasilan keluarga. Kepemilikan aset ekonomi, seperti emas dan ternak kambing serta sapi menjadi investasi nelayan banjang sambilan utama. Aset emas dan ternak digunakan sebagai tabungan untuk pendidikan anak. Keluarga nelayan banjang sambilan utama mempunyai tabungan jangka panjang sebagai aset ekonomi. Ekonomi yang kuat membuat keluarga nelayan banjang sambilan utama memiliki keadaan ekonomi yang lebih stabil. Pendapatan keluarga nelayan banjang sambilan utama tidak hanya bersumber dari sektor perikanan, tetapi juga dari sektor nonperikanan yang memudahkan terjadinya akumulasi pendapatan. Hal itu juga didasari adanya sumber pendapatan lain yang dimiliki, baik hasil usaha toko maupun hasil bertani.

Modal Manusia Keluarga Nelayan Banjang Sambilan Utama

Modal manusia mengarah pada tingkat kemampuan, pengetahuan, kesehatan, dan kepemilikan tenaga kerja guna menunjang strategi

penghidupan keluarga nelayan. Modal manusia yang dimiliki memadai dan dalam usia produktif. Makin banyak modal sumber daya manusia yang dimiliki maka makin mudah akumulasi pendapatan yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Modal manusia dalam aspek kepemilikan tenaga kerja menjadi sumber kekuatan yang dapat menunjang strategi penghidupan. Modal manusia yang dimiliki nelayan banjang sambilan utama tergolong kuat dilihat dari aspek pendidikan formal, yakni lulusan SMA. Pendidikan nonformal yang dimiliki keluarga nelayan banjang sambilan utama tergolong beragam mulai dari keterampilan bertani, bertukang, hingga beternak. Tingkat keberagaman keterampilan yang tinggi itu digunakan nelayan untuk melakukan pekerjaan sampingan, yakni bertani, menjadi tukang, dan beternak. Aspek kesehatan yang dimiliki juga baik dilihat dari kondisi fisik nelayan yang bugar dan tidak memiliki riwayat penyakit kronis. Modal manusia yang kuat akan dapat memaksimalkan pendapatan nelayan. Hal tersebut selaras dengan penelitian Magfiroh dan Sofia (2020). Tercapainya strategi nafkah tentunya memerlukan modal manusia berupa keterampilan. Modal manusia yang dimiliki digunakan untuk melakukan diversifikasi nafkah.

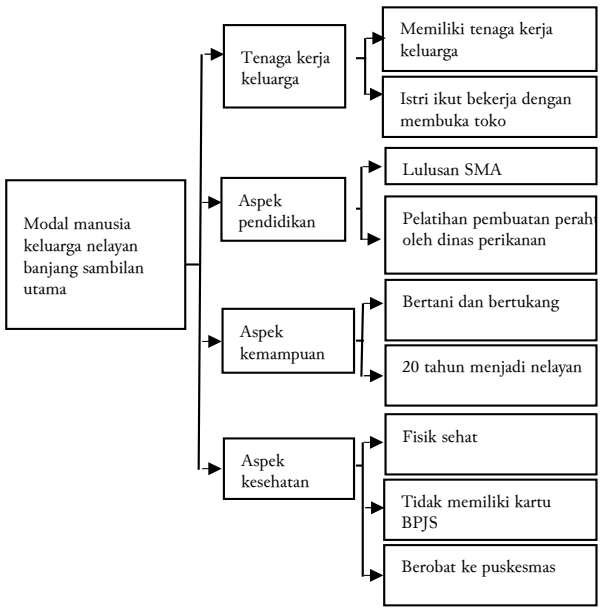

Gambar 9. Bagan Modal Manusia Keluarga Nelayan Banjang Sambilan Utama.

Modal manusia mengarah pada tingkat kemampuan, pengetahuan, kesehatan, dan kepemilikan tenaga kerja guna menunjang strategi penghidupan keluarga nelayan. Modal manusia yang dimiliki memadai dan dalam usia produktif. Makin banyak modal sumber daya manusia yang dimiliki maka makin mudah akumulasi pendapatan yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Modal manusia dalam aspek kepemilikan tenaga kerja menjadi sumber kekuatan yang dapat menunjang strategi penghidupan. Modal manusia yang dimiliki nelayan banjang sambilan utama tergolong kuat dilihat dari aspek pendidikan formal, yakni lulusan SMA. Pendidikan nonformal yang dimiliki keluarga nelayan banjang sambilan utama tergolong beragam mulai dari keterampilan bertani, bertukang, hingga beternak. Tingkat keberagaman keterampilan yang tinggi itu digunakan nelayan untuk melakukan pekerjaan sampingan, yakni bertani, menjadi tukang, dan beternak. Aspek kesehatan yang dimiliki juga baik dilihat dari kondisi fisik nelayan yang bugar dan tidak memiliki riwayat penyakit kronis. Modal manusia yang kuat akan dapat memaksimalkan pendapatan nelayan. Hal tersebut selaras dengan penelitian Magfiroh dan Sofia (2020). Tercapainya strategi nafkah tentunya memerlukan modal manusia berupa keterampilan. Modal manusia yang dimiliki digunakan untuk melakukan diversifikasi nafkah.

Modal Sosial Keluarga Nelayan Banjang Sambilan Utama

Modal sosial merupakan kemampuan individu nelayan atau sekelompok nelayan yang bekerja sama membangun suatu jaringan guna mencapai tujuan bersama dalam memperbaiki kualitas kehidupan yang meliputi kepercayaan, pranata, dan jaringan sosial (Sudrajat, 2021).

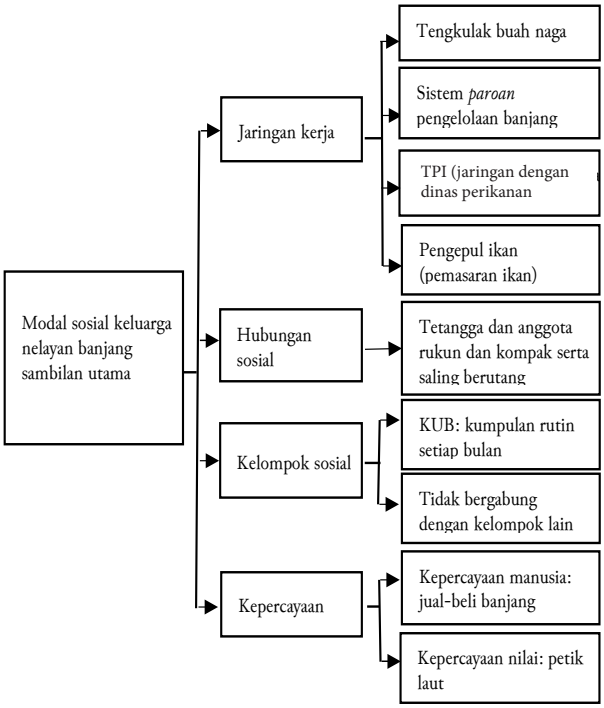
Modal sosial keluarga nelayan banjang sambilan utama
Jaringan kerja
Tengkulak buah naga
Sistem *paroan* pengelolaan banjang
TPI (jaringan dengan dinas perikanan
Pengepul ikan (pemasaran ikan)
Hubungan sosial
Tetangga dan anggota rukun dan kompak serta saling berutang
Kelompok sosial
KUB: kumpulan rutin setiap bulan
Tidak bergabung dengan kelompok lain
Kepercayaan
Kepercayaan manusia: jual-beli banjang
Kepercayaan nilai: petik laut

Gambar 10. Bagan Modal Sosial Keluarga Nelayan Banjang Sambilan Utama.

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

Modal sosial yang dimiliki nelayan banjang sambilan utama kuat. Hal itu dimanfaatkan untuk menunjang mata pencaharian. Salah satu modal sosial nelayan banjang sambilan utama adalah jaringan kerja nelayan dengan pengepul (tengkulak) yang dapat menambah penghasilan keluarga. Modal sosial nelayan banjang sambilan utama dalam penelitian ini dibagi menjadi empat aspek, yaitu (1) jaringan sosial yang beragam, seperti jaringan dengan pengepul; (2) sistem bagi hasil yang digunakan dalam peningkatan produksi dan pemasaran hasil ikan; (3) hubungan sosial yang terjalin dengan baik antartetangga dan antaranggota KUB; serta (4) kepercayaan tradisi yang menjadi budaya yang masih dilestarikan hingga saat ini, seperti tradisi petik laut sebagai ungkapan rasa syukur nelayan akan hasil laut yang melimpah.

Modal Fisik Nelayan Banjang Sambilan Utama

Modal fisik dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga aspek, yakni akses jalan, kepemilikan hunian, dan kepemilikan kendaraan (Chamro & Widjayanthi, 2020). Modal fisik dalam nafkah keluarga nelayan adalah barang produksi dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung mata pencaharian. Modal fisik yang dimiliki keluarga nelayan banjang sambilan utama cukup baik dilihat dari aspek kepemilikan hunian dan kendaraan milik sendiri yang digunakan untuk melakukan aktivitas ekonomi. Modal fisik digunakan sebagai penunjang kegiatan mata pencaharian sehari-hari dalam aktivitas dan mobilitas. Modal fisik merupakan sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas penghidupan manusia dan aktivitas mata pencaharian. Salah satunya adalah akses jalan untuk mobilitas dan tranportasi nelayan. Modal fisik menjadi salah satu modal kuat yang dimiliki keluarga nelayan banjang sambilan utama KUB Mina Sero Laut.

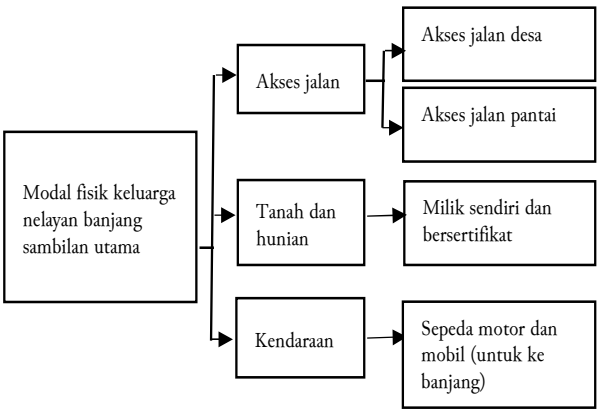

Gambar 11. Bagan Modal Fisik Keluarga Nelayan Banjang Sambilan Utama.

Strategi Nafkah Keluarga Nelayan Banjang

Strategi nafkah lebih diartikan sebagai strategi penghidupan (*livelihood strategy*) daripada strategi bertahan hidup (*means of living strategy*) [Magfiroh & Sofia, 2020]. Strategi nafkah merupakan upaya meningkatkan pendapatan yang meliputi aspek pilihan atas beberapa sumber nafkah yang ada di sekitar masyarakat. Makin beragamnya pilihan yang dimiliki maka makin memungkinkan terjadinya strategi nafkah (Anggraini, 2020). Alternatif peran usaha dilakukan untuk meningkatkan pendapatan keluarga nelayan agar makin optimal (Paulus, 2017). Scoones (1998) mengklasifikasikan strategi nafkah ke dalam tiga aspek, yaitu (1) intensifikasi/ektensifikasi pertanian, (2) diversifikasi nafkah, dan (3) migrasi. Intensifikasi merupakan usaha meningkatkan hasil produksi dengan cara meningkatkan kemampuan atau memaksimalkan produktivitas faktor-faktor produksi yang ada. Diversifikasi atau pola nafkah ganda merupakan penerapan keanekaragaman pola nafkah dengan cara mencari pekerjaan lain selain pertanian untuk menambah pendapatan (Gai *et al.,* 2020). Migrasi merupakan perpindahan penduduk dengan tujuan menetap dari satu tempat ke tempat yang lain melewati batas administratif suatu wilayah (Scoones, 1998).

Intensifikasi Keluarga Nelayan Banjang Penuh

Intensifikasi merupakan kegiatan yang dilakukan nelayan dalam rangka meningkatkan kualitas kapasitas usaha penangkapan (Izana & Susanti, 2021). Nelayan banjang penuh melakukan intensifikasi dalam bidang perikanan dengan meningkatkan hasil banjang dengan cara memaksimalkan sarana produksi yang dimiliki nelayan banjang penuh. Nelayan banjang penuh menggunakan banjang atau disebut melaut tanpa menggunakan kapal. Sarana produksi yang ada dalam banjang berupa jaring, waring, bambu, dan tampar. Nelayan banjang penuh memaksimalkan hasil ikan dengan meningkatkan dan merawat sarana produksi di banjang berupa jaring dan bambu yang rutin diganti setiap 4 bulan sekali. Modal yang besar diperlukan untuk membeli alat tangkap yang bagus agar hasil tangkapan ikan meningkat dan pendapatan juga akan meningkat. Nelayan melakukan servis banjang mulai dari membetulkan jaring dan bambu hingga memberikan kapur pada jaring. Scoones (1998) menyebutkan bahwa dukungan input eksternal atau kebijakan merupakan bagian dari intensifikasi pertanian. Kebijakan yang dimaksud berupa pelatihan yang diselenggarakan oleh dinas perikanan, yakni pelatihan penyulaman jaring.

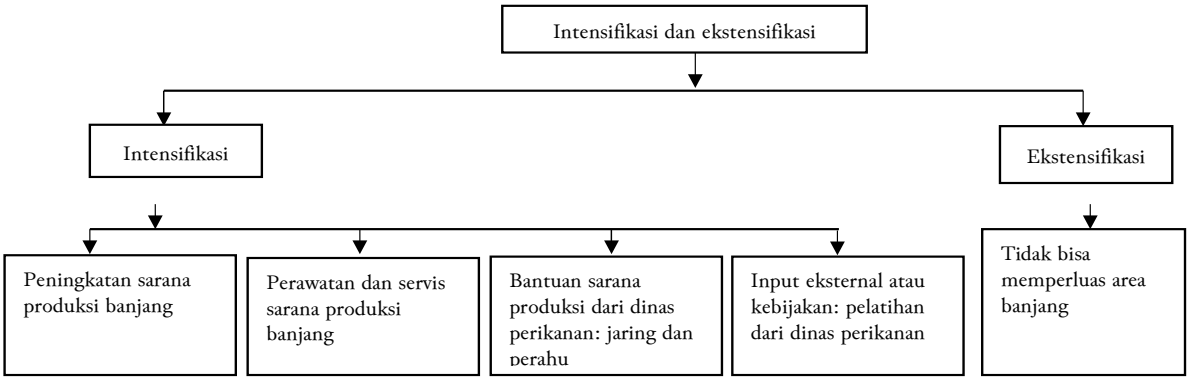
Intensifikasi dan ekstensifikasi
Intensifikasi
Ekstensifikasi
Peningkatan sarana produksi banjang
Perawatan dan servis sarana produksi banjang
Bantuan sarana produksi dari dinas perikanan: jaring dan perahu
Input eksternal atau kebijakan: pelatihan dari dinas perikanan
Tidak bisa memperluas area banjang

Gambar 12. Bagan Intensifikasi Keluarga Nelayan Banjang Penuh.

Diversifikasi Keluarga Nelayan Banjang Penuh

Diversifikasi nafkah merupakan perluasan alternatif mata pencaharian yang dilakukan nelayan, baik bidang nelayan maupun nonnelayan (Rero, 2020). Nelayan banjang penuh tidak melakukan penganekaragaman usaha untuk mencukupi kebutuhan nafkah keluarga. Nelayan banjang penuh hanya mengandalkan hasil banjang sebagai satu-satunya sumber pendapatan. Apabila hasil banjang menurun akibat musim paceklik atau musim angin, keluarga nelayan banjang penuh akan berutang kepada tetangga untuk memenuhi kebutuhannya. Cara lain yang dilakukan nelayan banjang penuh pada saat musim paceklik adalah mengandalkan arisan yang diikuti untuk mencukupi kebutuhannya. Arisan menjadi langkah nelayan ketika mengalami impitan ekonomi pada saat musim paceklik yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nelayan banjang penuh hidup seratus persen mengandalkan hasil laut berupa banjang.

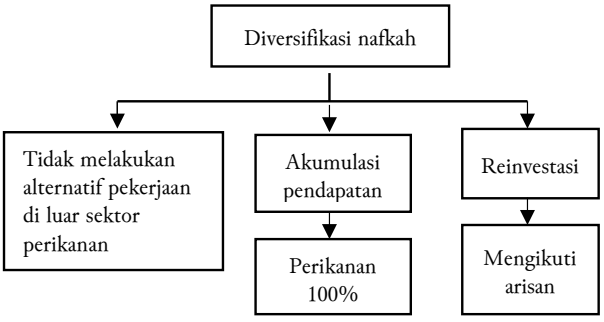

Gambar 13. Bagan Diversifikasi Keluarga Nelayan Banjang Penuh.

Migrasi Keluarga Nelayan Banjang Penuh

Migrasi merupakan fenomena aktual yang tidak dapat dipisahkan dari kondisi ekonomi masyarakat dan akses keluarga terhadap sumber ekonomi setempat.

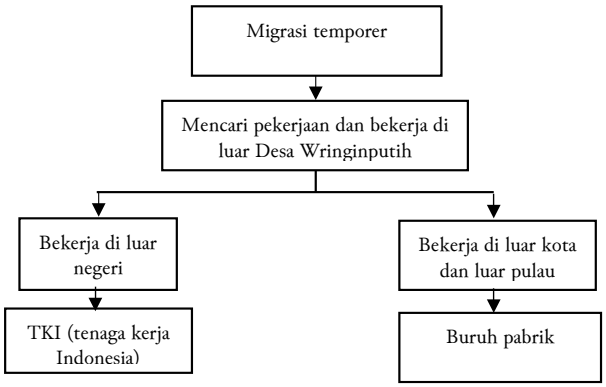
Migrasi temporer
Mencari pekerjaan dan bekerja di luar Desa Wringinputih
Bekerja di luar negeri
TKI (tenaga kerja Indonesia)
Bekerja di luar kota dan luar pulau
Buruh pabrik

Gambar 14. Bagan Migrasi Keluarga Nelayan Banjang Penuh.

Aspek ekonomi migrasi mengandung dua harapan, yakni mendapat pekerjaan dan memperoleh pendapatan yang tinggi. Faktor penarik (dari daerah tujuan migrasi) adalah tersedianya lapangan pekerjaan dengan upah yang pasti (Zulham *et al.*, 2017). Migrasi yang dilakukan oleh keluarga nelayan penuh adalah migrasi temporer dengan bekerja di luar negeri. Istri nelayan banjang penuh melakukan migrasi dengan bekerja sebagai TKW di Taiwan untuk memenuhi kebutuhan. Faktor pendorong menjadi TKW di luar negeri adalah menyempitnya lapangan pekerjaan. Faktor penarik TKW di luar negeri adalah adanya harapan akan memperoleh kesempatan untuk memperbaiki taraf hidup. Remitansi membantu keluarga keluar dari kemiskinan, menurunkan angka kematian, dan mempertinggi tingkat pendidikan. Keluarga yang menerima remitansi sebagian kecil menggunakannya untuk konsumsi dan sebagian besar lagi diinvestasikan dalam bentuk investasi sosial, seperti pendidikan dan perumahan (Mukbar, 2020). Penelitian menghasilkan dua pola kombinasi strategi nafkah dominan yang dijalankan oleh keluarga nelayan banjang penuh, yaitu strategi nafkah tunggal intensifikasi (I) dan pola kombinasi intensifikasi-migrasi (I-M).

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

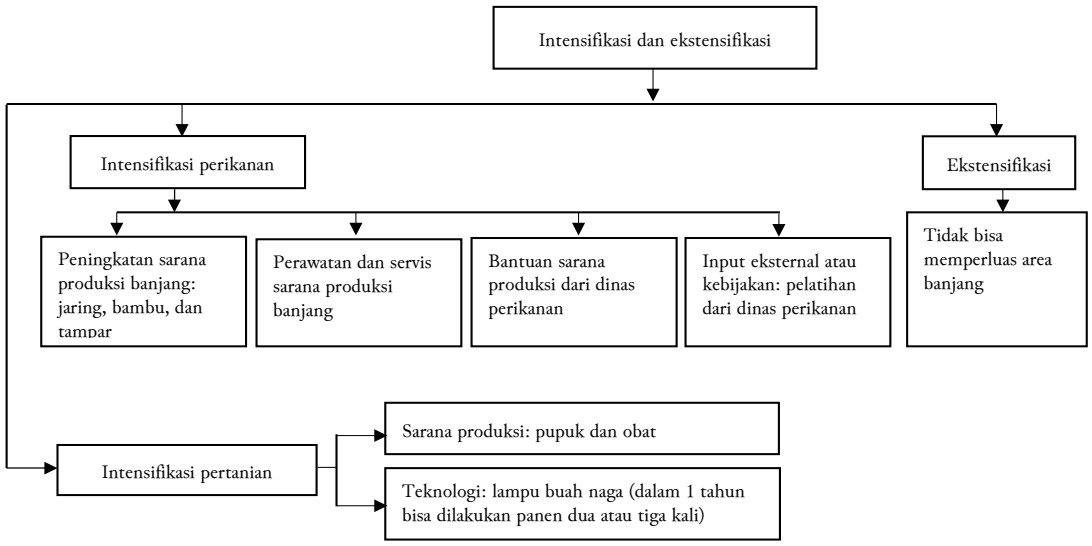
Intensifikasi dan ekstensifikasi
Intensifikasi perikanan
Ekstensifikasi
Peningkatan sarana produksi banjang: jaring, bambu, dan tampar
Perawatan dan servis sarana produksi banjang
Bantuan sarana produksi dari dinas perikanan
Input eksternal atau kebijakan: pelatihan dari dinas perikanan
Tidak bisa memperluas area banjang
Intensifikasi pertanian
Sarana produksi: pupuk dan obat
Teknologi: lampu buah naga (dalam 1 tahun bisa dilakukan panen dua atau tiga kali)

Gambar 15. Bagan Intensifikasi Keluarga Nelayan Banjang Sambilan Utama.

Intensifikasi Nafkah Keluarga Nelayan Banjang Sambilan Utama

Nelayan banjang sambilan utama melakukan intensifikasi dalam pengoptimalan sarana produksi yang dimiliki. Intensifikasi yang dilakukan oleh nelayan banjang sambilan utama KUB Mina Sero Laut mencakup dua sektor, yakni perikanan dan pertanian. Sarana produksi yang ada dalam banjang berupa jaring, waring, bambu, dan tampar. Nelayan memaksimalkan hasil ikan dengan meningkatkan dan merawat sarana produksi. Salah satunya adalah melakukan perawatan banjang. Input eksternal juga dilakukan dalam bentuk kebijakan dinas perikanan yang melaksanakan pelatihan bagi nelayan, yakni pelatihan penyulaman jaring dalam upaya meningkatkan sarana produksi. Upaya pengoptimalan hasil banjang juga dilakukan dengan adanya bantuan sarana produksi yang diberikan dinas perikanan untuk meningkatkan hasil banjang. Ekstensifikasi diarahkan untuk memperluas usaha penangkapan dan budi daya ke daerah-daerah yang masih mempunyai potensi yang besar. Nelayan banjang sambilan utama tidak melakukan ektensifikasi karena perjanjian banjang antara pemilik banjang lama dan pemilik banjang baru tidak bisa diperluas. Dengan demikian, nelayan banjang sambilan utama dalam peningkatan hasil hanya melakukan pengoptimalan dari segi sarana produksi. Perluasan area banjang tidak bisa dilakukan.

Diversifikasi Keluarga Nelayan Banjang Sambilan Utama

Menurut Scoones (1998), diversifikasi nafkah dilakukan oleh nelayan banjang sambilan utama dengan memilih alternatif pekerjaan lain, melakukan akumulasi dari hasil pendapatan yang diperoleh, dan melakukan reinvestasi modal usaha dalam bentuk usaha tani, berdagang, dan sebagainya. Diversifikasi nafkah merupakan perluasan alternatif mata pencaharian yang dilakukan nelayan, baik di sektor perikanan maupun nonperikanan (Rero, 2020). Diversifikasi yang dilakukan beragam sehingga akumulasi juga dari banyak sektor. Dengan demikian, nelayan dapat melakukan reinvestasi pendapatan dalam bentuk emas, ternak,

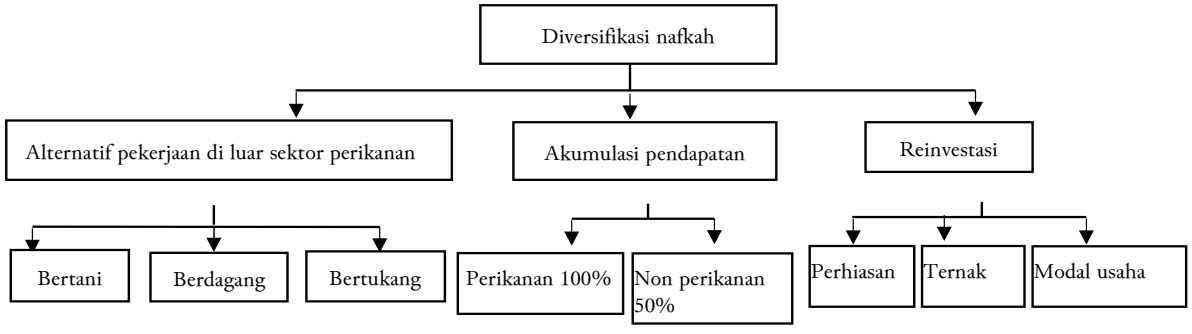

Gambar 16. Bagan Diversifikasi Keluarga Nelayan Banjang Sambilan Utama.

dan modal usaha keluarga nelayan banjang sambilan utama. Nelayan banjang sambilan utama memiliki modal manusia yang kuat dilihat dari tingginya keberagaman keterampilan yang membuat nelayan sambilan utama memiliki pekerjaan sampingan. Pendapatan dari pekerjaan sampingan ini digunakan untuk akumulasi pendapatan dengan melakukan pembelian aset, seperti ternak dan emas lalu pendapatan dari melaut digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Migrasi Keluarga Nelayan Banjang Sambilan Utama

Menurut Scoones (1998), migrasi merupakan salah satu strategi yang dilakukan untuk mempertahankan status kehidupan keluarga nelayan sambilan utama KUB Mina Sero Laut.

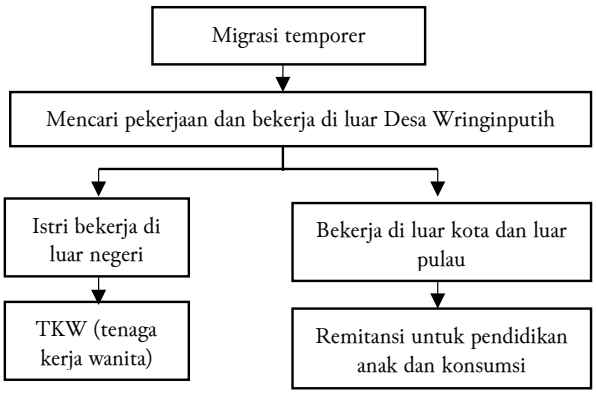
Migrasi temporer
Mencari pekerjaan dan bekerja di luar Desa Wringinputih
Istri bekerja di luar negeri
Bekerja di luar kota dan luar pulau
TKW (tenaga kerja wanita)
Remitansi untuk pendidikan anak dan konsumsi

Gambar 17. Bagan Migrasi Keluarga Nelayan Banjang Sambilan Utama.

Migrasi yang dilakukan oleh keluarga nelayan banjang adalah bekerja di luar negeri dan bekerja di luar pulau. Migrasi dilakukan dengan tujuan memperoleh penghasilan yang lebih tinggi agar kebutuhan hidup keluarga lebih terjamin (Suib & Sakdiyah, 2019). Anggota keluarga nelayan banjang sambilan utama melakukan strategi migrasi temporer untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Kegiatan migrasi tersebut dilakukan untuk memperoleh nafkah dari bekerja menjadi TKI (tenaga kerja Indonesia) di Taiwan. Empat istri nelayan banjang sambilan utama yang menjadi informan dalam penelitian ini bermigrasi dengan bekerja di luar negeri. Menjadi TKI merupakan pilihan yang dilakukan anggota keluarga nelayan dengan alasan kesempatan kerja yang besar dan upah yang tinggi sehingga mereka meninggalkan keluarga dengan bekerja di luar negeri. Migrasi dipilih keluarga nelayan banjang sambilan utama dalam upaya memenuhi kebutuhan sehingga istri nelayan bekerja di luar negeri dengan harapan mendapatkan gaji dan kesempatan yang jauh lebih besar. Remitansi gaji setiap bulan digunakan untuk membantu pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan pendidikan anak. Rata-rata anggota keluarga yang menjadi TKI memiliki 5-6 anggota keluarga dengan usia anak dalam masa pendidikan.

Keluarga nelayan banjang penuh kurang dapat memaksimalkan dan mengelola potensi modal keluarga yang dimiliki dari kelima modal keluarga (alam, manusia, sosial, ekonomi, dan fisik). Keluarga nelayan banjang penuh hanya memiliki dua modal yang kuat, yakni modal sosial dan fisik, sedangkan modal yang lemah adalah modal manusia, ekonomi, dan alam sehingga berpengaruh pada pemilihan strategi nafkah yang digunakan. Nelayan banjang penuh pada modal alam hanya memanfaatkan potensi hasil laut sebagai sumber pendapatan utama dan tidak mengeksplorasi potensi alam lain, seperti pantai yang bisa dimanfaatkan sebagai tempat berjualan. Modal manusia yang dimiliki nelayan banjang penuh berupa tingkat keterampilan yang sangat kurang, yakni hanya memiliki keterampilan melaut saja. Keterampilan merupakan perilaku yang menunjukkan kemampuan individu dalam melakukan tugas mental atau fisik tertentu. Untuk mencapai strategi nafkah, diperlukan modal manusia berupa keterampilan. Nelayan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sangat terbatas (Andari, 2022). Modal ekonomi yang dimiliki juga kurang maksimal, seperti kepemilikan aset ekonomi yang tidak beragam sehingga akumulasi pendapatan juga kurang. Nelayan banjang penuh memiliki modal sosial yang kuat dengan memanfaatkan jaringan kerja dalam pemenuhan kebutuhan, yakni jaringan kerja dengan tengkulak ikan untuk memasarkan ikan hasil banjang, jaringan dengan dinas perikanan dalam bentuk TPI, dan jaringan dengan sesama nelayan. Modal sosial merupakan sumber daya yang dipandang sebagai sebuah investasi untuk mendapatkan sumber daya baru. Potensi ini difokuskan pada ruang perhatian, jaringan sosial, norma, nilai, dan kepercayaan antara sesama dan menjadi norma kelompok yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari (Hasbullah, 2006).

Modal sosial dapat dikatakan sebagai pendorong terlaksananya modal lainnya, seperti modal manusia, modal alam, modal ekonomi, dan modal fisik. Modal kuat kedua yang dimiliki nelayan banjang penuh adalah modal fisik yang juga menyangkut infrastruktur yang dimanfaatkan untuk menunjang aktivitas ekonomi yang dilakukan. Kurang optimalnya modal yang dikelola keluarga nelayan banjang penuh membuat jumlah pendapatan juga kurang dapat dimaksimalkan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Keluarga nelayan

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

banjang sambilan utama memiliki pengelolaan aset atau modal yang optimal dan dominan. Kelima modal (alam, manusia, sosial, ekonomi, dan fisik) dimanfaatkan dengan maksimal. Keluarga nelayan banjang sambilan utama memiliki modal alam yang kuat. Selain memanfaatkan potensi hasil laut, keluarga nelayan banjang sambilan utama juga memanfaatkan pantai sebagai tempat berjualan. Kemudian, kepemilikan lahan dimanfaatkan sebagai ladang bertani buah naga. Pada modal alam, nelayan banjang sambilan utama memiliki tiga sumber pendapatan. Hubungan modal alam yang dimiliki oleh keluarga nelayan banjang penuh dengan strategi penghidupan berbanding lurus. Artinya, makin tinggi kepemilikan keluarga nelayan banjang sambilan utama terhadap modal alam maka strategi penghidupan keluarga nelayan banjang sambilan utama akan makin jauh dari sekadar untuk bertahan hidup dan digunakan sebagai akumulasi pendapatan.

Modal manusia yang dimiliki nelayan banjang sambilan utama juga optimal. Nelayan banjang sambilan utama memiliki banyak keterampilan yang digunakan untuk melakukan pekerjaan sampingan, seperti bertani, bertukang, dan berdagang. Untuk mencapai strategi nafkah, diperlukan modal manusia berupa keterampilan. Modal ekonomi yang dimiliki juga kuat dilihat dari beragamnya aset ekonomi yang dimiliki mulai dari ternak, emas, hingga tabungan. Aset ekonomi merupakan sumber kekuatan bagi keluarga nelayan banjang sambilan utama dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan pendidikan anak. Modal sosial yang dimiliki juga kuat, yakni jaringan sosial dengan tengkulak. Tengkulak juga merasakan dampak yang ditimbulkan dari relasi sosial yang terjalin di antara keduanya. (Imaniar & Brata, 2020). Jaringan kerja dengan dinas perikanan dalam bentuk TPI (tempat pelelangan ikan) berperan penting dalam kegiatan nelayan serta menjadi faktor yang menggerakkan dan meningkatkan usaha serta kesejahteraan nelayan (Pramudya *et al.,* 2020).

Nelayan banjang sambilan utama memiliki lima modal keluarga yang optimal yang membuat beragamnya strategi nafkah dan terakumulasinya pendapatan yang dimiliki dalam pemenuhan kebutuhan. Keluarga banjang sambilan utama lebih mudah melakukan akumulasi pendapatan daripada keluarga nelayan banjang penuh. Hal ini dapat dilihat dari strategi nafkah yang diterapkan. Keluarga nelayan banjang penuh hanya menerapkan strategi intensifikasi dan migrasi. Keluarga nelayan banjang penuh tidak melakukan diversifikasi karena lemahnya modal manusia dan ekonomi yang dimiliki. Sementara itu, keluarga nelayan sambilan utama memaksimalkan lima modal yang dimiliki, yakni modal alam, manusia, sosial, ekonomi, dan fisik. Kemaksimalan lima modal ini berpengaruh pada strategi nafkah yang juga dapat dimaksimalkan dengan melakukan tiga jenis strategi dalam pemenuhan kebutuhan keluarga dan akumulasi pendapatan, yakni intensifikasi, diversifikasi, dan migrasi.

IMPLIKASI KEBIJAKAN

Perlu ada kebijakan pemerintah yang diarahkan untuk menciptakan kondisi yang dibutuhkan untuk optimalisasi modal manusia pada keluarga nelayan banjang penuh dan nelayan banjang sambilan utama. Kebijakan tersebut dapat diwujudkan melalui akselerasi peningkatan capaian pendidikan, khususnya pendidikan formal keluarga nelayan banjang penuh dan mengembangkan keterampilan dalam rangka diversifikasi mata pencaharian. Hal ini relevan dengan temuan peneliti lain (Ilham & Hamidy, 2021; Ariska & Prayitno, 2019), yang menunjukkan kaitan antara capaian pendidikan dengan kondisi sosial ekonomi dalam masyarakat. Selanjutnya, sehubungan dengan modal ekonomi yang lemah, pemerintah melalui BUMDes dapat meningkatkan fasilitasi permodalan yang disertai dengan pembekalan keterampilan sehingga nelayan mampu membuka usaha alternatifFasilitasi untuk optimalisasi strategi nafkah keluarga nelayan banjang juga dapat dilakukan oleh pemerintah desa dan dinas terkait, terutama bagi keluarga nelayan banjang penuh dalam melakukan diversifikasi usaha melalui pelatihan dan pembinaan istri nelayan dalam rangka pengembangan keterampilan. Diversifikasi nafkah dari sektor non-perikanan dilakukan karena melihat potensi usia produktif istri nelayan yang seharusnya bisa dioptimalkan untuk menambah pendapatan keluarga.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada KUB Mina Sero Laut, Pemerintah Desa Wringinputih, pendamping penyuluh perikanan Kecamatan Muncar, dan Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi yang telah membantu dalam penelitian ini.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Kami menyatakan bahwa kontribusi setiap penulis dalam pembuatan karya tulis ini adalah Melisa Priskila Patrescia sebagai kontributor utama dan Rokhani sebagai kontributor anggota.

DAFTAR PUSTAKA

Andari, S. (2022). Kebutuhan nelayan miskin dalam pemenuhan kesejahteraan keluarga di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar. *Jurnal Kebijakan Sosek KP*, *12*(1), 11—21. http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v12i1.10825.

Badan Pusat Statistik, 2019. *Jumlah rumah tangga perusahaan perikanan tangkap menurut provinsi dan jenis penangkapan*. Badan Pusat Statistik.

Chamro, W., & Widjayanthi, L. (2020). Resiliensi masyarakat nelayan selama musim laeb di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian Agribisnis*. *16*(2), 147--159. https://doi.org/10.20961/Sepa.V16i2.33792.

Ellis, F. (2000). *Rural livelihood diversity in developing countries*. Oxford University Press.

Gai, A. M., Poerwati, T., Maghfirah, F., & Sir, M. M. (2020). Analysis of sustainable livelihood level and its influence on community vulnerability of Surumana Village, Central Sulawesi. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, *4*(3), 209–220. https://doi.org/10.29244/Jp2wd.2020.4.3.209-220.

Imran, A. N. (2012). Identifikasi Kapasitas komunitas lokal dalam pemanfaatan potensi ekowisata bagi pengembangan ekowisata di Kawah Cibuni. *Journal of Regional and City Planning*, *23*(2), 85. https://doi.org/10.5614/jpwk.2012.23.2.1.

Izana, N. N., & Susanti, A. (2021). Strategi penghidupan masyarakat pesisir di Giligenting Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, *7*(1), 15. https://doi.org/10.15578/Marina.V7i1.8656.

Lumban-Gaol, J., Arhatin, R. E., Syah, A. F., Kushardono, D., Lubis, J. T., Amanda, N. D., Amanda, Y., & Octavia, W. (2019). Distribusi kapal ikan pada fase bulan gelap dan terang berdasarkan data sensor visible infrared imaging radiometer suite (viirs) di Laut Jawa. *Jurnal Kelautan Nasional*, *14*(3), 135–144. https://doi.org/10.15578/Jkn.V14i3.7569.

Magfiroh, W., & Sofia. (2020). Strategi nafkah istri nelayan buruh di Desa Pengambengan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana. *JSEP (Journal of Social and Agricultural Economics)*, *13*(1), 73. https://doi.org/10.19184/Jsep.V13i1.16424.

Mujaddid, A., & Nugroho, F. (2021). Kondisi sosial ekonomi nelayan tangkap di Kelurahan Kolakaasi Kabupaten Kolaka. *Pekerjaan Sosial*, *20*(1), 130–137. https://doi.org/10.31595/Peksos.V20i1.304.

Nurhayani, N., & Hodijah, S. (2019). Kemiskinan dan kondisi pemukiman nelayan tradisional (studi di Kelurahan Kampung Nelayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat). *Jurnal Paradigma Ekonomika*, *13*(2), 55–64. https://doi.org/10.22437/Paradigma.V13i2.6747.

Kristianti, Kusai, & Bathara, L. (2014). Strategi bertahan hidup nelayan buruh di Desa Meskom Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. *Berkala Perikanan Terubuk*, *2*(42), 10--18. http://dx.doi.org/10.31258/Terubuk.42.1.62-68.

Kusbianto, Simon, J., & Irwanmay. (2021). Permasalahan dan strategi pemecahan masalah nelayan tradisional Keluarga Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan Kota Medan Provinsi Sumatra Utara. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, *9*(1), 1--7. https://doi.org/10.36987/Jiad.V9i1.1953.

Scoones. (1998). Sustainable governance of livelihoods in Rural Africa: A place-based response to globalism in Africa. *Development (Basingstoke)*, *42*(2), 57–63. https://doi.org/10.1057/Palgrave.Development.1110037.

Sihombing, S. J., Kusai, & Warningsih, T. (2021). Status aset penghidupan nelayan Desa Igal Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, *16*(1), 29–38. Http://Dx.Doi.Org/10.15578/Jsekp.V16i1.8368.

Sudrajat, J. (2016). Livelihood strategy of coastal community: A case study in Tanjung Saleh Islands, Kubu Raya District, Indonesia. *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, *8*(1), 22–31. https://doi.org/10.15294/Komunitas.V8i1.4581.

Suib, M. Syaiful, & Sakdiyah, H. (2019). Alam menghadapi era globalisasi ekonomi perspektif ekonomi Islam. *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan*, *3*(1), 52–70. https://doi.org/10.33650/Profit.V3i1.540.

Susanto, I. D., & Rondhi, M. (2021). Efek inovasi penyinaran lampu pada usaha tani buah naga di Desa Bulurejo Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal KIRANA*, *1*(2), 74. Https://Doi.Org/10.19184/Jkrn.V1i2.21186.

Sulistiyanti, S., & Wahyudi, W. (2015). Pengembangan ekonomi wilayah berbasis sektor perikanan di Provinsi Jawa Timur. *Media Trend: Berkala Kajian Ekonomi & Studi Pembangunan*, *10*(2), 140–164. https://Doi.Org/10.21107/Mediatrend.V10i2.945.

Ukkas, I. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja industri kecil Kota Palopo. *Kelola: Journal of Islamic Education Management*, *2*(2). https://doi.org/10.24256/Kelola.V2i2.440.

Widiasyih, A. S., Febriamansyah, R., & Yuerlita. (2019). Livelihood strategy of lake fishing community in Guguk Malalo Village, West Sumatra Province, Indonesia. *International Journal of Agriculture Sciences*, *1*, 36–43. https://doi.org/10.25077/Ijasc.3.1.36-43.2019.

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

Zulham, A., Saptanto, S., Rahmawati, R. E., Lindawati, L., & Fauzi, T. (2017). Analisis pola migrasi dan konsumsi rumah tangga di desa pesisir terkait kemiskinan dan kerentanan pangan. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, *4*(2), 185. https://doi.org /10.15578/Jsekp. V4i2.5829.

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

Strategi Pemasaran Dalam Masa Pandemi: Pelajaran dari Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar) Hasil Perikanan di Kabupaten Banyumas

Marketing Strategy During a Pandemic: Lessons from Fishery Product Processors and Marketers Group (Poklahsar) in Banyumas Regency

***Annisa Wening Maharani Putri[1], Muhammad Hanief Ihsanuddin[2], Kusdiarti[3], Lies Emmawati[3] dan Endhay Kusnendar Muljana Kontara[3]**

[1]Pusat Riset Veteriner, Organisasi Riset Kesehatan, Badan Riset dan Inovasi Nasional
Jl. Re. Martadinata No.30, RT.3, RW.11, Ciwaringin, Kota Bogor, Indonesia
[2]Direktorat Logistik, Direktorat Jenderal PDSPKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan
Gedung Mina Bahari III Lantai 12, Jl. Medan Merdeka Timur Kota Jakarta Pusat, Indonesia
[3]Pusat Riset Perikanan, Organisasi Riset Kebumian dan Maritim, Badan Riset dan Inovasi Nasional
Organisasi Riset Kebumian dan Maritim, Jl. Raya Jakarta-Bogor Km.46, Cibinong, INdonesia

ARTICLE INFO

Diterima tanggal : 18 Agustus 2022
Perbaikan naskah: 17 Februari 2023
Disetujui terbit : 29 Mei 2023

*Korespodensi penulis:
Email: annisawng@gmail.com

DOI: http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v13i1.11379

CC BY NC SA

ABSTRAK

Pandemi COVID-19, yang berdampak pada penurunan aktivitas sampai dengan kegagalan bisnis, memberi pelajaran berharga bagi keberhasilan pengembangan usaha Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar). Hasil Perikanan di Kabupaten Banyumas melalui penerapan strategi SO (*Strenght-Opportunities*). Penelitian ini merupakan studi kasus yang dilaksanakan di Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Kembaran, dan Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas pada bulan April sampai dengan Mei 2021. Tujuan penelitian untuk mengkonfirmasi validitas strategi keberhasilan poklahsar Banyumas dalam mengatasi dampak pandemi. Data utama diperoleh melalui konsultasi dengan pejabat Dinas Pertanian dan Perikanan (DPP) Kabupaten Banyumas, dan wawancara dengan anggota poklahsar melalui teknik *purposive sampling*. Poklahsar diwakili oleh pengurus dan/atau anggota aktif yang pada umumnya adalah perempuan berusia usia 20–60 tahun, yang melakukan usaha pengolahan nila, lele, gurami, tuna, dan salmon. Dilakukan pengambilan sampel sebanyak 10 responden dari total 37 anggota dari lima poklahsar aktif sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Pokok analisis pertama adalah rekonstruksi strategi yang diterapkan oleh masyarakat pada masa pandemi Covid-19, melalui analisis SWOT. Analisis SWOT didasarkan pada hasil identifikasi aspek-aspek kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang relevan dengan situasi. Analisis kedua adalah pengukuran kinerja dari strategi tersebut, melalui analisis usaha poklahsar terkait. Hasil menunjukkan bahwa: (i) strategi *Strenght-Opportunities* terbukti valid dan sesuai dengan analisis SWOT yang didasarkan pada pada aspek-aspek internal dan eksternal terkait, (ii) analisis usaha menunjukkan kinerja finansial positif, yang mengindikasikan berjalannya strategi yang diterapkan. Implikasi kebijakan dari kesimpulan ini adalah bahwa strategi tepat yang menyertakan pertimbangan segenap aspek relevan sangat penting untuk menunjang keberhasilan pelaku usaha untuk menghadapi situasi sulit seperti pandemi.

Kata Kunci: analisis kelayakan usaha; BEP; NPV; B/C ratio; poklahsar; SWOT

ABSTRACT

The impact of the COVID-19 pandemic on reducing activity to the point of business failure provided valuable lessons for the successful development of the Fishery Product Processing and Marketing Group (Poklahsar) business in Banyumas Regency through the implementation of the Strenght-Opportunities strategy. This research is a case study conducted in Kedungbanteng, Kembaran, and Sokaraja Districts, Banyumas Regency from April to May 2021. The aim is to confirm Poklahsars' successful strategy to overcome the pandemic impact. The primary data was obtained through consultation with the Agriculture and Fisheries Agency (DPP) officials of Banyumas Regency, and interviews with Poklahsars' members using a purposive sampling technique. Poklahsars were represented by the active members who are generally women aged 20–60 years, operating processing businesses of tilapia, catfish, gourami, tuna, and salmon. Sampling was conducted from 10 respondents from 37 members from five active Poklahsars according to predetermined criteria. The strategy-implemented reconstruction of the community during the pandemic through a SWOT analysis. SWOT analysis is based on the identification of strengths, weaknesses, opportunities, and threats to the situation. The strategy performance was measured through Poklahsars' business analysis. The results show that: (i) the Strength-Opportunities strategy is proven to be valid by the SWOT analysis based on internal and external aspects, (ii) the business analysis shows positive financial performance, which indicates the strategy accomplishment. The policy-implication conclusion is that an appropriate strategy that includes all relevant aspects of consideration is essential to support the businesses actor's success in dealing with the pandemic.

Keywords: *business feasibility analysis; BEP; NPV; B/C ratio; poklahsar; SWOT*

PENDAHULUAN

Di Kabupaten Banyumas berkembang usaha-usaha pengolahan dan pemasaran perikanan yang memanfaatkan tingginya produksi ikan di wilayah tersebut. Pada tahun 2020, produksi ikan Banyumas mencapai 10,94 ton, didukung oleh usaha perikanan laut sebanyak laut 33 unit dan perikanan umum daratan (PUD) 32 unit (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2021). Senjang antara angka konsumsi ikan (AKI) Kabupaten Banyumas (22,39 kg/kapita/tahun) (Pemerintah Kabupaten Banyumas, 2022), dengan AKI nasional (55 kg/kapita/tahun) (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2021), mendorong diterbitkannya Peraturan Bupati (PERBUP) Banyumas (2022) terkait pemenuhan atau peningkatan angka konsumsi ikan, melalui pengembangan kelompok-kelompok pengolah dan pemasar (poklahsar).

Namun, perkembangan poklahsar menghadapi masalah besar pada saat berlangsungnya pandemi Covid-19. Tidak hanya berdampak pada bisnis di belahan dunia lain (Gregurec *et al.,* 2021; Amoah *et al.,* 2020), pandemi Covid-19 berdampak pula pada berbagai usaha di Indonesia (Suratman, 2021). Di bidang perikanan, dilaporkan bahwa dampak pandemi terdeteksi sangat nyata pada usaha UMKM olahan ikan, yang ditandai dengan kesulitan pengelolaan keuangan, penurunan permintaan, pengurangan lapangan kerja, pengurangan produksi barang (Sholiha & Wibawa, 2021). Sebagian UMKM melakukan upaya-upaya untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang terjadi, dengan menerapkan strategi yang dipandang tepat oleh pelaku usaha, misalnya bergeser ke mekanisme penjualan secara daring (*online*) (Fairlie & Fossen, 2021). Kelompok-kelompok pengolah dan pemasar (poklahsar) di Kabupaten Banyumas termasuk yang berhasil bertahan dan ini dipercaya terkait dengan penerapan strategi yang mempertimbangkan aspek-aspek/faktor terkait pada saat itu, baik eksternal maupun internal.

Dengan latar belakang di atas, penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengambil pelajaran yang dapat dipetik dari penerapan strategi poklahsar-poklahsar di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menganalisis kondisi yang dihadapi oleh poklahsar pada saat itu, strategi yang kemudian diterapkan dan kinerja usaha yang terjadi setelahnya dianalisis.Analisis SWOT yang didasarkan pada kondisi faktor-faktor kekuatan (*strengths),* kelemahan (*weakness*), peluang *opportunities* dan ancaman *(threats)* yang relevan dengan masa Covid-19 digunakan untuk merekonstruksi strategi yang relevan untuk kondisi saat itu. Kelayakan finansial (NPV dan B/C ratio) digunakan sebagai proksi untuk mengukur kinerja usaha yang terjadi setelah penerapan strategi dimaksud.

Data utama untuk penelitian ini diperoleh melalui konsultasi dengan pejabat Dinas Pertanian dan Perikanan (DPP) Kabupaten Banyumas dan wawancara dengan anggota poklahsar, yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Poklahsar diwakili oleh pengurus dan anggota pelaku usaha aktif yang pada umumnya adalah perempuan berusia usia 20–60 tahun, yang melakukan bisnis olahan nila, lele, gurami, tuna, dan salmon. Dilakukan pengambilan sampel sebanyak 10 responden dari total 37 anggota dari lima poklahsar aktif yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan DPP Kabupaten Banyumas, diketahui bahwa poklahsar yang aktif di Kabupaten Banyumas berjumlah 13. Penentuan jumlah sampel dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah minimal 10% dari populasi sebagaimana ukuran sampel menurut Gay dan Diehl *dalam* Puspita, Sembodo, & Suratmi, 2018). Dengan demikian, dari 13 poklahsar aktif yang berlokasi di Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Kembaran, dan Kecamatan Sokaraja, ditentukan 5 poklahsar yang dinilai paling sesuai dengan kriteria untuk dijadikan sampel. Wawancara dan pengisian kuesioner dilakukan dengan dua responden dari setiap poklahsar. Dengan demikian, terdapat 10 responden yang diwawancarai selama bulan April dan Mei 2021. Analisis kelayakan dilakukan dengan mengacu pada (Dai *et al.,* 2022; Hopkinson, 2016; Khan & Jain, 2004, Mahyudin, 2008; Stelling *et al.,* 2018), sementara itu analisis SWOT dilakukan mengacu pada Wheelen & Hunger (2012), Rangkuti (2006), Utsalina & Primadani (2020), Pahl & Ritcher (2007).

Konsultasi dengan narasumber menunjukkan adanya sejumlah aspek/faktor penting, baik internal maupun eksternal, yang relevan dalam pengembangan poklahsar-poklahsar di Kabupaten Banyumas. Faktor internal meliputi bahan baku dan sumber daya, tenaga kerja, kualitas produk, modal, pengalaman dan kemampuan, diversifikasi produk, dan manajemen keuangan. Sementara itu, faktor eksternal mencakup bantuan dari pemerintah, kebijakan, kondisi sosial budaya, permintaan konsumen, konflik antara pengolah ikan, peran petugas penyuluh atau pendamping, pandemi, persaingan dagang, ketersediaan pasar, lembaga input produksi, hama/penyakit bahan baku, kondisi cuaca, harga jual hasil olahan, dan harga bahan baku.

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

Kondisi Umum Poklahsar di Kabupaten Banyumas

Produk olahan dari poklahsar di Kabupaten Banyumas pada umumnya berupa abon ikan, stik ikan, *ekado*, dan *crispy* bayi ikan (*baby fish crispy*) dapat dilihat pada Tabel 1. Di antara produk lain, *crispy* nila lebih diminati oleh konsumen terutama karena mudah disimpan dan memiliki variasi penggunaan yang cukup banyak (Sutarmin *et al.,* 2019). Anggota poklahsar terdiri atas 2-10 orang, dengan 1-4 tenaga kerja yang secara langsung menangani proses pengolahan pada setiap siklus produksi. Satu unit usaha produksi dioperasikan secara bersama oleh anggota kelompok, yang menangani sejumlah kegiatan mulai dari penyiapan bahan baku, proses pengolahan, hingga pengemasan. Siklus produksi per tahun bervariasi antara 12, 24, 36, dan 48 kali. Bahan baku utamanya adalah daging ikan lele, nila, gurami, tuna, dan salmon. Bahan baku lainnya adalah santan, bumbu, penyedap rasa, telur, tepung, dan minyak goreng. Biaya lainnya terdiri atas biaya operasional transportasi, biaya pemeliharaan peralatan, biaya perawatan bangunan, biaya isi LPG, dan biaya kemasan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa dampak pandemi Covid-19 membuat bisnis pemasaran dan pengolahan menjadi hanya kegiatan usaha sampingan, atau bahkan ditinggalkan oleh sebagian pelaku usaha. Sebelum pandemi Covid-19, ikan hasil tangkapan nelayan dan ikan hasil budi daya, antara lain, disalurkan untuk bahan baku ikan olahan (Suratman, 2021). Pada awalnya, pemasaran oleh poklahsar dilakukan secara konvensional, yaitu jual beli secara langsung dengan konsumen, baik di dalam maupun di luar wilayah kabupaten (Tabel 2). Kebijakan *social distancing* pada saat itu tak terelakkan mengakibatkan penurunan kegiatan jual beli secara langsung (Amankwah-Amoah *et al.,* 2020; Sholiha & Wibawa, 2021) dan menurunkan kinerja usaha pengolah ikan. Kondisi itu menginspirasi para pelaku usaha untuk mencoba strategi baru, misalnya bertransformasi ke penjualan daring (Sudaryono *et al.,* 2020).

Rekonstruksi Strategi Penanganan Dampak Covid-19 oleh Poklahsar

a. Penyusunan matriks IFAS dan EFAS

Rekonstruksi ini dilaksanakan mengacu pada analisis SWOT sebagaimana disebutkan pada bagian pendahuluan. Berdasarkan itu, Tabel 3 menampilkan matriks IFAS (*Internal Strategic Factor Analysis Summary*).

Tabel 1. Data Poklahsar.

No	Nama Poklahsar	Komoditas Olahan	Produk	Bahan Baku Utama (Kg)	Volume Produksi Per Siklus(Kg)
1	Berkah Antika I, Kec. Kedungbanteng	Tuna	Abon ikan	50	15
		Salmon	Abon ikan	50	15
		Lele	Abon ikan	50	15
2	Berkah Antika II, Kec. Kedungbanteng	Tuna	Abon ikan	50	15
		Salmon	Abon ikan	50	15
		Lele	Abon ikan	50	15
3	Mina Langgeng Sari I, Kec. Sokaraja	Nila	*Baby fish crispy*	100	80
4	Mina Langgeng Sari II, Kec. Sokaraja	Nila	*Baby fish crispy*	14	11
5	Rizqi Lele I, Kec. Kembaran	Lele	Abon ikan	10	4
6	Rizqi Lele II, Kec. Kembaran	Lele	Abon ikan	10	3
7	Runtuk Mangut, Kec. Kedungbanteng	Lele	*Ekado*	15	12
8	Runtuk Mangut II, Kec. Kedungbanteng	Lele	*Ekado*	15	12
9	Valentin, Kec. Kedungbanteng	Tuna	Abon ikan	60	25
		Salmon	Abon ikan	60	25
		Gurami	Stik ikan	50	35
10	Valentin II, Kec. Kedungbanteng	Tuna	Abon ikan	60	30
		Salmon	Abon ikan	60	30
		Gurami	Stik ikan	50	35

Sumber: Data diolah, 2022.

Tabel 2. Asal Bahan Baku dan Tujuan Pemasaran Poklahsar.

Nama Poklahsar	Komoditas Olahan	Produk	Asal Bahan Baku	Tujuan Pemasaran
Berkah Antika	Tuna	Abon ikan	Kab. Cilacap dan Kab. Batang	Lokal (Kab. Banyumas)
	Salmon	Abon ikan	Kab. Cilacap dan Kab. Batang	Lokal
	Lele	Abon ikan	Lokal	DKI Jakarta
Mina Langgeng Sari	Nila	*Baby fish crispy*	Lokal	Lokal
Rizqi Lele	Lele	Abon ikan	Lokal	DKI Jakarta dan lokal
Runtuk Mangut	Lele	*Ekado*	Lokal	Lokal
Valentin	Tuna	Abon ikan	Kab. Cilacap, Kab. Batang, dan lokal	Lokal
	Salmon	Abon ikan	Kab. Cilacap dan Kab. Batang	Lokal
	Gurami	Stik ikan	Lokal	DKI Jakarta, Kaltim, dan lokal

Sumber: Data diolah, 2022.

Pada Tabel 3 terlihat bahwa bantuan pemerintah untuk penguatan modal usaha yang dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas merupakan salah satu faktor yang relevan. Peluang pemasaran secara daring yang terbuka pada masa pandemi hanya dapat dilakukan dengan dukungan permodalan yang diperlukan untuk merealisasikannya. Dalam hal ini, Setiawati dan Ningsih *dalam* Triharsa *et al.,* 2016) menggarisbawahi bahwa satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam penyiapan dukungan dimaksud adalah perencanaan penggunaan pinjaman bank dengan pertimbangan rasionalitas pengembalian pinjaman.

Tabel 3. Matriks IFAS (Analisis Faktor Stategi Internal).

	Faktor-Faktor Internal	Bobot	Rating	Skor	Komentar
A.Kekuatan/*Strengths*					
1.	Bahan baku berkualitas selalu tersedia.	0,05	4	0,2	Bahan baku ikan segar dan memenuhi standar mutu bentuk, bau, tekstur, ukuran, dan warna, serta standar mutu lain.
2.	Lokasi usaha yang strategis	0,025	4	0,1	Lokasi usaha mendukung kegiatan produksi dan meningkatkan penjualan produk serta visibilitas baik.
3.	Tersedianya sumber air dan debit air yang cukup untuk kegiatan pengolahan	0,02	4	0,08	Kuantitas sumber air tidak tercemar dan cukup untuk memenuhi kebutuhan pengolahan ikan.
4.	Produk hasil pengolahan merupakan pangan fungsional sumber protein berkualitas tinggi.	0,03	4	0,12	Produk olahan ikan menyediakan pilihan pangan bernutrisi untuk masyarakat.
5.	Produktivitas usaha pengolahan yang tinggi	0,035	4	0,14	Poklahsar mempunyai kemampuan mengelola sumber daya untuk menghasilkan produk secara efektif dan efisien.
6.	Pengolah memiliki keterampilan dan kemampuan yang mumpuni.	0,06	4	0,24	Pengurus dan anggota poklahsar mendapatkan pelatihan dari pemerintah, internal poklahsar, atau pihak lain sehingga cukup kompeten dalam pengolahan ikan.
7.	Teknologi produksi yang diterapkan mudah.	0,09	4	0,36	Alat dan teknik produksi sederhana dan mudah diadopsi oleh poklahsar.
8.	Jumlah tenaga kerja mencukupi.	0,075	4	0,3	Beban tenaga kerja seimbang dengan kapasitas produksi poklahsar.
9.	Jalur pemasaran dan distribusi produk sudah jelas.	0,1	4	0,4	Poklahsar sudah memiliki langganan dan pasar yang stabil.
10.	Tidak membutuhkan lahan usaha pengolahan yang luas	0,015	3	0,045	Usaha dapat dilakukan di dalam rumah tangga/ lahan terbatas.
	Subtotal Kekuatan	**0,5**	**39**	**1,98**	

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

Lanjutan Tabel 3.

Faktor-Faktor Internal	Bobot	Rating	Skor	Komentar
B. Kelemahan				
1. Pengalaman pengusaha kurang.	0,05	4	0,2	Pengurus dan anggota poklahsar sebagian besar baru memulai usaha pengolahan ikan.
2. Kekurangan modal	0,1	5	0,5	Poklahsar masih menggunakan modal dari uang pribadi yang terbatas (belum memanfaatkan sumber lain).
3. Belum optimalnya pengelolaan/ penggunaan lahan usaha	0,025	4	0,1	Lahan usaha yang tersedia belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk proses produksi dan penyimpanan produk (gudang dingin) karena keterbatasan sarana/prasarana.
4. Biaya operasional yang tinggi	0,09	4	0,36	Biaya bahan baku dan pengemasan yang tinggi membutuhkan modal yang besar.
5. Ketersediaan input produksi rendah.	0,015	4	0,06	Sumber bahan baku menurun jumlahnya sehingga sulit didapatkan pada masa pandemi.
6. Keterbatasan informasi mengenai usaha pengolah ikan	0,06	4	0,24	Poklahsar tidak mendapatkan sosialisasi, pendampingan, atau penyuluhan yang cukup dari pemerintah/asosiasi/ pihak lain.
7. Keterbatasan kemampuan dalam distribusi dan pemasaran produk hasil pengolahan	0,03	4	0,12	Poklahsar belum mendapatkan pelatihan pemasaran secara daring dan distribusi dari pemerintah/asosiasi/ pihak lain.
8. Konsumsi keluarga akan produk olahan ikan rendah.	0,075	2	0,15	Konsumen lebih memilih konsumsi ikan segar daripada produk olahannya.
9. Diversifikasi produk olahan pangan berjalan sangat lambat.	0,02	2	0,04	Perusahaan sulit melakukan pengembangan produk.
10. Pengelolaan keuangan dan administrasi lain belum baik.	0,035	3	0,105	Pengurus dan anggota poklahsar kurang pengetahuan tentang manajemen keuangan.
Subtotal Kelemahan	**0,5**	**36**	**1,875**	
Total IFAS	**1**	**75**	**3,86**	

Sumber: Data diolah, 2022.

Berdasarkan hasil studi Zuliarni (2017), peluang dan ancaman (OT) dipengaruhi oleh faktor pasar yang potensial, kebutuhan konsumsi yang meningkat, biaya produksi yang makin tinggi, dan persaingan bisnis. Bantuan pemerintah, permintaan hasil produksi yang tinggi, dan cuaca buruk termasuk dalam faktor eksternal OT (Salatan *et al.,* 2018) dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Matriks EFAS (Analisis Faktor Stategi Eksternal).

Faktor-Faktor Internal	Bobot	Rating	Skor	Komentar
A. Peluang				
1. Bantuan dan dukungan pemerintah meningkatkan produktivitas kegiatan pengolahan.	0,1	4	0,4	Pemerintah belum memberikan bantuan dalam bentuk pendanaan, sarana/prasarana, pelatihan, atau dukungan dalam bentuk lain untuk poklahsar.
2. Kebijakan pemerintah meningkatkan peluang pasar.	0,09	4	0,36	Kebijakan PSBB, PPKM, dan karantina wilayah (*lockdown*) membatasi jam operasional pengusaha yang berdagang.
3. Kondisi sosial-budaya mendukung perkembangan usaha.	0,025	4	0,1	Tradisi masyarakat yang gemar makan ikan berdampak pada penjualan produk.
4. Permintaan konsumen tinggi.	0,02	4	0,08	Konsumen menyukai produk hasil olahan poklahsar.
5. Kepuasan pelanggan dan reputasi yang baik	0,035	4	0,14	Kualitas produk olahan terjaga, produk sesuai dengan permintaan konsumen, dan pembelian kembali.
6. Potensi lingkungan mendukung usaha pengolahan ikan.	0,03	4	0,12	Komoditas produksi ada di sekitar lingkungan usaha.
7. Adanya peluang usaha bagi koperasi/ BUMDes	0,06	3	0,18	Koperasi/BUMDes menyediakan beberapa pelayanan untuk usaha. Salah satunya adalah pinjaman modal.

Lanjutan Tabel 4.

	Faktor-Faktor Internal	Bobot	Rating	Skor	Komentar
8.	Minimnya konflik antara para pengolah ikan	0,05	3	0,15	Persaingan dagang di antara para pengolah ikan tidak menimbulkan masalah.
9.	Usaha pengolahan menjadi pekerjaan utama masyarakat.	0,015	3	0,045	Beberapa pengolah merupakan ibu rumah tangga dan sebagian kecil merupakan pegawai.
10.	Ada peran petugas penyuluh perikanan yang mendampingi atau membantu pengolah.	0,075	5	0,375	Pendampingan teknis poklahsar mencapai target dari proses produksi sampai bisa mandiri.
	Subtotal Peluang	**0,5**	**38**	**1,95**	
B. Ancaman					
1.	Pandemi Covid-19 menurunkan permintaan pasar.	0,1	4	0,4	Meningkatnya jumlah orang sakit dan kebijakan pemerintah dalam membatasi aktivitas
2.	Persaingan dagang antarpengusaha pengolahan ikan meningkat.	0,06	3	0,18	Daya beli masyarakat menurun, sedangkan pengusaha tetap membutuhkan konsumen (Sutarman, 2021).
3.	Pasar makin terbatas dan selektif.	0,035	3	0,105	Jam operasional dan penutupan wilayah saat pandemi membatasi mobilitas penjual untuk berdagang dan konsumen untuk membeli.
4.	Fungsi asosiasi kelompok dagang/koperasi makin menurun.	0,03	2	0,06	Koperasi/Aspikmas (Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil Menengah Banyumas) jarang memberikan program pelatihan, peningkatan manajemen usaha, perluasan jaringan, atau pemodalan.
5.	Tidak tersedia lembaga input produksi pengolah ikan.	0,075	3	0,225	Tidak ada lembaga atau pengepul yang menampung bahan baku ikan segar hasil budi daya ataupun ikan hasil tangkapan.
6.	Kegagalan produksi pengolahan ikan disebabkan bahan baku terkena penyakit/ hama.	0,015	2	0,03	Penyakit ikan menyerang budi daya induk dan benih gurami sejak tahun 2018.
7.	Kondisi cuaca sulit diprediksi.	0,05	3	0,15	Musim hujan lebat menurunkan produksi budi daya ikan pemasok bahan baku.
8.	Harga bahan baku mengalami kenaikan.	0,09	4	0,36	Harga bahan baku naik karena harga pakan ikan budi daya naik dan akses penjualan hasil tangkapan ikan tidak mudah karena pembatasan wilayah.
9.	Meningkatnya permintaan pasar terhadap hasil olahan ikan tertentu	0,025	3	0,075	Pembeli selektif terhadap hasil olahan dengan kemasan yang standar dan kandungan gizi yang baik.
10.	Harga jual hasil olahan ikan fluktuatif.	0,02	3	0,06	Hasil tangkapan nelayan tidak pasti, daya beli masyarakat menurun, dan pasar sepi.
	Subtotal Ancaman	**0,5**	**30**	**1,645**	
	Total EFAS	**1**	**68**	**3,595**	

Sumber: Data diolah, 2022.

b. Identifikasi strategi relevan

Koordinat diagram cartesius didapatkan dari selisih antara SW dan OT (Tabel 5). Koordinat diagram cartesius ditentukan untuk mengidentifikasi titik koordinat (x,y) pada diagram SWOT mengetahui posisi kuadran dan strategi terbaik. Titik koordinat diagram cartesius didapatkan dari total skor SW (koordinat analisis internal) dan total skor OT (koordinat analisis eksternal) (Ajismanto & Widyanto, 2020).

Tabel 5. Koordinat Diagram Cartesius SWOT.

SWOT	Skor	Koordinat (x,y)		
Strengths	1,99	SW = *Strengths* – *Weakness*	= + 0,11	(x)
Weakness	1,88			
Opportunities	1,95	OT = *Opportunities* – *Threats*	= + 0,31	(y)
Threats	1,64			

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

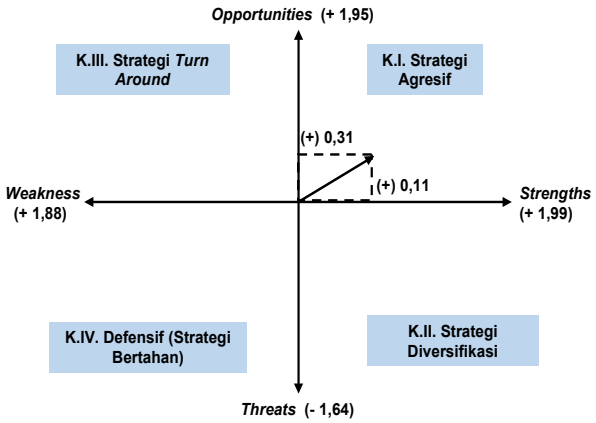

Gambar 1. Diagram Cartesius SWOT.
Sumber: Data diolah, 2022.

Pada gambar diagram cartesius (Gambar 1) diketahui bahwa poklahsar berada pada kuadran I dengan strategi agresif dengan rumusan kombinasi strategi matriks SWOT yang diutamakan dari strategi SO dan diikuti dengan strategi WO, ST, dan WT (Tabel 6).

Tabel 6. Rumusan Kombinasi Strategi Matriks SWOT.

IFAS / EFAS	*Strength* (S)	*Weakness* (W)
Opportunities (O)	Strategi (S-O) = 1,99 + 1,95 = 3,86	Strategi (W-O) = 1,88 + 1,95 = 3,82
Threats (T)	Strategi (S-T) = 1,99 + 1,64 = 3,63	Strategi (W-T) = 1,88 + 1,64 = 3,52

Sumber: Data diolah, 2022.

Menurut Tambunan (2020), strategi SO (*strengths and opportunities*) merupakan strategi yang mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada, yaitu dengan meningkatkan kompetensi atau pemberian pelatihan pada bidang pengolahan produk perikanan yang berupa transfer teknologi dari akademisi kepada poklahsar, bantuan pemerintah dalam bentuk suntikan dana usaha, jalinan kerja sama dengan mitra bisnis daring dan kerja sama dengan jasa pengiriman untuk mendapatkan harga terbaik saat pengiriman barang hasil olahan kepada konsumen, *public hearing*, serta diskusi kelompok terpumpun (*focus group discussion*) yang membahas permasalahan poklahsar dengan para pemangku kepentingan, dan seterusnya.

Strategi WO (*weakness and opportunities*) merupakan strategi untuk meminimalkan kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Sebagaimana terbaca pada Tabel 7, strategi ini adalah terkait optimalisasi peran koperasi dan BUMDes untuk memberi pinjaman modal usaha.

Strategi ST (*strengths and threats*) adalah strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Adapun strateginya adalah menciptakan jalur input produksi dengan menghubungkan sebanyak-banyaknya informasi pengepul dan pembudi daya dengan poklahsar untuk dapat memastikan ketersediaan bahan baku dan memaksimalkan peran pengurus dan anggota untuk aktif pada setiap kegiatan poklahsar (Tabel 7).

Strategi ST selanjutnya adalah poklahsar aktif melakukan promosi produk secara luring dan daring. Selain itu, poklahsar juga memanfaatkan jalur pemasaran lama untuk mendapatkan pelanggan baru, mengoptimalkan siklus produksi untuk meningkatkan produktivitas, dan menjaga kualitas bahan baku yang terbaik agar kualitas produk tetap terjaga dan tetap dipercaya konsumen (Tabel 7).

Strategi WT (*weakness and threats*) merupakan strategi untuk meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman, antara lain dengan cara memperbaiki kemasan sehingga memenuhi kriteria KLIK, yaitu kemasan, label, izin edar, dan kedaluwarsa untuk menurunkan keraguan konsumen dan menjamin mutu produk; cepat tanggap melakukan diversifikasi produk sesuai dengan ketersediaan bahan baku; dan jika ketersediaan salah satu komoditas menurun, siklus produksi tidak terhenti, tetapi diganti dengan komoditas lain yang mudah didapatkan yang dapat menjadi komoditas pengganti (Tabel 7).

Dalam rangka meningkatkan produktivitas, poklahsar perlu mengoptimalkan penggunaan lahan usaha (Tabel 7). Selain itu, pengurus dan anggota poklahsar harus aktif mencari informasi mengenai usaha pengolahan ikan, pemasaran, dan distribusi produk untuk meningkatkan kemampuan diri dan meningkatkan konsumsi keluarga terhadap hasil olahan ikan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan angka konsumsi ikan nasional. Selain hal yang telah disebutkan di atas, ajang promosi dengan menyebarkan konsumsi ikan pada level keluarga ke media sosial dapat memengaruhi dan menunjukkan kepada pengguna media sosial bahwa ikan dan produk olahannya bernutrisi dan baik untuk dikonsumsi keluarga dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Matriks Analisis Strategi SWOT.

IFAS / EFAS	*STRENGTHS*	*WEAKNESS*
	STRATEGI S-O	**STRATEGI W-O**
OPPORTUNITIES	1. Pemberian pelatihan pengolahan produk perikanan dari pemerintah dan pemangku kepentingan yang terkait kepada poklahsar dan pendamping/penyuluh sehingga poklahsar dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing produk	1. Memaksimalkan peran koperasi/ BUMDes untuk dapat memberikan pinjaman usaha yang mudah dicairkan dengan bunga terjangkau kepada poklahsar
	2. Pengenalan, adopsi, dan transfer teknologi dari pemerintah ataupun akademisi untuk pengolahan perikanan yang mudah, terjangkau, dan aman diterapkan oleh poklahsar	2. Memperluas jejaring poklahsar dengan pengepul ikan sebagai pemenuhan bahan baku, baik dalam kota maupun luar kota, melalui platform daring
	3. Pemberian bantuan dalam bentuk suntikan dana usaha atau peralatan kepada poklahsar untuk memutar roda perekonomian saat pandemi Covid-19	3...Pemberdayaan penyuluh perikanan sebagai bagian dari atau anggota poklahsar (sebagai *whistle blower*) pada seksi/bidang yang terkait
	4. Memperluas pangsa pasar dan mempertemukan para pengusaha/pengolah dan pemasar produk perikanan dengan calon pembeli dengan mediasi melalui platform daring dan kerja sama dengan mitra bisnis daring	4...Ketua, anggota, sekretaris, dan bendahara poklahsar mengikuti pelatihan tentang manajemen finansial dan teknologi pemasaran untuk usaha yang sehat.
	5. Peningkatan kualitas produk dengan menjalankan sistem rantai dingin dengan baik	5. Mengoptimalkan peran bendahara poklahsar untuk mengelola keuangan serta melengkapi data produksi
	6. Adanya kegiatan yang berkelanjutan dari pemerintah setempat, pemerintah pusat, dan penyuluh perikanan yang terkait untuk melakukan *public hearing* dengan kearifan lokal dan FGD (*focus group discussion*) untuk mendapatkan solusi atas permasalahan	6. Pembuatan proposal pengajuan bantuan usaha poklahsar kepada para pemangku kepentingan (pemerintah pusat, pemda, perusahaan, bank, dll.)
	7. Selain kerja sama dengan mitra bisnis daring, poklahsar bekerja sama dengan jasa pengantaran untuk mendapatkan harga kirim terbaik saat mencapai peningkatan kuantitas pengiriman.	
	STRATEGI S-T	**STRATEGI W-T**
THREATS	1. Menghubungkan pembudi daya dan/atau pengepul ikan kepada poklahsar melalui media sosial dan/atau media luring untuk mengatasi kekosongan input produksi dan menciptakan jalur input produksi baru	1. Saat pandemi Covid-19, pembeli akan lebih jeli dan berhati-hati sehingga perlu meningkatkan kualitas kemasan produk dengan memenuhi kriteria KLIK (kemasan, label, izin edar, dan kedaluwarsa) untuk meningkatkan minat pasar.
	2. Memaksimalkan peran anggota poklahsar untuk aktif mengikuti kegiatan poklahsar	2. Cepat dan tanggap dalam diversifikasi produk olahan sesuai dengan ketersediaan ikan di musim panen atau tangkapan
	3. Anggota poklahsar aktif melakukan promosi produk, baik secara luring maupun daring, untuk memperluas pangsa pasar.	3. Mengoptimalkan pengelolaan/penggunaan lahan usaha
	4. Mengoptimalkan produktivitas usaha pengolahan, misalnya yang semula 12 siklus/tahun meningkat menjadi 24 siklus/tahun	4. Pengurus dan anggota poklahsar rajin mencari informasi terkait usaha pengolahan ikan, pemasaran, dan cara distribusi produk hasil pengolahan.
	5. Memanfaatkan jalur pemasaran yang sebelumnya untuk menjaring pasar/pelanggan yang baru	5. Meningkatkan konsumsi keluarga akan produk olahan ikan dan membagikannya ke media sosial
	6. Menjaga kualitas bahan baku yang terbaik yang bisa masuk dalam proses produksi	

Sumber: Data diolah, 2022.

Pada masa pandemi Covid-19, daya beli konsumen menurun karena beberapa faktor sehingga daya serap pasar ikut menurun. Adanya beberapa regulasi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang terkait dengan pembatasan aktivitas sosial dan pembatasan mobilitas penduduk serta regulasi lainnya yang berhubungan dengan penjarakan sosial (*social distancing*) telah menyebabkan penurunan kegiatan jual beli secara konvensional di pasar-pasar tradisional ataupun pasar yang melaksanakan kegiatan jual beli secara tatap muka lainnya. Di sisi lain, terjadi ledakan terhadap penggunaan aplikasi jual beli daring ataupun media sosial karena pembeli bertendensi

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

untuk membeli produk secara daring tanpa harus keluar dari rumah. Fenomena pergeseran pada lokapasar daring (*online marketplace*) ini harus dapat diketahui, dipahami, dan dimanfaatkan dengan baik oleh pengelola poklahsar. Oleh karena itu, pada aspek pemasaran dan lingkungan, strategi pemasaran diperlukan untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan kuantitas pembeli.

Jika sebelumnya pengelola poklahsar masih menggunakan metode konvensional atau jual beli secara langsung di pasar, untuk meningkatkan kualitas aspek teknologi serta aspek sumber daya manusia pengelola poklahsar, selanjutnya poklahsar dapat menjual produk melalui beberapa platform daring yang tersedia dan melakukan perbaikan produk yang akan ditampilkan (*rebranding*) dengan baik dalam rangka meningkatkan minat para pembeli terhadap produk yang ditawarkan dan memperluas jangkauan pasar. Untuk keperluan tersebut, tenaga kerja poklahsar yang berusia 20—60 tahun dengan pendidikan terakhir SMP atau SMA dapat diberikan pendampingan dalam proses produksi, pengemasan, serta pelatihan pemasaran secara daring. Selain itu, perluasan pasar dengan metode tersebut juga melibatkan peningkatan kinerja bagian pemasaran di poklahsar. Hal ini berkaitan dengan pengelolaan pengemasan dan pengiriman produk yang terjaga dan tepat waktu untuk menjaga kepuasan pelanggan.

Strategi pengembangan kelayakan usaha poklahsar dirumuskan dengan mempertimbangkan hasil analisis SWOT. Strategi efektif berdasarkan analisis SWOT adalah memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang *(opportunities*) yang dimiliki sekaligus meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*). Prioritas pelaksanaan strategi yang didapatkan ditentukan secara berurutan dengan strategi SO, ST, WO, dan WT.

Strategi SO (*strengths-opportunities*) diarahkan melalui pemberian pelatihan pengolahan produk perikanan terhadap poklahsar, transfer teknologi dari akademisi ataupun pemerintah, bantuan pemerintah dalam bentuk suntikan dana usaha saat pandemi, jalinan kerja sama dengan mitra bisnis daring, dan jalinan kerja sama dengan jasa pengirim. Pemerintah juga perlu mengetahui permasalahan yang terjadi di lapangan sehingga perlu dilakukan *public hearing* dan/atau diskusi kelompok terpumpun (*focus group discussion*) dengan para pengusaha dan pemangku kepentingan yang terkait.

Strategi ST (*strengths-threats*) yang dapat dilaksanakan adalah menciptakan ketahanan jalur input produksi (salah satunya adalah dengan menghubungkan pengepul atau pembudi daya ikan sebagai pemasok bahan baku utama dengan poklahsar) dan memaksimalkan peran pengurus dan anggota untuk aktif pada setiap kegiatan poklahsar. Pengelola poklahsar harus aktif melakukan promosi produk, baik secara luring maupun daring. Poklahsar juga dapat memanfaatkan jalur pemasaran lama untuk mendapatkan calon pelanggan baru dan mengoptimalkan siklus produksi untuk meningkatkan produktivitas. Strategi lainnya adalah menjaga bahan baku yang digunakan dan bahan baku tersebut harus yang terbaik agar produk yang dihasilkan tetap terjaga kualitasnya.

Strategi WO (*weakness-opportunities*) dilakukan dengan mengoptimalkan peran koperasi dan BUMDes untuk dapat memberi pinjaman modal usaha sehingga dapat meningkatkan sarana dan prasarana pengolahan. Selain itu, pemberdayaan penyuluh sebagai pendamping poklahsar perlu dilaksanakan. Pengurus dan anggota poklahsar perlu mendapatkan pelatihan terkait manajemen finansial dan pelatihan pemasaran beserta teknologinya.

Strategi WT (*weakness-threats*) dilakukan dengan mengarahkan poklahsar untuk memperbaiki kemasan sehingga memenuhi kriteria KLIK (kemasan, label, izin edar, dan kedaluwarsa) dalam rangka meningkatkan minat beli konsumen dan pemenuhan standar kemasan. Poklahsar harus cepat dan tanggap dalam melakukan diversifikasi produk sesuai dengan ketersediaan bahan baku dan mengoptimalkan penggunaan lahan usaha. Poklahsar juga harus aktif mencari informasi terkait usaha pengolahan ikan, pemasaran, dan distribusi produk; meningkatkan konsumsi keluarga terhadap hasil olahan ikan; dan meningkatkan ketertarikan calon pembeli. Kegiatan konsumsi produk hasil olahan ikan dapat dibagikan melalui media sosial.

Pengukuran Kinerja Usaha Pasca Penerapan Strategi: Kelayakan Usaha

Pada Tabel 8 dapat diketahui bahwa poklahsar dengan produktivitas tertinggi adalah Poklahsar Valentin, sedangkan poklahsar dengan produktivitas terendah adalah Poklahsar Rizqi Lele. Menurut Tania dan Ulkhaq (2016), meningkatnya produktivitas didorong, salah satunya, oleh penggunaan sumber daya bahan baku yang efisien dan efektif. Biaya bahan baku yang termurah adalah biaya bahan baku komoditas lele, kemudian diikuti nila, gurami, tuna, dan salmon. Harga bahan baku yang terjangkau dapat menekan biaya variabel dan biaya total produksi sebagaimana dikemukakan oleh Pradana dan Jakaria (2020).

Tabel 8. Biaya Produksi dan Titik Impas Unit Per Siklus.

Responden	Siklus Produksi Per Tahun (Kali)	Biaya Tetap (Rp)	Biaya Variabel (Rp)	Biaya Total (Rp)	Produk	Titik Impas Unit (Unit)
1	12	152.500	7.236.750	7.389.250	Abon tuna	8
					Abon salmon	8
					Abon lele	6
2	12	152.531	7.238.750	7.391.281	Abon tuna	8
					Abon salmon	8
					Abon lele	6
3	12	150.500	4.423.500	4.573.999	*Baby fish crispy*	48
4	24	105.516	625.400	730.915	*Baby fish crispy*	8
5	48	112.714	428.900	541.613	Abon lele	3
6	48	62.605	402.200	464.804	Abon lele	2
7	12	11.336	514.800	526.135	*Ekado* lele	8
8	12	12.513	514.800	527.312	*Ekado* lele	8
9	12	146.406	9.110.400	9.256.806	Abon tuna	10
					Abon salmon	10
					Stik gurami	13
10	12	341.400	8.108.400	8.449.800	Abon tuna	16
					Abon salmon	9
					Stik gurami	9

Sumber: Data diolah, 2022.

Biaya total produksi poklahsar di Kabupaten Banyumas sebesar Rp500.000,00–Rp9.000.000,00. Biaya total produksi yang terendah adalah biaya pada produk olahan abon ikan lele, lalu diikuti *ekado* lele, *baby fish crispy,* stik ikan gurami, abon ikan tuna, dan abon salmon (Tabel 8). Tinggi rendahnya biaya produksi selain dipengaruhi oleh jenis komoditas bahan baku, juga berdasarkan volume produksi setiap poklahsar (Anggraeni *et al.,* 2020).

Dalam rangka mencapai titik impas penjualan, poklahsar dengan produksi terendah menunjukkan BEP unit sebesar 2—3 bungkus (1 kg/bungkus) setiap siklus produksi, sedangkan dengan produksi tertinggi membutuhkan 9–12 bungkus (1 kg bungkus) untuk mencapai titik impas produksi. BEP merupakan titik atau keadaan perusahaan tidak untung dan tidak rugi (Manuho *et al.,* 2021). Pada Tabel 8 dapat diketahui bahwa volume produksi setiap poklahsar telah mencapai titik impas dan melebihi BEP unit per produksinya sehingga usaha layak untuk dilanjutkan.

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa susut bahan baku produksi bisa mencapai 80% untuk produksi abon ikan, sedangkan *ekado*, stik ikan, dan *baby fish crispy* mencapai 20–30% dilihat pada Tabel 9.

Tabel 4. Susut Bahan Baku Produksi.

Responden	Produk	Volume Bahan Baku (Kg)	Volume Produksi Per Siklus (Kg)	Persentase Susut Produksi (%)
1	Abon tuna	50	10	80
	Abon salmon	50	10	80
	Abon lele	50	10	80
2	Abon tuna	50	10	80
	Abon salmon	50	10	80
	Abon lele	50	10	80
3	*Baby fish crispy*	100	80	20
4	*Baby fish crispy*	14	11	21
5	Abon lele	10	4	65
6	Abon lele	10	3	70
7	*Ekado* lele	15	12	20
8	*Ekado* lele	15	12	20
9	Abon tuna	60	15	76
	Abon salmon	60	15	76
	Stik gurami	50	35	30
10	Abon tuna	60	30	50
	Abon salmon	60	30	50
	Stik gurami	50	35	30

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

Hal ini sesuai dengan penelitian Sundari *et al.* (2015) yang mengungkapkan bahwa pengolahan dengan perebusan akan menghasilkan susut masak pada bahan pangan uji sampai 3,9% (tahu) dan 30,67% (ikan kembung), sedangkan dengan penggorengan mencapai 53% (ikan kembung) dan 8,6 % (tahu). Penurunan bobot atau susut masak bahan yang digoreng lebih tinggi daripada yang direbus karena hilangnya kadar air akibat pemanasan (Sundari *et al.,* 2015).

Berdasarkan analisis total penerimaan dan keuntungan, poklahsar dengan performa nilai terendah adalah poklahsar dengan komoditas lele, sedangkan poklahsar dengan nilai tertinggi adalah Poklahsar Valentin (Tabel 10). Harga jual abon ikan lele per kilogram sebesar Rp200.000,00–Rp280.000,00. Harga jual *ekado* lele sebesar Rp70.000,00/kg. Harga jual *baby fish crispy* sebesar Rp95.000,00/kg. Harga jual stik ikan gurami sebesar Rp175.000,00/kg. Kemudian, yang tertinggi adalah harga jual abon salmon dan abon tuna, yaitu Rp350.000,00/kg. Perbedaan harga jual produk disebabkan perbedaan harga bahan baku produk. Perbandingan harga bahan baku produk dari tertinggi ke terendah adalah abon salmon, abon tuna, stik gurami, *baby fish crispy,* abon lele, dan *ekado* lele.

Pada Tabel 10 diketahui bahwa BEP harga terendah adalah responden 7 dan 8 pada Poklahsar Runtuk Mangut dan BEP harga tertinggi adalah responden 1 dan 2 pada Poklahsar Berkah Antika. Menurut Mahyudin (2008), titik impas dicapai apabila keuntungan usaha sama dengan modal sehingga dapat diketahui semua responden (Tabel 10) sudah mencapai titik impas dengan harga jual melebihi BEP harga. Berdasarkan selisih total penerimaan dengan total biaya, dapat diketahui bahwa usaha poklahsar mengalami keuntungan.

Nilai B/C *ratio* harus melebihi 1 dengan nilai NPV positif untuk dapat dikatakan usaha poklahsar layak dilanjutkan. Pada Tabel 11 dapat diketahui bahwa nilai B/C *ratio* kelima poklahsar melebihi 1 dengan nilai NPV positif sehingga usaha poklahsar menguntungkan dan layak untuk dilanjutkan.

Tabel 11. Rasio Keuntungan-Biaya dan Nilai Uang Masa Kini Selama 3 Tahun.

Responden	Rasio B/C/	Nilai Uang Masa Kini
1	1,99	209.205.255
2	1,99	209.146.711
3	1,66	85.710.305
4	1,43	5.648.373
5	1,29	5.367.991
6	1,29	4.404.082
7	1,60	2.122.834
8	1,59	2.251.221
9	2,55	152.831.933
10	2,98	170.480.429

Sumber: Data diolah, 2022.

Tabel 10. Total Penerimaan, Keuntungan, dan Titik Impas Harga.

Responden	Total Penerimaan (Rp)	Keuntungan (Rp)	Produk	Harga Jual (Rp)	Titik Impas Harga (Rp)
1	14.700.000,00	7.236.750,00	Abon tuna	350.000,00	180.655,56
			Abon salmon	350.000,00	195.155,56
			Abon lele	280.000,00	115.605,56
2	14.700.000,00	7.308.718,75	Abon tuna	350.000,00	181.989,58
			Abon salmon	350.000,00	195.489,58
			Abon lele	280.000,00	115.272,92
3	7.600.000,00	3.026.000,29	*Baby fish crispy*	95.000,00	57.175,00
4	1.045.000,00	314.084,09	*Baby fish crispy*	95.000,00	66.446,90
5	700.000,00	158.386,46	Abon lele	200.000,00	154.746,73
6	600.000,00	135.195,25	Abon lele	200.000,00	154.934,92
7	840.000,00	313.864,47	*Ekado* lele	70.000,00	43.844,63
8	840.000,00	312.687,27	*Ekado* lele	70.000,00	43.942,73
9	23.625.000,00	14.368.193,75	Abon tuna	750.000,00	142.026,97
			Abon salmon	750.000,00	140.193,25
			stik gurami	125.000,00	62.894,31
10	24.125.000,00	15.675.199,54	Abon tuna	300.000,00	82.077,48
			Abon salmon	300.000,00	91.396,98
			Stik gurami	175.000,00	94.505,98

Sumber: Data diolah, 2022.

IMPLIKASI KEBIJAKAN

Strategi pengembangan usaha melalui penerapan cara pemasaran daring oleh para poklahsar yang didukung oleh pemerintah setempat terbukti efektif. Strategi tersebut relatif sejalan dengan hasil rekonstruksi strategi yang diperoleh melalui analisis SWOT berdasarkan kondisi faktor yang teridentifikasi melingkungi situasi pada saat pandemi. Strategi SO (*strengths-opportunities*) yang yang direkonstruksi dari identifikasi faktor-faktor yang relevan dengan masa pandemi mencakup pemberian pelatihan pengolahan produk perikanan terhadap poklahsar, transfer teknologi, suntikan dana usaha, dan penguatan jalinan kerja sama dengan mitra bisnis daring. Kinerja usaha positif yang terjadi setelah penerapan strategi tersebut, yang ditunjukkan melalui perhitungan kelayakan finansial mengkonfirmasi efektivitasnya untuk membantu pelaku usaha menghadapi dampak pandemi.

Hubungan antara strategi yang menyertakan pertimbangan faktor-faktor yang melingkungi dengan kinerja positif yang dihasilkan yang terjadi pada kasus poklahsar di Banyumas jelas merupakan pelajaran yang baik untuk kasus serupa di tempat lain di masa yang akan datang. Terlepas dari masih perlunya optimalisasi penerapan strategi tersebut, pendekatan, upaya, dan aspek-aspek yang terkait dengan upaya poklahsar Banyumas untuk keluar dari sebuah krisis dapat digunakan sebagai acuan penanganan krisis-krisis serupa. Pendekatan dan upaya semacam itu perlu dipertimbangkan untuk diadopsi atau diadaptasi dalam perumusan kebijakan-kebijakan di tingkat pusat, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Poklahsar Kabupaten Banyumas, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Banyumas, Pusat Riset Perikanan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang telah mendukung terlaksananya penelitian ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada para peneliti Pusat Riset Perikanan, BRSDMKP, dan KKP, serta analis pasar hasil perikanan Direktorat Logistik, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah berkontribusi secara langsung pada penulisan makalah ini.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Kami menyatakan bahwa kontribusi setiap penulis dalam pembuatan karya tulis ini adalah Annisa Wening Maharani Putri, Muhammad Hanief Ihsanuddin, Kusdiarti, Lies Emmawati, dan Endhay Kusnendar Muljana Kontara sebagai kontributor utama.

DAFTAR PUSTAKA

Ajismanto, F., & Widyanto, A. (2020). Analisa strategi teknologi informasi pemasaran UKM kuliner di media sosial menggunakan metode SWOT. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer* (JTIIK), *7*(6), 1297–1306.

Amankwah-Amoah, J., Khan, Z., & Wood, G. (2020). COVID-19 and business failures: The paradoxes of experience, scale and scope for theory and practice. *European Management Journal*, *39*(2), 179—184. https://doi.org/10.1016/j.emj.2020.09.002.

Anggraeni, I., Priatna, H., & Madaniah, D. (2020). Pengaruh biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja terhadap volume produksi pada CV Ismaya Citra Utama. *Jurnal Ilmiah Akutansi* FE Unibba, *11*(2).

Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas. (2021). *Kabupaten Banyumas dalam angka 2021*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas.

Botchkarev, A. (2015). Estimating the accuracy of the return on investment (ROI) performance *evaluation*. *Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management*, *10*, 217—233.

Dai, H., Li, N., Wang, Y., & Zhao, X. (2022). The analysis of three main investment criteria: NPV, IRR, and payback period. *Atlantic Press, Proceedings of the 2022 7th International Conference on Financial Innovation and Economic Development* (ICFIED 2022). https://doi.org/10.2991/aebmr.k.220307.028.

Fairlie, R., & Fossen, F.M. (2022). The early impacts of the COVID-19 pandemic on business sales. *Small Bussines Economy*, *58*,1853–1864.https://doi.org/10.1007/s11187-021-00479-4.

Gregurec, I., Fujan, T.M., & Tomičić-Pupek, K. (2021). The impact of COVID-19 on sustainable business models in SMEs. *Sustainability*, *13*, 1098. https://doi.org/10.3390/su13031098.

Hopkinson, M. (2016). Advances in project management series: The case for project net present value (NPV) and NPV risk models. *PM World Journal Series Article*, *5*(6), 1—3. https://pmworldlibrary.net/wp-content/uploads/2016/06/pmwj47-Jun2016-Hopkinson-pro ject -net-present-value-Series-Article.pdf.

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

Khan, M.Y., & Jain, P.K. (2004). *Financial management fourth edition*. Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited.

Mahyudin, K. (2008). *Panduan lengkap agribisnis lele*. Penebar Swadaya.

Manuho, P., Makalare, Z., Mamangkey, T., dan Budiarso, N.S. (2021). Analisis break even point (BEP). *Jurnal Ipteks Akuntansi bagi Masyarakat*, *5*(1), 21—28.

Pahl, N., & Ritcher, N. (2007). *SWOT analysis–idea, methodology and a practical approach*. GRIN Verlag.

Pradana, V.A., & Jakaria, R.B. (2020). Pengendalian persediaan bahan baku gula menggunakan metode *EOQ* dan *just in time*. *BINA TEKNIKA 16*(1), 43—48.

Pemerintah Kabupaten Banyumas. (2022). Peraturan Bupati Banyumas Nomor 32 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (2021). Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 443.5/0000429 Tanggal 08 Januari 2021 Perihal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Antisipasi Peningkatan Kasus COVID-19 di Jawa Tengah.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (2021). Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 443.5/0001933 Tanggal 02 Februari 2021 Perihal Peningkatan Kedisiplinan dan Pengetatan Protokol Kesehatan pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tahap II di Jawa Tengah.

Puspita, I., Sembodo, E., & Suratmi, T. (2018). Comparative analysis of electronic procurement and conventional proucurement at the coordinating ministry for political, legal and security affairs. *Prosiding 4th Annual International Conference on Economic in Developing Countries* (AICEDC), 349—354.

Rangkuti, F. (2014). *Analisis SWOT: Teknik membedah kasus bisnis*. PT Gramedia Pustaka Utama.

Salatan, S., Manoppo, V.E.N., & Darwisito, S. (2018) Strategi pemberdayaan masyarakat nelayan soma pajeko di Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud Sulawesi Utara. J. *Sosek KP*, *13*(1), 87—97.

Setiawati, I.T., & Ningsih, S. (2018). Manajemen usaha pengolahan abon ikan lele (*Clarias gariepinus*) di P2MKP Jaya Mandiri Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung. *Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan*, *12*(2), 95—110.

Sholiha, S., & Wibawa, F.A. (2021). Ketahanan UMKM olahan serba ikan di Kelurahan Margodadi terhadap pandemi COVID-19. *Jurnal Promosi Jurnal Pendidikan Ekonomi UM Metro*, *9*(2), 117—126. http://doi.org/10.24127/pro.v9i2.4519.

Statistik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). (2021). *Produksi perikanan budi daya air tawa*r. http://statistik.kkp.go.id.

Stelling, S., Syah, T.Y.R., Indrawati, R., & Dewanto, D. (2018). Role of payback period, ROI, and NPV for Investment in clinical health business. *International Advanced Research Journal in Science, Engineering and Technology*, *5*(7), 78—82. http://doi.org/10.17148.IARJSET.2018.5714.

Sudaryono., Rahwanto, E., & Komala, R. (2020). E-commerce dorong perekonomian Indonesia, selama pandemi COVID-19 sebagai enterpreneur modern dan pengaruhnya terhadap bisnis offline. *Jurnal Manajemen dan Bisnis (JUMANIS) Pro di Kewirausahaan*, *2*(2 http://doi.org/10.47080

Sugiyanto, Nadi, L., & Wenten, I.K. (2020). *Studi kelayakan bisnis*. Yayasan Pendidikan dan Sosial Indonesia Maju (YPSIM).

Sundari, D., Almasyuri, & Lamid, A. (2015). Pengaruh proses pemasakan terhadap komposisi zat gizi bahan pangan sumber protein. *Media Litbangkes*, *25*(4), 235–242.

Suratman, D. J. (2021). Makalah pemasaran hasil kelautan dan perikanan di masa pandemi COVID-19 (telaahan pustaka). Direktorat Logistik, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia.

Sutarmin., Parmini., Putri, E.S., & Rastuti, U. (2019). Peningkatan kapasitas produksi dan keberlanjutan usaha UKM pengolahan ikan air tawar Kabupaten Banyumas. *Sustainable Competitive Advantage-9* (*SCA-9*), *9*(1).

Tambunan, T.S. (2020). SWOT analysis for tourism development strategy of samosis regency. *The International Journal of Applied Business*, *4*(2), 90—105. https://doi.org/10.20473/tijab.V4.I2.2020.90-105.

Tania, F., & Ulkhaq, M. (2016). Pengukuran dan analisis produktivitas di PT Tiga Manunggal Synthetic Industries dengan menggunakan objective matrix (OMAX). *Industrial Engineering Online Journal*, *5*(4).

Trihasa, R., Ikhwana, A., Tinggi, S., & Garut, T. (2016). Analisis rencana pengembangan usaha abon ikan lele. *J. Kalibr. Sekolah Tinggi Teknol. Garut*, *14*(1),1–6.

Utsalina, D.S., & Primandari, L.A. (2020). Analisis SWOT dalam penentuan bobot kriteria pada pemilihan strategi pemasaran menggunakan analytic network process. *Jurnal Ilmiah Teknik Informatika*, *14*(1). 41—50. https://doi.org/10.35457/antivirus.v14i1.889.

Wheelen, T.L., & Hunger, J.D. (2012). *Strategic management and business policy toward global sustainability*. Pearson Education, Inc.

Zuliarni, S. (2017). Analisis strategi pengembangan usaha pengolahan ikan pada Kampung Patin, Kampar, Riau. *Journal of Business Administration*, *1*(1), 37—46.

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

Penguatan Kelembagaan Korporasi Pembudidaya Tambak Udang dan Ikan di Kawasan Pertambakan di Indonesia

Strengthtening Institution of Shrimp and Fish Farmer Corporates in the Brackish Water Area in Indonesia

Nensyana Shafitri[1], Radityo Pramoda[2], Sumaryanto[2], Saptana[3], Budi Wardono[3], Mochammad Fahlevi[4], Dadan Permana[3], *Armen Zulham[3,] Adhita Sri Prabakusuma[5] dan Dongqi Shi[5]

[1]Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Gd. BRSDMKP lt. 3 & 4, Jl. Ancol Timur – Jakarta, Indonesia
[2]Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkuler – Badan Riset dan Inovasi Nasional
Gd. Sasana Widya Sarwono Lantai 4, Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10. Jakarta 12710, Indonesia
[3]Pusat Riset Koperasi Korporasi dan Ekonomi Kerakyatan - Badan Riset dan Inovasi Nasional
Gd. Sasana Widya Sarwono Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10. Jakarta 12710, Indonesia
[4]Management Department, BINUS Online Learning, Bina Nusantara University
Jl. K. H. Syahdan No. 9, Kemanggisan, Palmerah Jakarta 11480 Indonesia, Indonesia
[5]Yunnan Agricultural University,
No. 452 Fengyuan Road, Panlong District, Kunming, Yunnan Province, China

ARTICLE INFO

Diterima tanggal : 7 November 2022
Perbaikan naskah: 30 Maret 2023
Disetujui terbit : 29 Mei 2023

*Korespodensi penulis:
Email: keude_bing@yahoo.co.id

DOI: http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v13i1.11847

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lambatnya pembentukan korporasi pada kawasan pertambakan di Indonesia.Tujuan penelitian adalah: (i) melakukan pemetaan keragaman penguasaan luasan tambak di berbagai pulau dan provinsi dalam kaitannya dengan pengembangan korporasi; (ii) mengidentifikasi peran komponen kelembagaan korporasi pertambakan; (iii) menyusun strategi pengembangan kelembagaan korporasi tambak di Indonesia, yang dituangkan pada model generic korporasi petambak untuk kawasan tambak dengan luas minimal 100 hektar. Pendekatan metodologis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan analisis statistik deskriptif. Data Sensus Pertanian 2013 (jumlah sampel 138.865 responden) dan data hasil survey tahun 2023 di Kabupaten Brebes dan Kabupaten Indramayu (100 responden) digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan korporasi pembudidaya tambak dapat dibentuk pada beberapa lokasi di provinsi tertentu, dengan lima komponen korporasi walaupun belum berperan. Model generik korporasi pembudidaya tambak tersebut, menjadi basis untuk membangun bisnis *on farm–off farm* korporasi dengan memfungsikan lima komponen korporasi pembudidaya tambak melalui prinsip konsolidasi, kolaborasi dan integrasi. Implikasi kebijakan dari hasil penelitian ini adalah relevansi pemahaman bahwa: (i) identifikasi dan pemetaan sebaran petambak dan luas kawasan pertambakan harus ditempatkan sebagai langkah paling awal dalam pengembangan korporasi pada sektor kelautan dan perikanan, (ii) petambak mutlak harus diorganisasikan dalam Gapokkan sehingga dapat mengatasi masalah produksi danpasar, dan (iii) komponen-komponen korporasi dari model generik merupakan hal yang vital di dalam upaya membangun korporasi pada satu kawasan pertambakan.

Kata Kunci: model korporasi; kawasan pertambakan; komponen korporasi; bisnis

ABSTRACT

This research is motivated by the slow formation of corporations in brackish water areas in Indonesia. The aims of the study were: (i) Mapping the diversity of pond control over various islands and provinces about corporate development; (ii) identifying the role of the institutional components of the aquaculture corporation; (iii) developing a strategy for developing pond corporation institutions in Indonesia, on the generic model of corporation farmers for pond areas with a minimum area of 100 hectares. The methodology of the study is a quantitative approach using descriptive statistical analysis. The answer research hypothesis used Agricultural Census data for 2013 (sample of 138,865 respondents) and survey data for 2023 in Brebes and Indramayu Regencies (100 respondents). The study highlights that pond cultivator corporations can be formed in several locations in certain provinces, with five corporate components, even though they have not played a role yet. The generic model of the pond cultivator corporation is the basis for building a corporate on farm – off farm business by functioning the five components of the pond cultivator corporation through the principles of consolidation, collaboration and integration. The policy implications of the results of this study are the relevance of the understanding that: (i) identification and mapping of the distribution of farmers and the area of brackish water must be placed as the earliest step in corporate development in the Maritime and Fisheries Sector, (ii) absolute farmers must be organized into Gapokkan so that they can overcome production and market issues, and (iii) the corporate components of the generic model are vital in the effort to build a corporation in a brackish water area.

Keywords: *corporate model; brackishwater area; corporate component; business*

PENDAHULUAN

Pembentukan kelembagaan korporasi petani/nelayan termasuk pembudidaya perikanan di Indonesia sering menghadapi kendala. Permasalahan ini menghambat realisasi implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Perpres RI No. 18/2020). Perpres tersebut mengamanatkan pembentukan 350 korporasi petani/nelayan termasuk pembudidaya perikanan, sebagai *major project* yang ditargetkan terlaksana pada tahun 2024. Laporan menyebutkan bahwa realisasi target tersebut masih sangat rendah (Kemenko Perekonomian, 2022, KSP, 2022 & Global News, 2021), terutama karena ketiadaan strategi yang efektif untuk mewujudkannya (Nugroho, 2021).

Sampai dengan tahun 2022, di antara korporasi pada sektor kelautan dan perikanan (KP) yang telah terbentuk kelembagaannya adalah korporasi yang diinisiasi melalui Koperasi Mino Saroyo di Cilacap dan Koperasi Mitra Mina Mandiri di Ogan Komering Ulu (OKU) Timur (Biro Perencanaan, 2022). Koperasi Mino Saroyo membangun korporasi nelayan di Cilacap dan Koperasi Mitra Mina Mandiri mendirikan korporasi pembudidaya ikan di OKU Timur. Untuk tahun 2023, direncanakan pembentukan korporasi di 5 lokasi nelayan dan 10 lokasi pembudidaya. Namun demikian, hingga saat yang dijadwalkan, pembentukan kelembagaan korporasi pembudidaya ikan dan udang pada kawasan pertambakan belum dapat terlaksana (Biro Perencanan KKP, 2023). Penyebab utama kasus ini adalah ketiadaan strategi untuk konsolidasi tambak dan penyatuan unit-unit kegiatan usaha (bisnis) pertambakan. Konsolidasi dalam konteks ini merupakan aspek sangat krusial mengingat tingginya keragaman penguasaan luasan tambak oleh pembudidaya di setiap lokasi (pulau atau provinsi), serta belum kuatnya terintegrasi bisnis *on-farm* dan *off-farm*.

Pada usaha pertambakan, konsolidasi umumnya terfokus pada kegiatan *on farm*, terutama melalui upaya-upaya untuk menghimpun para pelaku usaha dalam Kelompok Pembudidaya Ikan yang disebut Pokdakan (Puspita & Sunartomo, 2019). Salah satu permasalahan yang ditemukan dalam konsolidasi pokdakan tersebut adalah pendekatan yang diterapkan tidak cukup efektif untuk membangun posisi tawar petambak di dalam pasar *input* dan pasar *output* (*off taker*) seperti pada usaha perternakan dan pertanian pada umumnya (Koppenberg & Hirsch, 2021). Faktor utama penyebab permasalahan ini adalah terlalu sedikitnya jumlah anggota dari masing-masing pokdakan. Idealnya konsolidasi usaha bisnis tambak dilakukan dengan menghimpun pokdakan-pokdakan yang masing-masing memiliki anggota 10 sampai 20 petambak. Dengan jumlah keanggotaan yang cukup besar, penguatan bisnis *on farm* dan bisnis *off farm* dapat terjadi.

Pokdakan dengan jumlah anggota yang memadai berpeluang untuk merealisasikan target-target atau tujuan pembentukan pokdakan sebagaimana dimaksudkan pada saat awal pengembangan konsep pokdakan. Pada awalnya, konsep pokdakan diaplikasikan dalam upaya peningkatan produksi ikan bandeng (Schuster 1952; Rabanal 1988; Purwanti, 2017 & Widodo, 2003), perluasan usaha udang windu dan bandeng dengan teknologi tradisional (Rimmer *et al*., 2012). Pada saat itu, konsep dikembangkan terutama untuk tujuan menopang ekonomi rumah tangga (Susilo *et al*., 2021 & Masyitoh, 2017) dan memacu ekspor non migas (Booth & McCawley, 1981). Fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua tujuan tersebut dapat terelisasikan karena sejumlah aspek detil yang tidak tertangani dengan baik. Sebagai contoh, banyak pokdakan yang kurang efektif dalam menangani masalah penyakit (Rimmer *et al*., 2012), menjaga kualitas lingkungan tambak (Bahri *et al*., 2014; Zulham, 2022), mengatasi masalah pemasaran hasil panen petambak ke pasar modern (Markelova *et al*., 2009 & Valentinov, 2007).

Terkait upaya pengamanan target-target Perpres RI No. 18/2020, berbagai hal sebagaimana diuraikan di atas menyiratkan pentingnya strategi untuk membangun kelembagaan korporasi yang kuat/efektif. Melalui langkah tersebut, diharapkan pembudidaya udang dan ikan pada kawasan pertambakan, yang tergabung dalam berbagai pokdakan, akan mampu melakukan konsolidasi tambak (kolam). Selanjutnya, melalui konsolidasi yang baik, integrasi kegiatan *on-farm* dan *off-farm* dapat berlangsung dengan efektif dan efisiensi, sehingga produktivitas, dan pendapatan usaha meningkat, dan ketersediaan pangan pun terjamin (Saptana *et al*, 2019). Ini terjadi karena konsolidasi melalui korporasi memungkinkan tertanganinya berbagai permasalahan umum pada usaha pertambakan, termasuk penurunan kualitas lingkungan serta akses petambak ke sistem rantai pasok pasar domestik dan global.

Berdasarkan paparan di atas, kajian ini bertujuan untuk: (1) melakukan pemetaan keragaman penguasaan luasan tambak di berbagai pulau dan provinsi dalam kaitannya dengan

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

pengembangan korporasi; 2) mengidentifikasi peran komponen kelembagaan korporasi pertambakan; 3) menyusun strategi pengembangan kelembagaan korporasi tambak di Indonesia. Hasil dari kajian ini diharapkan dapat menjadi landasan atau acuan dalam pengoperasian kelembagaan korporasi pertambakan ikan dan udang di Indonesia. Data yang digunakan untuk kajian ini adalah data Sensus Pertanian 2013, dengan sampel responden tingkat desa (jumlah petambak yang menjadi sampel 138.865 responden). Data tersebut dilengkapi pula dengan survei lapangan pada bulan Maret 2023 yang dilaksanakan di Kabupaten Brebes (Jawa Tengah) dan Indramayu (Jawa Barat), dengan menyertakan sampel yang diambil dari 100 orang responden. Data-data tersebut kemudian dinalisis menggunakan pendekatan statistik deskriptif (Susilowati, 2019 & Nicholas, 1999).

KERAGAMAN PENGUASAAN LUASAN TAMBAK DAN KONSOLIDASI DALAM MENDUKUNG KORPORASI

Salah satu aspek penting dalam pembentukan kelembagaan korporasi pada kawasan pertambakan di Indonesia adalah keragaman penguasaan lahan oleh petambak. Sebaran luas tambak, petambak, dan tingkat penguasaan lahannya merupakan dasar yang penting untuk memutuskan pembentukan kelembagaan korporasi pada pulau atau provinsi yang memiliki jumlah petambak yang banyak dan kawasan dengan areal lahan tambak yang luas (Tabel 1 dan Tabel 2). Hal ini, dimaksudkan agar investasi pembentukan korporasi melalui konsolidasi tambak (kolam) lebih efisien, serta kolaborasi antar *stakeholder* dan integrasi bisnis menjadi lebih efektif (Saptana, 2012). Dengan korporasi petambak maka perencanaan infrastruktur tambak seperti jalan, saluran air tambak, listrik, serta akses ke pasar, dapat disiapkan dengan baik. Konsolidasi lahan tambak dalam korporasi pada skala kawasan, juga dapat mempercepat adopsi teknologi maupun memperbaiki kualitas lingkungan di sekitar tambak dan menjamin mendapatkan akses terhadap berbagai sumber pembiayaan.

Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa di sentra-sentra pertambakan udang, keragaman penguasaan lahan tambak cukup tinggi. Sebagai contoh, di Kabupaten Brebes dan Kabupaten Indramayu pada tahun 2023, kategori penguasaan bervariasi dari usaha tambak rakyat dengan status penguasaan hak milik dikelola sendiri (62,75%-68%), sewa (22% -25,49%), bagi hasil (2%-5.88%), hingga gadai (5,88%-8%). Luasan tambak yang dikuasai melalui berbagai kategori penguasaan tersebut berkisar antara 0,9 hektar-1,4 hektar. Selain dalam hal kategori dan luasan penguasaan, keragaman juga terjadi dalam hal sistem usaha dan kemitraannya. Sebagian petambak menerapkan sistem monokultur (60,78%-64,71%) sedang sebagian lainnya polikultur (35,29%-39,22%). Sebagian petambak melakukan operasi budidaya tambak secara individu, sehingga konsolidasi tambak untuk membangun kelembagaan korporasi petambak dalam skala kawasan harus dilakukan agar berbagai permasalahan relatif mudah dikendalikan. Permasalahan dimaksud misalnya adalah ketersediaan input, pemasaran hasil, pencemaran air dan kerusakan lingkungan perairan.

Secara nasional, mengacu pada hasil sensus pertanian 2013, keragaman luas kepemilikan lahan tambak di berbagai pulau di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1. Pada tabel ini, tercatat bahwa 40,7% petambak terdapat di Pulau Jawa; 26,1% petambak terdapat di Sulawesi; 22,3% petambak terdapat di Pulau Sumatera; 8,4% petambak terdapat di pulau Kalimantan.

Tabel 1 menunjukkan luas penguasaan tambak minimum dan maksimum di Indonesia sangat timpang. Oleh karena itu, korporasi merupakan strategi untuk konsolidasi bisnis petambak agar usaha pertambakan tersebut lebih efisien sehingga

Tabel 1. Jumlah Petambak dan Sebaran Tambak menurut Pulau di Indonesia berdasarkan Sensus Pertanian 2013.

Pulau	Jumlah Petambak (Orang)	Rata-rata Luas Tambak (Hektar)	Standar Deviasi	Luas Tambak Minimum (Hektar)	Luas Tambak Maksimum (Hektar)	Luas Tambak Total (Hektar)
Sumatera	31.010	1,54	1,68	0,043	4,7	47.850,53
Jawa	56.531	1,85	2,21	0,043	50	104.639,80
Bali & Nusa Tenggara	3.327	0,95	1.04	0,045	10	3.149,72
Kalimantan	11.645	6,6	5,83	0,045	42	77.133,29
Sulawesi	36.297	2,27	2,43	0,044	60	82.242,83
Maluku & Papua	55	2,63	1,63	0,2	8	144,45
Total	**138.865**	**2,27**	**2,98**	**0,425**	**60**	**315.160,00**

Sumber: Diolah dari Data Sensus Pertanian, 2013.

dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan petambak. Dengan demikian, beberapa korporasi pembudidaya ikan dan udang perlu segera dikembangkan pada kawasan tambak terluas di Indonesia yang terdapat di Pulau Jawa (104.639,8 H), Sulawesi (82.242,83 H), Kalimantan (77.133,29.H) dan Sumatra (47.850,53.H). Oleh sebab itu, sebaran petambak dan luas tambak dijadikan indikator dalam menentukan pembentukan kelembagaan korporasi pertambakan dengan mempertimbangkan rata-rata luas penguasaan tambak. Pada pulau-pulau tersebut diperlukan penguatan kolaborasi antar petambak dengan *stakeholder* (mitra). Kolaborasi ini diperlukan sebagai upaya membangun aksi kolektif petambak melalui kelembagaan korporasi pembudidaya tambak untuk mengintegrasikan kegiatan *on farm* dan *off farm*, sehingga dapat mencari solusi terhadap berbagai masalah produksi dan pemasaran hasil. Kolaborasi tersebut bertujuan juga untuk mereduksi biaya transaksi di dalam mengakses pasar (Markelova *et al.*, 2009) dan meminimalkan biaya produksi.

Di Pulau Sumatra korporasi petambak dapat dikembangkan di Provinsi Aceh, Sumatra Selatan, dan Lampung. Rata-rata penguasaan luas tambak dan luas penguasaan tambak maksimum di Lampung (1,25 H dan 10,07 H), di Sumatera Selatan (2,06 H dan 14 H), serta di Aceh (1,47 Hektar dan 12 H). Di Jawa Barat (2,26 H dan 50 H), di Jawa Timur (2,04 H dan 27 H), dan Jawa Tengah (1,33 H dan 12,25 H), Demikian juga di Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, serta Kalimantan Utara. Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan memiliki rata-rata penguasaan tambak dan luas tambak maksimal dengan keragaman yang tinggi. Pada provinsi-provinsi tersebut pengembangan korporasi petambak pada kenyataannya memiliki peluang terbesar (Tabel 2).

Di Provinsi Aceh dengan rata-rata penguasaan tambak 1,47 H pengembangan korporasi petambak melalui konsolidasi lahan dapat dilakukan di Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Timur, Kabupten Pidie, dan Kabupaten Bireuen di Provinsi Sumatra Selatan dengan rata rata penguasaan tambak 2,06 H maka konsolidasi tambak untuk membangun korporasi petambak dapat di kembangkan di Kabupaten Ogan Komering Ilir; sementara di Provinsi Lampung dapat dilakukan di Kabupaten Lampung Selatan.

Komponen Kelembagaan Korporasi Pembudidaya

Di dalam kepustakaan, sejumlah publikasi menyebutkan pentingnya kelembagaan yang efektif. Saptana *et al.* (2019), misalnya menyebutkan ada 6 (enam) peran penting kelembagaan, yaitu: (i) pengembangan budi daya tambak sebagai usaha yang dikelola oleh korporasi milik pembudidaya; (b) modernisasi sistem pengelola usaha budi daya tambak; (c) perancangan strategi, pola, dan model bisnis usaha pertambakan; (d) pelaksanaan kolaborasi bisnis dengan pelaku usaha lain di hulu maupun hilir; (e) peningkatan kualitas sumber daya manusia terhadap anggota dan kepengurusan korporasi; dan (f) peningkatan pendapatan dan kesejahteraan, pembudidaya tambak. Pembentukan korporasi petambak juga dilakukan untuk membangun jaringan usaha antara kelompok petambak dengan berbagai komponen yang terkait dengan bisnis tersebut. Kelembagaan yang disebutkan diatas merupakan pondasi dalam membangun aturan dan proses yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang disepakati.

Tabel 2. Jumlah Petambak dan Luas Tambak menurut Provinsi Utama yang Dominan Tambak berdasarkan Sensus Pertanian 2013.

Provinsi	Jumlah petambak (Orang)	Rata-rata Luas Tambak (Hektar)	Standar Deviasi	Luas Tambak Minimum (Hektar)	Luas Tambak Maksimum (Hektar)	Luas Tambak Total (Hektar)
Aceh	12.829	1,47	1,60	0,04	12,00	18.829,45
Sumatra Selatan	7.156	2,06	1,93	0,05	14,00	14.760,62
Lampung	9.467	1,25	1,39	0,05	10,07	11.880,64
Jawa Barat	15.462	2,26	2,63	0,04	50,00	34.897,93
Jawa Tengah	22.550	1,33	1,37	0,04	12,25	30.074,27
Jawa Timur	15.814	2,04	2,49	0,04	27,00	32.229,37
Kalimantan Selatan	2.098	4,90	3,91	0,05	28,31	10.280,88
Kalimantan Timur & Utara	8.628	7,24	6,26	0,05	42,00	62.499,14
Sulawesi Tengah	1.466	3,58	3,99	0.05	60,00	5.249,63
Sulawesi Selatan	31.029	2,13	2,30	0,04	18,00	66.244,22

Sumber: Diolah dari Data Sensus Pertanian, 2013.

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

Agar aturan tersebut dapat diwujudkan maka diperlukan pengorganisasian pelaku-pelaku bisnis yang terkait dengan usaha pertambakan agar tujuan itu dapat dicapai dengan cara yang terorganisasi dan efektif.

Lebih lanjut, Reviera *et al.* (2017) dan Lichtkoppler (1993) menyebutkan bahwa pengorganisasian petambak dalam korporasi akan memudahkan penyusunan rencana aksi kolektif petambak terutama dalam memperkuat modal sosial dan modal finansial, menentukan sumber daya manusia yang kompeten untuk menjalankan bisnis korporasi, memutuskan solusi permasalahan limbah dan pencemaran, mengelola air untuk budi daya tambak, serta mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi di dalam produksi, serta pemasaran. Pengorganisasian petambak dalam korporasi dapat sidahulukan dengan membangun akses pasar (*off taker*), mencari solusi pendanaan usaha melalui berbagai skema seperti kredit dari perbankan, pembiayaan melalui *crowd funding* (Koch *et al.,* 2015; Rossi & Vismar, 2018), atau modal ventura (Gompers & Lerner, 2001; Lerner & Tag, 2013).

Jauh dari kondisi ideal sebagaimana disebutkan dalam sitasi kepustakaan di atas, organisasi atau kelembagaan petambak saat ini belum memberikan output-output sebagaimana seharusnya. Salah satu penyebabnya, sebagaimana dilaporkan oleh Samian *et al*. (2015), adalah bahwa organisasi petambak yang ada pada umumnya merupakan entitas-entitas bisnis kecil sehingga tidak dapat berperan secara efektif. Dengan kondisi seperti itu, berbagai permasalahan termasuk yang terkait produksi dan pemasaran, lebih banyak diselesaikan secara individu oleh petambak.

Pengamatan di lapangan dalam riset ini menunjukkan gambaran pengorganisasian petambak yang ada dalam Pokdakan dan Poklina (kelompok pengelola irigasi perikanan). Ketidakefektifan kelembagaan pokdakan dalam mengadopsi teknologi yang diintroduksikan oleh pemerintah adalah salah satu fenomena umum yang menggambarkan hubungan antara terlalu kecilnya organisasi yang ada dengan kinerjanya. Kasus kegagalan intervensi teknologi pada kawasan pertambakan di Aceh Tamiang dan Aceh Timur adalah contoh umum dari fenomena tersebut. Teknologi tendon air yang diintroduksikan hanya diadopsi terbatas oleh beberapa petambak saja. Kasus serupa terjadi pada introduksi teknologi IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) di Brebes. Dalam hal ini, penyebab kegagalannya adalah biaya yang dibutuhkan untuk pembuatan IPAL, yang tidak dapat ditanggung hanya oleh individu petambak atau kelompok petambak dalam organisasi yang kecil.

Kasus-kasus di Aceh Tamiang, Aceh Timur dan Brebes tersebut di atas ini sebenarnya telah harus diantisipasi. Sebagaimana ditegaskan oleh Hansen *et. al.,* 2011), hanya dengan pengorganisasian dalam kelompok besarlah pengelolaaan bisnis pertambakan pada korporasi yang mencakupi kawasan luas dapat dilakukan dengan baik. Ukuran orgaisasi yang memadai dalam kelembagaan korporasi ini juga penting untuk memungkinkan kelayakan finansial untuk perekrutan tenaga professional. Sebagaimana disebutkan oleh Halal (2000), kelembagaan korporasi dalam mengelola bisnis harus menggunakan tenaga profesional. Tenaga profesional pada korporasi tersebut berfungsi mengelola bisnis *on farm* dan *off farm* untuk kepentingan para petambak secara terintegrasi.

Penelitian ini menemukan adanya beberapa komponen yang mendukung berfungsinya kelembagaan korporasi petambak, sebagaimana terangkum pada Gambar 1. Komponen tersebut adalah: (i) kelembagaan korporasi pembudidaya tambak di kawasan pertambakan, yang berperan membentuk kawasan budi daya tambak dan berkolaborasi dengan pelaku usaha lain (hilir dan hulu); (ii) swasta & pengusaha yang berperan sebagai mitra dengan korporasi pembudidaya tambak; (iii) penyedia jasa logistik yang berperan di dalam menyediakan jasa pengemasan dan distribusi sarana produksi serta hasil produksi; (iv) lembaga keuangan, sumber pembiayaan, dan asuransi, yang berperan membangun kemitraan untuk permodalan maupun jaminan kerugian; (v) pemerintah yang berperan sebagai regulator, katalisator, serta fasilitator, dalam mendukung berfungsinya kelembagaan korporasi pembudidaya tambak.

Untuk membuat korporasi pembudidaya tambak menjadi kelembagaan ekonomi yang berperan mensejahterakan petambak dalam menopang ekonomi nasional, hal yang dibutuhkan adalah penguatan interaksi antar komponen sebagaimana terangkum pada pada Gambar 1. Interaksi antar komponen pendukung korporasi, dimaknai sebagai suatu upaya untuk merestorasi jiwa gotong royong kelompok pembudidaya perikanan di dalam bisnis (Endro, 2016). Pendapat ini menekankan, bahwa usaha budi daya udang dan ikan di tambak apabila dikonsolidasikan sebagai sebuah bisnis korporasi dapat bersaing di pasar lokal dan global.

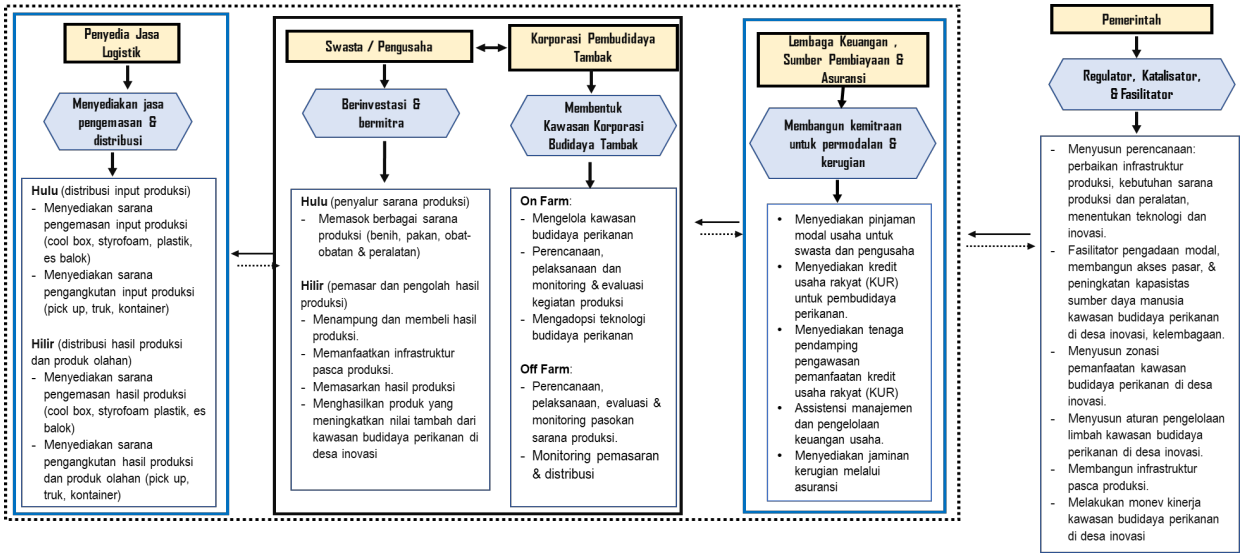
Penyedia Jasa Logistik
Menyediakan jasa pengemasan & distribusi
Hulu (distribusi input produksi)
- Menyediakan sarana pengemasan input produksi (cool box, styrofoam, plastik, es balok)
- Menyediakan sarana pengangkutan input produksi (pick up, truk, kontainer)
Hilir (distribusi hasil produksi dan produk olahan)
- Menyediakan sarana pengemasan hasil produksi (cool box, styrofoam plastik, es balok)
- Menyediakan sarana pengangkutan hasil produksi dan produk olahan (pick up, truk, kontainer)
Swasta / Pengusaha
Berinvestasi & bermitra
Hulu (penyalur sarana produksi)
- Memasok berbagai sarana produksi (benih, pakan, obat-obatan & peralatan)
Hilir (pemasar dan pengolah hasil produksi)
- Menampung dan membeli hasil produksi.
- Memanfaatkan infrastruktur pasca produksi.
- Memasarkan hasil produksi
- Menghasilkan produk yang meningkatkan nilai tambah dari kawasan budidaya perikanan di desa inovasi
Korporasi Pembudidaya Tambak
Membentuk Kawasan Korporasi Budidaya Tambak
On Farm:
- Mengelola kawasan budidaya perikanan
- Perencanaan, pelaksanaan dan monitoring & evaluasi kegiatan produksi
- Mengadopsi teknologi budidaya perikanan
Off Farm:
- Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi & monitoring pasokan sarana produksi.
- Monitoring pemasaran & distribusi
Lembaga Keuangan , Sumber Pembiayaan & Asuransi
Membangun kemitraan untuk permodalan & kerugian
• Menyediakan pinjaman modal usaha untuk swasta dan pengusaha
• Menyediakan kredit usaha rakyat (KUR) untuk pembudidaya perikanan.
• Menyediakan tenaga pendamping pengawasan pemanfaatan kredit usaha rakyat (KUR)
• Assistensi manajemen dan pengelolaan keuangan usaha.
• Menyediakan jaminan kerugian melalui asuransi
Pemerintah
Regulator, Katalisator, & Fasilitator
- Menyusun perencanaan: perbaikan infrastruktur produksi, kebutuhan sarana produksi dan peralatan, menentukan teknologi dan inovasi.
- Fasilitator pengadaan modal, membangun akses pasar, & peningkatan kapasistas sumber daya manusia kawasan budidaya perikanan di desa inovasi, kelembagaan.
- Menyusun zonasi pemanfaatan kawasan budidaya perikanan di desa inovasi.
- Menyusun aturan pengelolaan limbah kawasan budidaya perikanan di desa inovasi.
- Membangun infrastruktur pasca produksi.
- Melakukan monev kinerja kawasan budidaya perikanan di desa inovasi

Gambar 1. Komponen Pendukung Korporasi Pembudidaya Tambak.

Mengacu pada pengamatan pada kasus Kabupaten Brebes dan Kabupaten Indramayu, penelitian ini menemukan bahwa untuk mendukung berkembangnya aktivitas ekonomi di kawasan, komponen-komponen yang ada masih memerlukan upaya-upaya penguatan integrasinya. Pada dua lokasi tersebut, konsolidasi diperlukan terutama pada hubungan antara pelaku usaha pemasok benih dan pakan sehingga kualitas dan harga benih dan pakan menjadi lebih stabil. Hal ini perlu dilakukan karena potensi bisnis korporasi pada lokasi penelitian belum terintegrasi. Pasokan benih untuk pembudidaya tambak masih tergantung dengan jasa pedagang benih (di Kabupaten Brebes 68,78% dan Kabupaten Indramayu 78%), sehingga harga dan kualitas benih sangat beragam. Sumber kebutuhan pakan pembudidaya tambak pada dua kabupaten tersebut 74,51% diperoleh melalui toko penjual sarana produksi.

Potensi bisnis korporasi Kabupaten Brebes dan Kabupaten Indramayu dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Potensi Bisnis Korporasi pada Kawasan Pertambakan.

Potensi Bisnis Korporasi	Kabupaten Brebes	Kabupaten Indramayu
Sumber Benih	xx	xx
- Pedagang	60.78%	78.00%
- *Hatchery*	39.22%	22.00%
Sumber Pakan	xx	xx
- Pabrik pakan	3.92%	7.84%
- Toko sarana produksi	74,51%	74.51%
- Pedagang Desa	21,57%	17.65%

Sumber: Diolah dari survei, 2023.

Dengan demikian, integrasi *on farm* dan *off farm* dalam skala kawasan (khususnya Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Indramayu) melalui komponen korporasi pembudidaya tambak mampu:

1. Menjamin ketersediaan benih dan pakan lebih efektif, serta hasil produksi tambak dapat langsung sampai ke *off taker*.
2. Mendorong tumbuhnya industri pengolahan hasil tambak di kawasan pertambakan dalam skala ekonomi, sehingga bisa menghasilkan produk yang bernilai tambah untuk pasar ekspor dan domestik.
3. Memudahkan pelaksanaan program pelatihan dan pendampingan bagi petambak untuk meningkatkan kapabilitas petambak, sehingga dapat menghasilkan produk yang berkualitas.
4. Mengadopsi teknologi untuk pengelolaan air tambak, proses produksi, pengolahan hasil, dan memudahkan distribusi, karena para petambak telah terorganisasi dalam korporasi.

Pegorganisasian Komponen Korporasi dalam Model Kelembagaan Korporasi Petambak

Model pada Gambar 2, merupakan komponen pembentuk korporasi pada Gambar 1, yang dikonstruksi untuk hamparan minimal 100 H. Pada luasan tersebut kegiatan penyediaan input dan penawaran hasil produksi telah memenuhi skala ekonomi dan dapat mendorong tumbuhnya berbagai kegiatan ekonomi. Pada model tersebut, komponen korporasi pembudidaya terdiri dari Pokdakan yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Pembudidaya Ikan (Gapokan). Gapokan tersebut nantinya akan membentuk koperasi primer

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta koperasi sekunder (yang dikelola oleh tenaga profesional). Peran swasta dan investor dalam entitas bisnis korporasi ini adalah sebagai pengusaha/ agen sarana produksi dan pemasar/pengolah hasil perikanan. Penyedia jasa logistik yang mendukung kegiatan bisnis korporasi di dalam mendapat input dan mendistribusikan hasil produksi. Peran lembaga keuangan menjadi sangat sentral sebagai sumber pembiayaan dan asuransi yang mendukung pembiayaan bisnis korporasi dan kerugian bisnis korporasi. Kehadiran pemerintah sebagai integrator, memiliki peran yang penting dalam berperan sebagai pendorong berfungsinya korporasi pembudidaya di kawasan pertambakan.

Model korporasi pembudidaya tambak pada Gambar 2, dikembangkan dengan strategi prinsip konsolidasi, kolaborasi, dan integrasi. Konsolidasi merupakan prinsip menghimpun aset petambak (kolam ataupun tambak) agar aksi kolektif korporasi dapat: a) memanfaatkan nilai aset menjadi kekuatan korporasi bernegosiasi mendapatkan modal dengan pelaku bisnis lain untuk memperoleh kredit atau pembiayaan (*crowdfunding* atau modal ventura); b) mengelola kawasan pertambakan, sehingga dapat mengatasi berbagai permasalahan lingkungan (polusi/limbah, hama, serta penyakit) yang sering menggagalkan produksi, dan kontrak penjualan; c) mendorong diperolehnya sertifikasi kawasan pertambakan (menjadi kawasan tambak organik) yang sesuai dengan persyaratan pasar dalam meningkatkan nilai tambah kawasan dan manfaat diperoleh petambak (Kaganzi *et al.*, 2009).

Kolaborasi merupakan prinsip mengoptimalkan aset petambak pada satu kawasan yang telah dihimpun korporasi petambak yang dikelola oleh profesional, sehingga berperan di dalam peningkatan produksi hasil tambak dan meningkatkan nilai tambah. Kolaborasi korporasi petambak dengan pelaku bisnis lain dilakukan untuk: a) menjamin keberlangsungan bisnis di kawasan pertambakan di dalam memperoleh *input* produksi sehingga dapat meningkatkan pangsa pasar hasil tambak (Holloway *et al.*, 2000); b) menjamin kelangsungan bisnis korporasi dalam mengakses berbagai pasar, membuka akses pasar baru (Okello *et al.*, 2007), atau berperan dalam memasok produk khusus hasil tambak (seperti bandeng atau udang organik) dengan harga tinggi (Wollni & Zeller, 2007); c) mempermudah mendapat sertifikasi kawasan pertambakan sesuai dengan syarat pasar modern (Reardon *et al.*, 2009) sehingga dapat meningkatkan posisi tawar korporasi dengan pedagang di pasar global untuk mendapat harga premium (Roy & Thorat, 2008); d) mempermudah monitor pengelolaan sumber air tambak, serta mengendalikan konflik di kawasan pertambakan (Rivera *et al.*, 2017).

Integrasi merupakan prinsip pengorganisasian petambak untuk mengoptimalkan aset petambak yang dihimpun korporasi agar bisnis mereka berkembang dan berkelanjutan. Integrasi dilakukan melalui: a) kerjasama dengan kepemilikan unit bisnis di dalam struktur organisasi korporasi yang berfungsi mengintegrasikan bisnis tambak di kawasan tersebut; b) konsolidasi untuk distribusi hasil tambak di dalam kawasan pertambakan sehingga dapat masuk dalam

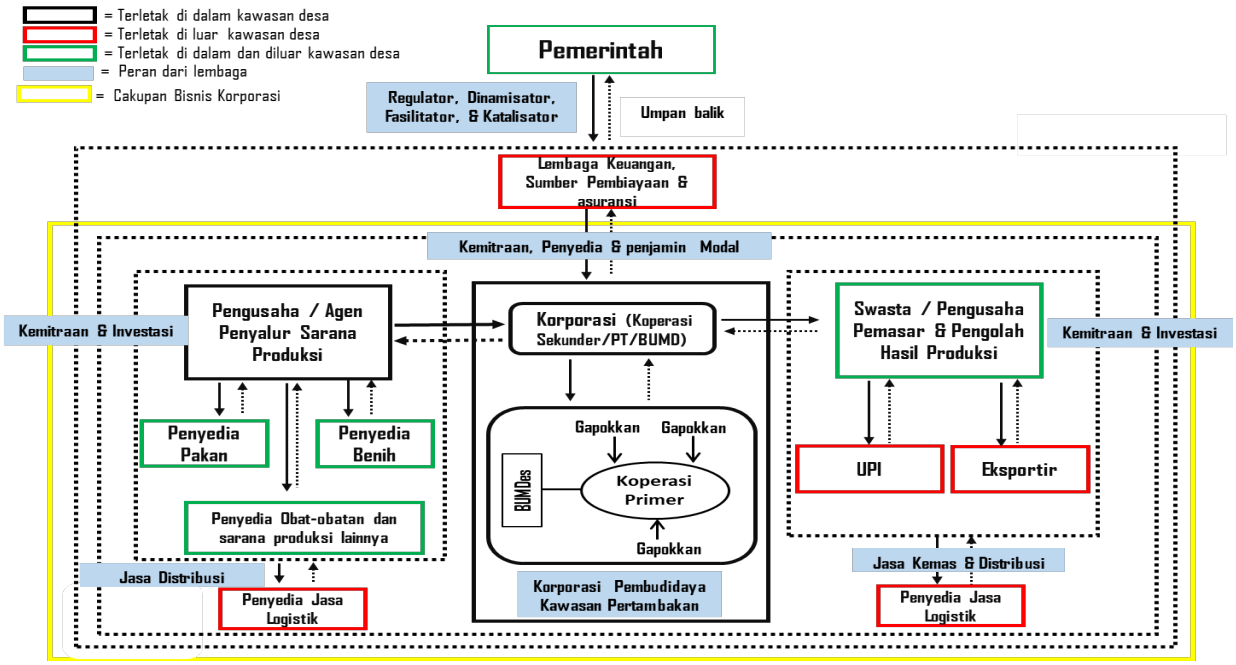

Gambar 2. Model Korporasi pada kawasan Pertambakan.

sistem rantai pasok di pasar lokal dan global sehingga mengurangi biaya transaksi (Markelova *et al*., 2009; Trebbin & Hassler, 2012; Valentinov, 2007); c) kerja sama dengan berbagai lembaga keuangan untuk memperlancar transaksi bisnis petambak sehingga perekonomian petambak menjadi lebih baik (Bernard & Spielman, 2009; Francesconi & Heerink, 2011).

Implementasi Kelembagaan Korporasi

Implementasi kelembagaan korporasi pada Gambar 2 menjadi cara yang efektif untuk mengintegrasikan *off farm* dan *on farm* agar tujuan bisnis budi daya tambak pada kawasan pertambakan tercapai. Integrasi tersebut merupakan strategi yang dapat dilakukan melalui: 1) identifikasi tujuan integrasi, agar tujuan bergabung dalam korporasi jelas dan disepakati oleh semua pelaku usaha yang terlibat dalam kelembagaan korporasi. Tujuan itu meliputi aspek finansial, sosial, dan lingkungan; 2) mengintegrasikan semua stakeholder dari koperasi, BUMDes, atau perusahaan yang membentuk kelembagaan korporasi agar integrasi *on farm* dan *off farm* dapat terwujud; 3) pengaturan tata kelola kelembagaan korporasi, yang terkait perencanaan anggaran, pengelolaan sumber daya, dan penetapan kebijakan; 4) identifikasi peluang bisnis, yang menguntungkan dan dikembangkan dengan mengintegrasikan kegiatan *on farm* dan *off farm*. Korporasi pembudidaya tambak dapat menjual produk mereka ke pasar lokal dan global dengan bantuan perusahaan yang telah memiliki akses pasar; 5) pemberdayaan pembudidaya, harus menjadi fokus utama kelembagaan korporasi. Pembudidaya ikan dan udang harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan mendapatkan manfaat yang adil dari kegiatan bisnis *on-farm* dan *off-farm*; 6) pembangunan infrastruktur, seperti jalan, irigasi, dan jaringan listrik perlu dilakukan untuk mendukung kegiatan *on farm* dan *off farm*; 7) pendidikan dan pelatihan perlu diberikan kepada pembudidaya ikan dan udang untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam agribisnis.

Implementasi kelembagaan korporasi pada kawasan pertambakan dapat dilihat sebagai kekuatan bisnis integrasi *on farm* dan *off farm* di dalam membangun kolaborasi petambak. Integrasi bisnis tersebut memberi beberapa manfaat kepada petambak seperti: 1) diversifikasi pendapatan, dengan mengintegrasikan kegiatan *on farm* dan *off farm*, pembudidaya ikan dan udang dapat mendiversifikasi sumber pendapatan mereka. Kondisi ini dapat membantu mengurangi risiko yang terkait dengan hanya mengandalkan satu sumber pendapatan; 2) peningkatan profitabilitas: mengintegrasikan kegiatan *off farm* dengan aktivitas *on farm* dapat membantu pembudidaya ikan dan udang untuk meningkatkan profitabilitas bisnis mereka. Pembudidaya ikan dan udang dapat menggunakan produk hasil tambak mereka untuk meningkatkan nilai tambah dan menciptakan produk baru yang dapat dijual dengan harga lebih tinggi; 3) pemanfaatan sumber daya yang lebih baik: dengan mengintegrasikan kegiatan *on farm* dan *off farm*, pembudidaya ikan dan udang dapat memanfaatkan sumber daya mereka dengan lebih baik, seperti kolam, tenaga kerja, dan modal. Hal ini dapat membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas tambak; 4) Peningkatan akses pasar: dengan mengintegrasikan kegiatan *off farm* dengan kegiatan *on farm*, pembudidaya ikan dan udang dapat memperoleh akses ke pasar baru untuk produk mereka. Sebagai contoh, pembudidaya ikan dan udang yang memproduksi udang atau bandeng organik dapat menggunakan outlet tertentu untuk menjual produknya langsung ke konsumen; 5) peningkatan kualitas hidup: mengintegrasikan kegiatan *off farm* dengan aktivitas *on farm* dapat meningkatkan kualitas hidup pembudidaya ikan dan udang dan keluarganya. Karena pendapatan *off-farm* dapat memberikan stabilitas keuangan dan mengurangi tekanan yang terkait dengan hanya mengandalkan pendapatan dari pertambakan.

Kolaborasi petambak dalam korporasi pembudidaya ikan dan udang pada kawasan pertambakan dapat juga dilihat sebagai upaya:

1. Peningkatan keterlibatan masyarakat: yang mendorong partisipasi aktif petambak dalam Pokdakan berkolaborasi dengan korporasi, sehingga membantu membangun kepercayaan bisnis.
2. Mendorong pembangunan berkelanjutan: dengan korporasi, masyarakat dirancang untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan, melalui penerapan cara budi daya yang baik dan ramah lingkungan, pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab, dan perlindungan habitat alami dan keanekaragaman hayati.
3. Peningkatan peluang ekonomi: korporasi dapat menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat, seperti penciptaan lapangan kerja baru, pengembangan pasar baru untuk produk budi daya, dan peningkatan pendapatan.
4. Berbagi pengetahuan: korporasi dapat memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan keahlian antara petambak dan berbagai pihak. Pertukaran pengetahuan ini, dapat membantu membangun kapasitas dan meningkatkan keterampilan pembudidaya ikan dan udang

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

5. Peningkatan ketahanan pangan: korporasi dapat membantu meningkatkan ketahanan pangan dalam masyarakat. Hal ini termasuk produksi produk ikan dan makanan yang terjangkau dan bergizi yang dapat dikonsumsi lokal atau dijual di pasar regional

IMPLIKASI KEBIJAKAN

Berdasarkan pembahasan yang diuraikan di atas, implikasi kebijakan yang relevan adalah perlunya penerapan strategi implementasi korporasi pada kawasan pertambakan, yang meliputi: (i) Pembentukan korporasi harus dimulai dengan identifikasi dan pemetaan sebaran petambak dan luas kawasan pertambakan. Identifikasi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah Kementerian Kelautan dan Perikanan dan pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan di dalam penetapan kawasan korporasi budi daya tambak ikan dan udang di Indonesia; (ii) Pengorganisasian petambak yang menjadi kekuatan korporasi harus diorganisasikan dalam kelompok besar (Gapokan), agar keberadaan korporasi dapat bermanfaat untuk mengatasi permasalahan produksi (pencemaran air dan limbah), penyakit, kualitas serta harga benih dan pakan, maupun pemasaran hasil produksi; (iii) Pembentukan kelembagaan korporasi harus memperhatikan secara utuh komponen pendukung korporasi. Seluruh komponen yang dijadikan dasar pembentukan korporasi wajib diimplementasikan dan diintegrasikan secara komprehensif, untuk menjaga tujuan yang telah direncanakan berjalan sesuai dengan yang diharapkan; dan (iv) Model korporasi pembudidaya tambak dalam kajian ini merupakan skema yang dibangun dengan mengacu komponen terpilih berdasarkan hasil penelitian pada lokasi pertambakan terpilih. Model ini pada prinsipnya harus diaplikasikan melalui konsolidasi, kolaborasi, dan integrasi, agar dapat memperoleh manfaat secara optimal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi-Badan Riset Inovasi Nasional dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atas kesempatan dan pembiayaan riset "Strategi Implementasi Kelembagaan Korporasi Agribisnis Tambak dalam Rangka Peningkatan Produktivitas dan Pendapatan" dari program Fasilitasi Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju (RIIM) Gelombang II Tahun 2022 Nomor 82/II.7/HK/2022 Tanggal 26 Oktober 2022. Tulisan ini merupakan salah satu output kegiatan riset tersebut.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Dengan ini kami menyatakan bahwa kontribusi penulis terhadap penyusunan karya tulis ilmiah ini adalah: Armen Zulham & Sumaryanto sebagai kontributor utama tulisan, peran dalam tulisan meliputi mendesain penelitian dan substansi tulisan, mengolah data, menginterpretasi data, menyusun tulisan serta *proff-reading*. Nensyana Shafitri, Radityo Pramoda, Saptana, Budi Wardono, Muhammad Pahlevi Yamani, Dadan Permana, Adhita Sri Prabakusuma dan Dongqi Shi sebagai kontributor anggota yang berperan menelusuri pustaka, menyusun tabel-tabel analisis, ikut menyusun tulisan, merevieu tulisan dan *proof-reading*. dan penulis telah melampirkan surat pernyataan kontribusi penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Bahri S., Indra., & Muyassir. (2014). Kualitas Lahan Tambak dan Sosial Ekonomi Pada Budidaya Udang dan Ikan di Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Manajemen Sumberdaya Lahan. Volume 3, Nomor 1, April 2014: hal. 412-420.*

Bernard, T. & D.J. Spielman. (2009). Reaching the rural poor through rural producer organizations? A study of agricultural marketing cooperatives in Ethiopia. *Food Policy, 34(1) 60-69. https:// doi.org/10.1016/j.foodpol.200808001.*

Biro Perencanaan. (2022). *Korporasi Nelayan Cilacap dan Pembudidaya Ikan OKU Timur.* Kementerian Kelautan dan Perikanan.

_____ (2023). Rencana Pembentukan Korporasi Nelayan dan Pembudidaya Ikan. Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Booth, A. & P. McCawley. (1981). *The Indonesian Economy During The Soeharto Era*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.

Endro, G. (2016). Tinjauan Filosofis Praktik Gotong Royong. Respons: *Jurnal Etika Sosial, 21(01), 89-111.*

Francesconi, G.N., & N. Heerink. (2011). Ethiopian agricultural cooperatives in an era of global commodity exchange: Does organisational form matter?. *Journal of African Economies, 20(1), 153-177. https://doi.org/10.1093/jae/ejq036.*

Gompers, P., & J. Lerne. (2001). The Venture Capital Revolution. *Journal of Economic Perspectives. Vol (15) 2: 145–168.*

Global news. (2021). Korporasi Petani Dan Nelayan Melalui Koperasi Moderen. https://globalnews.id/korporasi-petani-dan-nelayan-melalui-koperasi-moderen/ diakses 26 Mei 2023.

Hansen G B., E.K. Coontz & M. Audrey. (2011). *Steps to Starting a Worker Co-op. Northwest Cooperative Federation and the Center for Cooperatives*. University of California. http://www.us-worker.coop/howtos.

Halal, W.E. (2000). Corporate community: Strategy & Leadership*, JCC: 28(2), 10–16. George Washington University, USA. doi:10.1108/10878570010341582.*

Holloway, G., C. Nicholson, C. Delgado, S. Staal & S. Ehui. (2000). Agroindustrialization through institutional innovation: Transaction costs, cooperatives and milk-market development in the East-African highlands. *Agricultural Economics, 23(3), 279-288 https://doi.org/10.1016/S0169-5150(00)00089-X.*

Kaganzi, E., S. Ferris, J. Barham, A. Abenakyo, P. Sanginga & J. Njuki. (2009). Sustaining linkages to high value markets through collective action in Uganda. *Food Policy, 34(1), 23-30. https://doi.org/10.1016/j.foodpol.200810.004.*

Kemenko Perekonomian. (2022). Tingkatkan Entrepreneur Skill dan Dorong Skala.

Ekonomi yang Efisien, Pemerintah Kembangkan Korporasi Petani dan Nelayan.

https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4417/tingkatkan-entrepreneur-skill-dan-dorong-skala-ekonomi-yang-efisien-pemerintah-kembangkan-korporasi-petani-dan-nelayan. Diakses: 26 Mei 2023.

Koppenberg. M., S. Hirsch. (2021).Output market power and firm characteristics in dairyprocessing: Evidence from three EU countries. J Agric Econ. 2021;00:1–28. DOI: 10.1111/1477-9552.12460.

Koch, J.A., & S. Michael. (2015). Crowdfunding Success Factors: The Characteristics of Successfully Funded Projects on Crowdfunding Platforms. *Twenty-Third European Conference on Information Systems (ECIS), Münster, Germany, 2015.*

KSP. (2022). Presiden Ingin Petani – Nelayan Sejahtera Lewat Korporasi. https://koransn.com/ksp-presiden-ingin-petani-nelayan-sejahtera-lewat-program-korporasi/. Diakses 26 Mei 2023.

Lichtkoppler Frank, R., "Factors to Consider in Establishing a Successful Aquaculture Business in the North Central Region" (1993). *NCRAC Technical Bulletins. 13. http://lib.dr.iastate.edu/ncrac_techbulletins/13. United States Department of Agriculture Grant #89-38500-4319.*

Lerner, J & J. Tag. (2013). Institutions and venture capital. *Industrial and Corporate Change, Vol (22)1: 153-182. doi:10.1093/icc/dts050.*

Markelova, H., Meinzen-Dick, R., J. Hellin & S. Dohrn. (2009). Collective action for smallholder market access. *Food Policy, 34(1), 1-7. https:// doi.org/10.1016/j. foodpol.200810.001.*

Masyitoh, K. (2017). Lelang Bandeng Tradisional Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 1969-2006. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah Volume 5, No. 2, Juli 2017.*

Nugroho, T, (2021). Korporasi Nelayan. Korporasi Nelayan - Kompas.id. /baca/opini/2021/10/22/korporasi-nelayan. Diakses 26 Mei 2023.

Nicholas, J. (1999). *Introduction to Descriptive Statistics*. Mathematics Learning Centre University of Sydney NSW.

Okello, J.J., C. Narrod & D. Roy. (2007). *Food safety requirements in African green bean exports and their impact on small farmers*. Washington, D.C: International Food Policy Research Institute. https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.139.555& rep=rep1&type=pdf.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10.

Purwanti, A.D. (2017). Perkembangan Budi Daya Ikan Bandeng Di Gresik Tahun 1982-1989. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah. Volume 5, No. 2, Juli 2017.*

Puspita, M.C & A.F. Sunartomo. (2019). *Peran Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Aci Bahari Dalam Pembudidayaan Ikan Bandeng Di Desa Pesisir Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo*. JSEP Vol 12 No 2 Juli 2019.

Rabanal H.R. (1988). *History of Aquaculture*. ASEAN/SF/88/ Tech.7. ASEAN/UNDP/FAO Regional Small-Scale Coastal Fisheries Development Project, Manila, Philippines

Reardon, T., C.B. Barrett, J.A. Berdegu´e & J.F. Swinnen. (2009). Agrifood industry transformation and small farmers in developing countries. *World Development, 37 (11), 1717–1727. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2007.09.009.*

Rimmer M.A., K. Sugama., D. Rakhmawati., R. Rofiq & H.H. Richard. (2013). A review and SWOT analysis of aquaculture development in Indonesia. *Reviews in Aquaculture (2013) 5, 1-25. doi: 10.1111/raq.12017.*

Rivera, V.S., P.M. Cordero, D.C. Rojas & B. O'Riordan. (2017). Institutions and collective action in a Costa Rican small-scale fisheries cooperative: thecase of CoopeTárcoles R.L. *Maritime Studies, 16(1), 1-19. https://doi: 10.1186/ s40152-017-0077-1.*

Rossi, A & S. Vismar. (2018). *What do crowdfunding platforms do? A comparison between investment-based platforms in Europe*. Eurasian Bus Rev (2018) 8:93-118. https://doi.org/10.1007/s40821-017-0092-6.

Roy, D. & A. Thorat. (2008). Success in high value horticultural export markets for the small farmers: The case of Mahagrapes in India. *World Development, 36(10), 1874-1890. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2007.09.009.*

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

Samian, M., H. Saadi., M. Asadi., K. Mirzaei., E. Ansari., E. Ahmadihagh., A. Soleymani. (2015). The role of fishing cooperatives on social-Economic and cultural development of rural areas of Bord Khun city of Bushehr, Iran. *Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences. pp: 178-183. http://dx.doi.org/ 10.1016/j.jssas.2015.06.001*

Saptana. (2012). Konsep Efisiensi Usahatani Pangan dan Implikasinya Bagi Peningkatan Produktivitas. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 30(2), 109 -128.

Saptana, Hermanto, M. Sativa, T. Senoadji, S. Gabriella, A.M. Ar-Rozy, Elfitri, L.W.S Catur. (2019). *Pemetaan dan Reviu Proses Bisnis Perencanaan Wilayah Hortikultura (Komoditas Bawang Merah)*. Jakarta: Biro Perencanaan, Kementerian Pertanian; 2019. 181 p. ISBN 978-623-7470-60-1.

Schuster W.H. (1952). *Fish-Culture in Brackish-Water Ponds of Java*. Indo-Pacific Fisheries Council Special Publications No.1, Indonesia.

Susilo H., S. Qoriah, D. Oon, O.O. Nurul, M. Freddy, Zulkarnain & Erwiantono. (2012). Determinants of fish farmers' welfare in brackish water pond culture in Indonesia: fish farmer terms of trade index. *AACL Bioflux, 2021, Volume 14, Issue 2. http://www.bioflux.com.ro/aac.*

Susilowati, I. H. (2019). *Modul Matakuliah Statistik Deskriptif*. Universita Bina Sarana Informatika.

Trebbin, A., & M. Hassler. (2012). Farmers' producer companies in India: A new concept for collective action?. *Sage Jounal: Environment & Planning. 44(2), 411–427. https://doi.org/10.1068%2Fa44143.*

Valentinov, V. (2007). Why are cooperatives important in agriculture? An organizational economics perspective. *Journal of Institutional Economics, 3(1), 55-69. https://doi. org/10.1017/ s1744137406000555.*

Widodo D.I. (2003). *Griessee Tempo Doeloe*. Gresik: Pemerintah Kabupten Gresik.

Wollni, M. & M. Zeller. (2007). Do farmers benefit from participating in specialty markets and cooperatives? The case of coffee marketing in Costa Rica. *Agricultural Economics, 37(2-3), 243-248 https://doi.org/10.1111/j.1574-0862. 2007 .00270.x.*

Zulham, A. (2022). *Rekayasa Sosial Penerapan Inovasi Teknologi di Kawasan Pertambakan (Lesson Learned di Kawasan Pertambakan Aceh Tamiang)*. IPB Press. pp: 70.

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

Persepsi Masyarakat Tentang Dampak Pengembangan Pariwisata Pada Kesejahteraan Masyarakat: Kasus Pantai Ammani, Pinrang

Public Perceptions of The Impact of Tourism Development on Community Wellbeing: Lessond from the Case of Pinrang's Ammani Beach

Sri Wahyuni, Subari Yanto dan *Andi Alamsyah Rivai

Program Studi Pendidikan Teknologi Pertanian, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Makassar
Kampus Gunungsari Baru, Jl. A.P. Pettarani Makassar, Indonesia

ARTICLE INFO

Diterima tanggal : 7 November 2022
Perbaikan naskah: 30 Maret 2023
Disetujui terbit : 29 Mei 2023

*Korespodensi penulis:
Email: andi.alamsyah@unm.ac.id

DOI: http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v13i1.11850

ABSTRAK

Salah satu pemangku kepentingan yang paling berpotensi terdampak program pembangunan, termasuk program pengembangan pariwisata, adalah masyarakat sekitar. Karenanya, informasi mengenai dampak positif maupun negatif yang terjadi pada masyarakat, dan persepsi mereka tentang hal tersebut sangat krusial dalam pengembangan kebijakan terkait. Penelitian ini dilakukan pada kasus Pantai Ammani, Kabupaten Pinrang, dengan tujuan untuk: (i) mengukur tingkat kesejahteraan, yang didasarkan pada indikator Badan Pusat Statistik (BPS, dan (ii) menganalisis persepsi masyarakat terkait kesejahteraan dihubungkan dengan pengembangan wisata di wilayah mereka. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, dokumentasi, dan wawancara menggunakan kuesioner. Penentuan responden dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Uji Kruskal-wallis H digunakan untuk menganalisis perbedaan persepsi masyarakat mengenai tingkat kesejahteraan berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan hal-hal sebagai berikut: (i) Persepsi masyarakat terhadap pengembangan pariwisata Pantai Ammani adalah positif atau berdampak baik terhadap aspek kesejahteraan masyarakat, (ii) Tidak terdapat perbedaan signifikan dari persepsi masyarakat berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan (p>0,05), (iii) Berdasarkan indikator menurut BPS, tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar (Desa Mattiro Tasi), termasuk ke dalam kategori sejahtera dengan pendapatan rata-rata penduduk di atas Rp 3.000.000/bulan, tingkat pendidikan hingga jenjang SMA / sederajat, dan fasilitas tempat tinggal yang lengkap, (iv) Terdapat perbedaan signifikan untuk indikator pendapatan dan pengeluaran berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan (p < 0,05). Implikasi kebijakan penelitian ini adalah pentingnya penekanan aspek dampak kesejahteraan, baik yang terbaca melalui pengukuran objektif maupun terefleksikan dari persepsi masyarakat dalam pengembangan program pembangunan, termasuk pengembangan pariwisata. Untuk itu, kebijakan komplemen yang mengakomodasikan aspek ini merupakan hal yang sangat relevan.

Kata Kunci: persepsi; pariwisata; Pantai Ammani; kesejahteraan

ABSTRACT

One of the stakeholders that most potentially affected by development programs, including tourism development programs, is the community. Therefore, information about the positive and negative impacts that have occurred on the community, and their perceptions of this issue is crucial in the development of related policies. This research was conducted on the Ammani Beach, Pinrang Regency, with the aim of: (i) measuring the level of welfare, which is based on the indicators of the Central Statistics Agency (BPS), and (ii) analyzing people's perceptions regarding welfare related to tourism development in their area. The data was collected using observation, documentation and interview techniques using questionnaires. The respondents were determined using a purposive sampling technique. The Kruskal-Wallis H test was used to analyze differences in people's perceptions regarding the level of welfare based on gender and education level. The results showed the following : (i) The community's perception of Ammani Beach tourism development is positive or has a good impact on aspects of community welfare, (ii) There is no significant difference from the public's perception based on gender and level of education (p> 0.05), (iii) Based on indicators according to BPS, the level of welfare of the surrounding community (Desa Mattiro Tasi), is included in the prosperous category with an average income of over Rp. 3,000,000/month, education level up to high school level/equivalent, and complete housing facilities, (iv) There are significant differences for income and expenditure indicators based on gender and level of education (p <0.05). The policy implication of this research is the importance of emphasizing aspects of welfare impacts, both readable through objective measurements and reflected from public perceptions in the development of development programs, including tourism development. For this reason, complementary policies that accommodate this aspect are very relevant.

Keywords: *perception; tourist; Ammani Beach; well-being*

PENDAHULUAN

Pengembangan pariwisata pada suatu daerah dapat memberikan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya, baik berupa dampak positif maupun dampak negatif. Pengembangan pariwisata juga merupakan sebagian dari pembangunan ekonomi yang mempunyai tujuan untuk memperluas kesempatan berwirausaha, lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat. Seperti yang dikemukakan Rosni (2017), bahwa kesejahteraan

merupakan kondisi dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok yang dimaksud yaitu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya. Dengan demikian hidupnya dapat bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tentram, baik lahir maupun batin. Menurut Fudge *et al*. (2023), kesejahteraan adalah kondisi ketika kebutuhan manusia terpenuhi, individu dan komunitas dapat bertindak secara bermakna untuk mengejar tujuan mereka, dan ketika individu dan komunitas menikmati kualitas hidup yang memuaskan.

Salah satu wilayah pesisir di Kabupaten Pinrang dengan objek wisata bahari yang banyak diminati wisatawan terdapat di Desa Mattiro Tasi, Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Objek wisata tersebut dikenal dengan wisata Pantai Ammani yang berjarak 27 km dari pusat Kota Pinrang dengan menempuh jalur darat. Kawasan Pantai Ammani ini merupakan salah satu pantai yang menjadi ikon dari pantai-pantai di sepanjang pesisir Kabupaten Pinrang. Pantai Ammani memiliki daya tarik yang sangat memikat, daya tarik wisata tersebut secara alamiah masih murni dan berpotensi untuk dikembangkan. Daya tarik wisata ini dapat menjadi destinasi wisata prioritas bagi wisatawan saat berkunjung ke Kabupaten Pinrang sehingga dapat mendatangkan keuntungan ekonomi yang besar bagi masyarakat setempat dan pemerintah daerah (Bibin *et al.,* 2022).

Berkembangnya Pantai Ammani menjadi objek wisata pada tahun 2015 diharapkan dapat membuka lapangan kerja atau lapangan usaha bagi masyarakat sekitar sehingga tenaga kerja dari masyarakat yang berada di sekitar objek wisata dapat terserap melalui industri pariwisata ini. Objek wisata ini ramai dikunjungi wisatawan baik mancanegara maupun penduduk lokal untuk sekedar rekreasi atau menikmati pemandangan pantai serta menikmati kuliner berupa masakan khas ikan laut atau seafood, dan berenang. Saat ini, kawasan Pantai Ammani telah memiliki fasilitas pendukung wisata seperti MCK umum, rumah makan, tempat beribadah, gazebo, atraksi wisata seperti banana boat dan area parker yang luas (Bibin *et al.,* 2022). Gambaran jumlah kunjungan wisatawan ke kawasan wisata Pantai Ammani berdasarkan data lima tahun terakhir terhitung mulai tahun 2017 hingga tahun 2019 terus mengalami peningkatan dan pada tahun 2020 jumlah kunjungan mengalami penurunan karena masa pandemi Covid-19. Namun, memasuki era *new normal* pada tahun 2021, jumlah kunjungan wisatawan kembali meningkat. Data menunjukkan sebelum masa pandemi Covid-19 jumlah pengunjung meningkat dari tahun 2017 sebanyak 27.040 orang sampai pada tahun 2019 sebanyak 36.788 orang, pada tahun 2020 menurun menjadi 18.894 orang dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 29.158 orang. Berdasarkan hasil observasi awal, diperoleh data jumlah unit usaha masyarakat seperti pada Tabel 1.

Tabel 1 . Jumlah Unit Usaha Masyarakat Seiring dengan Perkembangan Wisata Pantai Ammani.

No	Jenis Usaha	Jumlah (Unit)
1	Rumah Makan (Kuliner)	42
2	Toko Souvenir	13
3	Toko Kelontong	20
4	Aneka Minuman	35
5	WC umum	11
6	Wahana Bermain di Pantai	
	- Banana Boat	7
	- Donut Boat	4
	- Perahu	5
	- Motor ATV	24
	Jumlah	**161**

Sumber: Data primer diolah, 2022.

Adanya kegiatan pengembangan kepariwisataan diharapkan dapat memberikan manfaaat bagi masyarakat sekitar baik dalam bentuk pendapatan maupun peningkatan tingkat kesejahteraan. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa dengan adanya pengembangan pariwisata dapat memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar objek wisata (Kaltenborn *et al*., 2021; La Manna *et al*., 2020; Schakner *et al*., 2019; Tovar *et al*., 2022; Yulianti, 2020). Dampak signifikan yang dirasakan oleh masyarakat adalah terbukanya peluang usaha.

Pengelolaan Pantai Ammani sebagai objek penelitian melibatkan masyarakat secara langsung. Tidak hanya dikenal dengan keindahan pemandangan pantainya, wisata kuliner juga menjadi ciri khas utama dari Pantai ini. Objek wisata ini dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber mata pencaharian, sehingga objek wisata Pantai Amani telah berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat setempat. Bentuk kontribusi wisata Pantai Ammani yaitu pemanfaatan lokasi wisata untuk membuka usaha seperti usaha kuliner, usaha wahana air, membuka toko kelontong dan toko pakaian maupun beragam aksesoris atau cenderamata. Menurut Palaba (2021), eksistensi yang dimiliki oleh destinasi kawasan wsiata Pantai Ammani yaitu wisata yang pengunjungnya bisa

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

berwisata kuliner karena difasilitasi oleh program PNPM yang menyediakan sarana prasarana seperti warung makan, kios yang menjual cinderamata dan lain-lain. Dengan adanya fasilitas tersebut, gunjung mendapatkan kesan yang menyenangkan karena bisa berkumpul bersama keluarga sambil rekreasi dan menikmati hasil laut. Untuk meningkatkan pengelolaan Pantai Ammani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya, dibutuhkan berbagai informasi terkait pantai Ammani, salah satunya adalah informasi mengenai persepsi masyarakat terhadap wisata Pantai Ammani. Namun demikian, informasi tersebut masih kurang. Berdasarkan kondisi tersebut, maka penelitian terkait persepsi masyarakat terhadap pengembangan pariwisata Pantai Ammani penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat mengenai dampak pengembangan pariwisata Pantai Ammani terhadap aspek kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan indikator Badan Pusat Statistik (BPS).

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Pantai Ammani, Desa Mattiro Tasi, Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang (Gambar 1). Desa Mattiro Tasi merupakan salah satu dari 9 Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan Mattirosompe yang terletak 9 Km ke arah utara. Desa ini mempunyai luas wilayah ±13,51 Km2 yang terbagi menjadi 3 Dusun yaitu Dusun Ammani Selatan, Dusun Ammani Utara, dan Dusun Pappareang. Jarak dari pusat Kota Pinrang ke objek wisata Pantai Ammani yaitu 27 km dengan waktu tempuh ±40 menit (BPS Kabupaten Pinrang, 2020).

Penelitian ini mengkaji persepsi masyarakat dari adanya pengembangan pada kawasan wisata Pantai Ammani terhadap aspek kesejahteraan masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan eksplorasi melalui pengisian kuesioner dan wawancara mendalam *(In-depth interview)*. Sumber data primer 35 orang, yang terdiri dari 5 orang pengelola Pantai dan 30 masyarakat pelaku usaha. Responden dipilih menggunakan teknik purposive sampling yaitu tipe penarikan sampel nonprobabilitas yang mana unit yang hendak diamati dipilih berdasarkan pertimbangan peneliti, dalam hal ini unit yang dianggap paling bermanfaat dan representatif. Teknik pengambilan sampel ini ditentukan sesuai dengan penelitian relevan yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Yulianti, 2020), mengenai dampak pengembangan pariwisata. Teknik pengambilan sampel ini dipilih agar mendapatkan sampel yang representative dengan masyarakat di sekitar lokasi penelitian. Indikator persepsi masyarakat mengikuti penelitian yang dilakukan oleh (Festivalia *et al.,* 2019). Selain itu, indikator kesejahteraan menurut (Badan Pusat Statistik, 2015) juga dikumpulkan dalam penelitian ini. Instrumen untuk mengukut indikator persepsi masyarakat dan indikator tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kriteria BPS ditunjukkan pada Tabel 2 dan 3. Berdasarkan diuji validitas dan diuji reliabilitas, instrument yang digunakan

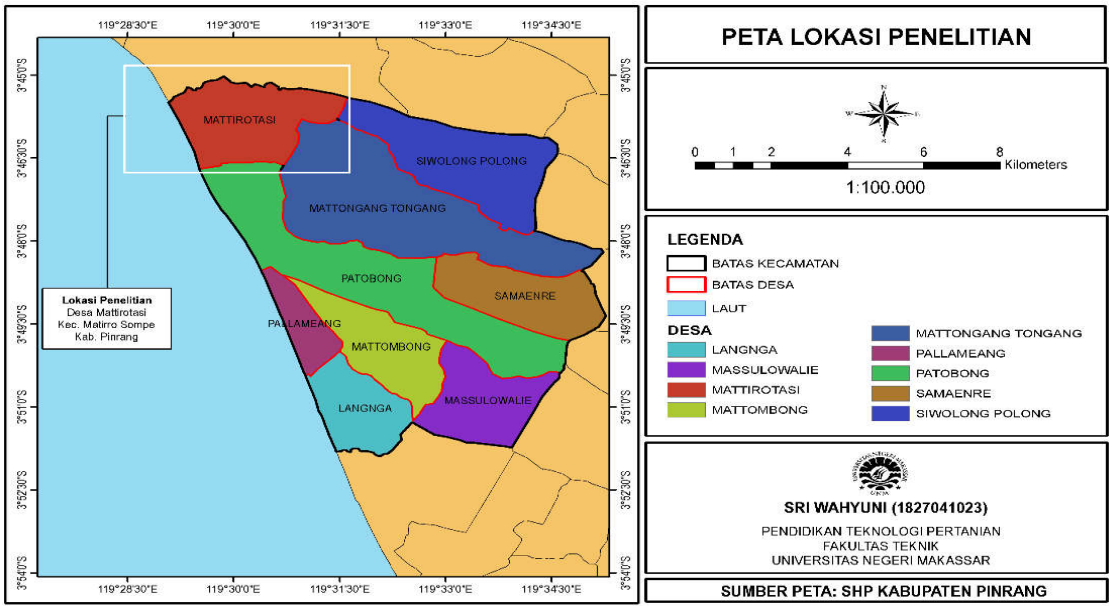

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian.
Sumber: SHP Kabupaten Pinrang, 2022.

dalam penelitian ini memiliki nilai r sebesar 0,334 dan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,598. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa instrument yang digunakan bersifat valid dan reliabel (Festivalia *et al.,* 2019; Hair *et al.,* 2019).

Tabel 2. Indikator Persepsi Masyarakat terhadap Aspek Kesejahteraan.

No	Persepsi Masyarakat
	Adanya Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Ammani Menyebabkan
1	Memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat Desa Mattiro Tasi
2	Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Mattiro Tasi
3	Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menjual hasil karyanya
4	Meningkatkan fasilitas transportasi
5	Meningkatnya harga barang dan jasa

Sumber: Festivalia *et al.,* 2019.

Tabel 3. Indikator Kesejahteraan Berdasarkan Kriteria BPS.

No	Indikator Kesejahteraan	Kriteria	Skor
1	Pendapatan	Tinggi> Rp.3.000.000	3
		SedangRp.2.000.000 – Rp.3.000.000	2
		Rendah < Rp.2.000.000	1
2	Pengeluaran	Tinggi > Rp.3.000.000	3
		Sedang Rp.2.000.000 – Rp.3.000.000	2
		Rendah< Rp.2.000.000	1
3	Pendidikan	Bagus	3
		Cukup	2
		Kurang	1
4	Keadaan Tempat Tinggal	Permanen	3
		Semi Permanen	2
		Tidak Permanen	1
5	Fasilitas tempat tinggal	Lengkap	3
		Cukup	2
		Kurang	1
6	Status Kepemilikan Rumah	Milik Sendiri	3
		Rumah Sewa	2
		Milik Orang Tua	1

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015.

Berdasarkan penskoran yang dilakukan pada setiap indikator seperti yang dikemukakan oleh Juliana (2018), maka dapat ditentukan skor untuk tingkat kesejahteraan menurut BPS yaitu:

1. Tingkat kesejahteraan tinggi: nilai skor 15 – 18
2. Tingkat kesejahteraan sedang: nilai skor 11 – 14
3. Tingkat kesejahteraan rendah: nilai skor 6 – 10

Analisis data dalam dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif dan statitik non paramerik. Data ditampilkan secara deskriptif dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, grafik, dan nilai rata-rata (Mitchell, 2022). Analisis statistik non parametrik menggunakan uji uji Kruskal-Wallis H. Uji ini digunakan untuk mengetahui perbedaan jawaban serta persepsi masyarakat terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai dampak yang ditimbulkan dari adanya pengembangan pariwisata Pantai Ammani berdasarkan kelompok jenis kelamin dan tingkat pendidikan responden. Uji Kruskal-Wallis H merupakan uji non-parametrik yang digunakan untuk menentukan adakah perbedaan signifikan secara statistik antar dua atau lebih kelompok variabel independen pada variabel dependen (Corder & Foreman, 2014). Uji ini digunakan karena data yang dikumpulkan merupakan data ordinal dan data tidak memenuhi asumsi normalitas data. Kriteria pengujian pada Uji Kruskal-Wallis H adalah jika p-value ≤ α, maka Ho ditolak dengan tingkat tingkat kepercayaan 95%. Dengan kata lain dikatakan terdapat perbedaan yang signifikan (Corder & Foreman, 2014).

KARAKTERISTIK RESPONDEN DAN LOKASI PENELITIAN

Kabupaten Pinrang merupakan salah satu dari 24 Kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang berjarak kurang lebih 185 km dari Kota Makassar. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.961,77 km^2 dengan jumlah penduduk sebanyak ± 351.118 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 171 jiwa/km^2. Kabupaten Pinrang terbagi dalam 12 Kecamatan dan 109 Desa/ Kelurahan terdiri dari 40 Kelurahan dan 69 Desa (BPS Kabupaten Pinrang, 2020). Salah satu wilayah pesisir di Kabupaten Pinrang dengan objek wisata bahari yang banyak diminati wisatawan terdapat di Desa Mattiro Tasi, Kecamatan Mattirosompe. Desa ini memiliki luas wilayah 13,51 Km^2 dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 yaitu 2618 jiwa (BPS Kabupaten Pinrang, 2020). Objek wisata tersebut dikenal dengan wisata Pantai Ammani.

Berdasarkan data yang dikumpulkan, jumlah responden yang digunakan sebanyak 35 orang yang terdiri dari jenis kelamin laki-laki sebanyak 15 orang dan perempuan sebanyak 20 orang, dengan rentang umur berkisar antara 18 sampai dengan 50 tahun. Berdasarkan jenis usahanya, responden terdiri dari 10 orang pelaku usaha kuliner dan masing-masing 5 orang dari jenis usaha wahana air, toko kelontong, cinderamata, penyewaan WC umum, dan penjual

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

minuman ringan. Responden berpendidikan SMA/Sederajat dengan persentase terbesar yaitu sebanyak 37,14%, kemudian tingkat SMP/Sederajat 28,57%, SD/Sederajat 25,71%, dan Strata 1 sebanyak 8,57%.

Pengembangan kawasan wisata yang dilakukan di sepanjang Pantai Ammani tidak terlepas dari upaya masyarakat sekitar yang mengelola kawasan secara swadaya. Keberhasilan pengelolaan kawasan wisata ini kemudian menarik perhatian pemerintah dan sejumlah pihak yang juga mulai ikut serta membantu mulai dengan perbaikan jalan, pembangunan instalasi listrik hingga perbaikan di sepanjang pantai. Destinasi wisata Pantai Ammani memiliki akses yang bagus untuk dikunjungi dengan jalan yang mudah dilewati kendaraan roda dua maupun roda empat dengan atraksi yang disuguhkan berupa wisata pantai. Fasilitas yang disediakan seperti warung makan, kios menjual berbagai macam makanan ringan dan cinderamata atau souvenir, gazebo sebanyak 120 unit, wifi area, 2 unit mushollah, 20 unit kamar mandi/kamar ganti, balai pertemuan, serta lahan parkir.

Kelebihan dari wisata ini yaitu selain menyuguhkan pemandangan pantai, wisatawan juga dapat menikmati sensasi berenang serta bermain wahana air seperti banana boat dan perahu pantai. Wisatawan juga dapat menikmati kuliner berupa masakan atau hidangan laut *(seafood)* yang menjadi ciri khas utama dari wisata ini. Keamanan Pantai Ammani sendiri terjamin karena ada penjaga pantai yang mengawasi dari menara sehingga pengunjung merasa aman untuk melakukan aktivitas. Selain itu terdapat larangan membawa senjata tajam yang membahayakan dan larangan membawa alkohol ke pantai. Sedangkan kekurangan dari wisata ini yaitu kebersihan lingkungan sekitarnya, kawasan pantai masih tercemar sampah perairan yang terbawa oleh arus dan gelombang sehingga mengurangi estetika pemandangan. Selain itu, beberapa fasilitas seperti mushollah dan jalan di dalam kawasan wisata juga masih memerlukan perbaikan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nur *et al*., 2022), bahwa fasilitas ibadah di kawasan wisata Pantai Ammani belum dirawat dengan baik sehingga masih memerlukan tindakan atau perawatan lebih baik agar wisatawan dapat merasa nyaman dan khusyuk saat beribadah.

Wisata Pantai Ammani ramai dikunjungi wisatawan pada akhir pekan maupun menjelang liburan. Kunjungan wisatawan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 17.894 orang, penurunan ini terjadi per maret 2020 yang merupakan dampak dari Pandemi Covid-19 sehingga menyebabkan dilakukannya pembatasan wilayah dan penutupan sementara pada kawasan wisata. Gambaran jumlah pengunjung berdasarkan data dari tahun 2017-2021 disajikan dalam bentuk grafik pada Gambar 2. Kondisi ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pradana & Mahendra, 2021) yang melaporkan bahwa terjadi penurunan wisatawan yang sangat signifikan akibat adanya pandemi Covid-19 yang juga menyebabkan seluruh pedagang di sekitar kawasan wisata kehilangan mata pencahariannya.

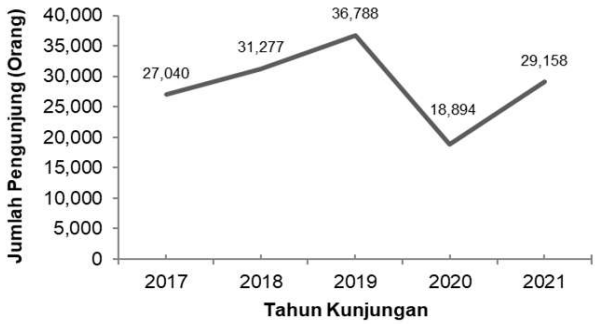

Gambar 2. Data Pengunjung Pantai Ammani dari tahun 2017-2021.

PERSEPSI MASYARAKAT MENGENAI PENGEMBANGAN PARIWISATA PANTAI AMMANI TERHADAP ASPEK KESEJAHTERAAN

Dari aspek kesejahteraan masyarakat, sebagian besar responden menyatakan "Sangat setuju" bahwa pengembangan pariwisata Pantai Ammani memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat Desa Mattiro Tasi dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Mattiro Tasi. Selain itu, sebagian besar responden menyatakan "Setuju" terhadap pernyataan bahwa pengembangan pariwisata Pantai Ammani memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menjual hasil karyanya (seperti souvenir), meningkatkan fasilitas transportasi, dan meningkatnya harga barang dan jasa. Frekuensi dan rata-rata persepsi masyarakat terhadap aspek kesejahteraan dapat dilihat pada Tabel 4.

Hasil uji Kruskal-wallis H aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat pada Tabel 5 dan Tabel 6. Berdasarkan jenis kelamin secara umum tidak terdapat perbedaan secara signifikan (nilai kritis > 0,05) antara persepsi responden laki-laki dan perempuan dengan nilai rata-rata tertinggi yang diperoleh laki-laki yaitu 4,93 dan perempuan yaitu 4,70 pada pernyataan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat Desa Mattiro Tasi.

Tabel 4. Frekuensi dan Rata-rata Analisis Persepsi Ditinjau dari Aspek Kesejahteraan Masyarakat.

Variabel Persepsi	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju	Rata-rata
Aspek Kesejahteraan Masyarakat: Adanya Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Ammani Menyebabkan						4,21
1. Memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat Desa Mattiro Tasi	0%	0%	0%	20%	80%	4,80
2. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Mattiro Tasi	0%	0%	11,43%	28,57%	60%	4,48
3. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menjual hasil karyanya	0%	0%	17,14%	42,86%	40%	4,23
4. Meningkatkan fasilitas transportasi	0%	14,29%	40%	42,86%	2,86%	3,34
5. Meningkatnya harga barang dan jasa	0%	0%	11,43%	57,14%	31,43%	4,20

Sumber: Data primer diolah, 2022.

Interpretasi nilai tersebut menunjukkan bahwa jawaban responden laki-laki menyatakan sangat setuju dan responden perempuan menyatakan setuju. Hal tersebut mengindikasikan bahwa responden laki-laki maupun perempuan merasakan dampak positif terbukanya peluang usaha dari pengembangan pariwisata yang dilakukan.

Berdasarkan tingkat pendidikan, pada aspek kesejahteraan masyarakat secara umum jawaban responden tidak berbeda secara signifikan (nilai kritis > 0,05) dengan nilai rata-rata tertinggi diperoleh responden tingkat pendidikan S1 dengan interpretasi jawaban menyatakan sangat setuju. Hal ini mengindikasikan bahwa responden dengan pendidikan tinggi memiliki pola pikir, tingkat pengetahuan, dan keterampilan dalam memanfaatkan peluang untuk menghasilkan pendapatan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dirinya beserta keluarga.

Pengembangan pariwisata di Pantai Ammani membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Banyak masyarakat yang kemudian dapat terlibat langsung maupun tidak langsung dalam aktivitas pariwisata terutama sebagai penyedia jasa pariwisata. Hal ini dapat menjadi mata pencaharian tersendiri bagi masyarakat yang berada di sekitar wisata pantai, sejalan dengan itu perkembangan pariwisata Pantai Ammani turut memajukan perekonomian masyarakat. Semakin banyak pengunjung yang datang, semakin menambah aktifitas masyarakat setempat dalam melakukan transaksi. Seperti yang dikemukakan oleh Muljadi (2010), bahwa dampak positif dari pengembangan pariwisata yaitu dapat memberikan pekerjaan dan penghasilan kepada masyarakat daerah setempat. Tertuang dalam Permendagri No. 33 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa ekowisata adalah kegiatan wisata alam di daerah yang bertanggung jawab

Tabel 5. Hasil analisis Kruskal-Wallis H pada Persepsi Masyarakat terhadap Aspek Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Jenis Kelamin.

Variabel Persepsi	Jenis Kelamin	Rata-rata	Nilai Kritis	Keterangan
1. Memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat Desa Mattiro Tasi	L	4,93	0,092	Tidak berbeda secara signifikan
	P	4,70		
2. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Mattiro Tasi	L	4,67	0,169	Tidak berbeda secara signifikan
	P	4,35		
3. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menjual hasil karyanya	L	4,40	0,207	Tidak berbeda secara signifikan
	P	4,10		
4. Meningkatkan fasilitas transportasi	L	3,40	0,639	Tidak berbeda secara signifikan
	P	3,30		
5. Meningkatnya harga barang dan jasa	L	4,27	0,624	Tidak berbeda secara signifikan
	P	4,15		

Sumber: Data primer diolah, 2022.

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

Tabel 6. Hasil analisis Kruskal-Wallis H Pada Persepsi Masyarakat terhadap Aspek Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

Variabel Persepsi	Tingkat Pendidikan	Nilai Rata-rata	Signifikasi Nilai Kritis	Keterangan
1. Memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat Desa Mattiro Tasi	SD	4,89	0,606	Tidak berbeda secara signifikan
	SMP	4,70		
	SMA	4,77		
	S1	5,00		
2. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Mattiro Tasi	SD	4,67	0,090	Tidak berbeda secara signifikan
	SMP	4,70		
	SMA	4,08		
	S1	5,00		
3. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menjual hasil karyanya	SD	4,11	0,235	Tidak berbeda secara signifikan
	SMP	4,10		
	SMA	4,23		
	S1	5,00		
4. Meningkatkan fasilitas transportasi	SD	3,22	0,166	Tidak berbeda secara signifikan
	SMP	3,60		
	SMA	3,08		
	S1	4,00		
5. Meningkatnya harga barang dan jasa	SD	4,44	0,170	Tidak berbeda secara signifikan/ Not significantly different
	SMP	3,90		
	SMA	4,15		
	S1	4,67		

Sumber: Data primer diolah, 2022.

terhadap peningkatan pendapatan masyarakat lokal dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan wisata, sehingga memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat.

Menurut salah satu responden yang mengkordinir para pelaku usaha di sekitar objek wisata, pendapatan yang diterima oleh para pengusaha utamanya pengusaha kuliner selain sudah mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, juga sudah mampu membangun rumah dan memperbaiki fasilitas lainnya. Mereka juga sudah mampu membangun toko atau tempat usaha menjadi lebih bagus lagi. Selain itu, dikatakan juga bahwa hampir tidak ada pelaku usaha yang tidak menyekolahkan anaknya ke jenjang SMA/ Sederajat. Menurut salah satu pelaku usaha kuliner di Pantai Ammani, omset para pengusaha dapat meningkat tajam terutama pada hari-hali libur nasional seperti libur hari raya idul fitri dan idul adha. Pada waktu-waktu tersebut, pelaku usaha kuliner bahkan bisa mendapatkan nilai penjualan mencapai Rp10.000.000 dalam satu minggu dengan standar harga jual Rp400.000/Basket.

Berdasarkan hasil analisis, nilai rata-rata persepsi yang paling rendah terdapat pada pernyataan meningkatkan fasilitas transportasi dengan nilai 3,34. Hal ini menunjukkan bahwa responden menyatakan netral/ragu-ragu. Dengan adanya responden yang menyatakan ragu-ragu, maka ini mengindikasikan bahwa terdapat responden yang tidak yakin terhadap peningkatan fasilitas transportasi di sekitar objek wisata. Hal ini disebabkan karena masyarakat maupun pengunjung cenderung menggunakan kendaraan pribadi dari pada kendaraan umum. Satu-satunya kendaraan umum yang dapat ditemukan di sekitar objek wisata yaitu ojek. Sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Festivalia *et al*., 2019), bahwa pengembangan destinasi wisata disambut baik oleh masyarakat karena pengembangannya mendorong tingkat ekonomi masyarakat lokal seperti menciptakan lapangan kerja, memiliki pendapatan yang lebih baik, dan pertumbuhan kegiatan kewirausahaan serta ketersediaan transportasi yang lebih baik dengan kata lain, kegiatan pengembangan pariwisata dapat menghasilkan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat lokal. Namun, sebagai konsekuensi dari pengembangan destinasi wisata menyebabkan harga barang dan jasa menjadi cenderung lebih mahal.

ANALISIS TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERDASARKAN INDIKATOR MENURUT BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)

Berdasarkan data pada Tabel 7, diketahui bahwa pendapatan responden banyak pada kategori tinggi (skor 3) atau memiliki pendapatan tiap bulan > Rp.3.000.000. Tingginya pendapatan pelaku usaha dipengaruhi oleh pembelanjaan dan biaya yang dikeluarkan pengunjung serta pengembangan pariwisata yang dilakukan dengan baik. Menurut salah satu pemilik toko kelontong, omset yang dihasilkan dalam satu hari jika kondisi pantai ramai oleh pengunjung bisa mencapai Rp800.000/hari. Kondisi ini sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh (Yulianti, 2020), bahwa jumlah pendapatan yang dihasilkan dari sebuah usaha yang dimiliki lebih baik dibandingkan dengan keadaan atau pekerjaan sebelumnya. Pendapatan yang tinggi ini dapat meningkatkan kesejahteraan pemilik usaha beserta keluarganya.

Tabel 7. Rekapitulasi Kategori Responden Berdasarkan Indikator Badan Pusat Statistik.

Indikator Kesejahteraan	Rendah	Sedang	Tinggi
Pendapatan	11	3	21
Pengeluaran	13	3	19
Pendidikan	9	10	16
Keadaan tempat tinggal	2	32	1
Fasilitas tempat tinggal	0	1	34
Status kepemilikan rumah	0	0	35

Sumber: Data primer diolah, 2022.

Konsumsi atau pengeluaran rumah tangga responden banyak tergolong tinggi (skor 3) atau memiliki pengeluaran tiap bulan >Rp.3.000.000 (Tabel 7). Semakin tinggi pendapatan yang diterima oleh suatu rumah tangga maka semakin besar juga pengeluaran yang digunakan. Semakin tingginya pendapatan maka seseorang akan menjadi lebih konsumtif dalam mengkonsumsi barang yang berkualitas dan proporsi pengeluaran pangan maupun non pangan juga akan semakin meningkat (Puspitasari & Primalasari, 2021). Pola pengeluaran rumah tangga yang dikeluarkan dipengaruhi oleh tingkat pendapatan yang diperoleh (Mardiana *et al*., 2014).

Tingkat pendidikan responden pada umumnya tergolong tinggi yaitu pada tingkat SMA/ Sederajat hingga Strata 1 (S1) dengan nilai skor 3 (Tabel 7). Sebagian besar responden memiliki jenjang pendidikan yang tinggi sehingga dapat dipahami bahwa dengan pendidikan masyarakat memiliki pola pikir, tingkat pengetahuan, dan keterampilan dalam memanfaatkan peluang untuk menghasilkan pendapatan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dirinya beserta keluarga. Seperti yang dikemukakan oleh Juliana (2018), semakin tinggi pendidikan yang ditamatkan maka kualitas seseorang dalam penguasaan ilmu pengetahuan maupun keterampilan tergolong baik sehingga tingkat kesejahteraan tergolong tinggi. Sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh (Yulianti, 2020), bahwa pendidikan menentukan kemampuan seseorang dalam memanfaatkan peluang dengan berbagai jenis usaha yang dimiliki oleh para informan untuk bisa mencukupi kebutuhan keluarganya.

Keadaan tempat tinggal responden banyak tergolong semi permanen dengan nilai skor 2 (Tabel 7). Pada umumnya, atap rumah mereka terbuat dari seng, dinding terbuat dari papan, dengan rata-rata luas rumah 8-15 m^2. Menurut Juliana (2018), masyarakat yang sejahtera tentu saja akan memiliki tempat tinggal yang tergolong luas dan mewah, karena hal tersebut akan menjadi tolak ukur sampai sejauh mana masyarakat tersebut akan dipandang sejahtera oleh masyarakat lainnya.

Fasilitas tempat tinggal tergolong lengkap dengan nilai skor 3. Rata-rata responden memiliki jenis penerangan listrik, bahan bakar gas, jenis pendingin ruangan berupa kipas angin, jenis kendaraan unruk bepergian yaitu sepeda motor, jenis air konsumsi berupa air isi ulang, fasilitas air bersih yaitu sumur bor, dan memiliki fasilitas MCK sendiri. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh (Puspitasari & Primalasari, 2021), bahwa rumah tangga yang sudah menggunakan bahan bakar berupa gas LPG, sumber penerangan menggunakan listrik, telah memiliki aset motor, dan memiliki rumah sendiri sudah masuk ke dalam kriteria rumah tangga sejahtera.

Status kepemilikan rumah seluruh responden adalah milik sendiri dengan nilai skor 3. Rumah tangga yang sudah memiliki rumah sendiri termasuk ke dalam kriteria rumah tangga sejahtera (Puspitasari & Primalasari, 2021). Menurut (Juliana, 2018), tidak salah jika dikatakan keluarga yang telah memiliki rumah sendiri tergolong sejahtera meskipun rumah tersebut belum begitu bagus, sebab sebagus apapun rumah yang ditinggali jika itu bukan milik sendiri baik itu milik orang tua ataupun saudara tentu saja akan memberikan dampak kurangnya rasa kebahagiaan, sehingga belum dapat dikatakan sebagai keluarga sejahtera.

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

Berdasarkan hasil, diketahui bahwa sebanyak 19 responden (54,29%) tergolong ke dalam keluarga dengan tingkat kesejahteraan tinggi dan 16 responden (45,71%) tergolong ke dalam keluarga dengan tingkat kesejahteraan sedang Tabel 8. Berdasarkan ketiga tingkatan indikator yang digunakan tersebut pada dasarnya menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat pelaku usaha di sekitar kawasan wisata Pantai Ammani tergolong dalam keluarga yang taraf hidupnya sejahtera. Faktor yang menyebabkan tingginya tingkat kesejahteraan masyarakat pelaku usaha di kawasan wisata Pantai Ammani adalah rata-rata pendapatan yang tergolong tinggi atau dengan skor 3, tingkat pendidikan yang juga tinggi sehingga pola pikir mereka mengenai peluang usaha menjadi lebih terbuka atau lebih maju, serta fasilitas tempat tinggal yang lengkap.

Tabel 8. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Pelaku Usaha di Sekitar Objek Wisata Pantai Ammani Berdasarkan Indikator Badan Pusat Statistik.

Tingkat Kesejahteraan	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
Tinggi	19	54,29
Sedang	16	45,71
Rendah	0	0
Jumlah	**35**	**100**

Sumber: Data primer diolah, 2022.

Hasil analisis Kruskal-Wallis H berdasarkan jenis kelamin, dapat diketahui bahwa secara umum jawaban responden tidak berbeda secara signifikan (nilai kritis > 0,05) pada indikator pendidikan, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal dan status kepemilikan rumah (Tabel 9). Sedangkan, untuk indikator pendapatan dan pengeluaran dinyatakan berbeda secara signifikan (nilai kritis < 0,05). Hal ini mengindikasikan bahwa antara responden berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan memiliki pendidikan yang cukup baik, serta memiliki kondisi dan fasilitas tempat tinggal yang serupa dimana mayoritas tempat tinggal masyarakat merupakan semi permanen berbentuk rumah panggung dengan bahan dasar kayu. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah mampu memenuhi kebutuhan pendidikan dan tempat tinggal mereka sehingga kondisi mereka sudah dapat dikategorikan sejahtera.

Hasil analisis Kruskal-Wallis H berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa terdapat 3 indikator dengan jawaban responden tidak berbeda secara signifikan (nilai kritis > 0,05) yaitu pada indikator keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal dan status kepemilikan rumah (Tabel 10). Sedangkan, untuk indikator pendapatan dan pengeluaran dinyatakan berbeda secara signifikan signifikan (nilai kritis < 0,05). Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan sangat mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran, sehingga dapat dipahami bahwa responden dengan pendidikan tinggi memiliki penguasaan ilmu pengetahuan maupun keterampilan memanfaatkan peluang tergolong baik sehingga tingkat kesejahteraan tergolong tinggi.

PERSEPSI DAN TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SEBAGAI DAMPAK PENGEMBANGAN PARIWISATA PANTAI AMMANI

Pengembangan pariwisata menjadi pilihan penting bagi suatu daerah karena multiefek yang ditimbulkan oleh kegiatan pariwisata. Peningkatan kesejahteraan merupakan dampak utama yang dicirikan oleh terbukanya lapangan kerja, stimulasi

Tabel 9. Hasil analisis Kruskal-Wallis H Pada Indikator Aspek Kesejahteraan Masyarakat menurut Badan Pusat Statistik Berdasarkan Jenis Kelamin.

Indikator	Jenis Kelamin	Nilai Rata-rata	Signifikasi Nilai Kritis	Keterangan
1. Pendapatan	L	3,00	0,000	Berbeda secara signifikan
	P	1,75		
2. Pengeluaran	L	2,87	0,000	Berbeda secara signifikan
	P	1,65		
3. Pendidikan	L	2,00	0,259	Tidak berbeda secara signifikan
	P	2,35		
4. Keadaan tempat tinggal	L	1,93	0,514	Tidak berbeda secara signifikan
	P	2,00		
5. Fasilitas tempat tinggal	L	3,00	0,386	Tidak berbeda secara signifikan
	P	2,95		
6. Status kepemilikan rumah	L	3,00	1,000	Tidak berbeda secara signifikan
	P	3,00		

Sumber: Data primer diolah, 2022.

Tabel 10. Hasil analisis Kruskal-Wallis H Pada Indikator Aspek Kesejahteraan Masyarakat Menurut Badan Pusat Statistik Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

Variabel Persepsi	Tingkat Pendidikan	Nilai Rata-rata	Signifikasi Nilai Kritis	Keterangan
1. Pendapatan	SD	2,78	0,008	Berbeda secara signifikan
	SMP	2,10		
	SMA	1,92		
	S1	3,00		
2. Pengeluaran	SD	2,44	0,030	Berbeda secara signifikan
	SMP	2,10		
	SMA	1,85		
	S1	3,00		
3. Keadaan tempat tinggal	SD	1,89	0,398	Tidak berbeda secara signifikan
	SMP	1,90		
	SMA	2,08		
	S1	2,00		
4. Fasilitas tempat tinggal	SD	2,89	0,409	Tidak berbeda secara signifikan
	SMP	3,00		
	SMA	3,00		
	S1	3,00		
5. Status kepemilikan rumah	SD	3,00	1,000	Tidak berbeda secara signifikan
	SMP	3,00		
	SMA	3,00		
	S1	3,00		

Sumber: Data primer diolah, 2022.

investasi sehingga produk wisata berkembang baik barang maupun jasa sehingga pariwisata dapat terus berkembang. Kesejahteraan adalah pencerminan dari kualitas hidup manusia *(quality of human life)*, yaitu suatu keadaan ketika terpenuhinya kebutuhan dasar serta terealisasikannya nilai-nilai hidup (Nartin & Musin, 2022).

Dampak positif dari pengembangan pariwisata yaitu dapat memberikan pekerjaan dan penghasilan kepada masyarakat daerah setempat. Pengelola kawasan wisata, mengatakan bahwa pengembangan pariwisata di Pantai Ammani membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Sejalan dengan itu, perkembangan pariwisata Pantai Ammani turut memajukan perekonomian masyarakat. Semakin banyak pengunjung yang datang, semakin menambah aktifitas masyarakat setempat dalam melakukan transaksi.

Beragam jenis usaha yang dimiliki masyarakat seperti toko souvenir, toko kelontong, aneka minuman, penyewaan WC umum, wahana bermain air di pantai serta rumah makan atau usaha kuliner. Pelaku usaha, berpendapat bahwa masyarakat di sekitar objek wisata sangat merasakan dampak dari adanya pengembangan yang dilakukan yaitu karena mereka dapat menjual berbagai macam barang dan jasa. Selain pemilik usaha, peluang kerja menjadi karyawan juga terbuka luas bagi masyarakat setempat yang berdampak pada tingkat pendapatan walaupun sifatnya tidak tetap, karena jumlah transaksi dipengaruhi oleh jumlah pengunjung dan daya beli pengunjung.

Kegiatan pengembangan pariwisata dapat menghasilkan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat lokal. Namun, sebagai konsekuensi dari pengembangan destinasi wisata menyebabkan harga barang dan jasa menjadi cenderung lebih mahal (Festivalia *et al*, 2019). Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap adanya pengembangan pariwisata Pantai Ammani adalah positif atau berdampak baik terhadap aspek kesejahteraan masyarakat. Tidak terdapat perbedaan signifikan dari persepsi masyarakat ini berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Sementara itu, berdasarkan indikator menurut Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kesejahteraan di Desa Mattiro Tasi, Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang termasuk ke dalam kategori tingkat kesejahteraan tinggi. Terdapat perbedaan yang signifikan untuk indikator pendapatan dan pengeluaran berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan ($p<0,05$).

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

Penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat tentang dampak pariwisata terhadap kesejahteraan mereka dapat bervariasi. Oleh karena itu, kebijakan perlu mendorong pengembangan program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan oleh stakeholder menyusun kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui potensi pengembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Pinrang. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk melanjutkan penelitian ini menggunakan metode studi komparasi dengan membandingkan fenomena yang terjadi di kawasan wisata Pantai Ammani dengan kawasan wisata lainnya.

IMPLIKASI KEBIJAKAN

Implikasi umum dari penelitian ini adalah relevansi iklusi aspek kesejahteraan masyakarat, baik dalam ukuran objektif maupun sebagaimana terpersepsikan, dalam pengembangan kebijakan, termasuk kebijakan / program kepariwisataan. Pelajaran dari penelitian yang mengambil kasus Pantai Ammani ini menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan komplemen dapat dikembangkan dengan mengacu pada persepsi masyarakat terkait kesejahteraan mereka, dihubungkan dengan pengembangan pariwisata di wilayahnya.

Pelajaran dari kasus Pantai Amani ini memberi contoh bagaimana persepsi masyarakat mengarah pada relevansi kebijakan komplemen dalam bentuk penguatan kerjasama antara pengelola pengelola wisata dengan masyarakat. Lebih jauh, persepsi yang tergali memberi petunjuk bahwa penguatan kerjasama dimaksud diarahkan pada sejumlah aspek operasional. Aspek-aspek tersebut misalnya adalah penanganan kebersihan yang dikaitkan dengan upaya untuk menjamin kelestarian lingkungan, penataan lingkungan yang dikaitkan dengan peningkatan daya tarik, dan perbaikan sarana dan prasarana yang dikaitkan dengan peningkatan kualitas layanan wisata.

Untuk kasus Pantai Ammani secara khusus, implikasi dari penelitian ini adalah perlunya kebijakan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat lokal dan pelibatan mereka secara aktif dalam bisnis pariwisata yang dikembangkan. Untuk itu, pemerintah setempat perlu memperbanyak program pelatihan, pendidikan, dan pengembangan keterampilan sehingga masyarakat memiliki kapasitas yang memadai untuk memainkan peran-peran bisnis terkait secara signifikan. Bisnis-bisnis dimaksud termasuk di antaranya adalah pemandu wisata, pengrajin kerajinan tangan, atau penyedia jasa lainnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Mattiro Tasi atas perizinan dan akses data yang diberikan. Terima kasih kami sampaikan kepada pihak pengelola kawasan wisata Pantai Ammani dan masyarakat pelaku usaha dan pengunjung Pantai Ammani yang telah bersedia diwawancarai sehingga penulis dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Tim Dosen Pendidikan Teknologi Pertanian dan rekan-rekan yang telah mendampingi proses penelitian.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Kontribusi masing-masing penulis terhadap karya tulis dengan judul Analisis Dampak Pengembangan Pariwisata Pantai Ammani Terhadap Aspek Lingkungan Dan Kesejahteraan Masyarakat ini adalah Sri Wahyuni sebagai kontributor utama dan Subari Yanto serta Andi Alamsyah Rivai sebagai kontributor anggota.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang. (2020). Kabupaten pinrang dalam angka 2020. Badan Pusat Statistik, Kabupaten Pinrang.

Badan Pusat Statistik. (2015). Indikator kesejahteraan rakyat. Badan Pusat Statistik, Kabupaten Pinrang.

Bibin, M., Kaswiran, & Wahyudi, A. (2022). Persepsi wisatawan terhadap daya tarik wisata Pantai Ammani Di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Sains Dan Teknologi Perikanan, 2*(2), 90–98.

Corder, G. W., & Foreman, D. I. (2014). *Nonparametric statistics: A Step-by-step approach (2nd ed.)*. John Wiley & Sons.

Festivalia, F., Enggriani, M., & Pramanik, P. D. (2019). The impact of tourism on village society. *Tourism Research Journal, 3*(2), 178–1887.

Fudge, M., Ogier, E., & Alexander, K. A. (2023). Marine and coastal places: Wellbeing in a blue economy. *Environmental Science & Policy, 144,* 64–73. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.envsci.2023.03.002.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate data analysis (8th ed.)*. Cengage.

Juliana. (2018). Analisis tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan (Studi kasus: Kelurahan Bagan Deli Seberang, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan) [Skripsi]. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Kaltenborn, B. P., Kaltenborn, J. F., Baczynska, B. B., Kornfeldt, J., & Hovelsrud, G. K. (2021). Media

coverage of environmental and social change in northern norway's coastal regions: Main themes in national and international news. *Arctic, 74*(2). https://doi.org/10.14430/arctic72474.

La Manna, G., Melis, G., Rako-Gospić, N., Basta, J., Mackelworth, P., Holcer, D., Atzeni, M., & Leeb, K. (2020). Sustainable dolphin watching tours as a tool to increase public awareness of marine conservation–a comparative analysis between two Mediterranean destinations and implications for management. *Journal of Ecotourism, 19*(4). https://doi.org/10.1080/14724049.2020.1742132.

Mardiana, R., Abidin, Z., & Soelaiman, A. (2014). Pendapatan dan kesejahteraan petani karetrakyat di Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan. *Jurnal Ilmu Ilmu Agribisnis, 2*(3), 239–245.

Mitchell, P. J. (2022). *Experimental design and statistical analysis for pharmacology and the biomedical sciences*. Wiley.

Muljadi. (2010). *Kepariwisataan dan perjalanan*. Raja Grafindo.

Nartin, N., & Musin, Y. (2022). Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dimasa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Kantor Camat Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan). *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, *1*(3), 163-172. https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i3.23.

Nur, M., Hasan, I., & Katman, M. N. (2022). Analisis pengembangan pariwisata halal Pantai Menralo dan Pantai Ammani Kabupaten Pinrang. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 11*(2), 381–388. Palaba, S. (2021). Manajemen pengembangan destinasi taman wisata ammani Kabupaten Pinrang di era pandemi Covid-19. *Sosains, 1*(10), 1271–1278.

Pradana, M. I. W., & Mahendra, G. K. (2021). Analisis dampak Covid-19 terhadap sektor pariwisata di objek wisata Goa Pindul Kabupaten Gunungkidul. *Journal of Social Politics and Governance, 3*(2), 73–85.

Puspitasari, M. S., & Primalasari, I. (2021). Analisis pengeluaran dan tingkat kesejahteraan rumahtangga petani karet di Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara. *Journal of Food System and Agribusiness, 5*(1), 71–83. https://doi.org/10.25181/jofsa.v5i1.1960.

Rosni. (2017). Analisis tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara. *Jurnal Geografi, 9*(1), 53–66. http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/geo.

Schakner, Z., Purdy, C., & Blumstein, D. T. (2019). Contrasting attitudes and perceptions of California sea lions by recreational anglers and the media. *Marine Policy, 109*. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2019.103710.

Tovar, B., Espino, R., & López-del-Pino, F. (2022). Residents' perceptions and attitudes towards the cruise tourism impact in gran Canaria. *Research in Transportation Business and Management, 45*. https://doi.org/10.1016/j.rtbm.2020.100586.

Yulianti, D. (2020). Dampak pengembangan pariwisata terhadap kesejahteraan masyarakat (Studi kasus pada masyarakat pelaku usaha di sekitar objek wisata Pantai Tanjung Setia, Pekon Tanjung Setia Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat) [Skripsi]. Institut Agama Islam Negeri Metro.

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

Silvofishery Ecopreneurship - Strategi Untuk Pengembangan Ekosistem Mangrove Sebagai Kawasan Budi Daya Berkelanjutan

Silvofishery Ecopreneurship – A Strategy for Developing Mangrove Ecosystem as a Sustainable Aquaculture Area

***Amal Arfan, Muhammad Azrul Muin, Hasriyanti, Muhammad Yusuf dan Irwansyah Sukri**

Jurusan Geografi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Makassar
Jl. Daeng Tata Raya, Parang Tambung, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia

ARTICLE INFO

Diterima tanggal : 13 Februari 2023
Perbaikan naskah: 24 Mei 2023
Disetujui terbit : 20 Juni 2023

*Korespodensi penulis:
Email: amalarfan@unm.ac.id

DOI: http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v13i1.12339

ABSTRAK

Areal hutan mangrove berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di wilayah pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengembangan kawasan budidaya pada ekosistem mangrove tanpa merusak fungsi ekologisnya. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan metodologis deksriptifkualitatif, dengan data-data primer yang diperoleh dari wawancara mendalam dengan responden yang dipilih dengan teknik *purposive sampling* berdasarkan profesi responden. Data-data dari responden tersebut diverifikasi dengan observasi dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan teknik SWOT *(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)*. Lokasi penelitian adalah ekosistem hutan mangrove di Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar, di mana masyarakat melakukan kegiatan penangkapan dan budi daya ikan di kawasan sekitarnya. Hasil SWOT menunjukkan bahwa lokus strategi terbaik berada pada kuadran I (0,55; 0,68) (strategi agresif), yaitu memaksimalkan kekuatan serta peluang untuk meraih keuntungan berkelanjutan. Strategi tersebut mencakup tiga poin utama: (1) penerapan konsep *silvofishery-ecopreneurship*, yang memadukan budidaya dengan pelestarian ekosistem mangrove, dan (2) peningkatan peran lembaga masyarakat dalam pengelolaan kawasan mangrove. (3) pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan kemandirian dengan inovasi yang berbasis kegiatan budidaya berkelanjutan. Implikasi dari hasil ini adalah bahwa pendekatan *ecofishery-ecopreneurship* perlu dipertimbangkan dalam pengembangan kebijakan pengelolaan hutan mangrove di berbagai lokasi.

Kata Kunci: strategi agresif; pengembangan; pengelolaan; mangrove; budi daya berkelanjutan

ABSTRACT

Mangrove forests are potential to be developed as sustainable cultivation areas to increase the income of coastal communities. This study aims to analyze the strategy for developing cultivation areas in mangrove ecosystems without destroying their ecological functions. A qualitative descriptive method was conducted in this study based on primary data obtained from in-depth interviews. Sampling using the purposive sampling technique based on the profession of the respondent. The data of respondents are verified by observation and documentation. The data were analyzed using SWOT analysis (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). The research location is a mangrove forest ecosystem in Sanrobone District, Takalar Regency, where the community carries out fishing and fish farming activities in the surrounding area. The SWOT analysis results show that the best strategic locus is in quadrant I (0.55; 0.68) (aggressive strategy), namely maximizing strengths and opportunities to gain sustainable profits. The strategy includes three main points: (1) application of the silvofishery-ecopreneurship concept, which combines cultivation with the preservation of mangrove ecosystems, and (2) increasing the role of community institutions in managing mangrove areas. (3) community empowerment to create independence with innovation based on sustainable cultivation activities. The implication of these results is that the ecofishery-ecopreneurship approach needs to be considered in the development of mangrove forest management policies in various locations.

Keywords: *aggressive strategy; development; management; mangrove; sustainable cultivation*

PENDAHULUAN

Ekosistem mangrove adalah ekosistem yang potensial untuk dikembangkan. Pengembangan ekosistem mangrove dapat dilihat dari berbagai perspektif diantaranya aspek ekonomi (termasuk perikanan, ekowisata, sumber mata pencaharian masyarakat lokal), aspek ekologi diantaranya melindungi dari dampak perubahan lingkungan (Pattimahu *et al*., 2017; Sari *et al*., 2018; Winata *et al*., 2017), dan aspek sosial terkait pola kehidupan dan kearifan lokal dalam pengelolaan kawasan mangrove. Ekosistem mangrove memiliki sifat yang kompleks sehingga dapat dimanfaatkan dan dikembangkan oleh masyarakat. Kawasan mangrove banyak ditemukan di wilayah provinsi Sulawesi Selatan. Menurut Amin *et al*. (2016) di Sulawesi Selatan terjadi penurunan kondisi ekosistem mangrove yang sangat memprihatinkan. Tingginya aktivitas alih fungsi lahan mangrove dapat mempengaruhi terjadinya penurunan kualitas bahkan dapat

mengakibatkan kepunahan mangrove yang dilakukan oleh masyarakat (Ahmad *et al*., 2016).

Kegiatan yang tinggi di area mangrove akan mengurangi kualitas ekosistem khususnya kegiatan budi daya yang dilakukan dengan cara membuka lahan untuk budi daya tambak. Permasalahan yang mengancam keberadaan ekosistem mangrove adalah pengambil alihan hutan untuk dijadikan lahan tambak dan pertanian, bahkan yang paling mendasar adalah pembukaan lahan pemukiman penduduk (Mutmainnah, 2015). Pemanfaatan dan aktivitas yang melebihi kemampuan ekosistem dapat mengancam keberadaan ekosistem mangrove. Dalam melindungi, memelihara, dan memanfaatkan ekosistem mangrove untuk memastikan keberadaan, kegunaan, dan kelestariannya, diperlukan peningkatan fungsi dan produktivitas air laut (Diposaptono, 2017). Apabila kegiatan ini terus menerus terjadi maka keberlangsungan kawasan ekosistem mangrove akan punah, padahal jika kawasan hutan mangrove dikelola dengan menerapkan strategi-strategi pengelolaan yang berkelanjutan maka fungsi ekologis dan ekonomis ekosistem mangrove juga akan berkelanjutan.

Tujuan studi ini adalah untuk menganalisis strategi pengembangan ekosistem mangrove sebagai kawasan budi daya berkelanjutan di Kecamatan Sanrabone Kabupaten Takalar. Untuk mendukung keberlanjutan ekosistem mangrove maka dilakukan kajian strategi pengembangan ekosistem mangrove dengan menerapkan analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan salah satu alat analisis yang efektif dan efisien dalam merumuskan strategi pengembangan wilayah (Muta'ali, 2015; Sukri *et al.,* 2022). Analisis yang mendalam terkait pengembangan kawasan ekosistem mangrove penting untuk mengembalikan fungsi ekosistem mangrove kearah yang lebih berkelanjutan.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian studi kasus yang mengaplikasikan pendekatan deskriptif kualitatif. Kajian ini merupakan langkah dalam menganalisis dan menyajikan situasi objektif berdasarkan fakta-fakta yang ada. Penelitian dilakukan di lokasi kasus di kawasan mangrove Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar. Wilayah ini dipilih karena Sanrobone merupakan sentra produksi ikan bandeng dan kepiting bakau di Kabupaten Takalar, yang dengan potensi tersebut justru membuatnya terancam karena hutan mangrovenya dikonversi menjadi lahan tambak yang akan mengurangi daya dukung lingkungan di daerah tersebut. Penelitian ini didukung dengan data yang dikumpulkan menggunakan teknik pengambilan sampel *purpose sampling* (PS). Teknik PS adalah teknik mengambil sampel dari data jumlah besar berdasarkan beberapa pertimbangan (Sugiyono, 2010). Sampel dalam penelitian dipilih berdasarkan profesinya yaitu pemerintah setempat (2%), tokoh masyarakat (6%), lembaga swadaya masyarakat (2%), kelompok nelayan (2%), kelompok mangrove (2%), wanita (10%), dan masyarakat umum di sekitar kawasan mangrove (76%).

Teknik pengumpulan data yang dilakukan diantaranya, pertama, observasi yaitu pengamatan awal terhadap seluruh kawasan mangrove dan masyarakatnya. Kedua, wawancara dengan cara mengajukan pertanyaan (kuesioner) langsung kepada responden mengenai hal yang diperlukan dalam penelitian. Ketiga, dokumentasi yaitu menghimpun informasi data dari berbagai informasi dokumen yang diperlukan. Teknik analisis data dalam

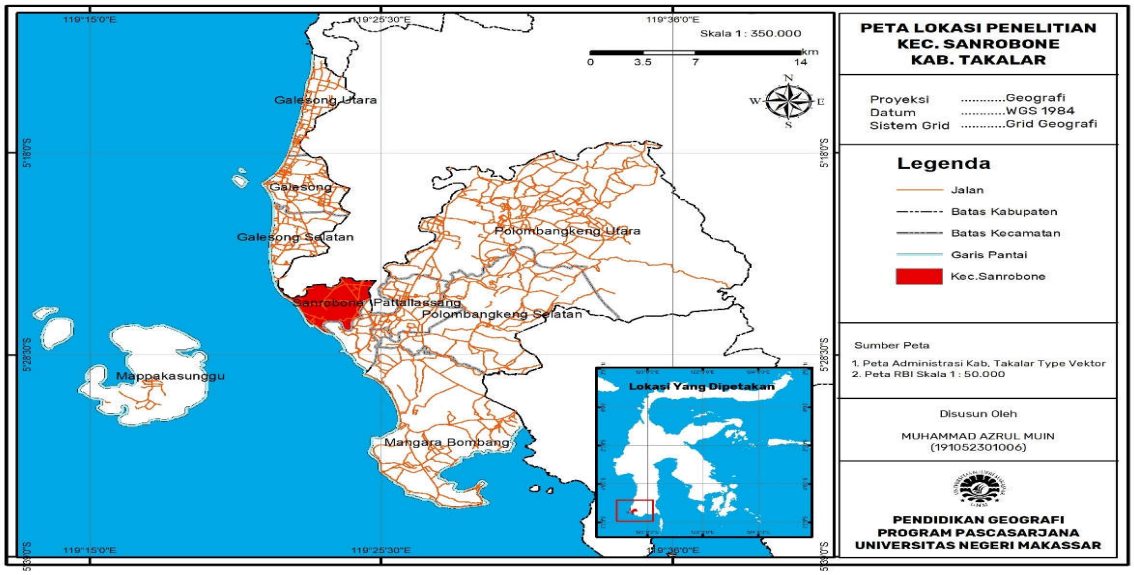

Gambar 1. Lokasi Penelitian.
Sumber: Analisis Data, 2021.

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

studi ini yaitu, pertama analisis deskriptif dengan menjelaskan gambaran lokasi serta faktor internal dan eksternal pemanfaatan ekosistem mangrove. Kedua, analisis SWOT yaitu *Strenghts* untuk kekuatan, *Weaknesses* untuk kelemahan, *Opportunities* untuk peluang, dan *Threats* untuk ancaman (Sukri *et al.,* 2022). Analisis SWOT merupakan alat yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor strategis yang relevan dengan tujuan yang ingin dicapai (Novianti, 2016)

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sanrobone ditunjukkan pada Gambar 1. Sanrobone merupakan Kecamatan yang berada di Kabupaten Takalar yang memiliki luas wilayah ± 29,36 km^2. Kecamatan Sanrobone merupakan daerah pesisir di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Secara geografis wilayah Kecamatan Sanrobone terletak di bagian barat Kabupaten Takalar dengan jumlah desa/ kelurahan sebanyak enam yaitu Banyuanyara Laguruda, Paddinging, Sanroboone, Tonasa dan Ujung Baji. Secara administrasi Kecamatan Sanrobone berbatasan dengan Kabupaten Gowa (sebelah utara), Kecamatan Pattalassang (sebelah timur), Kecamatan Mappakasunggu (sebelah selatan) dan Kepulauan Tanakeke (sebelah barat) yang semuanya berada di Kabupaten Takalar. Jumlah penduduk yang mendiami Kecamatan Sanrobone yang tercatat pada tahun 2020 sebanyak 15.293 jiwa. Wilayah dengan jumlah penduduk terbesar adalah Desa Banyuanyara sebesar 3.266 jiwa atau 21,48%. Sedangkan untuk jumlah penduduk terkecil yaitu Desa Languruda dengan jumlah penduduk sebesar 1.783 jiwa atau 11,65% dari total penduduk yang berada.

Masyarakat yang berada di Kecamatan Sanrobone memiliki berbagai macam tingkatan pendidikan. Adapun tingkat pendidikan yang diketahui dari 100 responden yaitu untuk Sekolah Dasar (SD) sebanyak 28%, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 33%, Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 30%, Perguruan Tinggi/ Sarjana sebanyak 4%, dan yang tidak pernah mengenyam pendidikan sebanyak 5%. Pengaruh faktor pendidikan adalah sebuah hal yang sangat dibutuhkan bagi keterampilan dan pengetahuan dalam mengembangkan sebuah kawasan yang berkelanjutan.

Analisis SWOT Pengembangan Kawasan Hutan Mangrove

Strategi pengembangan kawasan hutan mangrove di Kecamatan Sanrobone dirumuskan dengan menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT pada dasarnya dipergunakan untuk memaksimalkan sebuah kekuatan (*Strength*) dan peluang (*Oppurtunities*) yang merupakan faktor strategi eksternal (Tabel 1) serta secara bersamaaan mampu meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*) yang merupakan faktor strategi internal (Tabel 2) (Sukri *et al.,* 2022). Analisis faktor strategi eksternal dan internal untuk pengembangan kawasan hutan mangrove disajikan pada Tabel 3.

Tabel 1. Faktor Strategi Eksternal.

	Faktor Strategis	Bobot	Peringkat	Skor
	Peluang			
O1	Potensi sumber daya alam hutan mangrove	0,15	4	0,60
O2	Kemudahan akses lokasi dan jarak	0,12	3	0,36
O3	Terbentuknya lapangan pekerjaan untuk usaha kecil dan menengah	0,09	3	0,27
O4	Kepedulian lembaga masyarakat dalam peningkatan pengetahuan, mengelola dan melindungi sumber daya hutan mangrove	0,09	3	0,27
O5	Permintaan pasar untuk budi daya perairan yang tinggi	0,11	4	0,44
	Jumlah bobot	**0,56**		**1,94**
	Ancaman			
T1	Perubahan Cuaca	0,06	2	0,12
T2	Konservasi kawasan hutan mangrove	0,07	3	0,21
T3	Penurunan hasil budi daya akibat penyakit atau pencemaran lingkungan perairan	0,10	3	0,30
T4	Kebiasaan masyarakat membuang sampah disekitar kawasan hutan mangrove	0,13	4	0,52
T5	Konflik kepentingan dalam pemanfaatan kawasan hutan mangrove	0,08	3	0,24
	Jumlah bobot	**0,44**		**1,39**
	Bobot Total	**1**		

Sumber: Analisis Data, 2021.

Tabel 2. Faktor Strategi Internal.

	Faktor Strategis	Bobot	Peringkat	Skor
	Kekuatan			
S1	Ketersediaan lahan	0,15	4	0,60
S2	Mata pencaharian utama (usaha yang sudah lama dilakukan)	0,13	4	0,52
S3	Pemanfaatan kawasan hutan mangrove untuk budidaya	0,10	3	0,30
S4	Keikutsertaan masyarakat dalam pengembangan ekonomi hutan mangrove berkelanjutan sangat tinggi	0,11	3	0,33
S5	Alat tangkap yang digunakan ramah lingkungan	0,09	3	0,27
	Jumlah Bobot	**0,53**		**2,02**
	Kelemahan			
W1	Sarana dan prasarana dalam kebutuhan budi daya belum cukup mendukung	0,08	3	0,24
W2	Kualitas SDM masih kurang dan lambat terhadap informasi teknologi	0,10	2	0,20
W3	Pembudidaya masih tergantung dari pengalaman	0,10	3	0,30
W4	Keterbatasan modal	0,11	4	0,44
W5	Pengolahan limbah tidak ada	0,08	2	0,16
	Jumlah Bobot	**0,47**		**1,34**
	Bobot Total	**1**		

Sumber: Analisis Data, 2021.

Tabel 3. Perhitungan Nilai EFAS dan IFAS.

Kekuatan	Skor	Kelemahan	Skor	Peluang	Skor	Ancaman	Skor
S1	0,60	W1	0,24	O1	0,60	T1	0,12
S2	0,52	W2	0,20	O2	0,36	T2	0,21
S3	0,30	W3	0,30	O3	0,27	T3	0,30
S4	0,33	W4	0,44	O4	0,27	T4	0,52
S5	0,27	W5	0,16	O5	0,44	T5	0,24
Jumlah	**2,02**		**1,34**		**1,94**		**1,39**

Sumber: Analisis Data, 2021.

Pada Tabel 3 menunjukkan bahwa faktor internal yaitu kekuatan mendapatkan jumlah nilai sebesar 2,02 dan kelemahan nilainya 1,34, sedangkan untuk faktor eksternal yaitu peluang nilainya sebesar 1,94 dan ancaman nilainya sebesar 1,39. Setelah jumlah dari perhitungan faktor internal dan eksternal didapatkan, selanjutnya dilakukan perhitungan kembali untuk masing-masing agar mendapatkan nilai skor dari EFAS dan IFAS. Adapun perhitungannya sebagai berikut:

EFAS = Nilai Peluang (X) – Ancaman (Y)
= 1,94 – 1,39
= 0,55

IFAS = Nilai Kekuatan (X)– Kelemahan (Y)
= 2,02 – 1,34
= 0,68

Nilai prioritas yang didapatkan dalam pengembangan kawasan ekosistem hutan mangrove di Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar adalah EFAS = 0,55 sedangkan IFAS = 0,68 Hasil perhitungan tersebut terletak pada kuadran pertama, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.

Selanjutnya, dilakukan analisis menggunakan matriks analisis SWOT dapat dilihat pada Tabel 4.

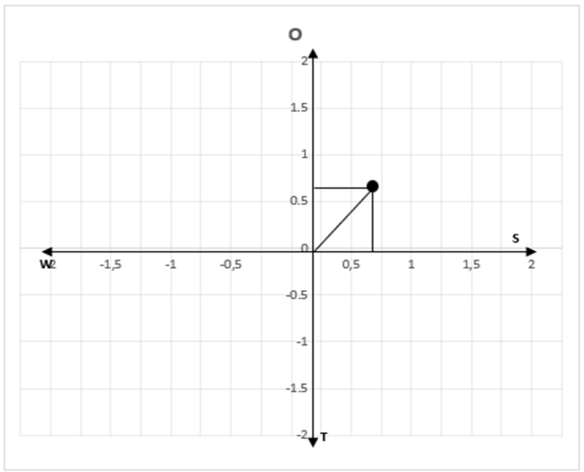

Gambar 2. Kuadran I Mendukung Strategi Agresif.

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

Tabel 4. Matriks Analisis SWOT.

Faktor Internal / **Faktor Ekstenal**	Peluang/ *Opportunities* (O) 1. Potensi sumber daya alam hutan mangrove 2. Kemudahan akses lokasi dan jarak 3. Terbentuknya lapangan pekerjaan untuk usaha kecil dan menengah 4. Kepedulian lembaga masyarakat dalam peningkatan pengetahuan, mengelola dan melindungi sumber daya hutan mangrove 5. Permintaan pasar untuk budi daya perairan yang tinggi	Ancaman/ *Threats* (T) 1. Perubahan cuaca 2. Konservasi kawasan hutan mangrove 3. Penurunan hasil budi daya akibat penyakit atau pencemaran lingkungan perairan 4. Kebiasaan Masyarakat membuang sampah disekitar kawasan hutan mangrove 5. Konflik kepentingan dalam pemanfaatan Kawasan hutan mangrove
Kekuatan/*Streght* (S) 1. Ketersediaan lahan 2. Model pengelolaan yang telah ada di sekitar kawasan mangrove 3. Pemanfaatan kawasan ekosistem mangrove untuk budi daya 4. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove berkelanjutan sangat tinggi 5. Alat tangkap yang digunakan ramah lingkungan	**(S-O)** 1. Pengembangan kawasan hutan mangrove sebagai kawasan budi daya berkelanjutan dengan melakukan konsep penggabungan kegiatan budi daya dengan konservasi sumber daya alam. Konsep *silvofishery-ecopreneurship yaitu silvofishery* memadukan ekosistem mangrove dan perikanan, sedangkan *ecopreneurship* menghasilkan profit yang mengutamakan kelestarian lingkungan. 2. Meningkatkan peran lembaga masyarakat dalam mengelola kawasan mangrove. Lembaga masyarakat seperti kelompok nelayan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan BUMDes menjadi adaptor sosial yang memadukan tujuan pemerintah dan kebutuhan masyarakat lokal. 3. Memberdayakan masyarakat dalam membantu kemampuan individu untuk menciptakan kemandirian dengan inovasi yang berbasis kegiatan budi daya berkelanjutan.	**(S-T)** 1. Melibatkan masyarakat dalam peraturan untuk memelihara, mengelola kawasan hutan mangrove 2. Pembuatan peraturan yang bersifat tegas terhadap aktivitas yang berpotensi dalam merusak kawasan hutan mangrove 3. Pengelolaan budi daya berkelanjutan yang terintegrasi
Kelemahan/ Weaknesses (W) 1. Sarana dan prasarana dalam kebutuhan budi daya belum cukup mendukung 2. Kualitas SDM masih kurang dan lambat terhadap informasi teknologi 3. Pembudidaya masih tergantung dari pengalaman 4. Keterbatasan modal 5. Pengolahan limbah tidak ada	**(W-O)** 1. Penguatan keterampilan pembudidaya/nelayan dalam mengelola usahanya 2. Mengubah pola pengelolaan budi daya menjadi super intensif dalam peningkatan produksi 3. Pengadaan sarana dan prasarana kebutuhan budi daya 4. Peningkatan SDM dalam menggunakan teknologi dan informasi	**(W-T)** 1. Menerapkan manajemen pengelolaan yang memperhatikan daya dukung lingkungan 2. Pemberian bantuan permodalan bagi pembudidaya untuk menekan biaya produksi 3. Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan limbah dan buangan sampah

Sumber: Analisis Data, 2021.

Pemanfaatan Ekosistem Hutan Mangrove Sebagai Kawasan Budi Daya

Keberadaan kawasan hutan mangrove merupakan bagian dari kehidupan masyarakat di Kecamatan Sanrobone. Keberadaannya menjadi penting untuk mencapai sebuah proses dalam melakukan pengembangan dan pengelolaan di suatu wilayah, dan peran masyarakat menjadi garda terdepan untuk mencapai tujuan pembangunan. Pengelolaan wilayah pesisir dilakukan oleh masyarakat sebagai wujud untuk memperoleh manfaat dalam kesejahteraan hidupnya (Kinasih & Purnaweni, 2019). Keberadaan ekosistem mangrove memang bagi masyarakat pesisir khususnya di Kecamatan Sanrobone sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup mereka. Karena kawasan hutan mangrove dapat

digunakan untuk keperluan perikanan, sumber bahan makanan, kehutanan, pertanian, habitat pembibitan, bahkan industri (Arfan, 2018; Kusmana & Sukwika, 2018). Kawasan hutan mangrove yang berada di Kecamatan Sanrobone saat ini telah dimanfaatkan sebagai perikanan tangkap, budi daya dan tambak-tambak garam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.Selain itu juga sebagian masyarakat menjadikan kawasan mangrove sebagai tempat membuang sampah.

Budi daya yang banyak dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Sanrobone adalah budi daya ikan dan udang. Jenis ikan yang dibudidayakan yaitu ikan bandeng (*Chanos chanos*), sedangkan jenis udang yang dibudidayakan di antaranya udang windu (*Penaeus monodon*) dan udang vaname (*Litopenaeus vannamei*). Budi daya perairan merupakan kegiatan penting dari pengembangan sektor perikanan, ketahanan pangan, dan menjadi sentra produksi yang banyak dilakukan khususnya di Sulawesi Selatan (Hasnawi *et al*., 2016).

Sumber daya perikanan sangat berpotensi untuk dikembangkan dan memiliki nilai ekonomis tinggi (Husain *et al*., 2020). Usaha budi daya saat ini masih merupakan kegiatan yang menguntungkan, akan tetapi kegiatan budi daya harus diikuti dengan penerapan yang berkelanjutan dengan memperhatikan lingkungan, sosial, dan ekonomi (Mukhtar, 2021). Pengelolaan sumber daya laut dan perikanan yang menyangkut implementasi dapat diwujudkan ke dalam program *blue economy*. Konsep ini mendorong kolaborasi antara daya dukung lingkungan dan pembangunan ekonomi untuk mencapai stabilitas dan pertumbuhan jangka panjang (Taha & Kamruzzaman, 2020).

Strategi Pengembangan Ekosistem Hutan Mangrove sebagai Kawasan Budi Daya Berkelanjutan

Rumusan strategi pengembangan kawasan hutan mangrove sebagai kawasan budi daya yang berkelanjutan dilakukan dengan cara analisis SWOT. Hasil analisis menunjukkan bahwa mendukung strategi agresif menjadi prioritas dilakukan karena titik koordinat EFAS dan IFAS berada pada kuadran I (Gambar 2.) Adapun strategi agresif yang dirumuskan untuk pengembangan kawasan ekosistem mangrove di lokasi penelitian sebagaimana pada Tabel 4 yaitu pertama, pengembangan kawasan hutan mangrove sebagai kawasan budi daya berkelanjutan dengan melakukan konsep penggabungan kegiatan budi daya dengan konservasi sumber daya alam. Langkah-langkah penerapan perikanan berkelanjutan dilakukan dengan cara menguatkan keterampilan dalam pengelolaan usaha perikanan, menerapkan budi daya perikanan sistem *ecopreneurship* yakni tidak hanya mengejar profit tetapi juga mengutamakan kelestarian lingkungan mangrove, pengadaan sarana dan prasarana perikanan, dan meningkatkan SDM dalam penggunaan teknologi informasi terutama untuk pemasaran. Pemanfaatan sumber daya alam hutan mangrove harus dilakukan secara berkelanjutan karena itu ekosistem mangrove perlu dijaga dan dilestarikan (Yudhanti *et al*., 2019). Pemanfaatan dan pelestarian sumber daya perairan harus dilakukan secara rasional dan lestari sehingga menjadi paradigma yang baru demi pembangunan di masa yang akan datang. Masyarakat Kecamatan Sanrobone dapat memberikan alternatif pengembangan yang bisa dilakukan untuk budi daya berkelanjutan yaitu budi daya tambak dengan sistem wanamina (*Silvofishery*). Kegiatan budi daya dengan sistem *silvofishery*/wanamina merupakan konsep usaha terpadu antara mangrove dan budi daya perikanan (Perwitasari *et al*., 2021). Sistem *silvofishery* mudah beradaptasi dan memiliki berbagai macam aplikasi perikanan di antaranya budi daya polikultur untuk ikan, udang, dan rumput laut (Sribianti & Sambu, 2019).

Kedua, meningkatkan peran lembaga masyarakat dalam mengelola kawasan mangrove. Lembaga masyarakat seperti kelompok nelayan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan badan usaha milik desa (BUMDes) menjadi adaptor sosial yang memadukan tujuan pemerintah dan kebutuhan masyarakat lokal. Keberadaan lembaga masyarakat sangat berpengaruh dalam meningkatkan pengetahuan dan pengelolaan kawasan hutan mangrove menjadi kawasan budi daya yang berkelanjutan, mempertahankan dan melestarikan lingkungan dalam bentuk kearifan lokal. Mekanisme pengelolaan ekosistem mangrove yang baik harus memperhatikan keselarasan kebutuhan ekonomi, kepentingan masyarakat lokal, dan keperluan untuk pelestarian lingkungan (Hasriyanti & Syarif, 2021). Meningkatkan kinerja lembaga masyarakat merupakan upaya dalam mengelola kawasan ekosistem mangrove (Ely *et al*., 2021). Pembentukan kelompok nelayan bertujuan untuk membantu anggota agar lebih mandiri dalam melakukan kegiatan usaha sehingga dapat meningkatkan ekonomi rumah tangganya (Adi *et al.,* 2018). Kehadiran lembaga masyarakat merupkan solusi yang sangat penting dalam pengembangan kawasan hutan mangrove yang bernilai ekonomis serta berkelanjutan. Lebih lanjut, pemerintah harus mendukung keberadaan lembaga masyarakat tersebut. Hal ini selaras dengan yang

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

dirumuskan oleh Fikri dan Sam'un (2022) bahwa strategi agresif dalam pengembangan kawasan mangrove perlu dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Strategi agresif juga dirumuskan oleh Saputra *et al.* (2019) bahwa pemerintah dan masyarakat perlu melakukan kerjasama dalam mengantisipasi permasalahan sosial dan transportasi yang ditimbulkan dari pengelolaan kawasan mangrove terutama sebagai kawasan ekowisata.

Ketiga, memberdayakan masyarakat dalam membantu kemampuan individu untuk menciptakan kemandirian dengan inovasi yang berbasis kegiatan budi daya berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu kegiatan dalam membantu individu atau rumah tangga untuk mengembangkan kemampuan dan kesadarannya. Melalui pemberdayaan masyarakat akan tercipta lingkungan yang memotivasi individu untuk meningkatkan kemampuan dirinya mengakses sumber-sumber daya sosial dan ekonomi (Purwanti *et al.,* 2017). Hal tersebut penting untuk dilakukan dalam mencapai kehidupan yang lebih baik karena model pengelolaan wilayah yang baik yaitu menekankan pada pemberdayaan masyarakatnya (Shafira & Anwar, 2021). Penerapan pemberdayaan berbasis masyarakat adalah model yang ideal untuk mewujudkan kemandirian masyarakat (Rahmat & Mirnawati, 2019). Pemberdayaan masyarakat dalam pengunaan teknologi juga diperlukan. Melalui pemberdayaan masyarakat pesisir khususnya peningkatan teknologi *socio industry* diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sary *et al*., 2021). Dengan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dengan sebuah inovasi maka akan menciptakan hasil budi daya yang lebih modern dan berkelanjutan. Strategi agresif untuk pengembangan kawasan mangrove harus berbasis masyarakat, sebagaimana yang dirumuskan oleh Mahardana *et al.* (2020) bahwa pengembangan ekowisata mangrove disamping menyiapkan infrastruktur pendukung, pengelolaan kawasan mangrove harus melibatkan masyarakat dan kearifan lokal.

IMPLIKASI KEBIJAKAN

Peran penting ekosistem mangrove dalam kehidupan masyarakat di Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar merepresentasikan situasi serupa di wilayah-wilayah lain. Ekosistem mangrove banyak dimanfaatkan oleh masyarakat melalui aktivitas-aktivitas ekonomi seperti penangkapan kepiting dan ikan, dan kegiatan pembudidayaan udang / ikan melalui pembukaan lahan tambak di areal-areal magrove. Aktivitas seperti ini perlu dikendalikan sehingga keberlanjutan ekosistem mangrove dan fungsi-fungsi atau layanan ekosistemnya dapat terjaga dari waktu-ke waktu.

Analisis SWOT yang dilakukan pada kasus Kecamatan Sanrobone menunjukkan adanya peluang untuk mengkompromikan kepentingan pengembangan ekonomi masyarakat dan pelestarian ekosistem mangrove. Strategi agresif yang disimpulkan dari analisis pada kasus Sanrobone besar kemungkinan dapat pula diterapkan untuk hutan-hutan mangrove di daerah-daerah lain. Penggabungan budi daya tambak berdampingan dengan keberadaan hutan mangrove, yang disebut sebagai budi daya wanamina (*silvofishery*) dan penerapan sistem *ecopreneurship*, dapat dipertimbangkan untuk menyusun kebijakan yang diarahkan untuk menggali potensi profit dan menjaga keberlanjutan eksistensi melestarikan ekosistem mangrove di berbagai tempat.

Kebijakan tersebut tentunya perlu didukung dengan kebijakan-kebijakan pelengkap, misalnya penguatan lembaga-lembaga masyarakat sehingga mampu berperan dalam peningkatan pengetahuan dan pengelolaan kawasan hutan mangrove dan budi daya berkelanjutan. Kebijakan pendukung lain misalnya adalah terkait penguatan kerja sama antar institusi pemerintah atau dengan lembaga-lembaga relevan lain di luar itu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Para penulis mengucapakan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pendidikan Tinggi (DIKTI). Ucapan terima kasih dihaturkan pula kepada Rektor, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Makassar, tim peneliti, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam kegiatan penelitian ini.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Kontributor dalam artikel hasil penelitian ini adalah Amal Arfan sebagai kontributor pertama, Muhammad Azrul Muin sebagai kontributor ke dua, Hasriyanti sebagai kontributor ketiga, Muhammad Yusuf sebagai kontributor keempat dan Irwansyah Sukri sebagai kontributor kelima.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, I. C., Mochammad, F., & Tiwi, N. (2018). Institution's Business Role to Improve Smallscale Fisherman's Household Income. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences (RJOAS)*, *12*(84), 299–303. https://doi.org/https://doi.org/10.18551/rjoas.2018-12.38.

Ahmad, A., Saleh, M. B., & Rusolono, T. (2016). Model Spasial Deforestation di KPHP Poigar, Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea*, *5*(2), 159–169. https://doi.org/10.18330/jwallacea.2016.vol5iss2pp159-169.

Amin, A. M., Irawati, M. H., Rohman, F., & Syamsuri, I. (2016). Sosialisasi Pengelolaan Hutan Mangrove Berkelanjutan Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Siswa dan Masyarakat Akan Dampak Alih Fungsi Lahan Mangrove. *Prosiding Seminar Nasional Biologi*, 330–338.

Arfan, A. (2018). Factors That Influence The Change Of Mangrove Forest In South Sulawesi, Indonesia. *UNM Geographic Journal*, *1*(2), 96–102. https://doi.org/10.26858/ugj.v1i2.5409.

Diposaptono, S. (2017). *Membangun Poros Maritim Dunia Dalam Perspektif Tata Ruang Laut* (*Issue* 16). Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Ely, A. J., Tuhumena, L., Sopaheluwakan, J., & Pattinaja, Y. (2021). Strategi Pengelolaan Ekosistem Hutan Mangrove di Negeri Amahai. *Jurnal Triton*, *17*(1), 57–67. https://doi.org/10.30598/tritonvol17issue1page57-67.

Fikri, M. R. A., & Sam'un, M. (2022). Analisis Pengembangan Kawasan Hutan Mangrove Di Wilayah Pesisir Pantai Kabupaten Karawang. *Grouper: Jurnal Ilmiah Perikanan*, *13*(2), 138-145. https://doi.org/10.30736/grouper.v13i2.123.

Hasnawi, Tarunamulia, & Mustafa, A. (2016). Analisis Kawasan Potensial untuk Tambak Super-Intensif di Pesisir Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan. *Media Akuakultur*, *11*(129), 35–46.

Hasriyanti, & Syarif, E. (2021). Jurnal Environmental Science. *Jurnal Environmental Science*, *3*(2), 171–182.

Husain, A., Rustam, R., & Ernaningsih, E. (2020). Strategi Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Kecil Di Desa Tokke Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara. *Journal of Indonesian Tropical Fisheries*, *3*(1), 67–78. https://doi.org/10.33096/joint-fish.v3i1.66.

Kinasih, P. I., & Purnaweni, H. (2019). Pemanfaatan Mangrove untuk Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. *Conference on Public Administration and Society*, *1*(1), 71–78.

Kurniawati, A., Yuliati, Y., & Susilo, E. (2021). Social Adapter Model: Development of Coastal Resources Potential Through Empowerment of Coastal Communities in Watu Pecak Beach Lumajang District. *Habitat*, *32*(2), 54–62. https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.habitat.2021.032.2.7.

Kusmana, C., & Sukwika, T. (2018). Coastal community preference on the utilization of mangrove ecosystem and channelbar in Indramayu, Indonesia. *AACL Bioflux*, *11*(3), 905–918.

Mahardana, D. G., Zulkifli, D., & Sabariyah, N. (2021). Strategi Pengembangan Ekowisata Mangrove di Provinsi Bali. *Buletin Jalanidhitah Sarva Jivitam*, *2*(2), 93-100. http://dx.doi.org/10.15578/bjsj.v2i2.8749.

Mukhtar, M. (2021). Feasibility Study of Marine Aquaculture Business in Indonesia. *SSRN Electronic Journal*. https://doi.org/10.2139/ssrn.3888983.

Muta'ali, L. (2015). *Teknik Analisis Regional Untuk Perencanaan Wilayah, Tata Ruang dan Lingkungan*. *Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPFG)*.

Mutmainnah, A. (2015). Identifikasi Potensi Ekosistem Mangrove Sebagai Penunjang Ekowisata di Pulau Tanakeke, Kepulauan Tanakeke, Kabupaten Takalar [Skripsi, Universitas Hasanuddin]. UNHAS Repository. http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/ZDllODFjZjg1ZThjMmY4MzU5MmU3ZA==.pdf.

Novianti, D. (2016). Strategi Pengembangan Mangrove Dalam Mendukung Pembangunan Ekowisata Di Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Politik Pemerintahan*, *9*(1), 155–164.

Pattimahu, D. V, Kastanya, A., & Papilaya, P. E. (2017). Sustainable mangrove forest management analysis (A case study from Dusun Taman Jaya, West Seram Regency, Maluku). *International Journal of Applied Engineering Research*, *12*(24), 14895–14900.

Perwitasari, W. K., Muhammad, F., & Hidayat, J. W. (2021). Budidaya Silvofishery Di Desa Mororejo Kabupaten Kendal Untuk Mendukung Program Budidaya Berkelanjutan. *Jurnal Pengabdian Perikanan Indonesia*, *1*(3), 196–201. https://doi.org/10.29303/jppi.v1i3.345.

Purwanti, P., Susilo, E., & Indrayani, E. (2017). *Pengelolaan Hutan Mangrove Berkelanjutan (Pendekatan Kelembangaan dan Insentif Ekonomi)*. Universitas Brawijaya Press.

Rahmat, A., & Mirnawati, M. (2019). Model Participation Action Research Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, *6*(1), 62–71.

Saputra, D., Salim, K., & Christianingrum, C. (2019). Strategi Pengelolaan Ekowisata Mangrove Munjang di Desa Kurau Barat Kabupaten Bangka Tengah. *Akuatik: Jurnal Sumberdaya Perairan*, *13*(1), 27-41. https://doi.org/10.33019/akuatik.v13i1.1078.

Sari, Y. P., Salampessy, M. L., & Lidiawati, I. (2018). Persepsi Masyarakat Pesisir dalam Pengelolaan Ekosistem Hutan Mangrove di Muara Gembong Bekasi Jawa Barat. *Perennial*, *14*(2), 78–85. https://doi.org/10.24259/perennial.v14i2.5303

Sary, D. V., Rahman, K., Prayuda, R., & Sundari, R. (2021). Identifikasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Masyarakat Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. *Sosio Informa*, *7*(2), 136–157.

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

Shafira, M., & Anwar, M. (2021). Model Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir Lampung Berbasis Masyarakat. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, *11*(2), 103–117. https://doi.org/10.15578/jksekp.v11i2.9233

Sribianti, I., & Sambu, A. H. (2019). Management Model Ecosystem Mangrove. *Journal of Enterpreneurship Education*, *22*(1), 1–9.

Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta.

Sukri, I., Harini, R., & Sudrajat. (2022). Sustainable Food and Agriculture Strategy in Kulon Progo Regency based on SWOT and Spatial Analysis. *Proceedings of the 2nd International Conference on Smart and Innovative Agriculture (ICoSIA 2021)*, *19*(41), 32–39. https://doi.org/10.2991/absr.k.220305.006.

Taha, H., & Kamruzzaman. (2020). Priority areas for Bangladesh: Roadmap to 2041 as Developed Country. *Archives of Community Medicine and Public Health*, *6*(2), 277–280. https://doi.org/10.17352/2455-5479.000121.

Winata, A., Yuliana, E., & Rusdiyanto, E. (2017). Diversity and Natural Regeneration of Mangrove Vegetation in The Tracking Area on Kemujan Island Karimunjawa National Park, Indonesia. *Advances in Environmental Sciences*, *9*(2), 109–119.

Yudhanti, D. A., Ripanti, E. F., & Perwitasari, A. (2019). Knowledge Management System Konservasi Hutan Tanaman Mangrove. *Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika (JEPIN)*, *5*(3), 321–328. https://doi.org/10.26418/jp.v5i3.35956.

BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
Gedung BRSDM KP Lt. 3
Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara
Telp. (021) 6471 1583, Faks.(021) 64700924
Web : https://kkp.go.id/brsdm/sosek
email : kebijakan.sosek@gmail.com

ISSN **2089-6980**